SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) RKPD Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
   b. prioritas pembangunan daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. Program Strategis Nasional; dan
   e. kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Nasional Tahun 2025.

(3) RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAH DAERAH;
BAB VII : PENUTUP.

BAB III

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA DAN PPAS

Pasal 4

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.

Pasal 6

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 7

Uraian RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2026 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana

pembangunan daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan,indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Substansi RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun dengan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi: (1) pendekatan teknokratik, dimana penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) pendekatan partisipatif, yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah; (3) pendekatan politis, dimana dalam penyusunan RKPD memiliki keselarasan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD; serta (4) pendekatan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas), yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Selain hal di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 juga berorientasi kepada substansi dengan menggunakan

pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 mengacu pada pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan beberapa tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, serta penetapan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Perumusan RKPD yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) masing-masing. Seluruh tahapan yang dilaksanakan pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2026 juga berpedoman pada arah kebijakan nasional/program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai amanat undang–undang. Dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, integratif, realisitis, akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dengan *leading sectornya* Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah menyusun dan menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

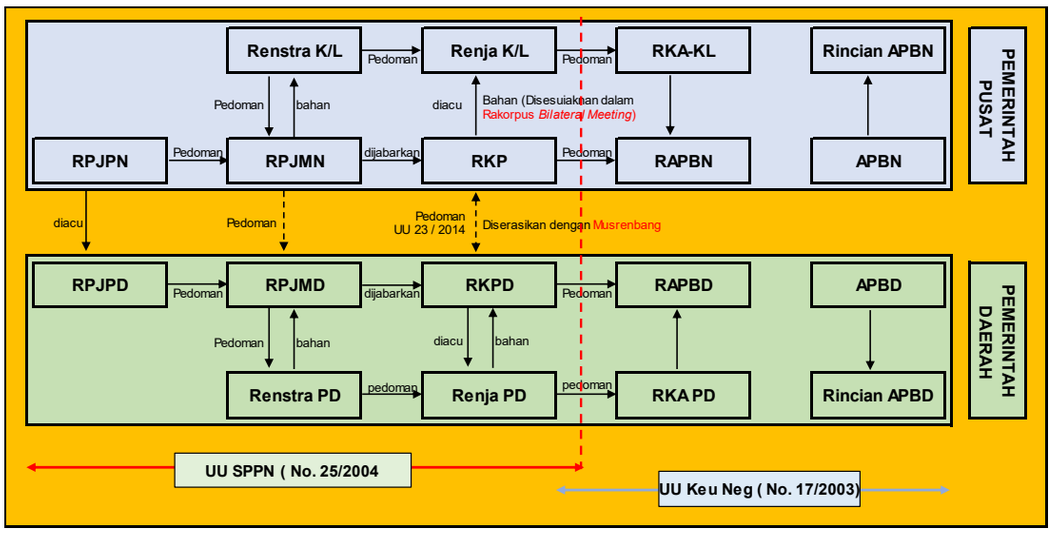
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pada prinsipnya berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Dairi kendati saat ini masih disusun secara simultan, Rencana Kerja Pemerintah pusat, RKP Provinsi Sumatera Utara, RPJPD Kabupaten Dairi, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen



Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP Provinsi dan RKP Pusat melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional. Dokumen RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD.

Selain itu, dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan *arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih*, serta *program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025*, dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional terakomodir antara lain :

a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
d. Pengendalian Inflasi di daerah;
e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. Dukungan swasembada pangan; dan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 disusun dengan mempedomani sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2026;
2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026;
3. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
5. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Mewujudkan integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat;
8. Menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026;
9. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam memahami karakteristik kewilayahan Kabupaten Dairi, pada sub bab aspek geografi dan demografi dijabarkan tentang letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup. Aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju penduduk, komposisi penduduk, dan karakteristik lainnya yang relevan. Aspek statis dan dinamis kependudukan di Kabupaten Dairi seperti laju pertumbuhan penduduk, rasio penduduk, kepadatan penduduk, dideskripsikan dalam sub bab ini berdasarkan data dan informasi kependudukan pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Dairi berperan strategis sebagai wilayah penyangga pertanian untuk Sumatera Utara, dengan potensi perkebunan kopi, dan tanaman pangan, yang mendukung perekonomian regional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor tanaman pangan, Kabupaten Dairi berpotensi menjadi pusat pengembangan industri hilir berbasis agro. Kabupaten ini memiliki berbagai aspek geografi, yang meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah serta distribusi kerawanan bencana di Kabupaten Dairi.

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi. Karakteristik tersebut memiliki korelasi yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Dairi. Berikut ini beberapa karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Dairi.

a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km^2 atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/ kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2/ sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Punggapungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			**169**	**1.927,80**	**100,00**

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2024

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak yang cukup strategis, yakni dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 3 jam yang membuat aksessibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter diatas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

c. Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 400 - 1.700 meter diatas permukaan laut. Topografi tersebut memengaruhi daya dukung untuk pertanian dan perkebunan, namun membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim terhadap risiko bencana longsor dan banjir.

Kabupaten Dairi didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43% dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70% dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran.

Tabel 2.2. Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROM BAK	BERGELOM BANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo[1)]	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu[1)]	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan[1)]	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan[2)]	-	-	-	-	-	-	956
7.	SilimaPunggapungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira[3)]	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu[4)]	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir[4)]	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember[5)]	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir[5)]	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
	KABUPATEN DAIRI	26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025.

Keterangan:[1)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; [2)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; [3)] Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Punggapungga; [4)] Masih bergabung dengan

d. Geologi

Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas (Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Diatas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmppt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut.

e. Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu. Satuan jenis tanah tersebut diantaranya yaitu tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85 persen dari luas total Kabupaten Dairi yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Tanah masa permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26 persen, tanah masa palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83 persen, tanah garbo diabase sepentijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94 persen dan sisanya jenis tanah masa jura seluas 231,34 ha. Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu tanah dengan kedalaman efektif < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga, kedalaman efektif tanah 30 – 90 cm terdapat di sebelah Selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah apabila ditinjau dari sifat kekasarannya, dibedakan menjadi tanah bertekstur halus dan kasar. Tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah Barat

Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Punggapungga.

f. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

   Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

   - WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
   - WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2. 3 Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Punggapungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Punggapungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Punggapungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Punggapungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Punggapungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase

alami yang mengalirkan air hujan diatas permukaan tanah *(surface run off).* Di antara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km^2.

3. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M^3 /Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025.

g. Klimatologi

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979),* pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

   Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Punggapungga.

2. Iklim C1

   Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

3. Iklim D1

   Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian

Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl. Lihat Gambar berikut.

h. Penggunaan Lahan

Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 Ha. Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91 persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	**Penggunaan Lahan**	**Luas**	
		(Ha)	**(Persen)**
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		**192.789,45**	**100**

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersedian lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam memengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Dairi 2014-2034 terdapat banyak potensi sumber daya alam yaitu :

a. Pertanian Lahan Basah.

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
2. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.
3. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

b. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Prospek hortikultura akan semakin baik, tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.
3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.

4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

c. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, kakao dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
    a. Subsistem Hulu *(up stream):* sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
    b. Subsistem Usaha Tani *(on farm):* produksi pertanian primer (budidaya).
    c. Subsistem Hilir *(down stream):* pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
    d. Subsistem Kelembagaan *(supporting institution):* perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

d. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt).

Sedangkan pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

Program yang dikembangkan untuk perwujudan energi peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu di beberapa kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Siempat Nempu Hulu. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau.
2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:
    a) Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura *(organic farm).*
    b) Kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain).
    c) Kawasan integrasi peternakan-perikanan.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian lokal.

e. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan.

Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	**Budidaya**		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	**Perairan**		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		**1.824**	**1.426,8**

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi: Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan perikanan adalah:

1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
   b. Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya.
   c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha.

d. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan.
f. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan.
g. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.

2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan.
   b. Melaksanakan desain teknis detil pembangunan pelabuhan perikanan.
   c. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.
   d. Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan.

f. Pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Punggapungga, Tanah Pinem, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng		Tereka	
3.	Perak		Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan- kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M^3
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	• Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2.8 Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Punggapungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen

No.	Kecamatan	Potensi
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitan, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Berdasarkan data di atas, Program yang dikembangkan untuk peningkatan dan penembangan pengelolaan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral adalah:

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi.
   b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian.
   c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
   d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis *(bussines plan)* untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
   e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain.
   f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
2. Pengembangan energi alternatif. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:

a. Melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lain-lain.
b. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif.
c. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif.

g. Pariwisata

Jenis Pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari Pariwisata Alam dan Pariwisata Budaya.

1. Pariwisata Alam

Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

2. Pariwisata Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2. 9 Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pondom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matahari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Punggapungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk diatas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Adapun program yang diperlukan untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
   b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
   c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek–obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:

a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

h. Industri

Kawasan atau sentra industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan program pengembangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/ anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
2. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
3. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.
4. Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/ menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/ anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB) harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Definisi daya dukung dan daya tampung sendiri berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;
b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan

hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Disamping UU PPLH Nomor 32/2009, daya dukung dan daya tampung lingkungan juga sudah menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanan tata ruang dan pembangunan sektor. Sebagai contoh antara lain:

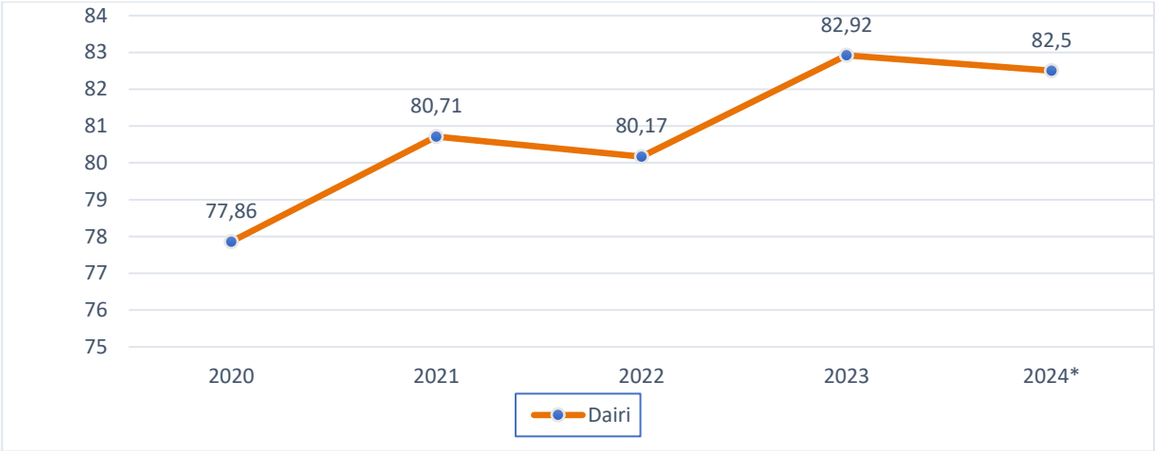
a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 25 menyiratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional/provinsi/kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 (ayat 6) menyatakan bahwa pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut;
c. UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 6 (ayat 1 huruf d) menyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pasal 32 (huruf c) (termasuk juga Pasal 18 dan Pasal 28), menyatakan bahwa kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam 1 (satu) WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) adalah Daya Dukung Lingkungan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 7 (huruf c) menyatakan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tak tergantikan. Memenuhi kebutuhan makanan adalah suatu hal yang vital dan tidak bisa diabaikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Komoditas beras, sebagai sumber makanan utama, menjadi poin utama dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi, 2020-2024



Sumber : Badan Pangan Nasional RI, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Adapun capaian kinerja lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,31	63,05	83,81	70,20	78,96	77,90
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	46,61	42,45	79,65	79,48	79,48	62,01
Persentase Penurunan Eminsi GRK	Persen	24,6	24,9	24,9	28,9	28,9	29,1
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	42,78	42,88	43,1	44,05	45,15	49,69
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	10,78	10,79	10,80	26,21	26,21	26,21

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan peningkatan dari 56,31 pada tahun 2019 menjadi 77,90 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dairi sudah cukup baik, masih belum sepenuhnya optimal. Indeks Kualitas Tutupan Lahan cukup fluktuatif, pada tahun 2019

46,61 turun menjadi 42,45 pada tahun 2020, pada tahun 2021 meningkat menjadi 79,65, pada tahun 2022 dan 2023 turun menjadi 79,46 dan pada tahun 2024 menjadi 62,01, menandakan bahwa kondisi tutupan hutan dan vegetasi non- hutan di Kabupaten Dairi semakin berkurang.

Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah penuh meningkat dari 10,78 persen pada tahun 2019 menjadi 26,21 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat untuk layanan pengumpulan sampah telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan fokus pada penanganan dan pengurangan sampah.

Persentase penurunan emisi GRK juga meningkat setiap tahun, dari 24,60 persen pada tahun 2019 hingga 29,10 persen pada tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam pengurangan emisi GRK di Kabupaten Dairi. Pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah meningkat setiap tahun, dari 42,78 persen pada tahun 2019 menjadi 49,69 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga sudah diolah dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal, sehingga kesadaran masyarakat masih diperlukan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Potensi bencana di Kabupaten Dairi terdiri dari Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan,

Kekeringan, Likuefaksi dan Tanah Longsor (KRB Kab. Dairi, 2025-2029)

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2015 – 2024, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : Banjir, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tanah Longsor. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015-2024 di Kabupaten Dairi

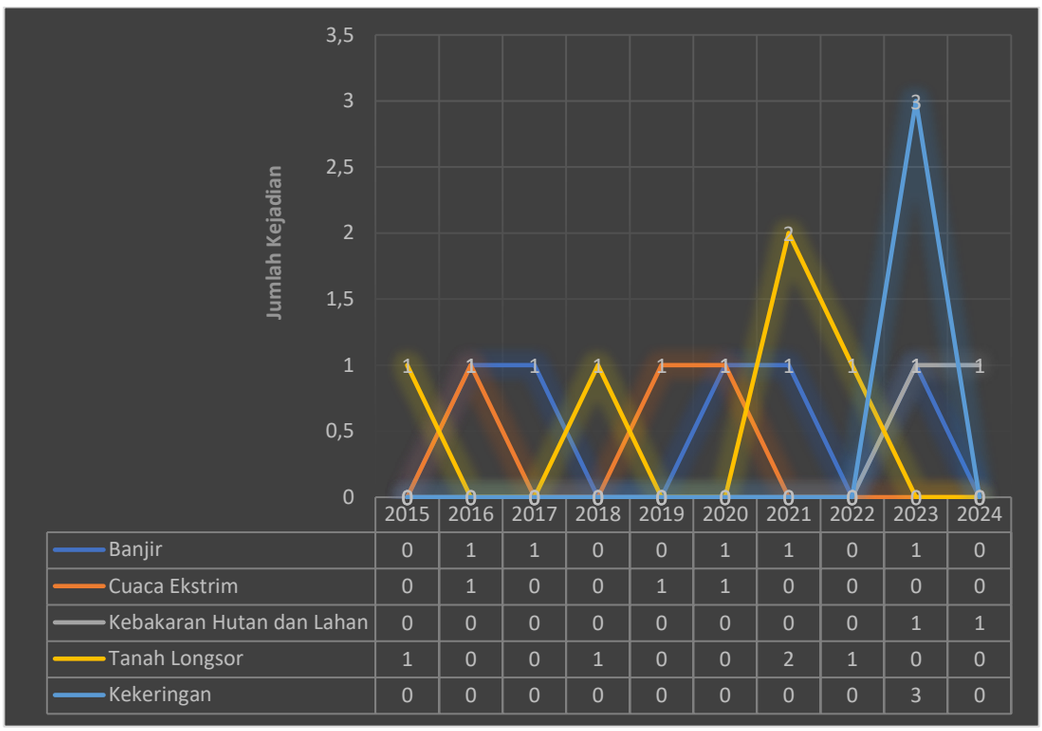
NO	JENIS BENCANA	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan Rumah		
			Meniggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Berat	Sedang	Ringan
1	Banjir	6	6	1	4	392	95	18	2	67
2	Cuaca Ekstrem	3	0	0	7	5	0	5	0	28
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kekeringan	3	0	0	0	645	0	5	12	129
5	Tanah Longsor	5	9	3	12	42	0	4	0	4
Jumlah		20	15	4	23	1.034	95	32	14	228

Sumber: KRB Kabupaten Dairi 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kejadian yang tercacat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Dairi

serta DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) terdapat bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Terlihat bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2015-2024 yaitu sebanyak 5 kali, yang mana kejadian tersebut berdampak terhadap Masyarakat dan pemukiman Masyarakat.

Gambar 2.3. Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi 2015-2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
Cuaca Ekstrim	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tanah Longsor	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0
Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

Sumber, KRB Kabupaten Dairi, 2025-2029

Berdasarkan kajian resiko bencana yang telah dilakukan, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Dairi ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Bahaya Bencana di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		BAHAYA				KELAS
		LUAS (Ha)				
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Banjir	2.687,76	1.599,57	706,50	4.993,83	Tinggi
2	Banjir Bandang	447,57	2.082,60	3.336,84	5.867,01	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	376,87	44.630,04	32.748,88	77.791,79	Tinggi
4	Gempa Bumi	687,35	16.965,30	182.947,49	200.600,14	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	43.026,60	147.269,35	3.200,67	193.496,62	Tinggi
6	Kekeringan	200.600,14	0	0	200.600,14	Rendah
7	Likuefaksi	1,17	169,83	8,64	179,64	Tinggi
8	Tanah longsor	11.428,92	5.352,66	85.836,33	102.617,91	Tinggi
MULTI BAHAYA		0,72	1.658,32	198.941,10	200.600,14	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Tabel diatas memperlihatkan nilai luas rekapitulasi kajian resiko bencana unyuk potensi luas bahaya di Kabupaten Dairi. Nilai luas tersebut menentukan kelas bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang dan tinggi. Rekapitulasi kelas bahaya diatas menunjukkan bahwa 7 jenis potensi bencana yang ada di Kabupaten Dairi memiliki bahaya tinggi, hanya bencana kekeringan yang memiliki kelas bahaya rendah.

Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Pada sub bab ini akan dijabarkan rekapitulasi penduduk terpapar, kerugian ekonomi, fisik, dan kerusakan lingkungan tingkat kecamatan. Untuk potensi penduduk terpapar akan dihasilkan jumlah total penduduk terdampak yang disesuaikan dengan pengelompokkan analisa terpapar rendah, sedang dan tinggi, selain itu juga disandingkan dengan jumlah kelompok rentan yakni penduduk umur rentan, miskin, dan penyandang disabilitas.

Untuk analisa kerugian akan dilihatkan jumlah nominal (nilai rupiah) dari analisa rumusan yang ada yang tergolong kerugian ekonomi dan kerugian fisik. Untuk jenis bencana tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan tidak ada analisa penduduk terdampak serta kerugian fisik, hal ini juga terdapat pada bencana kekeringan yang tidak ada berdampak langsung pada kerugian fisik. Untuk potensi kerusakan lingkungan yang tidak ada pada kajian gempabumi dan cuaca ekstrim. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan uraian analisis kerentanan di atas, hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Dairi ditunjukkan dengan Tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				
			KELOMPOK RENTAN				KELAS
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS	
1	Banjir	8.818	105	1.886	5.124	11	Tinggi
2	Banjir Bandang	7.307	105	1.625	4.322	9	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	216.402	111	46.590	128.255	576	Tinggi
4	Gempa Bumi	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
7	Likuefaksi	494	103	114	298	4	Tinggi
8	Tanah longsor	24.904	120	5.645	17.785	96	Sedang
MULTI BAHAYA		329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan per jenis bahaya berada pada kelas tinggi untuk semua jenis bencana yang berpotensi di Kabupaten Dairi, terkecuali bencana likuefakasi yang berada pada kelas sedang. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan hanya terjadi di kawasan non-pemukiman warga.

Tabel 2.14 Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA	KERUGIAN (JUTA RUPIAH)						KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KELAS FISIK	KERUGIAN EKONOMI	KELAS EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS KERUGIAN	LUAS	KELAS
Banjir	20.719,60	Tinggi	11.603,33	Tinggi	32.322,93	Tinggi	340	Sedang
Banjir Bandang	38.277,53	Tinggi	50.778,60	Tinggi	89.056,10	Tinggi	1.079	Tinggi
Cuaca ekstrim	1.247.948,26	Tinggi	554.326,35	Tinggi	1.802.274,62	Tinggi	-	-
Gempa Bumi	3.955.337,03	Tinggi	1.563.014,91	Tinggi	5.518.351,94	Tinggi	-	-
Kebakaran hutan dan lahan	-	-	737.601,94	Tinggi	737.601,94	Sedang	18.696	Tinggi
Kekeringan	-	-	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah
Likuefaksi	18.114,82	Tinggi	333,34	Tinggi	18.448,17	Tinggi	12	Rendah
Tanah longsor	205.142,10	Tinggi	375.521,35	Tinggi	580.663,45	Tinggi	52.854	Tinggi
Multi	3.958.134,78	Tinggi	1.571.584,45	Tinggi	5.529.719,23	Tinggi	75.766	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kabupaten Dairi berada pada kelas kerugian rendah, sedang dan tinggi. Total perkiraan jumlah kerugian terbanyak adalah bencana gempabumi sedangkan kerugian terkecil untuk jenis bencana likuefaksi. Jika dilihat dari kelas kerusakan lingkungan tergolong pada kelas rendah, sedanf dan tinggi dimana potensi kerusakan lingkungan terbesar untuk jenis bencana longsor.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerentanan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Dairi

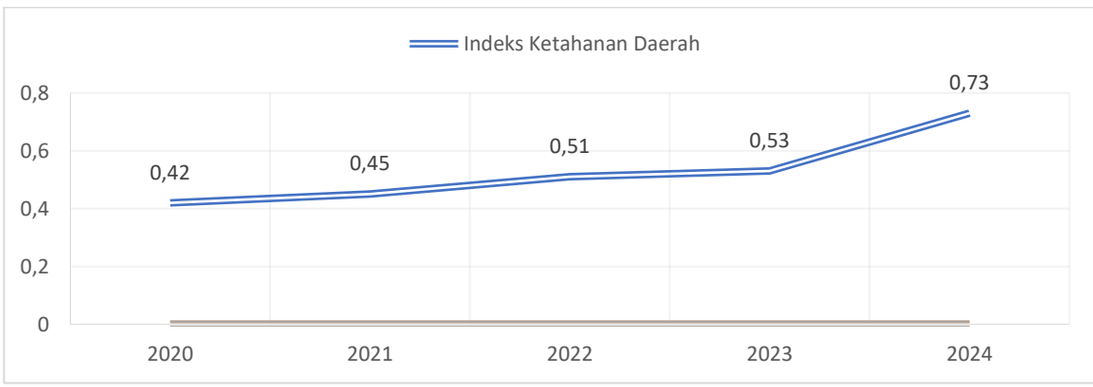
JENIS BENCANA		KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Multi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kelas kerentanan sedang dan tinggi. Untuk potensi bahaya yang tergolong kelas kerentanan sedang yaitu bencana banjir, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Sedangkan potensi bahaya tergolong kelas kerentanan tinggi adalah bencana banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan gempa bumi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggambarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. IKD merupakan nilai komposit dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi dan 71 indikator pencapaian. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.4. Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.



Sumber : BPBD Kab. Dairi, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa dari Tahun 2020-2024 ketahanan daerah Kabupaten Dairi dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks rata-rata sebesar 0,52. Nilai ini masuk dalam kategori tingkat ketahanan daerah sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi secara aturan untuk pedoman kebijakan dan kelembagaan serta pengembangan system pemulihan bencana sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu menyusun pengkajian risiko dan perencanan penanggulangan bencana secara terpadu. Serta meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negative dari bencana.

2.1.1.7 Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitinjo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat

beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

a. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan. Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi. Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat kearah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata *(ecotourism)* atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk diatas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Baski, Panorama Tornauli dan lain-lain.

c. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitinjo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

d. Kawasan Perkotaan Siultinggi

Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar - masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat. Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

4. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Seperti tertuang dalam Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Kabupaten dinyatakan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air Dan Energi. Kabupaten Dairi memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, air, dan energi. Potensi ini didukung oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki.

Kabupaten Dairi dimasukkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai Kawasan Swasembada Pangan karena memiliki sejumlah keunggulan strategis dan potensi sumber daya yang mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional.

a. Letak Geografis Strategis dan Iklim Ideal :

- Dairi terletak di dataran tinggi (700–1.400 mdpl) dengan iklim sejuk yang sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti kentang, kol, cabai, dan kopi.
- Ketersediaan curah hujan yang relatif stabil membuat daerah ini potensial untuk produksi pangan sepanjang tahun.

b. Ketersediaan Lahan Subur dan Potensi Lahan Tidur :

- Dairi memiliki ratusan hektar lahan subur dan lahan tidur (belum dimanfaatkan maksimal) yang dapat dialihfungsikan untuk pertanian produktif.
- Potensi pengembangan kawasan pertanian terpadu yang telah ditetapkan melalui RTRW dan RPJMD daerah.

c. Komoditas Unggulan Bernilai Ekonomi Tinggi :

- Dairi dikenal sebagai penghasil kopi Arabika Sidikalang .
- Selain itu, produk sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, tomat, dan bawang merah merupakan komoditas strategis di Sumatera Utara.

d. Dukungan Infrastruktur dan Program Nasional

- Dairi termasuk dalam prioritas pembangunan kawasan pertanian dalam di RPJMN 2025–2029.
- Pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran pembangunan irigasi, jalan tani, dan gudang resi gabah untuk mendukung produktivitas petani.

e. Penguatan Ketahanan Pangan Regional

- Dairi diposisikan sebagai salah satu daerah penyangga lumbung pangan untuk Sumatera Utara
- Swasembada pangan dari Dairi akan memperkuat ketahanan pangan kawasan barat Indonesia.

f. Keselarasan dengan Visi Pembangunan Nasional

- Sesuai arah kebijakan pembangunan RPJMN yang menekankan: "Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas", dengan sub-fokus pada “kedaulatan pangan”.
- Dairi diidentifikasi sebagai salah satu daerah dengan potensi dan komitmen tinggi dalam mendukung tujuan tersebut.

g. Dukungan Pemerintah Daerah dan Kelembagaan Petani

- Kelembagaan petani dan koperasi mulai berkembang dan dilibatkan dalam kemitraan dengan swasta dan off-taker.
- Kabupaten Dairi masuk dalam RPJMN sebagai Kawasan Swasembada Pangan karena memenuhi tiga pilar utama ketahanan pangan nasional: potensi alam, dukungan kelembagaan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan intervensi yang tepat, Dairi diharapkan mampu menjadi model pengembangan kawasan pangan terpadu di dataran tinggi Indonesia. Kabupaten Dairi memiliki peluang besar untuk mewujudkan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi. Namun, keberhasilan bergantung pada penguatan infrastruktur, kapasitas SDM, dukungan teknologi, serta sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta.

2.1.1.8. Demografi

Demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Demografi atau kependudukan memiliki urgensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dengan mengetahui kondisi demografi suatu daerah, dapat membantu merumuskan yang berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah 330.586 jiwa, terdiri dari 165.937 jiwa penduduk laki-laki (50,19%) dan 164.649 jiwa penduduk perempuan (49,80%).

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 100,78 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata lebih dari 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2024, terdapat sembilan kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Tigalingga, Siempat Nempu Hulu,

Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara tujuh kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen,yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.16 Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	28.283	29.330	57.612	96,43
2	Berampu	4.908	4.622	9.530	106,19
3	Sitinjo	8.129	7.367	15.496	110,34
4	Parbuluan	13.920	13.999	27.919	99,44
5	Sumbul	24.790	23.032	47.822	107,63
6	Silahisabungan	2.803	3.217	6.020	87,13
7	Silima Punggapungga	7.610	8.024	15.634	94,84
8	Lae Parira	7.490	8.284	15.774	90,42
9	Siempat Nempu	10.776	10.627	21.403	101,40
10	Siempat Nempu Hulu	10.895	10.396	21.294	104,80
11	Siempat Nempu Hilir	6.347	6.218	12.565	102,07
12	Tigalingga	12.893	12.773	25.666	100,94
13	Gunung Sitember	5.943	5.274	11.217	112,86
14	Pegagan Hilir	8.917	9.450	18.367	94,36
15	Tanah Pinem	12.234	12.036	24.270	101,65
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 815,23 jiwa/km^2. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

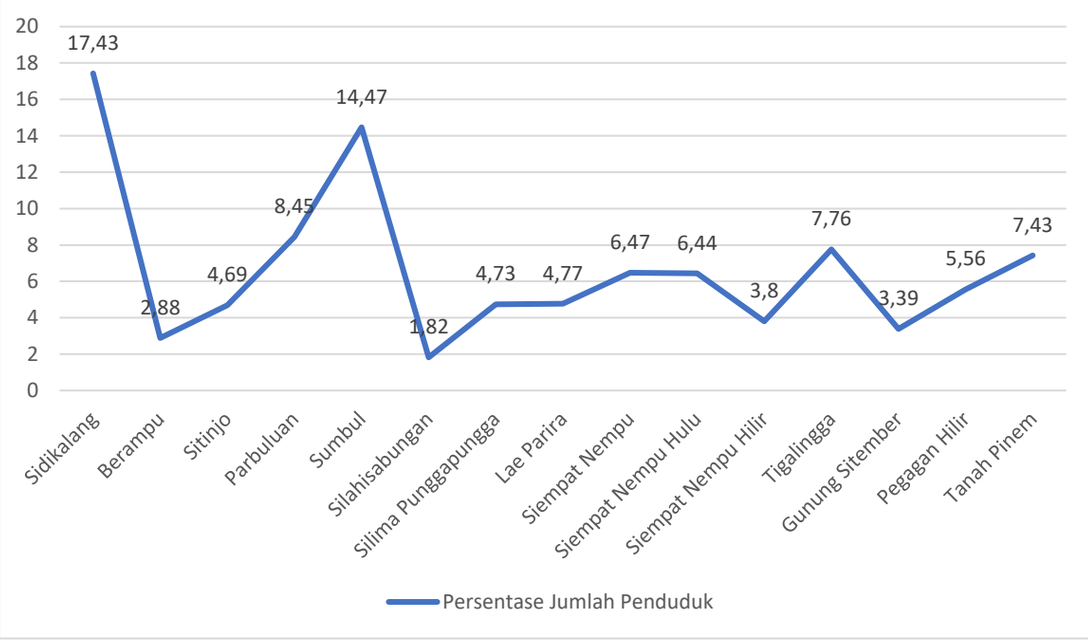
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km^2)	%	
1	Sidikalang	57.612	70,67	17,43	815,23
2	Berampu	9.530	192,58	2,88	236,55
3	Sitinjo	15.496	197,00	4,69	296,90
4	Parbuluan	27.919	60,15	8,45	121,67
5	Sumbul	47.822	88,35	14,47	251,37
6	Silahisabungan	6.020	439,4	1,82	82,43
7	Silima Punggapungga	15.634	93,93	4,73	180,53

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km^2)	%	
8	Lae Parira	15.774	105,62	4,77	376,80
9	Siempat Nempu	21.403	155,33	6,47	360,95
10	Siempat Nempu Hulu	21.294	235,4	6,44	229,79
11	Siempat Nempu Hilir	12.565	42,75	3,80	121,02
12	Tigalingga	25.666	77,00	7,76	131,94
13	Gunung Sitember	11.217	40,85	3,39	147,39
14	Pegagan Hilir	18.367	75,62	5,56	121,05
15	Tanah Pinem	24.270	53,15	7,43	56,14
Jumlah		330.586	1.927,80	100	174,50

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

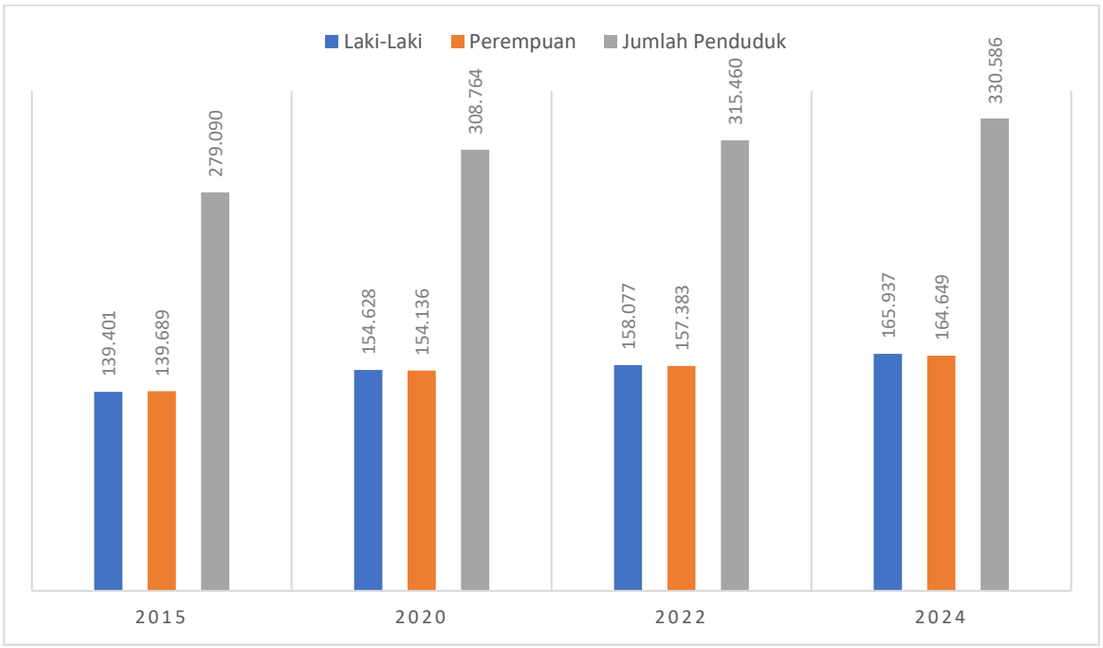
Tabel 2.18 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 4	17.306	16.563	33.869	104,49
2	5 – 9	15.005	14.161	29.166	105,96
3	10 – 14	15.806	15.007	30.813	105,32
4	15 – 19	16.169	15.397	31.566	105,01
5	20 – 24	15.859	15.026	30.885	105,54
6	25 – 29	14.876	13.812	28.688	107,70
7	30 – 34	12.404	11.127	23.531	111,48
8	35 – 39	10.748	9.843	20.591	109,19
9	40 – 44	9.780	9.207	18.987	106,22
10	45 – 49	9.304	8.929	18.233	104,20
11	50 – 54	7.840	7.991	15.831	98,11
12	55 – 59	6.664	7.556	14.220	88,19
13	60 – 64	5.394	6.554	11.948	82,30
14	65 – 69	4.222	5.717	9.939	73,85
15	70 – 74	2.666	4.067	6.733	65,55
16	75 +	1.894	3.692	5.586	51,30
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Tabel 2.18 di atas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif atau pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebesar 214.480 jiwa. Usia ini merupakan usia yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban atau pada rentang usia 0-14 tahun yaitu sebesar 93.848 jiwa dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau pada rentang usia 65 tahun keatas sebesar 22.258 jiwa. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat *mortalitas* penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh *migrasi* ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

Gambar 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Jenis Kelamin



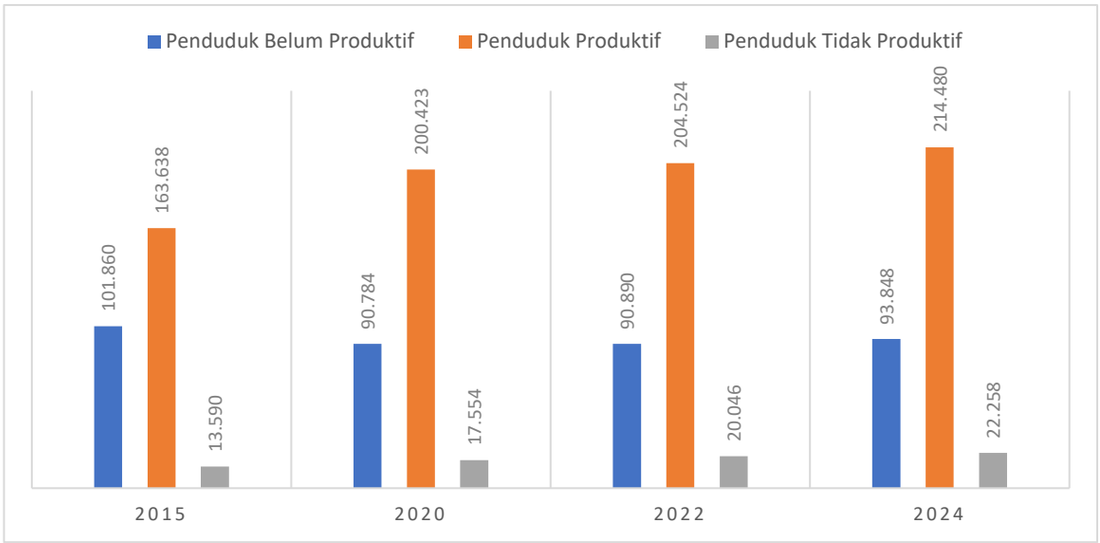
Sumber: BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Dari tahun 2015 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami penambahan setiap periode. Penambahan jumlah penduduk sebesar 1,3 persen sampai 1,84 Persen Pertahun dengan komposisi penambahan penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan. Komposisi penduduk pada tahun 2015 hingga 2024 penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda dengan rentang 100,44-100,78 persen dari tahun 2015 hingga 2024.

1. Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi atau keadaan dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan penduduk tidak produktif. Penduduk usia produktif diartikan sebagai penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, sementara penduduk belum produktif dikelompokan ke dalam rentang umur 0-14 dan penduduk tidak produktif dikelompokkan ke dalam rentang umur 65 ke atas. Analisis penduduk Kabupaten Dairi dalam konteks bonus demografi saat ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.7 Analisis Bonus Demografi Kabupaten Dairi Tahun 2015, 2020, 2022, 2024



Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2025 (diolah)

Kabupaten Dairi memiliki penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk belum produktif dan tidak produktif. Secara jumlah, adanya penambahan penduduk produktif maupun penduduk tidak produktif. Sementara penduduk belum produktif mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penambahan namun tidak banyak atau lebih kecil dari tahun 2015.

Di satu sisi jumlah penduduk produktif mengalami penambahan, namun dari sisi trendnya mengalami pelambatan. Pada tahun 2015 ke 2020, jumlah penduduk produktif mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,22. Namun pada tahun 2022, adanya penurunan trend penambahan penduduk produktif, yaitu hanya meningkat sebesar 0,02 persen. Sementara penduduk belum produkti memiliki trend negative pada tahun 2015 dan 2020, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun sangat kecil, yaitu sebesar 0,001 persen. Sama halnya dengan penduduk tidak produktif yang trend pertumbuhannya mengalami peningkatan setiap periode, tahun 2022 trend pertumbuhan paling tinggi dipegang oleh penduduk tidak produktif (0,14 persen), diikuti penduduk produktif (0,02 persen) dan kemudian penduduk belum produktif (0,001 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran demografi di Kabupaten Dairi terutama penduduk tidak produktif yang memiliki trend peningkatan yang lebih tinggi.

Tentu saja, kondisi demografi Kabupaten Dairi di atas menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena penduduk produktif diasumsikan memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian daeran melalui pemanfaatan TIK dan sumber daya lain yang dimiliki sehingga output ekonomi daerah dapat meningkat. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada penduduk tidak produktif dan bahkan mampu menjadikan kelompok tersebut lebih berdaya terutama dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, Pemerintah daerah juga harus mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam menundukung dinamika kependudukan di Kabupaten Dairi.

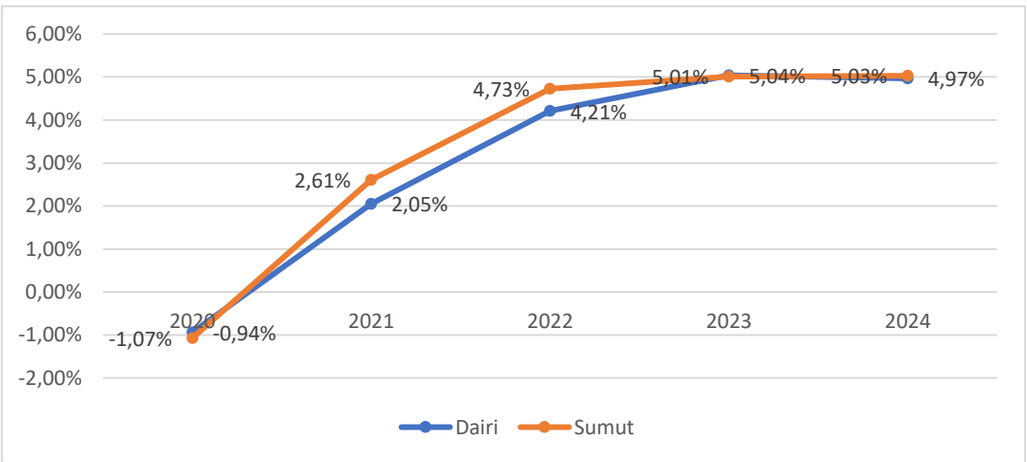
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2020-2024 menunjukkan trend fluktuatif. Pada Tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami kontraksi sebesar -0,94%, hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,05%, dan kembali meningkat di Tahun 2022 menjadi 4,21%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan diangka 5,04%, sementara pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan ke angka 4,97%.

Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional, perlu dilakukan optimalisasi atas potensi sektor ekonomi, terutama di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial serta Transportasi dan Pergudangan.

B. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

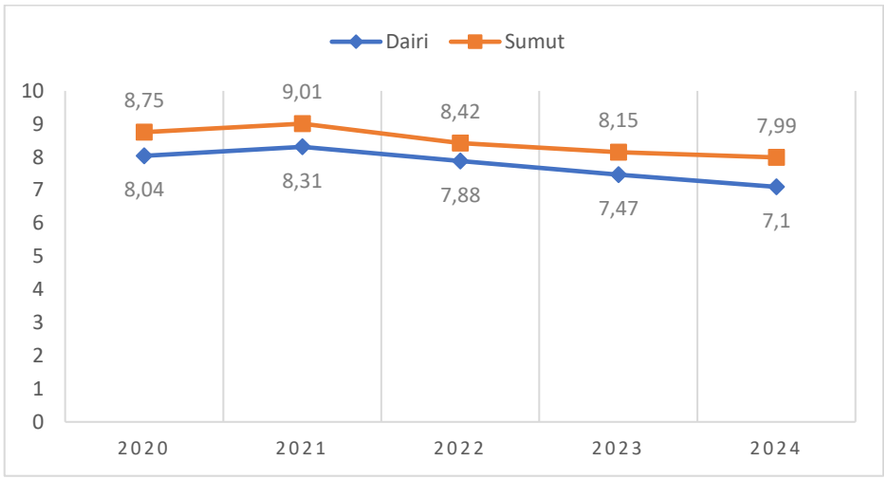
Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimun non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2024 hingga mencapai 7,10%.

Gambar 2.9 Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024 (%)



Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2025.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa trend persentase kemiskinan di kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 cukup fluktuatif dimana berada di angka 8,04% pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 naik menjadi 8,31% dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,88% dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 menjadi 7,47% kemudian pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 7,10%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75% pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01% dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 8,42% dan kembali menurun pada Tahun 2023 ke angka 8,15%, kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,99%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 1,09, pada Tahun 2021 mencapai 1,24, dan pada Tahun 2022 menurun di angka 0,65 dan meningkat ke angka 0,93 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,79. Dilihat dari

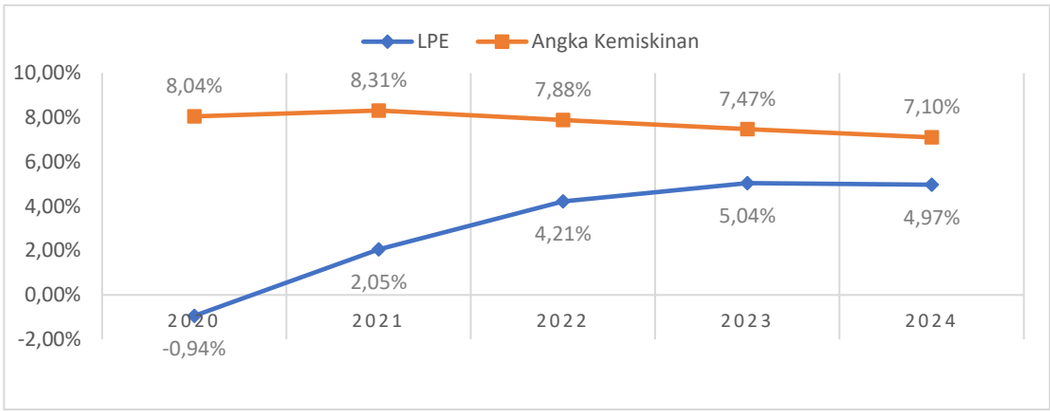
keparahannya, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada Tahun 2021 meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun di angka 0,08 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,17, kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,15.

Tabel 2.19 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2020 – 2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,09	1,24	0,65	0,93	0,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,20	0,28	0,08	0,17	0,15

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 2. 10 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kenyataannya hubungan ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurun diakibatkan oleh pandemik Covid-19 diikuti meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tapi tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Program penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.20 Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
4	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Mengurangi Beban Pengeluaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan
		Program Hubungan Industrial	Meningkatkan Pendapatan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Perlindungan Khusus Anak	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Program	Tagging Strategi
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.21

PDRB per kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	30.271.338	31.013.125	31.013.125	35.877.624	38.398.103
Atas Dasar Harga Konstan	21.142.880	21.211.341	21.702.725	22.387.473	23.084.189

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

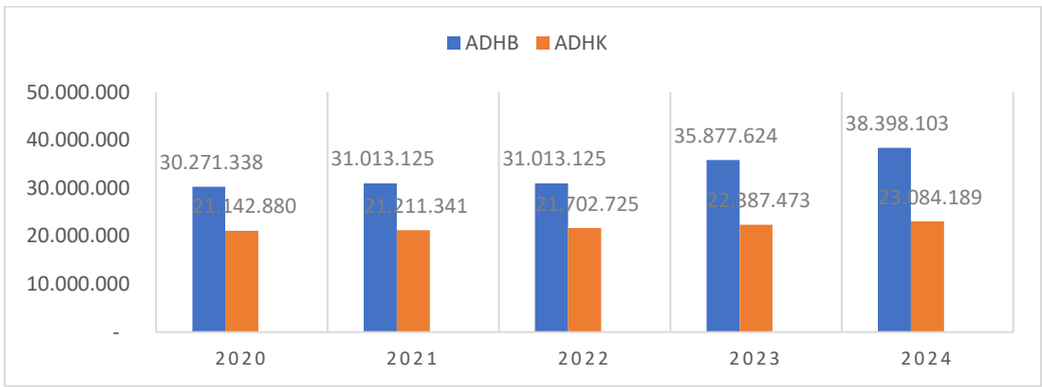
PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 30.271.338, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilainya sama menjadi 31.013.125 ribu rupiah pada Tahun 2023

meningkat menjadi 35.877.624, angka tersebut meningkat menjadi 38.398.103 Tahun 2024.

Sementara itu dari perhitungan harga konstan, periode Tahun 2020 sebesar 21.142.880, pada Tahun 2021 sebesar 21.211.341 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21.702.725, kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22.387.473 dan pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 23.084.189.

Gambar 2.11

PDRB per kapita Kabupaten Dairi berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2020-2024 (Rupiah)



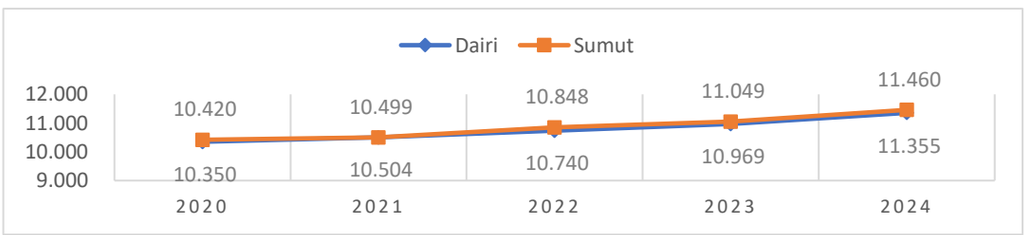
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

D. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.12

Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Per Kapita Per Tahun 2020 -2024 (ribu rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk pada

Tahun 2020 sebesar 10.350 ribu rupiah per kapita per tahun, lalu meningkat pada Tahun 2021 menajdi 10.504 ribu rupiah perkapita dan meningkat kembali Tahun 2022 menjadi 10.740 ribu rupiah per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 10.969 ribu rupiah serta Pada Tahun 2024 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi 11.355 ribu rupiah. Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT**)**

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Dairi pada Tahun 2020 sebesar 1,75 persen, pada Tahun 2021 sebesar 1,49 persen, dan pada Tahun 2022 sebesar 0,88 persen, untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) capaian Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 1,23 %. Namun pada tahun 2024 naik menjadi 1,43 persen.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Dairi Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang lalu, 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	1,75	1,49	0,88	1,23	1,43

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

F. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

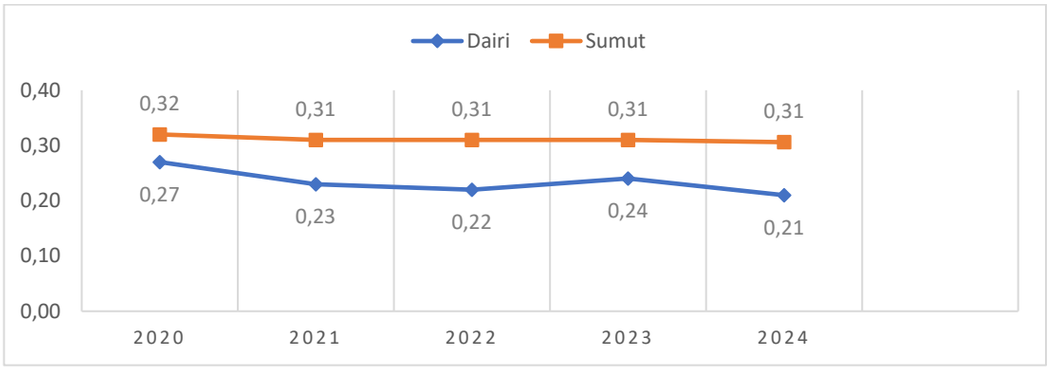
Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, G=0, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0<G<0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3<G<0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5<G<1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Dan jika nilai Gini Ratio, G=1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan

cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.13 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020 -2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2025.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2020 berada pada angka 0,27, nilai gini ratio Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan gini ratio Kabupaten Dairi atau berada pada angka 0,32. Nilai gini ratio Sumatera Utara cenderung stabil diatas angka 0,31 sedangkan nilai gini ratio Kabupaten Dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,27.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 yang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai 0,27 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah. Pada Tahun 2022 gini ratio Dairi berada pada angka 0,22 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan di angka 0,24, dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 0,21.

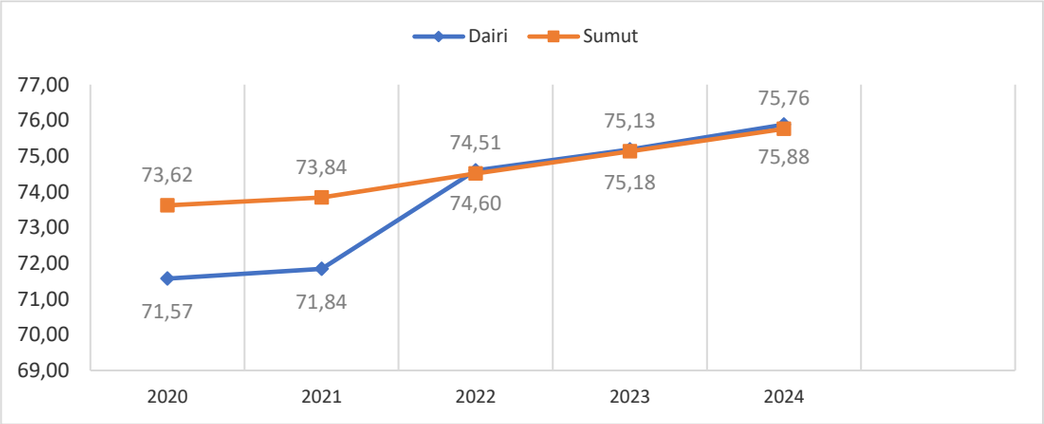
Dalam rangka menekan angka ketimpangan/gini ratio Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan beberapa kebijakan seperti meningkatkan konektifitas antar wilayah, perbaikan infrastruktur dasar, pengembangan Kawasan pertanian terpadu, meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola langsung ke masyarakat, fasilitasi pemberian kredit usaha rakyat kepada petani dan pelaku UMKM, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan lainnya.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan

memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi sebesar 71,57 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada Tahun 2022 sebesar 72,56, pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18, dan pada tahun 2024 sebesar 75,88, meningkat sebanyak 0,93 persen dari tahun sebelumnya. Sejak Tahun 2022 sampai 2024, IPM Kabupaten Dairi berada sedikit diatas IPM Provinsi Sumatera Utara.

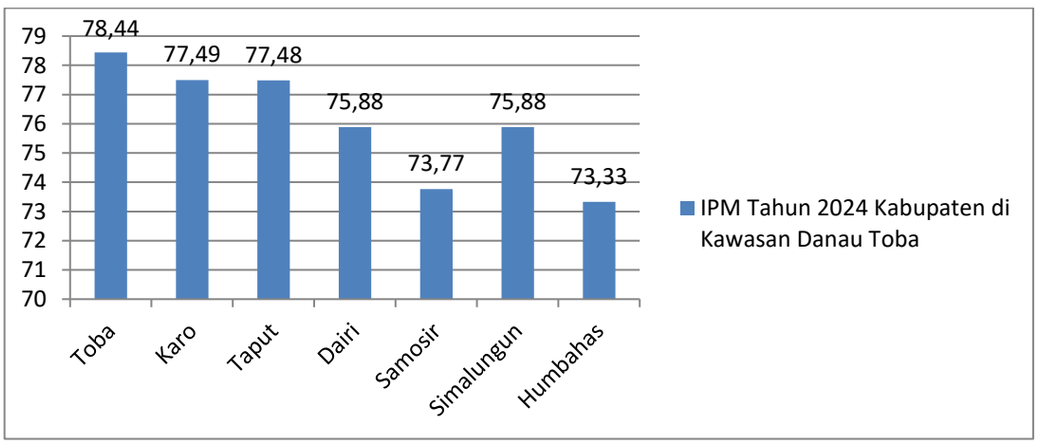
Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat

IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Kabupaten Dairi bersama enam Kabupaten lain, yakni : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir merupakan tujuh Kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada dikawasan Danau Toba, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 berada pada posisi keempat dari tujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba.

Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten di Kawasan Danau Toba, Tahun 2024



Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025.

Tabel 2.23 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 77,88 dan berada pada status “tinggi”.

Tabel 2.24 IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2024

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,38
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,53
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,89
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/Tahun)	Rp. 11.355
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	75,88

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

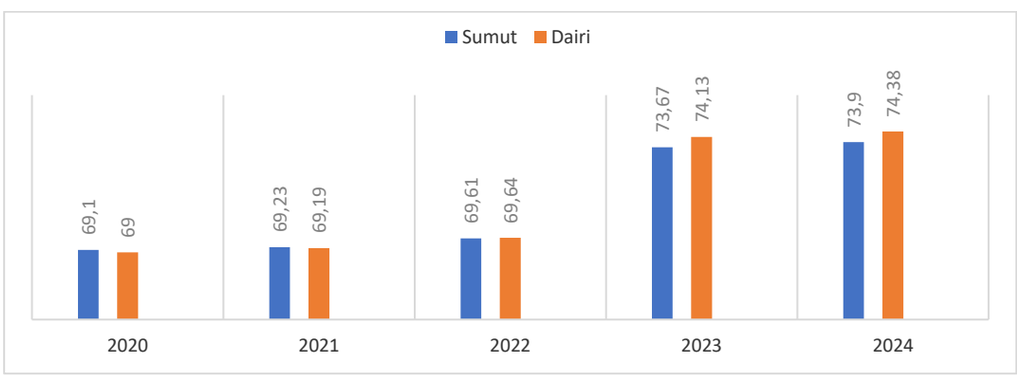
Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut

Gambar 2.16 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Usia Harapan Hidup kabupaten Dairi pada Tahun 2024 adalah 74,38 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

B. Indeks Kualitas Keluarga

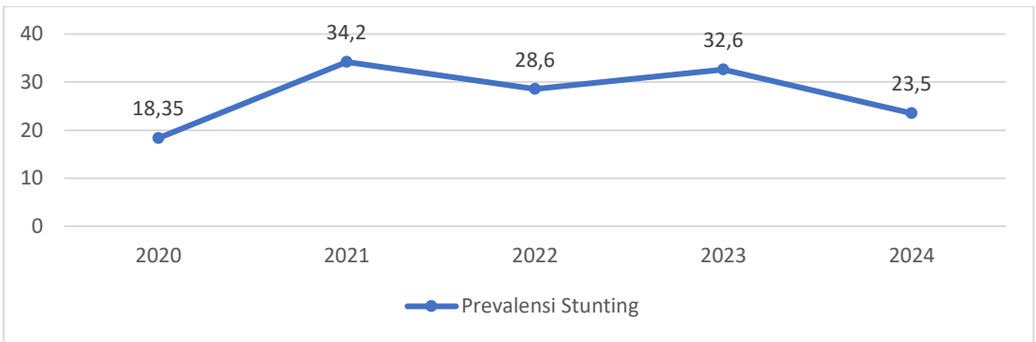
Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 Persen pada tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.
Selama periode lima tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi terjadi peningkatan prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 28,06 persen. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan stunting adalah yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus

stunting. Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting. Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskemas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitembar 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17 Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI, 2024

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.18 Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



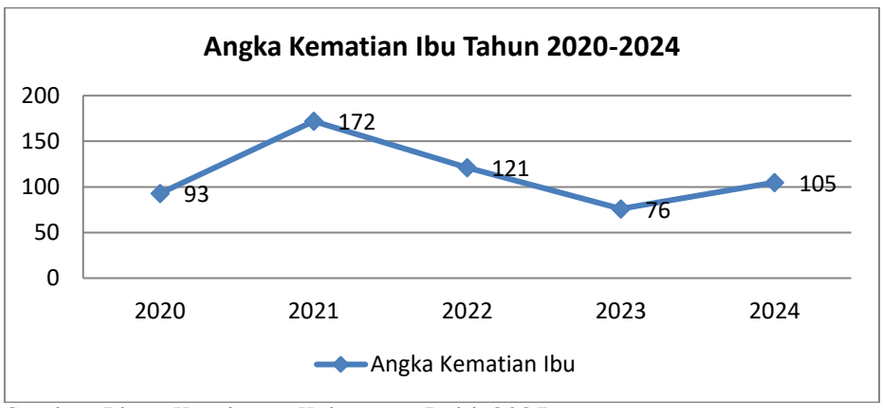
Sumber : LPPD, Kabupaten Dairi

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

E. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.19 Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

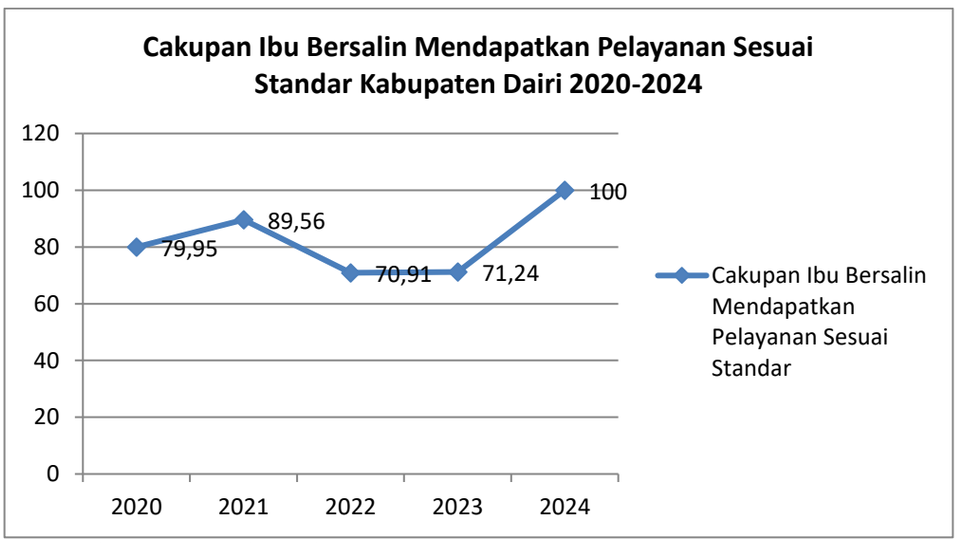
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif . AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2024 sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut kurang baik karena sudah berada diatas target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, upaya penanganan kasus kematian ibu perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih

yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20 Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



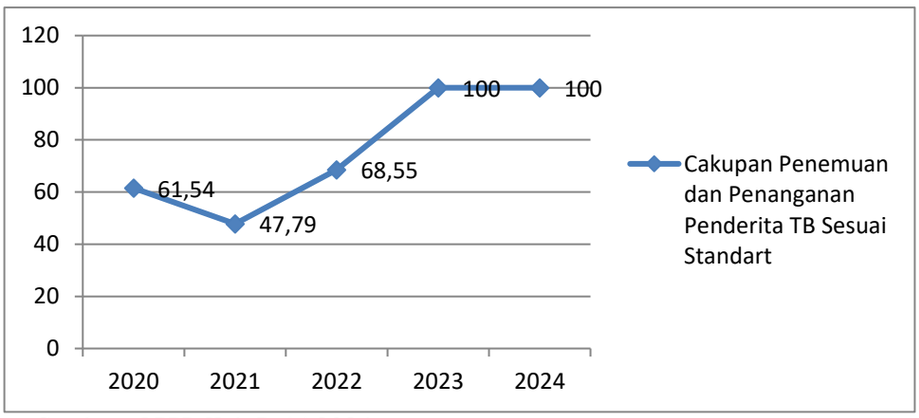
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

G. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen,menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 2.21 Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

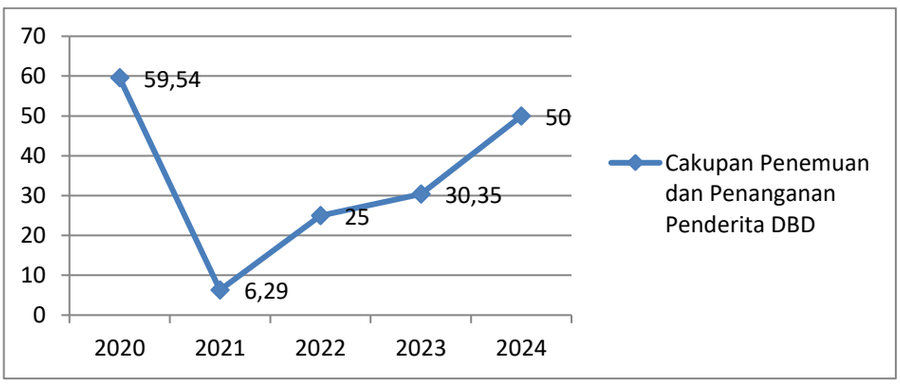


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

H. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



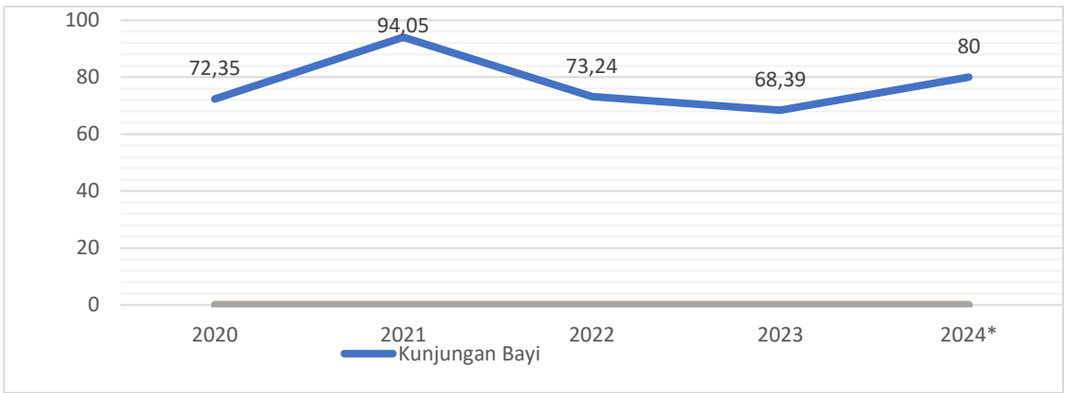
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

I. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter,

bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024



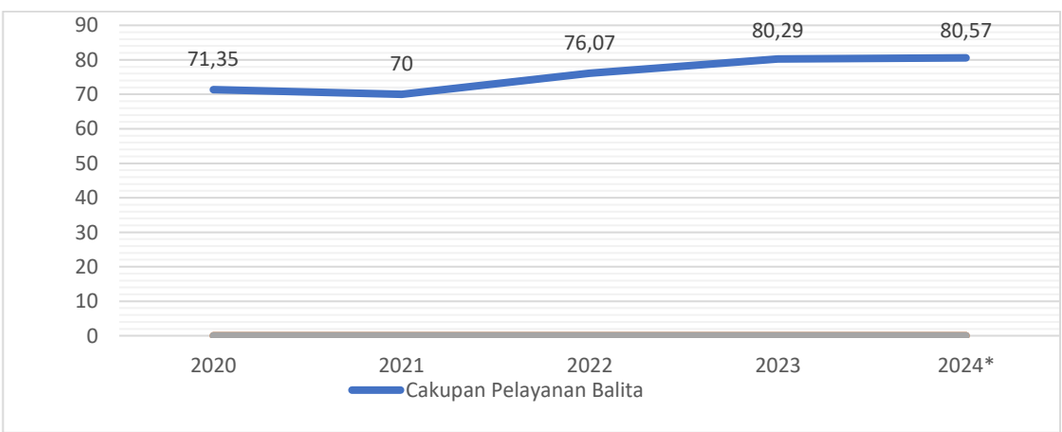
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, sebesar 94,05 persen pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 73,24 persen dan pada Tahun 2023 mencapai angka 68,39 persen dan pada Tahun 2024 adalah 80 persen.

J. Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07%, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29% dan juga pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,57%

Gambar 2.24 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024

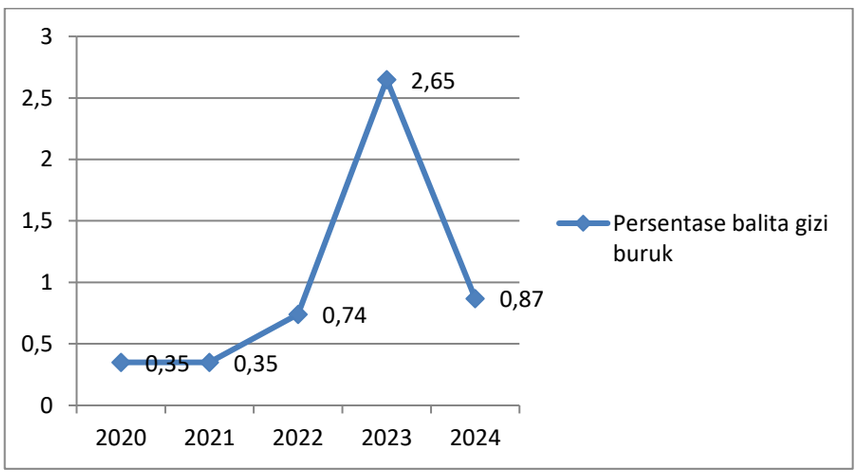


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

K. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal (golden period) terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa golden period tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.25 Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024 (%)



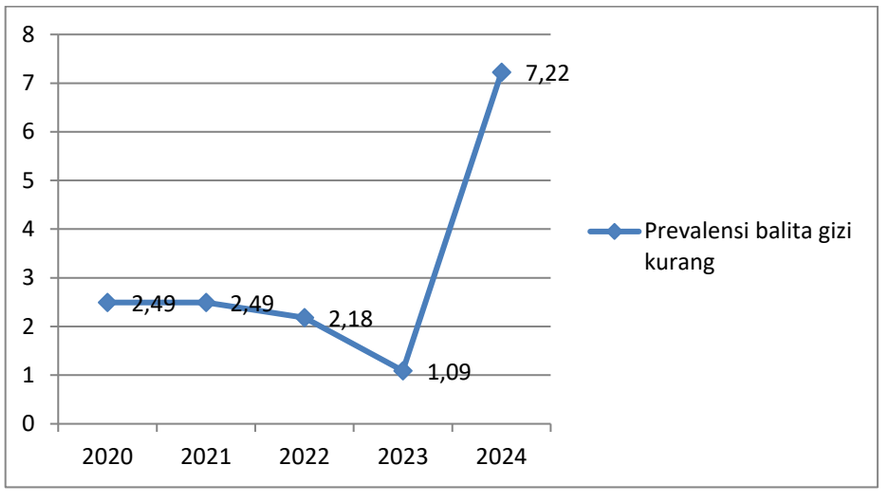
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0.35%, ditahun 2021 sebesar 0,35%, kemudian naik menjadi sebesar 0,74% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 2,65 namun di tahun 2024 turun menjadi 0,87%, pada Tahun 2024.

L. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.26 Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 hingga 2024 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang sebesar 2,49% pada Tahun 2020 dan 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,18%, menurun kembali ditahun 2023 menjadi 1,09% namun pada tahun 2024 melonjak drastic menjadi 7,22%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan balita gizi kurang belum optimal.

M. Indeks Kualitas Keluarga

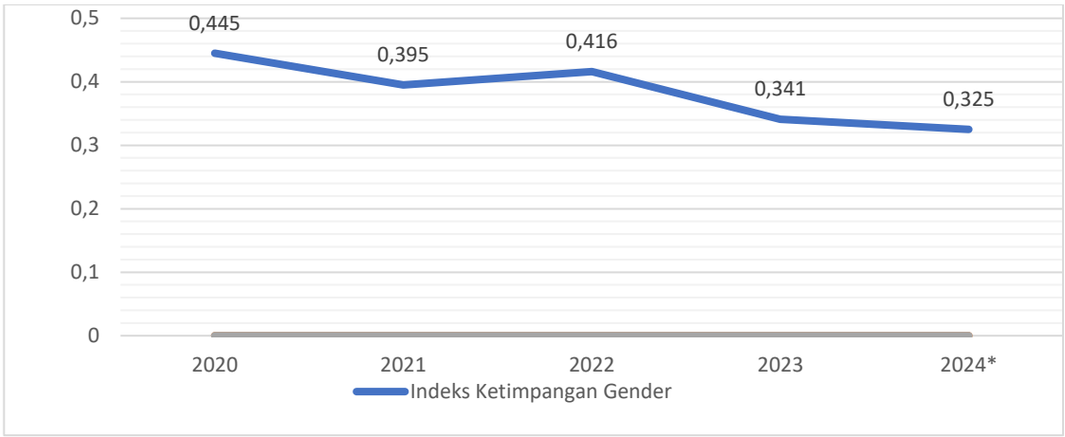
Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebgai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan public dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

N. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender, IKG mengukur ketimpangan dalam tiga dimensi, yaitu

kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Dairi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2.27 Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab.Dairi 2024

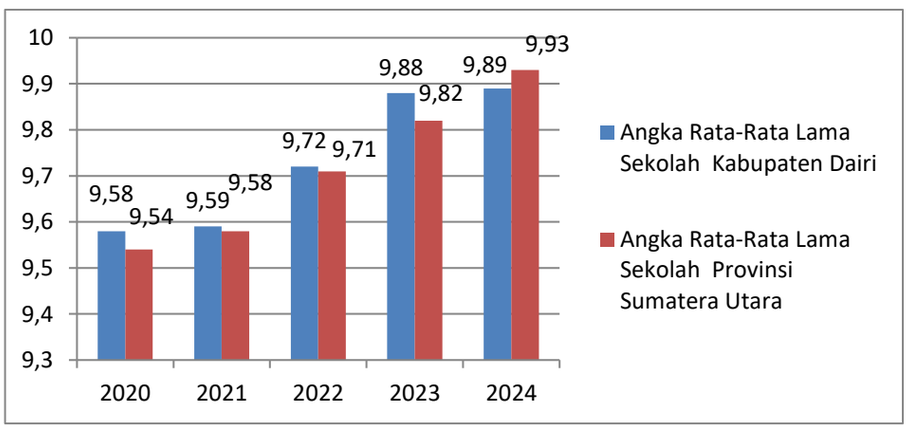
Pada Tahun 2023 indeks ketimpangan gender di Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar 0,075 Point, demikian juga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,016 point. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Dairi.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.28 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024 (Tahun)



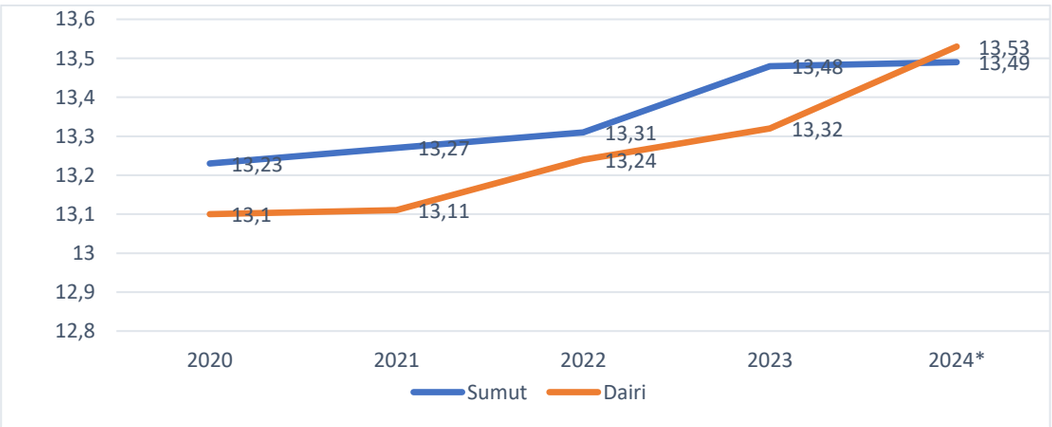
Sumber : BPS Sumatera Utara, Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada Tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada Tahun 2022, meningkat ke angka 9,88 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi menjadi sebesar 9,89 tetapi masih dibawah Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,93. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,89 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 1.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024



Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,11, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,27. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13,24 sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,31 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 13,32 dan provinsi menjadi 13,48. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 harapan tersebut meningkat ke jenjang sarjana yaitu 13,53.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

menunjukan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat petumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Untuk mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta

kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisikuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupuninstitusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyan dang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
d. Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

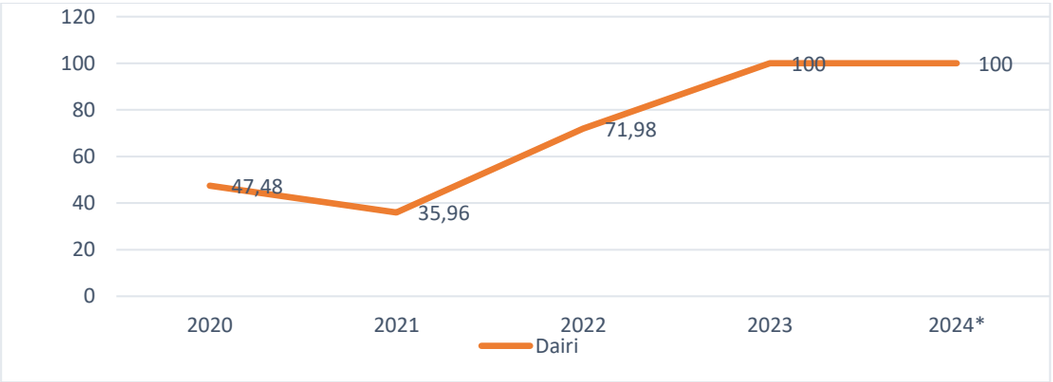
1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai mana dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pembangunan kesejahteraan social ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.30 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



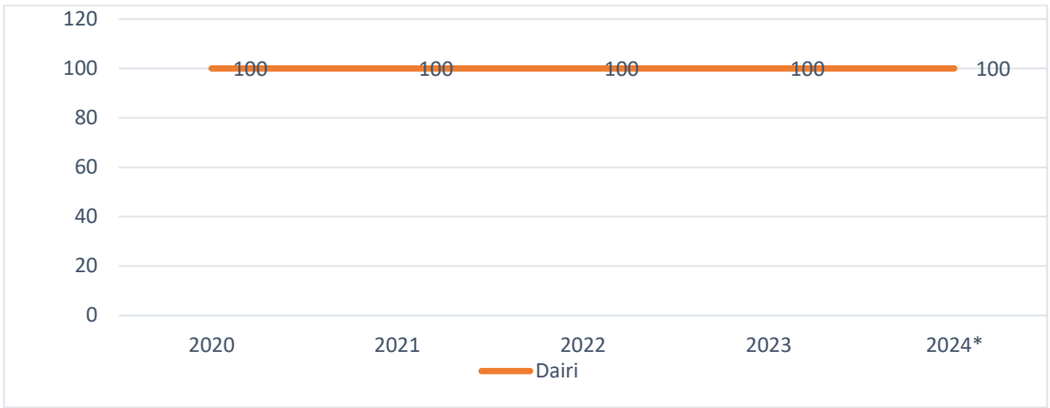
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi pada Tahun 2020 sebesar 47,48 persen dan Tahun 2021 sebanyak 35,96 persen, Tahun 2022 meningkat menjadi 71,98% dan meningkat kembali pada Tahun 2023 dan 2024 menjadi 100%

2. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

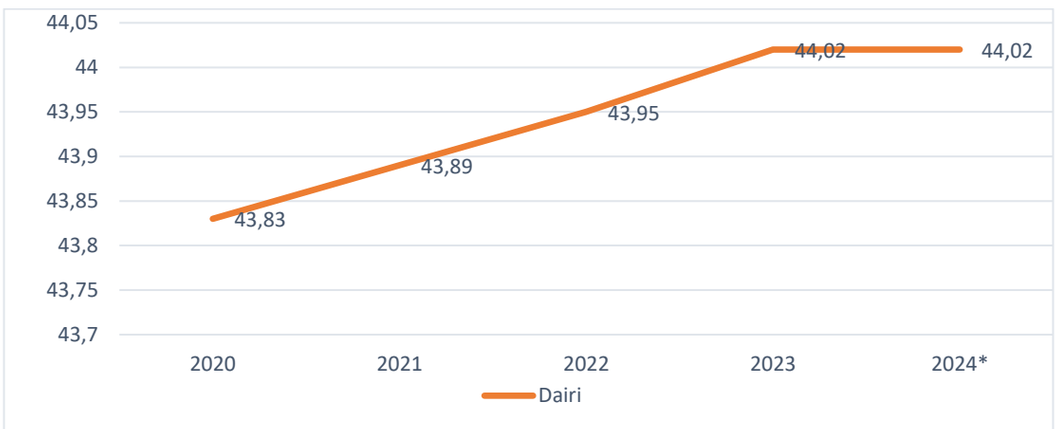
Gambar 2. 31 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.32 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020 -2024



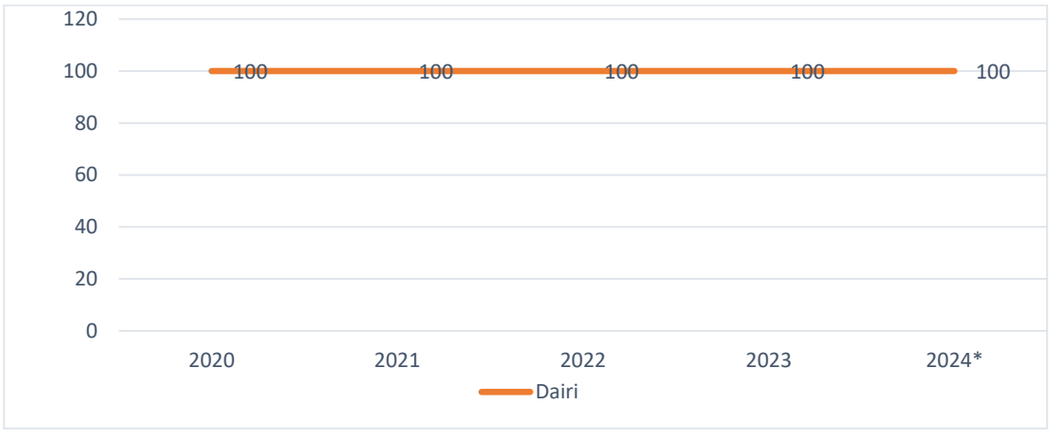
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 43,83%, Tahun 2021 sebesar 43,89%, Tahun 2022 sebesar 43,95% sedangkan Tahun 2023 dan 2024 adalah sama sebesar 44,02% .

4. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024adalah 100%.

Gambar 2. 33 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.2.5 Beragama dan Berkebudayaan Maju

A. Pembangunan Kebudayaaan

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset daerah. Sasaran urusan tersebut adalah:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
2. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
3. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

Indikator kebudayaan di Kabupaten Dairi dapat dilihat dari:

a. Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi
b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

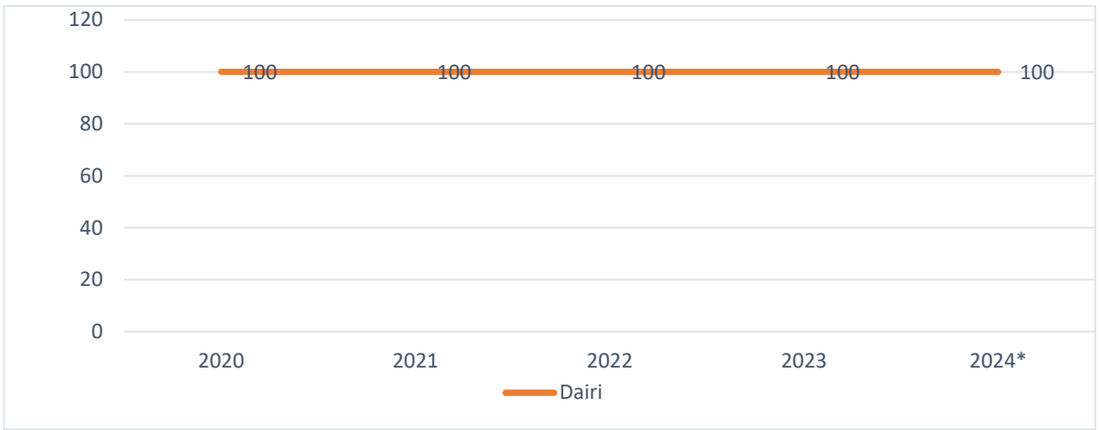
A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100%. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Tahun 2020-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.34 Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2024

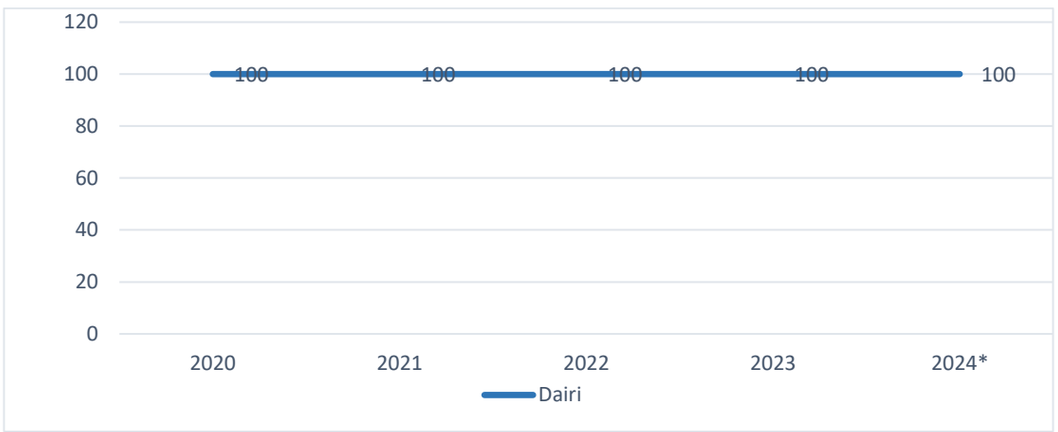


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100%.

Gambar 2.35 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum

tersedia namun sebgai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan public dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, indikator ini diharapkan apat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda serta dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar 56.33%, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 %. Capaian ini merupakan gambaran kemajuan dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Dairi, namun masih diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

1. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.25 Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Dairi, Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Organisasi Kepemudaan	47	47	47	47	47
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	16	16	16	16	16
3.	Prasarana Olahraga	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dimana ada sebanyak 47 organisasi kepemudaan sementara untuk jumlah organisasi olahraga berjumlah 16 organisasi dan sarana prasarana olahraga sebanyak 13 unit.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Proyeksi Ketergantungan di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2039 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Proyeksi Rasio Ketergantungan (persen) di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen)	
		2025	2029
Umur 0-14	29,41	28,22	28,04
Umur 15-64	64,93	64,81	64,22
Umur 65+	5,66	6,97	7,74
Rasio Ketergantungan	53,98	54,30	55,71

Sumber: Olah Data

Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang fluktuaksi namun cenderung menurun pada tahun 2029. Pada Tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 53,98 persen meningkat menjadi 55,71 pada Tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada Tahun 2029, penduduk usia produktif menanggung bebas 55-56 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh

penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 2.27 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.639,56
Pertambangan dan Penggalian	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
Industri Pengolahan	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
Pengadaan Listrik dan Gas	7,27	7,60	8,38	8,71	9,31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
Konstruksi	1.250,16	1.313,82	1.420,37	1.505,48	1,626,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
Transportasi dan Pergudangan	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
Informasi dan Komunikasi	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Keuangan dan Asuransi	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
Real Estat	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
Jasa Perusahaan	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33
Jasa Pendidikan	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
Jasa lainnya	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.317,91	9.710,80	10.716,94	11.651,15	12.693,88

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dimana besaran pada Tahun 2020 adalah Rp. 9.317.91 kemudian pada Tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 dan menjadi 10.716,94 pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11.651,15 dan tahun 2024 juga meningkat menjadi 12.693,88 Milyar Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 Milyar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.257,91 Milyar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 Milyar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 Milyar.

Tabel 2.28 Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Pertambangan dan Penggalian	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Industri Pengolahan	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Konstruksi	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.100,57	1.146,87	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Transportasi dan Pergudangan	247,11	244,55	264,18	290,35	304,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi dan Komunikasi	82,12	85,77	92,29	97,83	101,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Real Estat	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11
Jasa Perusahaan	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Jasa Pendidikan	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,89	400,38	42,12	44,82	46,47
Jasa lainnya	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.508,05	6.641,67	6.921,48	7.270,26	7.631,31

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.508,05, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 dan pada Tahun 2022 menjadi 6.921,48, kemudian pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan 7,270,26 dan Tahun 2024 kembali meningkat sebesar Rp. 7.631,31 Pada Tahun 2024 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.422,75 disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11, Konstruksi sebesar Rp. 938,80, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 661,94 dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 304,75.

Tabel 2.29 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
3	Industri Pengolahan	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Kontruksi	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
12	Real Estat	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
15	Jasa Pendidikan	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Distribusi persentase PDRB pada Tahun 2020-2024 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Tahun 2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36% disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,79%, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81%, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05%, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 %.

Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,05	1,99	4,51	4,69	4,29
2	Pertambangan & Penggalian	-2,78	2,95	2,64	3,67	6,19
3	Industri Pengolahan	-2,93	3,58	1,75	3,68	5,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,62	3,83	4,99	2,69	3,59
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2,19	0,92	1,16	2,77	2,73
6	Kontruksi	-4,98	2,18	0,88	5,05	5,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-0,68	4,21	6,67	5,96	6,24
8	Tranportasi dan Pergudangan	-3,69	-1,04	8,03	9,91	4,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,73	-0,45	5,82	8,14	3,16
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	4,44	7,60	6,01	3,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	3,44	2,79	4,33	3,76
12	Real Estat	1,89	0,43	3,41	2,57	4,35
13	Jasa Perusahaan	-0,88	-0,14	1,22	4,65	4,60
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	-0,51	-0,06	0,67	2,32	6,16
15	Jasa Pendidikan	0,72	3,82	5,13	6,47	5,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,18	-1,25	4,32	6,40	3,68
17	Jasa lainnya	-3,47	2,00	0,95	5,97	4,61
	PDRB	-0,94	2,05	4,21	5,04	4,97

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024.

Dari tabel 2.22 di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2020-2024 yang paling berkontribusi di Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,24% sektor disusul Pertambangan dan Galian sebesar 6,19% kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,16%, sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,96%, sektor Industri Pengolahan sebesar 5,86% dan sektor Konstruksi sebesar 5,61%.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. Di Kabupaten Dairi, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada Tahun 2020 Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total yaitu sebesar 42,71%, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan atas komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,87% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 43,47%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 44,30% dan pada Tahun 2024 kembali meningkat sebesar 44,36%.

Dari tiga sub lapangan pada lapangan usaha ini, sub lapangan pertanian yang lebih berkontribusi pada kategori ini. Lapangan usaha Pertanian menjadi kekuatan ekonomi utama Kabupaten Dairi, oleh karena itu, diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Mulai dari perhatian terhadap para petani yang generasi muda tidak lagi tertarik pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, alat-alat pertanian yang modern, pemberian edukasi terhadap petani, dan juga

penyaluran/distribusi hasil pertanian yang tidak lagi melalui para makelar pertanian. Hal ini sangat berguna karena lahan pertanian yang lambat laun akan semakin sempit, maka dibutuhkan teknologi yang lebih baik agar pertanian di Kabupaten Dairi dapat berdampak pada kenaikkan PDRB Kabupaten Dairi, karena dari lapangan usaha inilah pembentukkan PDRB tertinggi. Kementerian Perindustrian mendorong industri nasional mengembangkan hilirisasi produk pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di samping itu, melalui hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara khusus masyarakat Kabupaten Dairi.

Tabel 2.31 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.630,56
- ADHK 2010	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,05	1.99	4,51	4,69	4,29

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

2. Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2024 mencapai 8,08 milyar rupiah. Sumbangannya terhadap pembentukan PDRB total relatif kecil yaitu 0.06%, kontribusinya tidak banyak mengalami perubahan sejak Tahun 2020. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan nilai yang menurun. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memang tidak menjadi prioritas bagi Kabupaten Dairi, tetapi jika lapangan usaha ini mendapat perhatian lebih, maka dari lapangan usaha ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Dairi. Pemberian fasilitas izin yang lebih mudah dan pengelolaan hasil tambang dan galian juga dibutuhkan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usaha Pertambangan dan Penggalian. Akan lebih baik jika bahan tambang dan galian diekspor tidak dalam bentuk komoditas tetapi dalam bentuk akhir yang mendekati konsumen yang akan meningkatkan nilai tambah daerah.

Tabel 2.32 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
- ADHK 2010	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.07	0,07	0,07	0,07	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-2.78	2,95	2,64	3,67	6,19

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

3. Industri Pengolahan

Nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2024 mencapai 48,61 milyar rupiah. Kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi hanya sebesar 0,38 persen dan terus mengalami penurunan sejak Tahun 2022.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu menunjukkan nilai pluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 5,86%.

Tabel 2.33 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
- ADHK 2010	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-2.93	3,58	1,75	3,68	5,86

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Industri pengolahan ini banyak memberikan kesempatan kerja karena menyangkut usaha rumahan. Pada publikasi SE 2016 Kabupaten Dairi jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi ke empat setelah kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran, kategori I. Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, dan Kategori Jasa pendidikan, yakni sebesar 4.840 orang dari 1.436 jumlah usaha kategori industri pengolahan. Melihat jumlah tenaga kerja yang cukup banyak diserap oleh industri pengolahan serta bahan baku yang cukup memadai, maka kontribusi

PDRB kategori Industri Pengolahan ini cukup memprihatinkan, sekitar 1,75. Untuk menambah nilai tambah tidak cukup hanya mengandalkan APBD/APBN saja, tetapi diperlukan promosi yang baik untuk meningkatkan ketertarikan pada pihak swasta untuk mengembangkan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Dairi. Banyak bahan baku yang dapat diolah menjadi makanan jadi, misalnya, jeruk menjadi sirup, durian menjadi keripik durian, kopi instan, dll.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 dengan nilai tambah mencapai 9,31 milyar rupiah.

Tabel 2.34 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	7,27	7,60	8,38	8,71	9,31
- ADHK 2010	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0,08	0,08	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	3,62	3,83	4,99	2,69	3,59

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,59% yaitu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Nilai tambah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2024 sebesar 8,26 milyar rupiah. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di kabupaten dairi selama Tahun 2020-2024 relatif stabil yaitu berkisar pada angka

0,07%. Sementara itu, laju pertumbuhannya pada Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 0,07 %.

Tabel 2.35 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (milyar Rp)					
- ADHB	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
- ADHK 2010	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0.08	0,07	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	2,19	0,92	1,16	2,77	2,73

Smber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

6. Konstruksi

Kontribusi lapangan usaha konstruksi pada Tahun 2024 sebesar 12,81 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan sektor ini mengalami pluktuasi nilai sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Lapangan usaha ini juga memegang peranan yang cukup tinggi dalam pembentukan nilai tambah Kabupaten Dairi, porsinya selalu menduduki urutan ketiga dari lapangan usaha lainnya.

Tabel 2.36 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	1 250,16	1313,82	1.420,37	1.505,48	1.626,55
- ADHK 2010	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-4,98	2,18	0,88	5,05	5,61

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi pada Tahun 2020 mengalami mengalami penurunan signifikan sampai diangka -4,98 pada Tahun 2021 meningkat menjadi 2,18, di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 0,88. di Tahun 2023 meningkat menjadi 5,05, sedangkan pada Tahun 2024 tumbuh menjadi 5,61 persen.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang memegang peranan besar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Selama 4 tahun terakhir, lapangan usaha ini pada Tahun 2024 menyumbang sekitar 17,79 % dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi Tahun 2024 mencapai 2.257,91 milyar rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Tahun 2024 sebesar 1.377,11 milyar rupiah.

Tabel 2.37 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
- ADHK 2010	1 100,57	1.146,31	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,68	4,21	6,67	5,96	6,24

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub-lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Peranan lapangan usaha ini terhadap nilai tambah Kabupaten Dairi Tahun 2024 hanya 4,37 persen dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 554,22 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 304,75 milyar rupiah.

Kontribusi dan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
- ADHK 2010	247,11	244,55	264,18	290,35	304,75
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,69	-1,04	8,03	9,91	4,96

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2024, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi sebesar 2,56%. Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan 3,16% pada Tahun 2024.

Tabel 2.39 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2020 – 2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
- ADHK 2010	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,73	-0.45	5,82	8,14	3,16

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Tabel 2.40 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, Tahun 2020-2024

U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17
- ADHK 2010	82,12	85,77	92,92	97,83	101,19
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	7,15	4,44	7,60	6,01	3,43

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi selama Tahun 2020-2022 meningkat sampai 1,03%. Pada Tahun 2023 peranan lapangan usaha ini menurun menjadi 1,02%. Pada Tahun 2024 kontribusi lapangan usaha ini kembali menurun menjadi 0,99% sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 125,17 milyar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 101,19 milyar.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung fluktuatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 1,40%. Sedangkan Tahun 2021 laju pertumbuhannya naik menjadi 3,44% dan kembali mengalami penurunan 2,79 persen ditahun 2022 dari seluruh lapangan usaha, Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen dan Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,76% .

Peranan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terhadap keseluruhan PDRB hanya sekitar 2,06% pada Tahun 2024.

Tabel 2.41 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, Tahun 2020 - 2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
- ADHK 2010	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	1,40	3,44	2,79	4,33	3,76

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

12. Real Estat

Lapangan usaha real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Dairi dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Pada Tahun 2020, sumbangan lapangan usaha real estat sebesar 2,87 persen sedangkan pada Tahun 2024 berada di angka 2,74 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini pada Tahun 2024 mencapai 347,98 milyar rupiah berdasarkan harga berlaku dan 199,11 milyar rupiah berdasarkan harga konstan. Selama Tahun 2020-2024, laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 pertumbuhannya sebesar 1,89 persen dan menurun sampai Tahun 2021 dan meningkat dengan signifikan pada Tahun 2022. Laju pertumbuhan lapangan usaha real estat pada Tahun 2022 sebesar 3,41 persen, pada Tahun 2024 laju pertumbuhan lapangan usaha ini kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,35 persen.

Tabel 2.42 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat, Tahun 2020-2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
- ADHK 2010	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	1,89	0,43	3,41	2,57	4,35

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

13. Jasa Perusahaan

Nilai tambah nominal Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar 7,86 milyar rupiah. Nilai ini setara dengan 0,06 persen dari total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan lapangan usaha ini relatif kecil, dari Tahun 2020-2024 hanya berkisar 0,06 persen.

Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat krusial dengan nilai negative pada Tahun 2020 hanya bernilai -0,88 persen dan bernilai -0,14 pada Tahun 2021 dan kembali meningkat pada Tahun 2022 menjadi 1,22 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,65 persen Tahun 2024b kembali menurun menjadi 4,60 .

Tabel 2.43 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Tahun 2020-2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
- ADHK 2010	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,88	-0,14	1,22	4,65	4,60

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.44 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Tahun 2020 -2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33
- ADHK 2010	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,51	-0,06	0,67	2,32	6,16

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Lapangan usaha adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 peranan lapangan usaha ini mencapai 9,05 persen. Selama Tahun 2020-2024 peranannya relative stabil di kisaran 10 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selama Tahun 2020 bernilai positif meskipun mengalami fluktuasi pada Tahun 2020 dan 2021 dimana laju pertumbuhan lapangan usaha ini menjadi negative dengan nilai -0,51 persen dan -0,06 persen dan pada Tahun 2022 kembali bernilai positif sebesar 0,67 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 2,32 persen dan Tahun 2024 meningkat menjadi 6,16%.

15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2024 jasa pendidikan menyumbang sebesar 1,91 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi, dengan nilai tambah nominal sebesar 247,58 milyar rupiah. Peranan ini cenderung berfluktuasi. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,72 dan kembali meningkat menjadi 3,82 persen di Tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 5,13 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 6,47 persen dan Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,96 persen.

Tabel 2.45 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, Tahun 2020 - 2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
- ADHK 2010	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	0,72	3,82	5,13	6,47	5,96

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dapat meningkatkan multiplier effect atau efek ganda yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah dan akan menambah nilai tambah yang berasal dari Jasa Pendidikan. Sebagai contoh, jika Kabupaten Dairi memiliki sekolah yang bermutu nasional, seperti Sekolah Unggul Dell, SMA Negeri 1 Matauli dll, maka Kabupaten Dairi akan menjadi salah satu tujuan belajar utama masyarakat luar atau dalam kabupaten. Hal ini tidak hanya menambah nilai tambah dari sektor pendidikan saja, dari beberapa sektor juga akan meningkatkan nilai tambah Kabupaten Dairi, misalnya akan meningkatkan nilai tambah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan Usaha Real Estat.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Nilai PDRB ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sehingga pada Tahun 2024 mencapai 85,25 milyar rupiah, sedangkan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan nilai sebesar 46,47 milyar rupiah. Kontribusi lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kabupaten Dairi sebesar 0,67 persen dengan laju pertumbuhan mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 3,68 persen.

Tabel 2.46 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2020-2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
- ADHK 2010	40,89	40,38	42,12	44,82	46,47
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-2,18	-1,25	4,32	6,40	3,68

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

17. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Dairi relatif kecil, dan dari tahun ke tahun menunjukkan stagnan. Tahun 2024, peranannya sebesar 0,02 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 2,65 milyar rupiah. Dan laju pertumbuhan lapangan usaha jasa lainnya mengalami fluktuasi.

Tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan nilai 2,00 persen, pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,61 persen.

Tabel 2.47 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, Tahun 2020-2024

U r a i a n	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
- ADHB	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
- ADHK 2010	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,47	2,00	0,95	5,97	4,61

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja di Dairi adalah 237.560 orang, terdiri dari 199.085 orang angkatan kerja dan sisanya sebanyak 38.475 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Dairi Tahun 2024 adalah sebesar 83,80 persen, artinya bahwa pada Tahun 2024 sebanyak 83,80 persen penduduk usia kerja di Dairi siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengganggguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Dairi menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2021 TPAK Dairi 85,73 persen, kemudian turun menjadi 85,01 persen pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 turun menjadi 84,81 persen dan pada Tahun 2024 kembali turun menjadi 83,80%.

C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun data yang tersaji bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda setiap tahunnya namun kondisi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dairi relatif meningkat.

Tabel 2.48 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dairi, 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	63	18,52	46,90	25,04	43,98

Sumber : Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Data Diolah, 2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan, dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah. Keenam indikator tersebut digunakan untuk

melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di Kabupaten Dairi.

1. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/Negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	111,00	98,24	101,79	111.34	101,66
SMP	98,24	99,10	95,82	89,12	94,41

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata diatas 100%, dimana pada Tahun 2020 sebesar 111,00, pada Tahun 2021 sebesar 98,24 dan pada Tahun 2022 sebesar 101,79, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 111,34% dan Tahun 2024 menurun menjadi 101,66%. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2020 sebesar 98,24 dan pada Tahun 2021 sebesar 99,10%, pada Tahun 2022 sebesar 95,82, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,12 % dan Tahun 2024 kembali naik menjadi 94,41%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah

terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.50 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99,19	89,40	93,78	99,28	98,95
SMP	90,21	90,18	87,70	77,47	78,14

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2020 sebesar 99,19 pada Tahun 2021 turun menjadi 89,40 dan meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 93,78 dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,28. Tahun 2024 menurun menjadi 98,95. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2020 sebesar 90,21, pada tahun 2021 menurun menjadi 90,18 dan pada Tahun 2022 menurun kembali menjadi 87,70 dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,47. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 78,14.

3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	0,55	0,57	0,05	0,02	0,11
SMP	0,93	0,94	0,03	0,03	0,05

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024.

Angka Putus Sekolah SD pada Tahun 2020 sebesar 0,55 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,57 dan Tahun 2022 sebesar 0,05, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,02 dan meningkat menjadi 0,11 pada Tahun 2024. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2020 sebesar 0,93 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,94 dan pada Tahun 2022

sebesar 0,03 dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,03 dan meningkat menjadi 0,05 pada Tahun 2024.

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2020-2024 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024*
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD ke SMP	124,27	91,49	99,81	99,81	98,82
SMP ke SMA	89,85	97,03	96,59	96,59	105,37

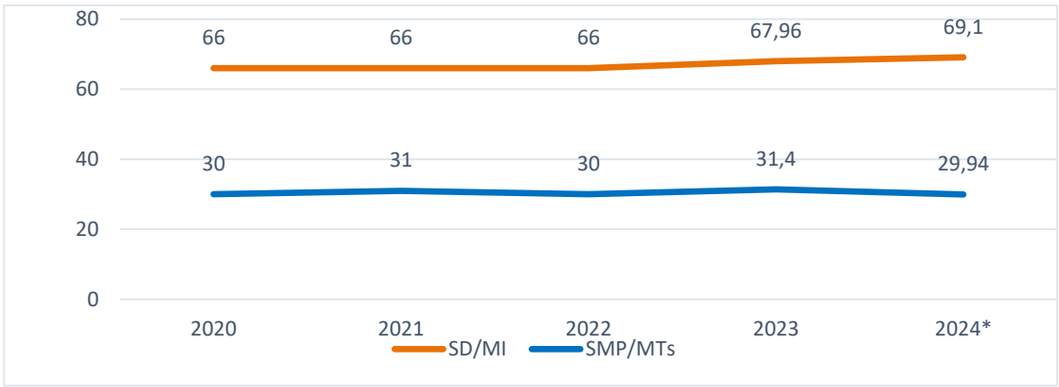
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada, Tahun 2020 sebesar 124,27, Tahun 2021 sebesar 91,49 dan menjadi 99,81 pada Tahun 2022, Tahun 2023 99,81 dan pada tahun 2024 sebesar 98,82.. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2020 sebesar 89,85, pada Tahun 2021 menjadi 97,03 dan pada Tahun 2022 sebesar 96,59 , Tahun 2023 sebesar 96,59 dan pada tahun 2024 menjadi 105,37.

6. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tahun 2024 untuk SD/MI adalah 69,10 dan SMP/MTs adalah 29,94.

Gambar 2.36 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)

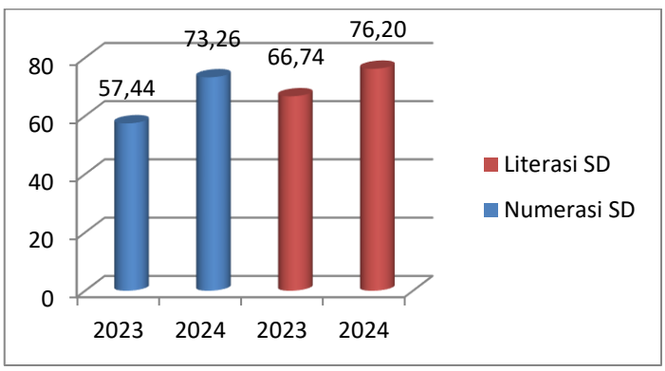


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

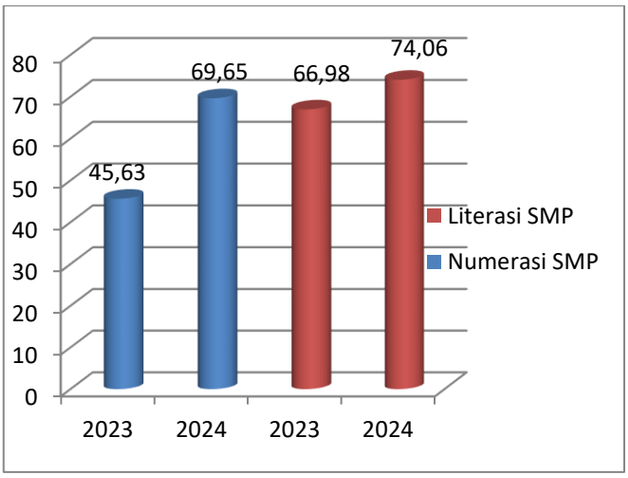
7. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi peserta didik di Kabupaten Dairi masih kurang dan masih harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan tersebut. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi kurang dapat berkembang. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan literasi dan Numerasi Tibgkat SD dan SMP.

Gambar 2.37 Literasi dan Numerasi SD



Gambar 2.38 Literasi dan Numerasi SMP



B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.39 Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



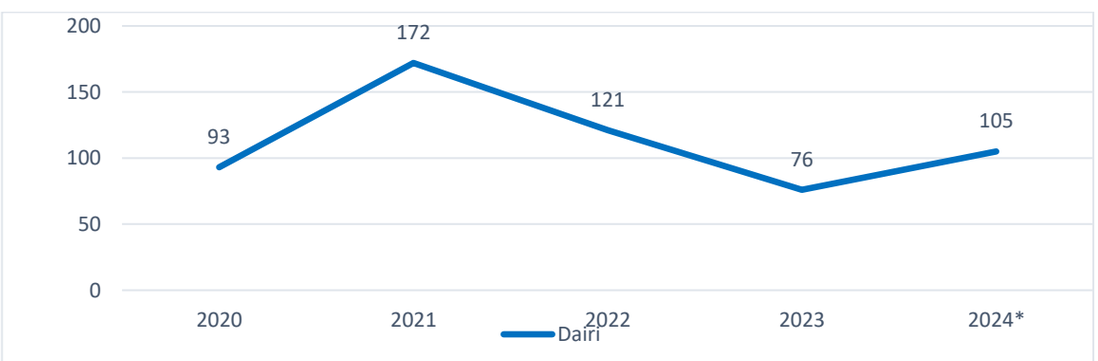
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

2. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.40 Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



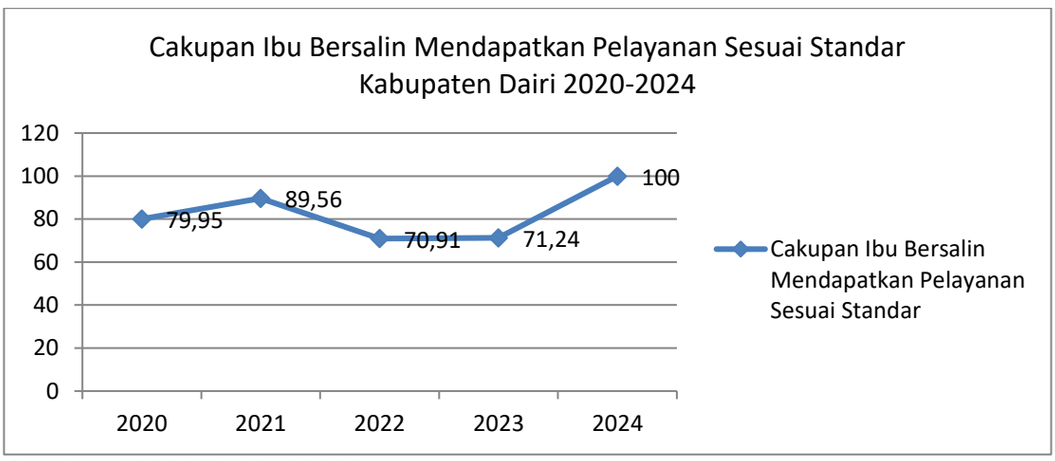
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, dan Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 105 per 100.000. Dengan demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (Antenatal Care), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (Postnatal Care).

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.41 Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



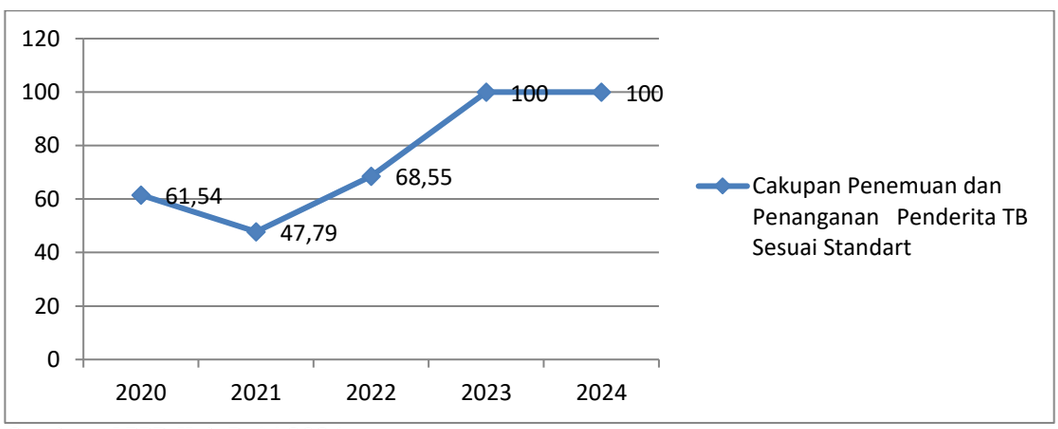
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

4. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jika dilihat dari tabel dibawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen,menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

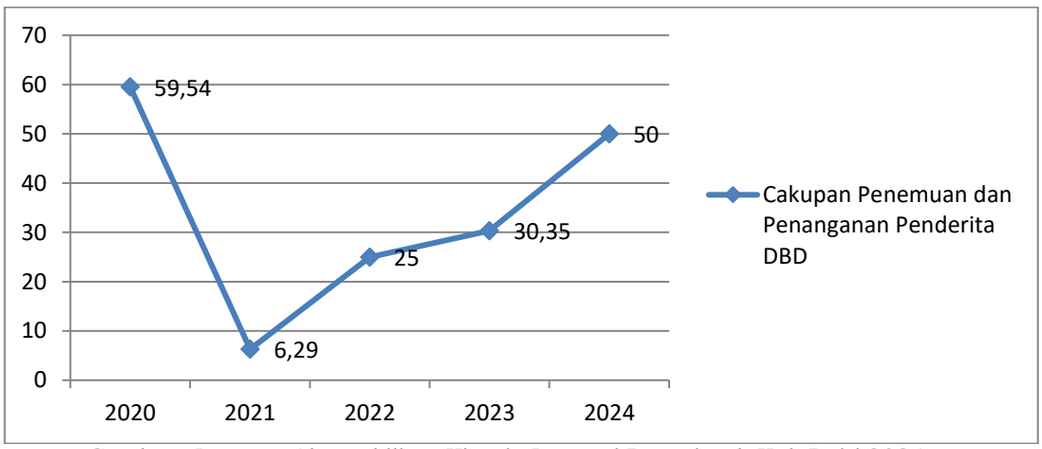


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.43 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

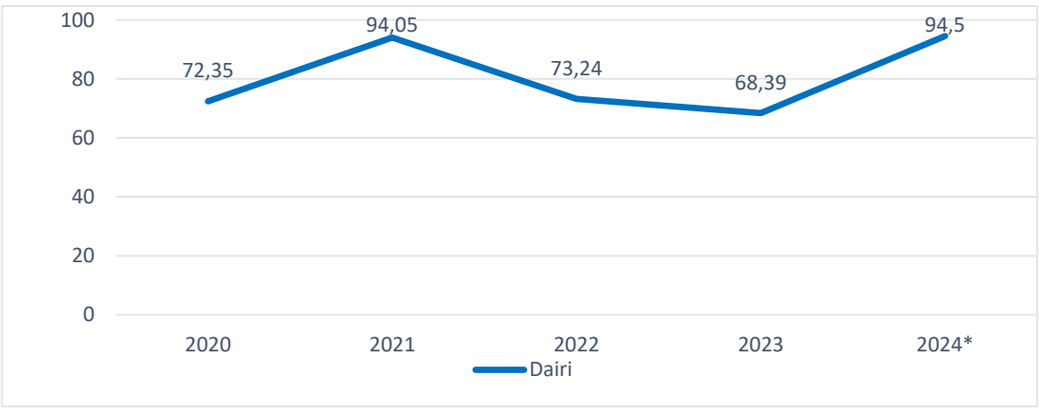


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024.

6. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.44 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



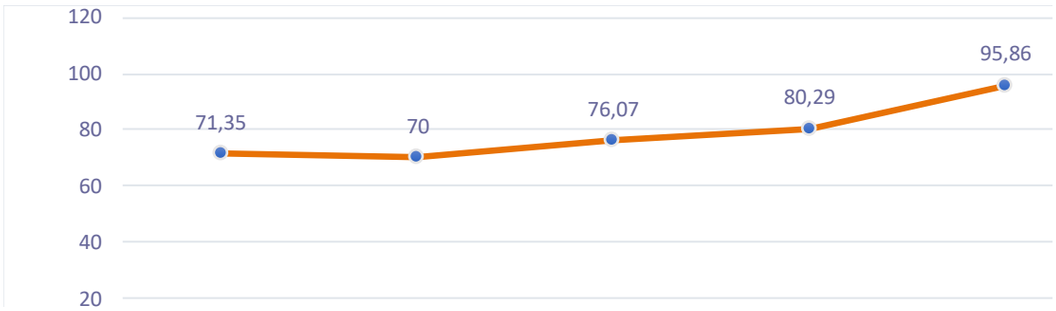
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel diatas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, pada Tahun 2021 sebesar 94,05 persen dan pada Tahun 2022 mencapai angka 73,24 persen dan pada Tahun 2023 adalah 68,39 persen, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 94,5 persen.

7. Cakupan Pelayan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada Tahun 2019 sebesar 71%, sebesar 71,35% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00%, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07% dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29% dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 95,86%.

Gambar 2.45 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



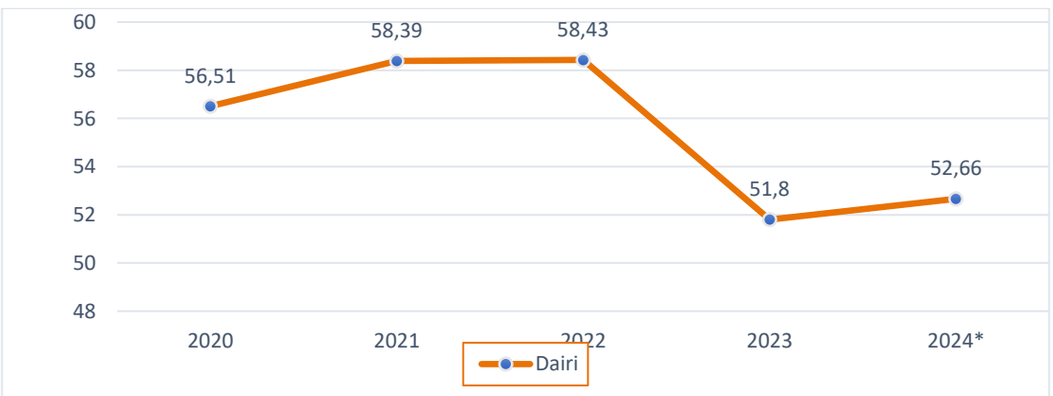
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.46 Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi *Tahun 2020-2024*

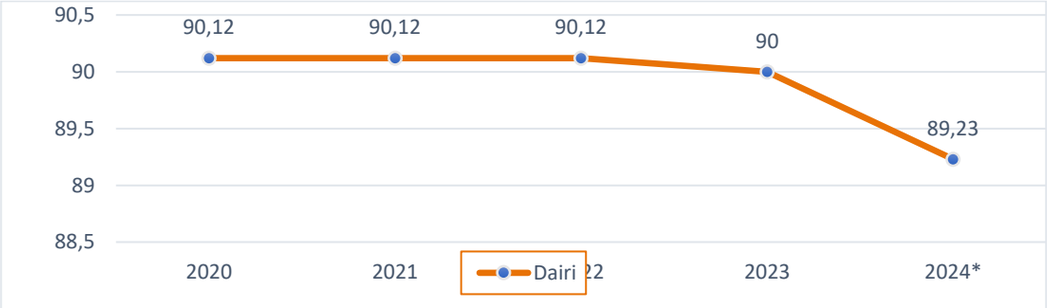


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi mantap pada Tahun 2020 sebesar 56,51 %, pada Tahun 2021 sebesar 58,39 % dan pada Tahun 2022 menjadi 58,43%, jalan kondisi baik pada Tahun

2023, sebesar 51,80%, dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 52,66%.

Gambar 2.47 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



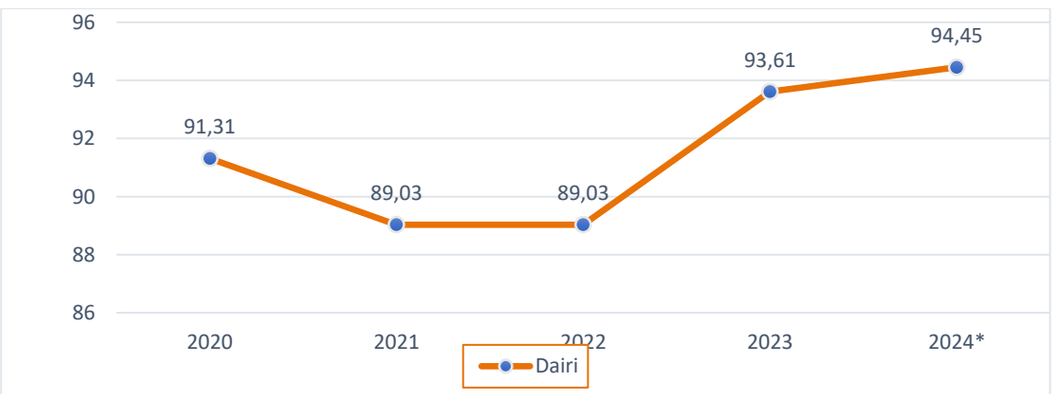
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2020 sebesar 90,12%, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebesar 90,12%. Pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 90 dan 89,23 persen.

2. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.48 Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 adalah 91,37% dengan luasan 10.211 Ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03% dengan luasan 9.949 Ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41%, dengan luasan 9.992 Ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61% dengan luasan sebesar 10.461 Ha. Pada Tahun 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 94,45% dengan luasan 10.554 Ha.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

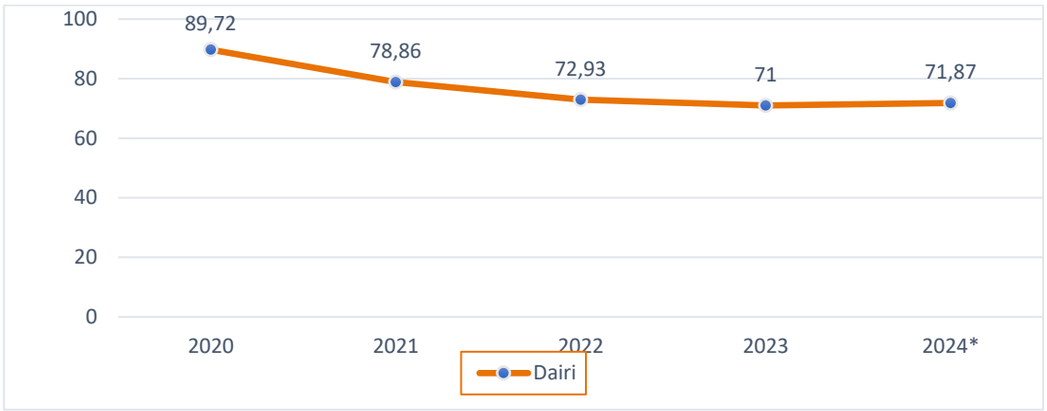
Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

3. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dana aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2.49 Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2020-2024

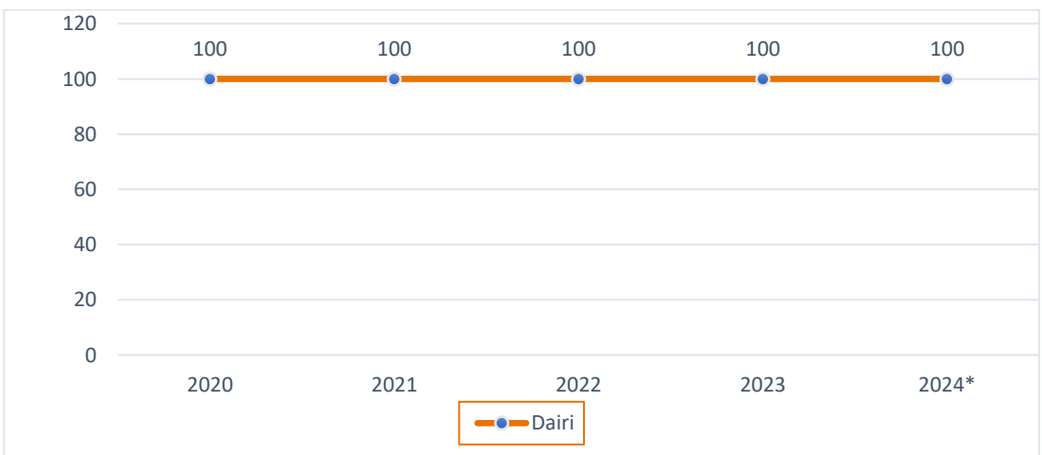


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau sebesar 72,93%, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00%. Pada Tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87%.

4. Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2.50 Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

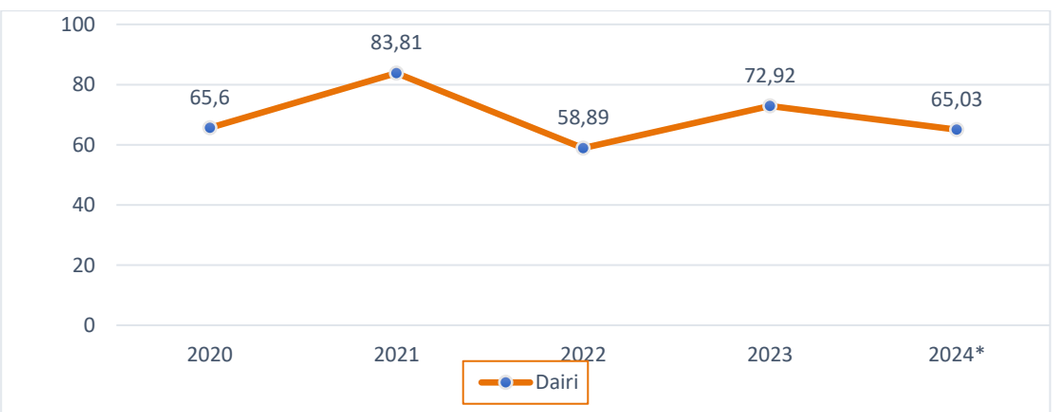
Dari gambar diatas dapat dijelasakan bahwa capaian terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB dari Tahun 2020-2024 tercapai 100%.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.51 Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU Tahun 2020-2024



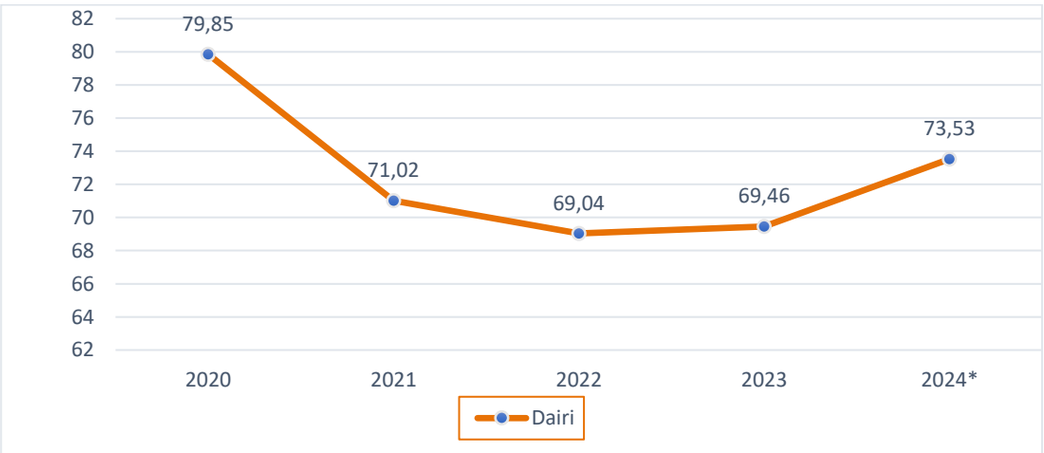
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2020 sebesar 65,6%, sebesar 83,81% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89%. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92% sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 65,03%.

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersedian Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2.52 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

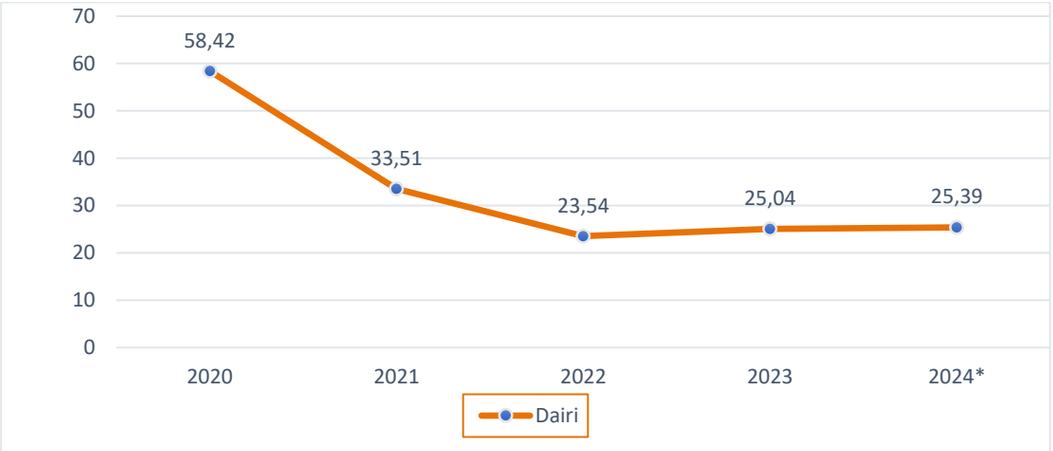
Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar 79,85% dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02% dan sebesar 69,04% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 % dan Tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,53%.

3. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar dibawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97%, sebesar 58,42% pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51%. Pada

Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 Ha atau sebesar 23,54% dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 Ha dari total kawasan kumuh 684,41 Ha atau sebesar 25,04%.

Gambar 2.53 Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

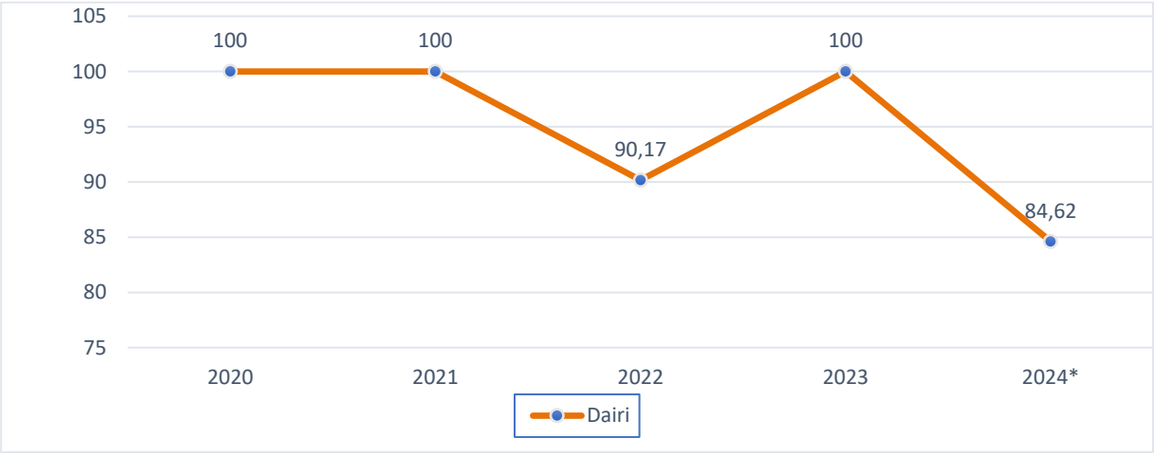
Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Tahun 2017 sesui dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri fungsi Linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, akan tetapi regulasi pengalihan Linmas dari Kesbangpol Kabupaten Dairi belum ada sehingga pelaksanaan kegiatan kelinmasan tidak berjalan optimal.

2. Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 100%, pada Tahun 2021 sebesar 100% dan sebesar 90,17% pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 sebesar 100% dan Tahun 2024 sebesar 84,62%. Belum optimalnya penanganan pelanggaran peraturan di Kabupaten Dairi disebabkan oleh beberapa hal antara

lain: rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda dan belum optimalnya kapasitas penegak Perda yaitu anggota Satpol-PP.

Gambar 2.54 Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

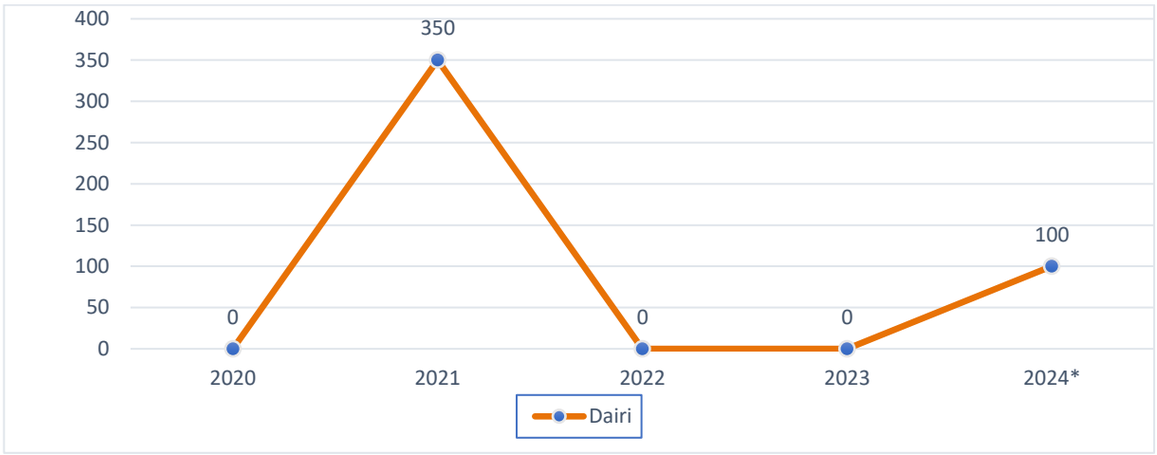
3. Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik

Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik, diwakili oleh jumlah parpol yang mengikuti program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Terdapat 15 Partai Politik di Kabupaten Dairi yang dilakukan pembinaan.

4. Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah tokoh agama/adat/masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, pada Tahun 2021 sebanyak 350 orang, sementara pada Tahun 2020, Tahun 2022 dan Tahun 2023 kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan tidak dilaksanakan. Pada Tahun 2024 kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dilaksanakan terhadap 100 orang peserta.

Gambar 2.55 Jumlah Tokoh Agama/Adat/Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

F. Sosial

Untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG's) pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, no poverty, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, zero hunger, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (supply side), penjangkauan oleh

masyarakat miskin (demand side), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (supply side), baik dari sisikuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupuninstitusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota: Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

1. Persentase Tingkat Kemiskinan

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 persentase kemiskinan berada di kisaran sebesar 8,04% dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 8,31% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan ke angka 7,88%, pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 7,47%. Dan Tahun 2024 menurun menjadi 7,10.

Gambar 2.56 Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024



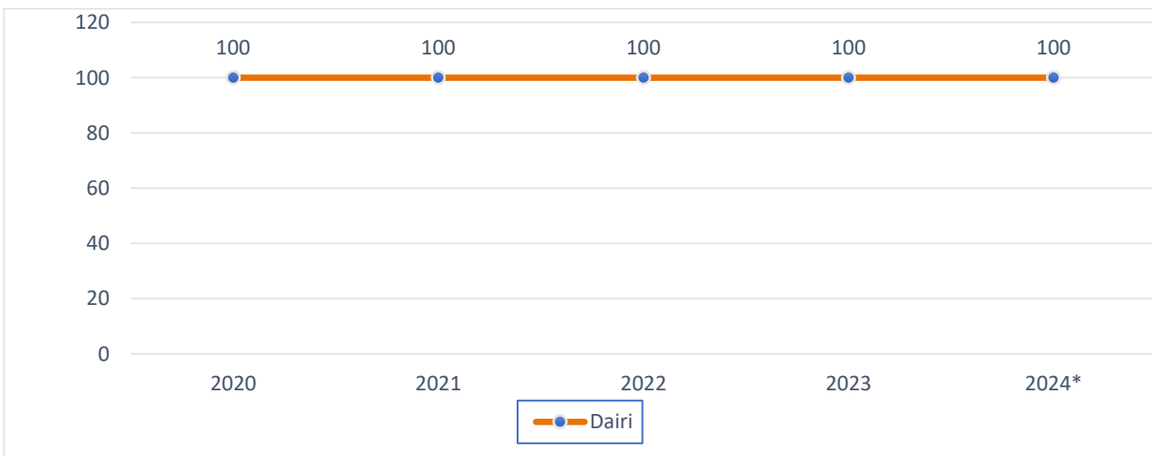
Sumber : BPS, Daairi Dalam Angka 2025

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 data tidak tersedia.

2 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024adalah 100%.

Gambar 2.57 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

A. Tenaga Kerja

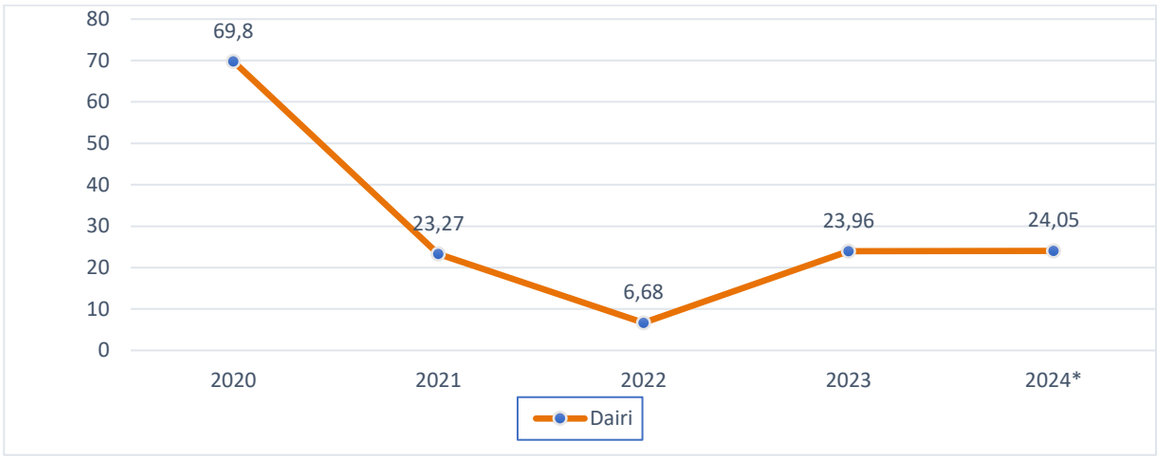
Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada Tahun pada Tahun 2020 69,80%, pada Tahun 2021 23,27% dan pada Tahun 2022 menjadi 6,68%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 23,96%. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 24,05 Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.58 Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

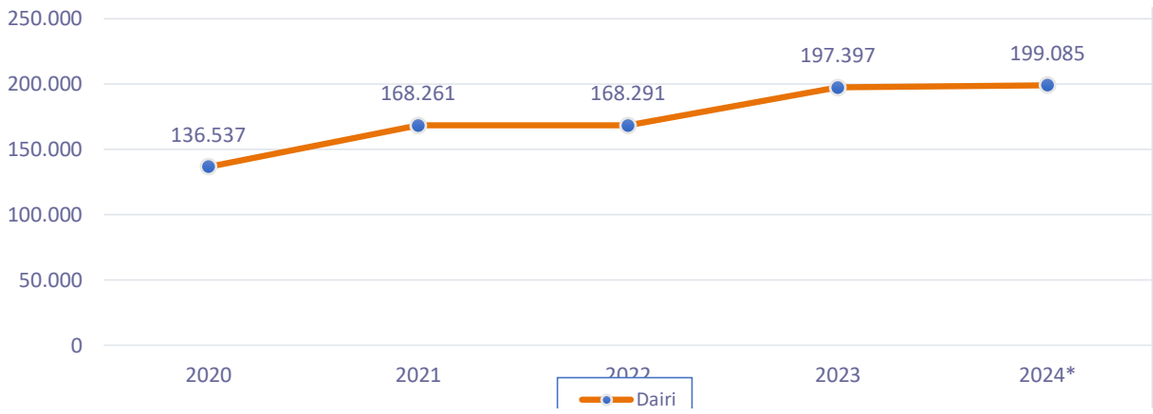


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 136.537 orang, pada Tahun 2021 menjadi 168.261 orang, pada Tahun 2022 menjadi 168.291 orang, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197.395. Pada Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 199.085 Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

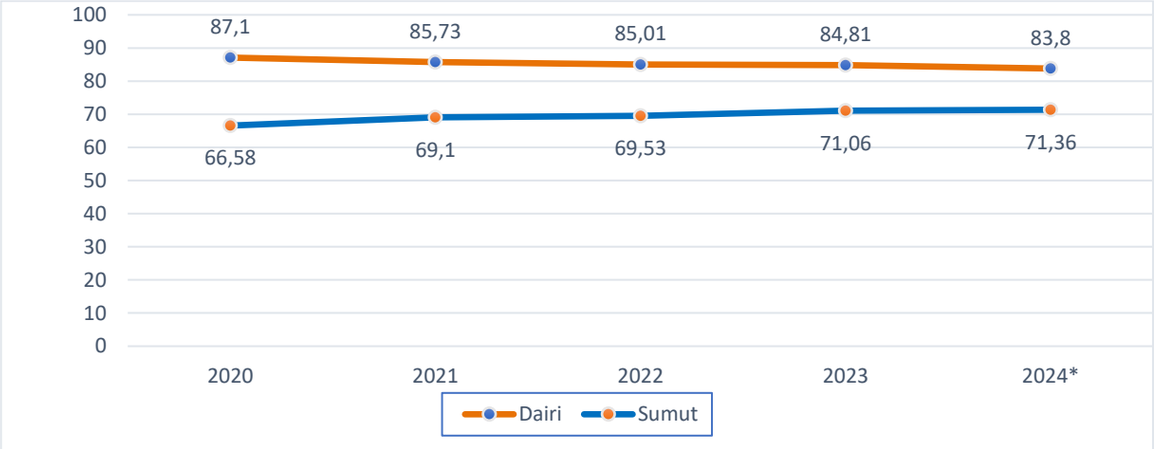
Gambar 2.59 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.60 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2025.

Dari gambar di atas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020 TPAK Kabupaten Dairi sebesar 87,01% dan Sumatera Utara sebesar 66,58% dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 85,73% sedangkan Sumatera Utara juga mengalami peningkatan menjadi 69,10%, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke angka 82,01% dan Sumatera Utara di angka 69,53% dan pada Tahun 2023 juga mengalami penurunan ke angka 84,81% sedangkan Sumatera Utara di angka 71,06%, pada Tahun 2024 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Dairi menurun menjadi 83,80 sedangkan Sumatera Utara di angka 71,36.

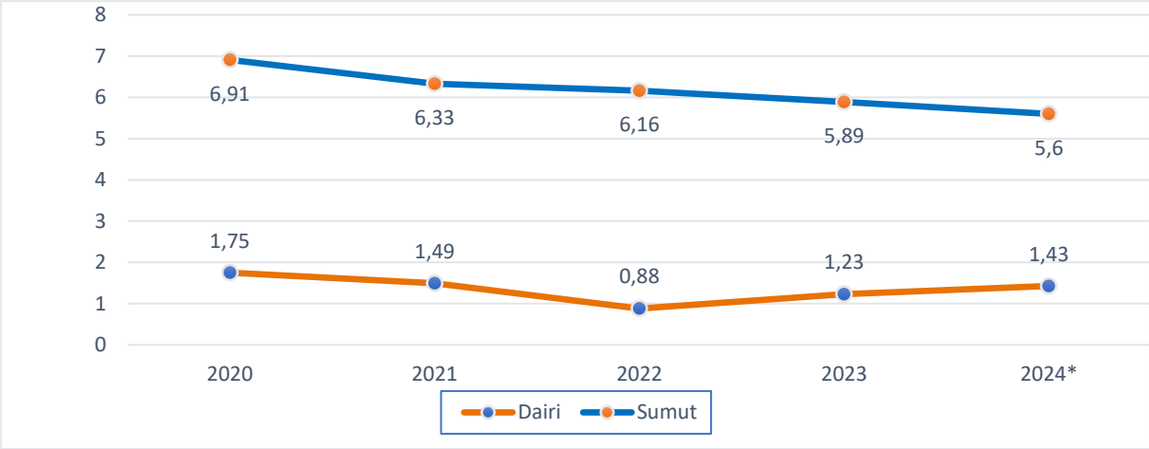
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dairi secara keseluruhan masih diatas Provinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,75% pada Tahun 2020 sedangkan Sumatera Utara dengan nilai 6,91 pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,49% dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88% dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16% pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23% sedangkan Provinsi 5,89%. Pada Tahun 2024 TPT di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43 sedangkan Provinsi

Sumatera Utara menurun menjadi 5,60. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Dairi lebih baik dari TPT Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

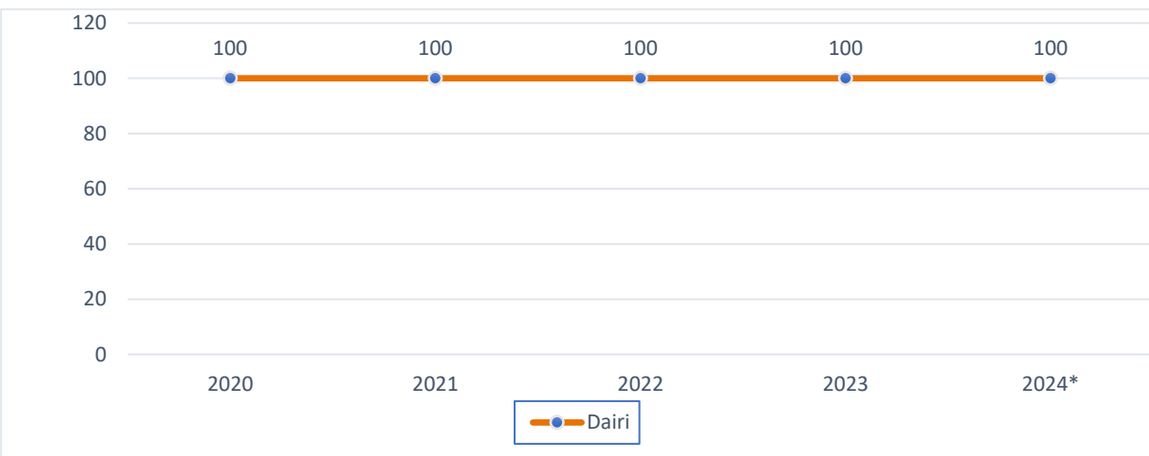
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelengggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100%.

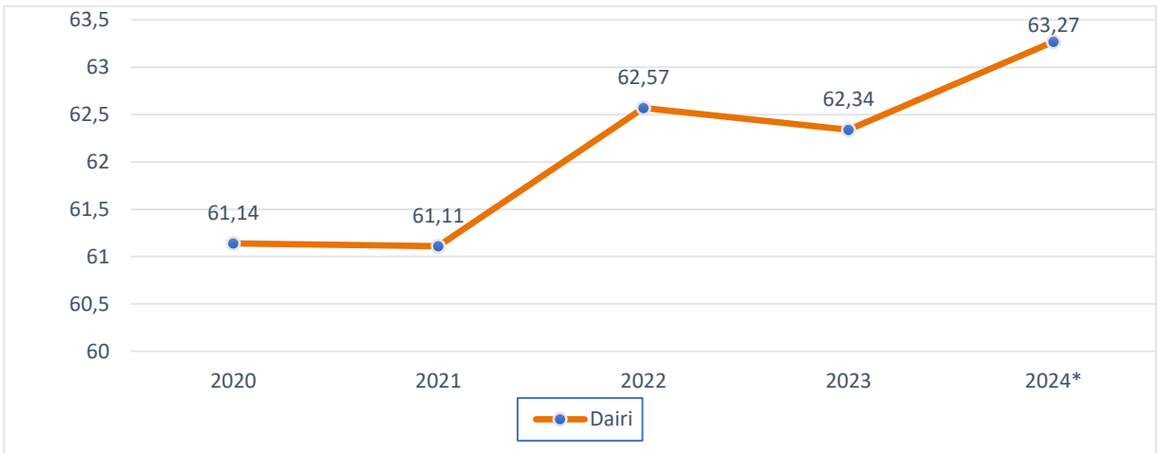
Gambar 2.62 Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 63 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

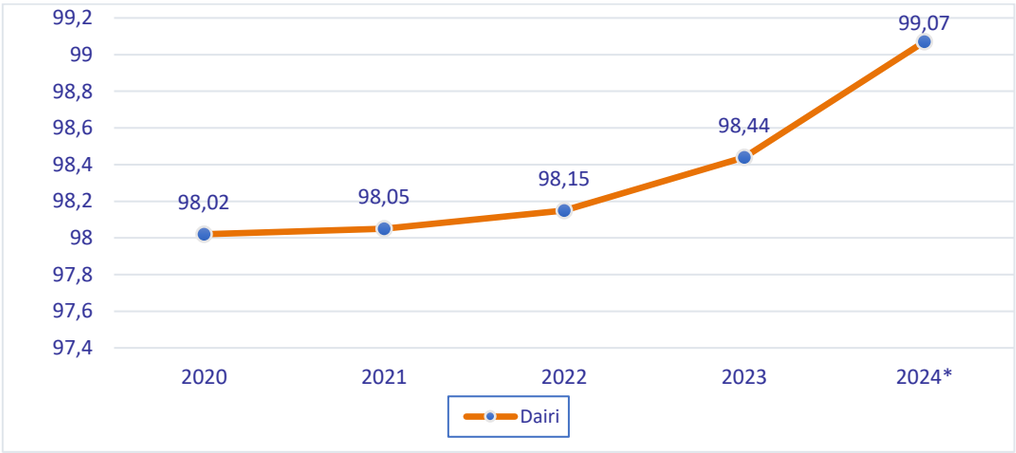
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu,

dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 64 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

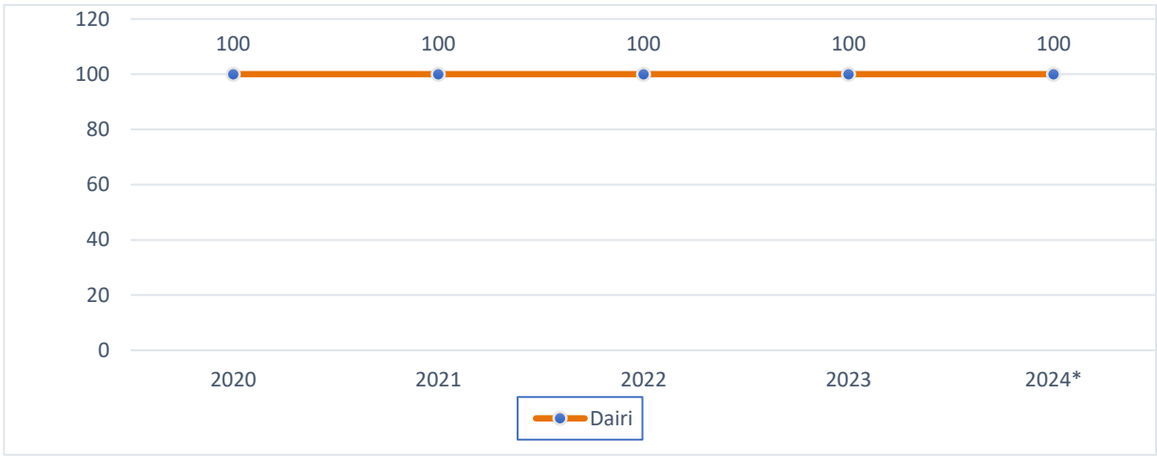


Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

3. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100%.

Gambar 2.65 Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data Tahun 2022 tidak tersedia, sedangkan pada Tahun 2024 ketersediaan Energi per kapita sebesar 93,16% dan jumlah ketersediaan protein per kapita adalah sebesar 97,34%.

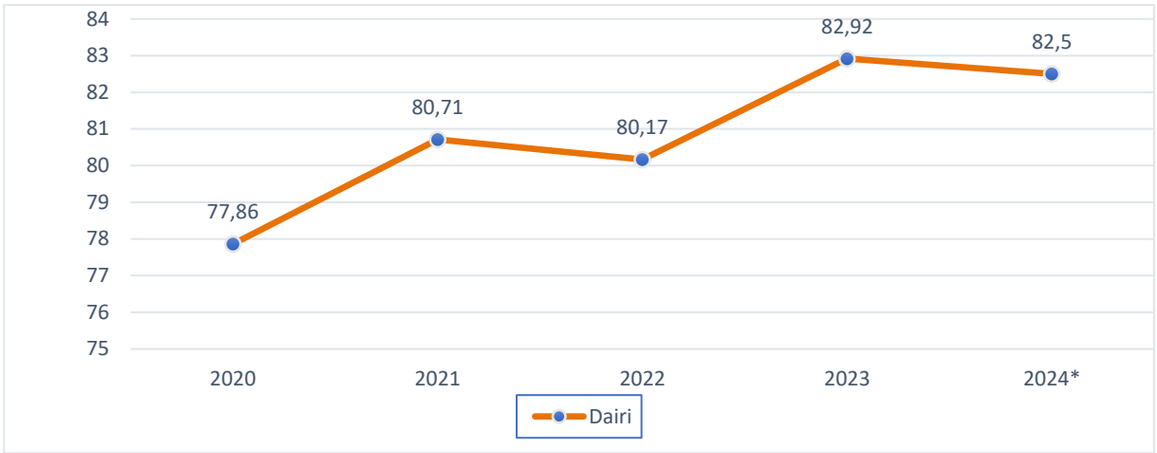
Tabel 2.54 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024**
Energi Per Kapita (%)	100,63	64,47	n/a	92,32	93,16
Protein Per Kapita (%)	95,63	71,04	n/a	97,00	97,34

Sumber : RPD Kab.Dairi 2025-2026

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisa dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah. Indeks ketahanan pangan merupakan ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan.

Gambar 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi
Tahun 2020-2024



Sumber: Badang Pangan Nasional, 2025

D. Pertanahan

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2020-2024

Tahun	HakMilik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Jumlah
2020	158	132	133	423
2021	3.291	11	45	3.347
2022	194	7	181	382
2023	2.156	9	132	2.297
2024	2.411	64	39	2.514

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 terbesar merupakan hak milik. Pada Tahun 2023 status kepemilikan dengan status hak milik sebanyak 2.411, hak guna bangunan 64, hak pakai sebanyak 39 dan jumlahnya 2.514.

E. Lingkungan Hidup

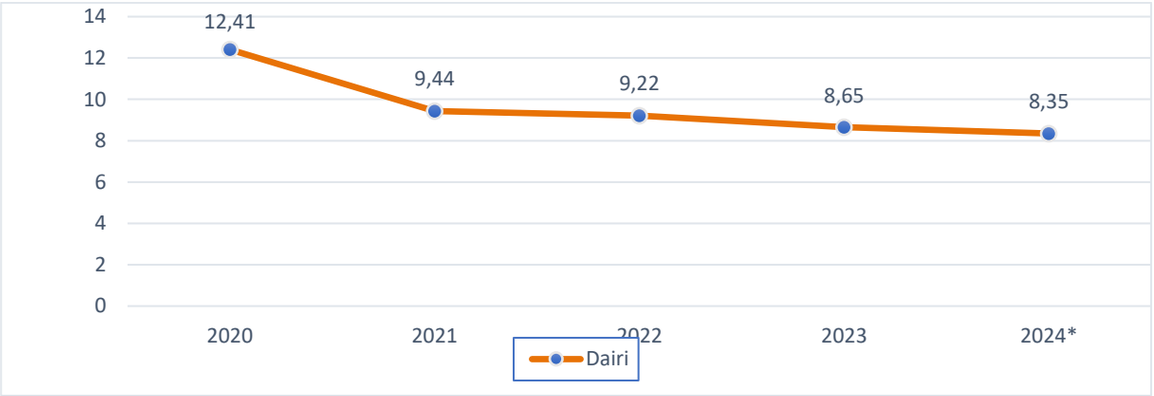
Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Dairi, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang komplek, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor,

baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2.67 Penurunan Lahan Kritis Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Persampahan

Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri, kedua adalah dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

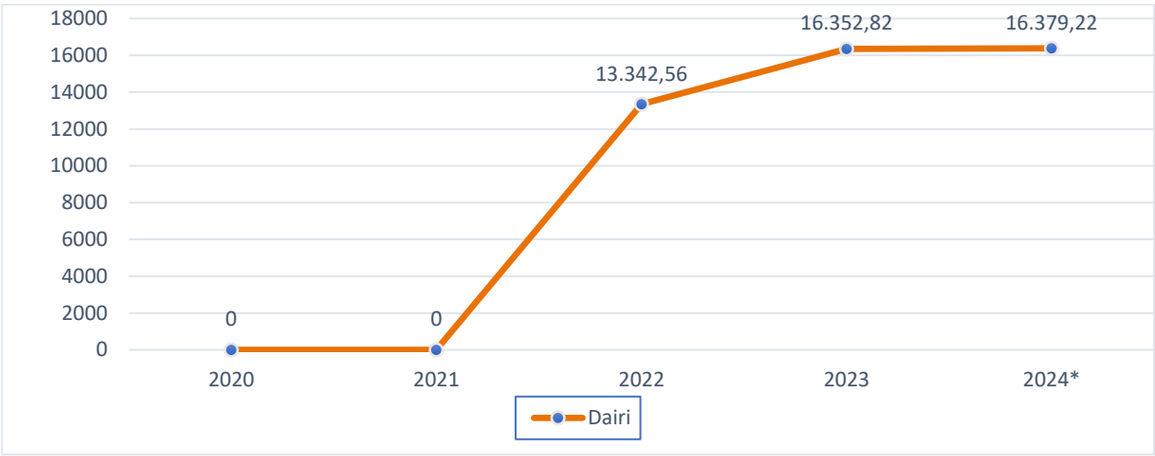
Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pelayanan persampahan di kota-kota dan IKK di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada. Untuk Tahun 2022 jumlah sampah yang berhasil ditangani adalah sebanyak 13.342,56 Ton dari total 46.541,88 Ton timbunan sampah kabupaten atau sebesar 28,67% dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan penanganan sampah yaitu sebanyak 16.352,82 Ton sampah atau sebesar 34,34%.

Pada tahun 2024 total sampah yang ditangani adalah sebanyak 16.379,22 Ton dari jumlah sampah yang ada sebanyak 48,666,91 atau sekitar 33,66%.

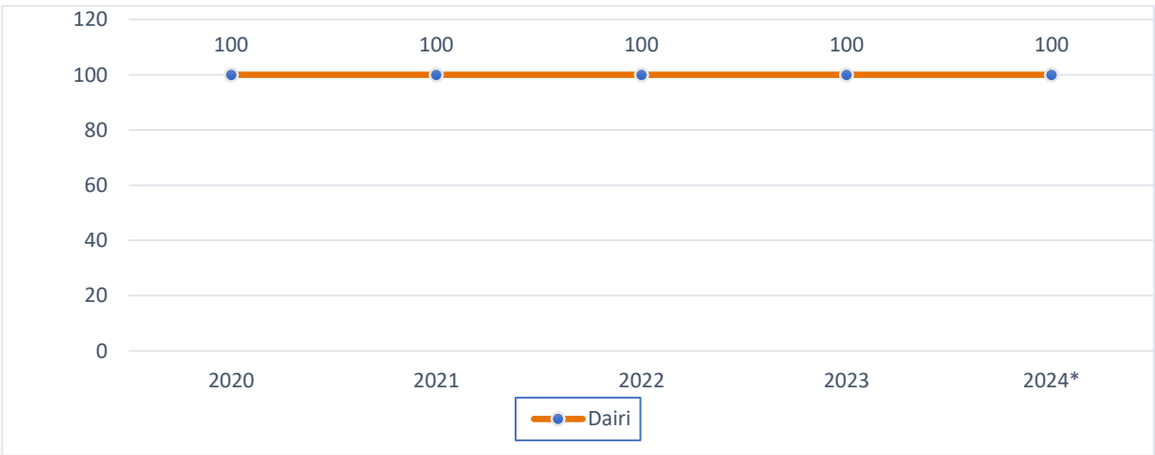
Gambar 2.68 Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Gambar 2.69 Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2020–2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 204

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah 100%.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup diantaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk

mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.56 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	98,02	98,88	61,82	98,02	94,30
Indeks Kualitas Air	55,36	70,00	66,21	67,70	69,50
Indeks Tutupan lahan	42,45	79,65	79,48	79,48	62,01
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**63,05**	**83,81**	**70,20**	**78,96**	**77,90**

Sumber: LPPD Kab.Dairi 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mencatat bahwa IKLH Kabupaten Dairi memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian IKLH pada tahun 2024 adalah 77,90. Kriteria capaian IKLH Kabupaten Dairi tergolong sedang, kemudian naik menjadi kategori baik, diangka 83,81 pada tahun 2021. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kabupaten Dairi juga memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian indeks kualitas air masih pada kategori baik pada tahun 2021, dan berkategori sedang pada tahun 2022. kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat indeks kualitas air di Kabupaten Dairi. UntukTahun 2023 dan 2024 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dairi mengalami peningkatan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai paling rendah jika dibandingkan dengan indikator lainnya pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian IKTL hanya pada tahun 2020 memiliki kategori kurang yaitu 42,45, karena memiliki nilai kurang dari 50. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan lindung dan belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian

IKTL di Kabupaten Dairi, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2024. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian dari IKTL yang sudah berkategori baik, namun masih dalam ambang batas bawah dari kategori tersebut.

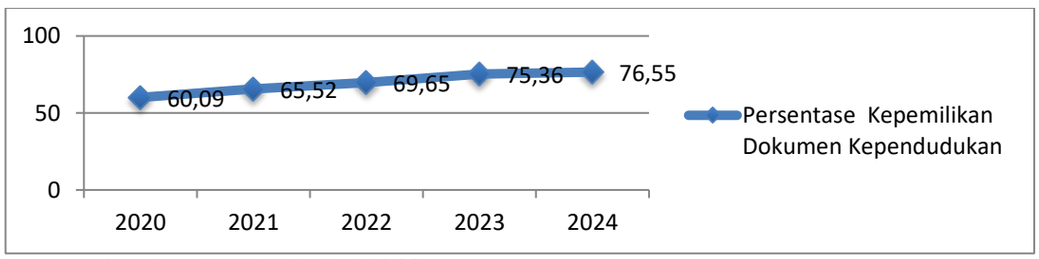
Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020 Indeks kualitas udara sebesar 98,02 semakin baik dibandingkan tahun 2019, dimungkinkan karena pengawasan dan pembinaan terus menerus dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi udara. Di sisi lain, capian IKU kembali menurun pada tahun 2022, dan berganti status menjadi kategori baik pada angka 61,82. Dengan demikian, upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Dairi perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada Tahun 2023 dan 2024 IKU Kabupaten Dairi kembali meningkat diangka 96,52 dan 94,30.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 60,09%, pada Tahun 2021 sebesar 64,75%, pada Tahun 2022 sebesar 69,65%, pada Tahun 2023 sebesar 75,68% dan pada Tahun 2024 sebesar 76,55%

Gambar 2.70 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2020–2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

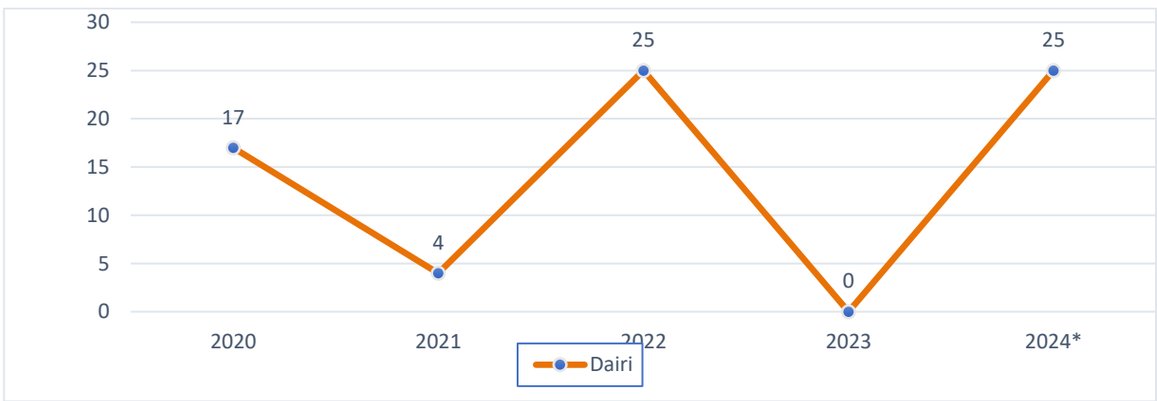
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

1. Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar di bawah ini dapat dijelasakan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Tahun 2020 sebanyak 17 desa, pada Tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa. Tahun 2023 tidak didapati data tentang fasiltasi dan pembentukan BUM Desa. Tahun 2024 terdapat 25 BUM Desa yang ditargetkan terfasilitasi dan terbentuk.

Gambar 2.71 Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2020 – 2024.



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat

diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

4. LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

5. Desa mandiri

Desa Mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat beberapa pilar utama yang menopang konsep desa mandiri, di antaranya:

a. Kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan menciptakan lapangan kerja.

b. Ketahanan sosial yang terwujud dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan gotong royong.
c. Kemandirian pangan dan energi yang memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka.
d. Lingkungan hidup yang lestari sebagai penopang kehidupan dan sumber daya bagi masyarakat desa.
e. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan, memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa mendorong terwujudnya desa mandiri demi mewujudkn ekonomi kerakyatan, dimana desa mandiri memiliki kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi berkelanjutan.

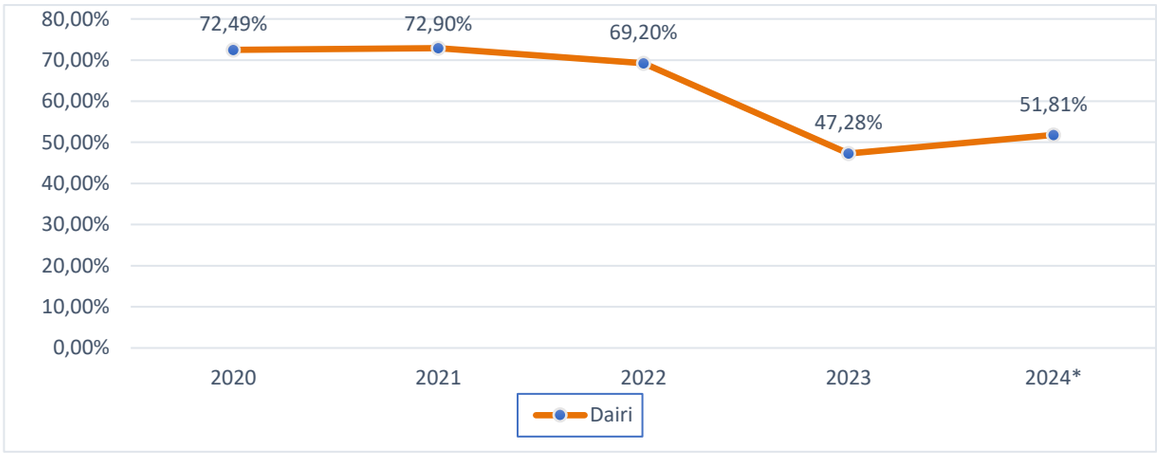
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelengaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

1. Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat cakupan pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif di Kabupaten Dairi sebesar 72,49% pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 72,90% dan pada Tahun 2022 menjadi 69,20% dan pada Tahun 2023 jumlahnya menjadi 47,28%. Sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 51,81%.

Gambar 2.72 Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2020–2024

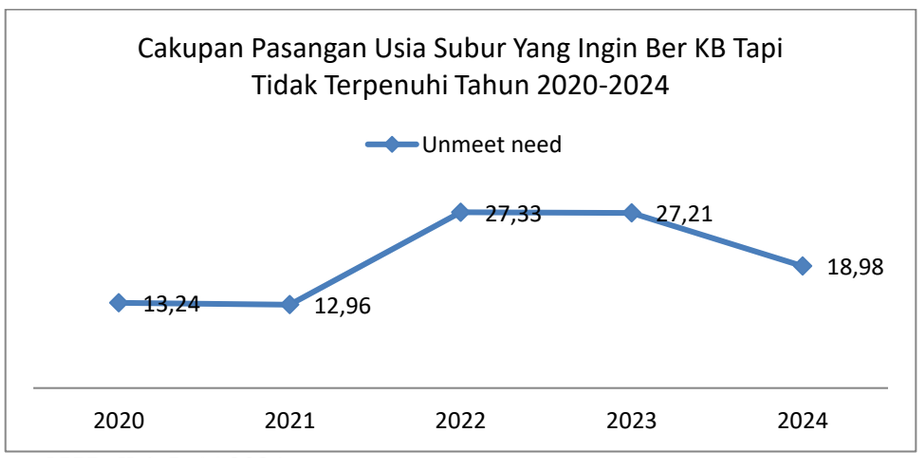


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB Tapi Tidak Terpenuhi

Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 sebesar 37,83%, pada Tahun 2021 sebesar 37,04% dan pada Tahun 2022 sebesar 47,27%, dan pada Tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi sebesar 27,21%. Kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 18,98%. Hal ini terutama disebabkan oleh makin makin lengkapnya sarana dan fasilitas KB dan masifnya sosialisasi pentingnya KB.

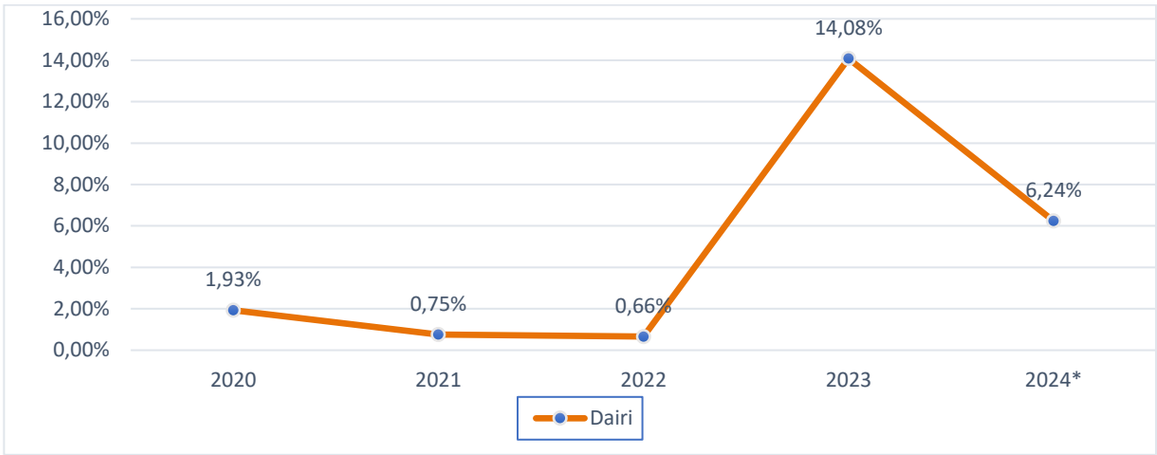
Gambar 2.73 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Gambar 2.74 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada Tahun 2020 – 2024



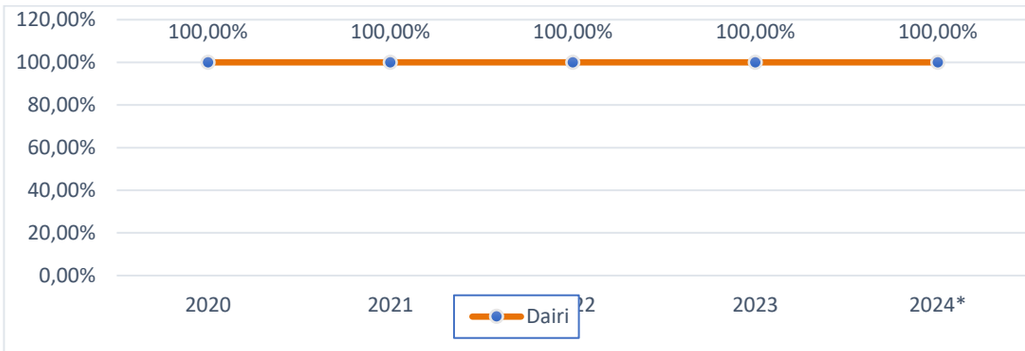
Sumber : LPPD Kab Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 1,93%, dan pada Tahun 2021 sebesar 0,75% dan pada Tahun 2022 sebesar 0,66%, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 14,08%. Akan tetapi pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 6,24%

4. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan cakupan penyediaan data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024sebesar 100%.

Gambar 2.75 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2020 – 20224



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

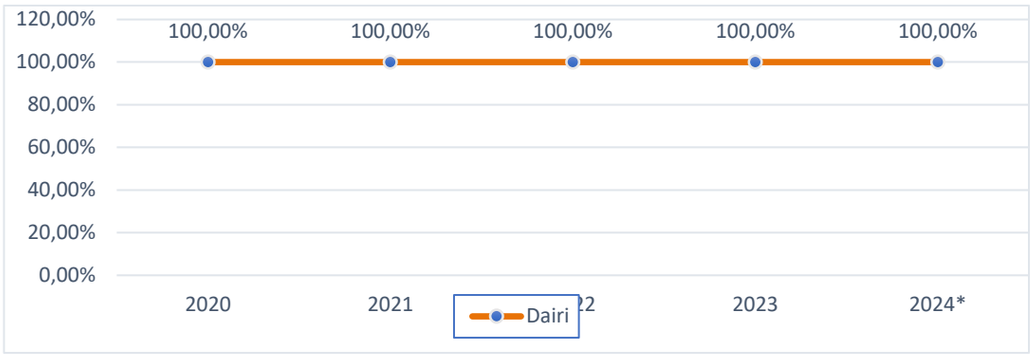
I. Perhubungan

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin

memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

1. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2.76 Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

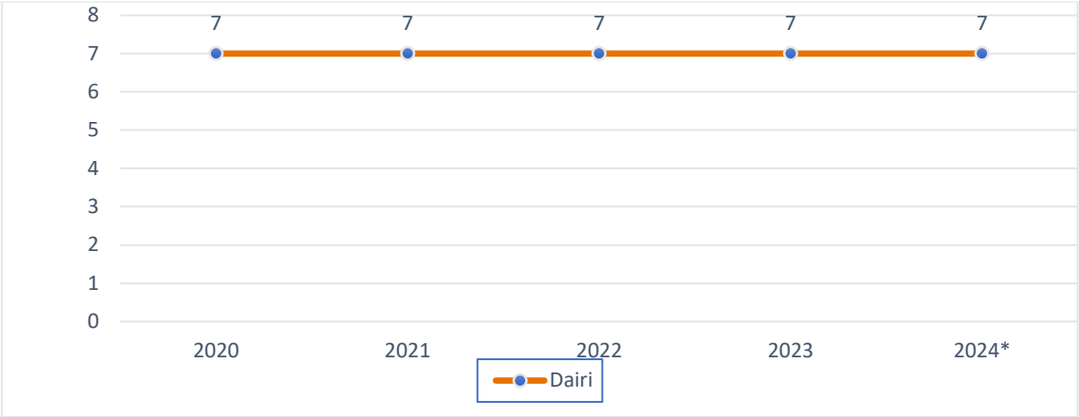
J. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah, serta akses masyarakat terhadap infomasi publik. Kinerja penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi publik dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti Persentase OPD Menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Media Yang Digunakan dalam desiminasi informasi

1. Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi (SP4N) di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024adalah 7 media desiminasi informasi.

Gambar 2.77 Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N) Tahun 2020– 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	17,45	42,50	100	100	100
2	Jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi	7	7	7	7	7

Sumber: LKPJ Kabupaten Dairi

Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik mencapai realisasi tahun 2020 sebesar 17,45%. Sampai dengan akhir tahun 2024 Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah 100%. Meskipun capaian indikator tersebut cukup tinggi, namun secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Persoalan belum tercapai hingga 100% disebabkan oleh masih minimnya jumlah kapasitas *bandwidth,* kurangnya alat-alat studio. Sedangkan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi dari tahun 2020 sampai 2024 terlihat stagnan di angka 7 media. Kondisi ini merupakan realisasi yang dipertahankan dari tahun ke tahun mengingat jumlah media yang terbatas di Kabupaten Dairi. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika Kabupaten Dairi juga dapat dilihat dari jumlah kantor instansi pemerintah yang menggunakan jaringan internet untuk pelayanan publik.

Secara keseluruhan, kondisi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap komunikasi dan informatika masih belum optimal. Penyebab dari persoalan ini diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras dan belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi.

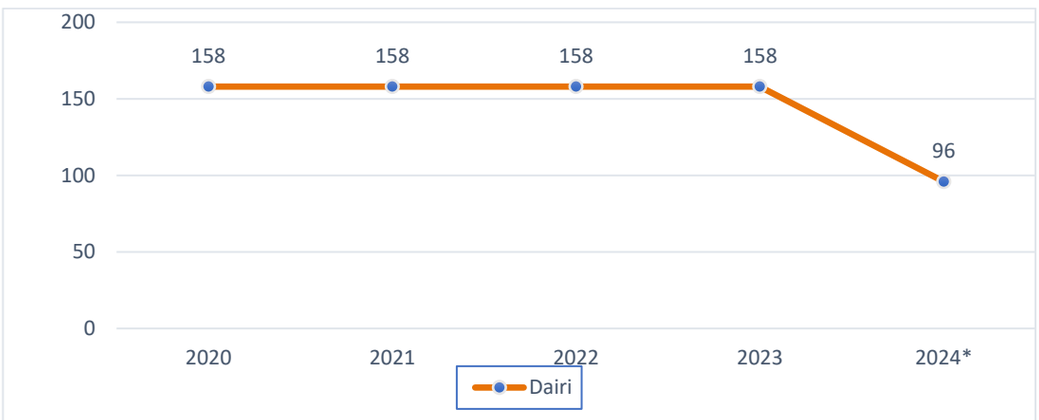
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

1. Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif, jumlah tertinggi adalah pada kelompok koperasi serba usaha sebanyak 101 unit. Pada Tahun 2024 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi adalah 96 unit, dengan kelompok serba usaha 37 unit.

Gambar 2.78 Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024

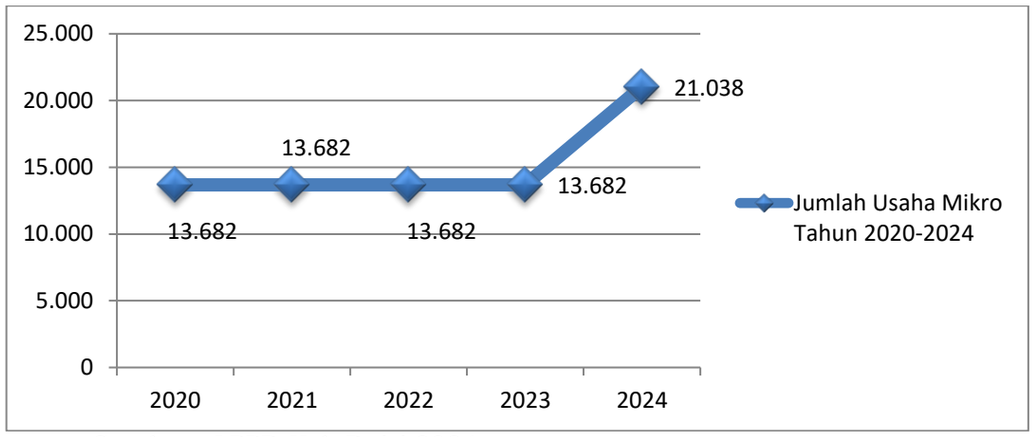


Sumber BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

2. Jumlah Usaha Mikro

Dari gambar di dibawah dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2020 sebanyak 13.682 unit pada tahun 2020 dan menjadi 21.038 unit pada tahun 2024.

Gambar 2.79 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020-2024



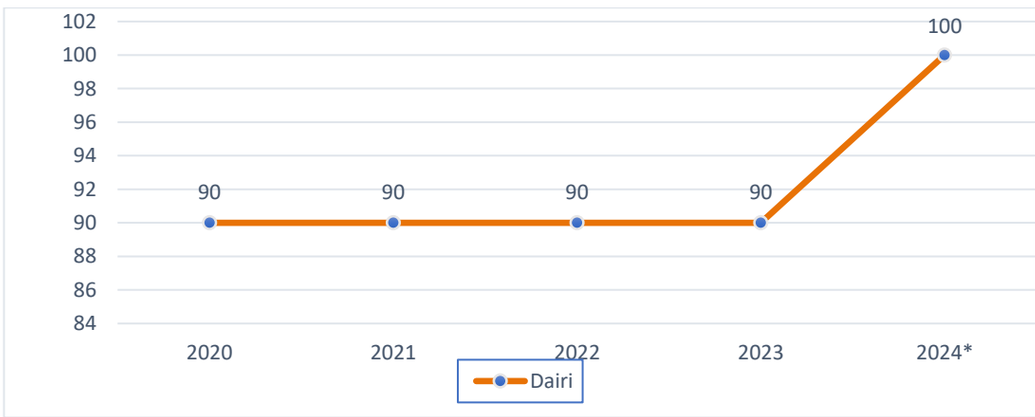
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

L. Penanaman Modal

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, Persentase Izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan ijin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

1. Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.80 Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

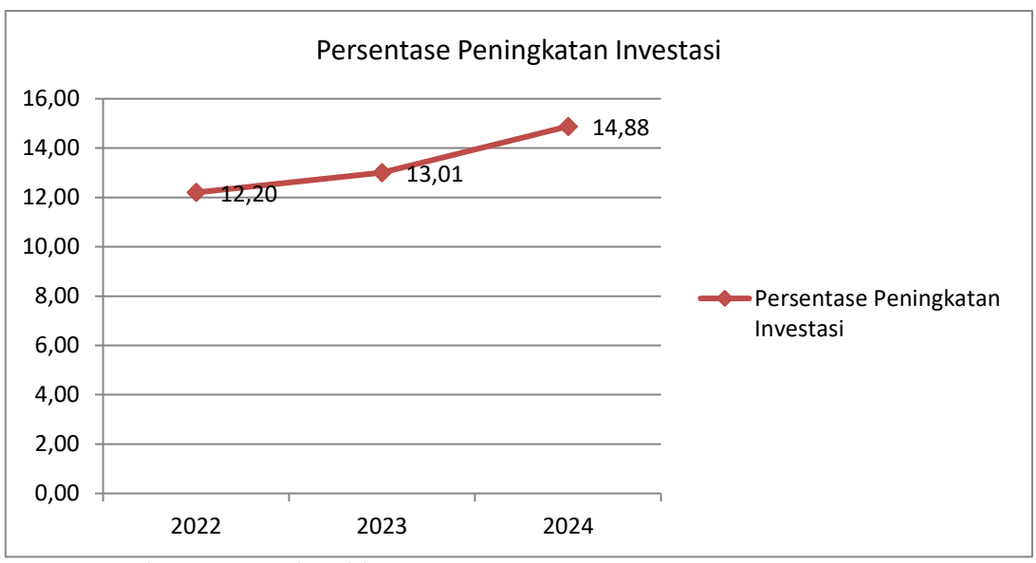
Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 90% pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tetap 90%. Pada Tahun 2024 Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 100%.

2. Persentase Peningkatan Investasi

Salah satu motor penggerak bagi pembangunan daerah adalah investasi daerah. Investasi daerah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Dairi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan mitra terbaik bagi investor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Indikator realisasi investasi umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan investasi daerah. Berikut adalah data mengenai Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2020 – 2024.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase kondisi investasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2022-2024 pada Tahun 2022 sebesar 12,86%, terjadi peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 13,01%, dan pada tahun 2024 menjasi 14,88%.

Gambar 2.81 Persentase Peningkatan Investasi Kab Dairi 2022-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun berada pada angka 12,20 pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2022, demikian juga untuk tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 14,88% dari Tahun 2023. Nilai realisasi investasi Kabupaten Dairi masih didominasi oleh investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi juga saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online, dan persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang diterima.

Upaya untuk meningkatkan investasi daerah Dairi juga perlu didukung dengan adanya pelayanan investasi yang baik, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Bentuk dukungan tersebut sudah diwujudkan pemerintah Kabupaten Dairi.

M. Kepemudaan dan Olahraga

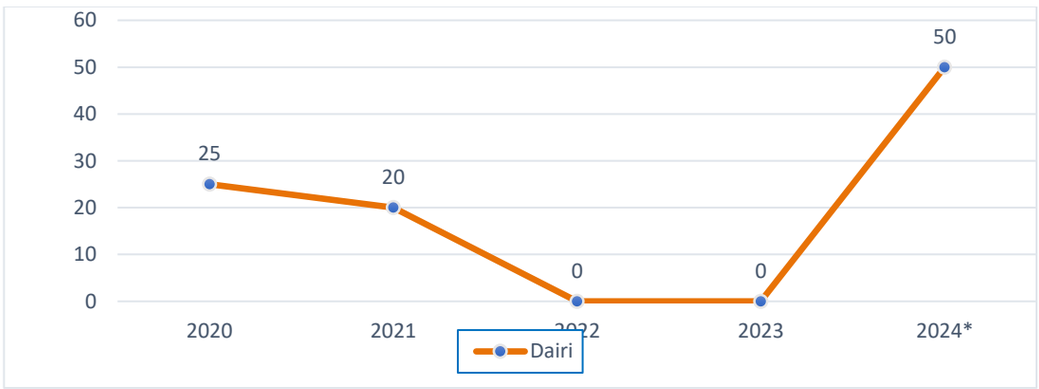
Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi entrepreneur sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

1. Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan

Dari gambar di bawah dapat dilihat jumlah terfasilitasinya pelayanan kepemudaan di Kabupaten Dairi sebanyak 1.439 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 25 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 20 orang dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 data tidak tersedia. Pada Tahun 2024 terdapat 50 Orang pemuda yang mendapat layanan pelatihan kewirausahaan.

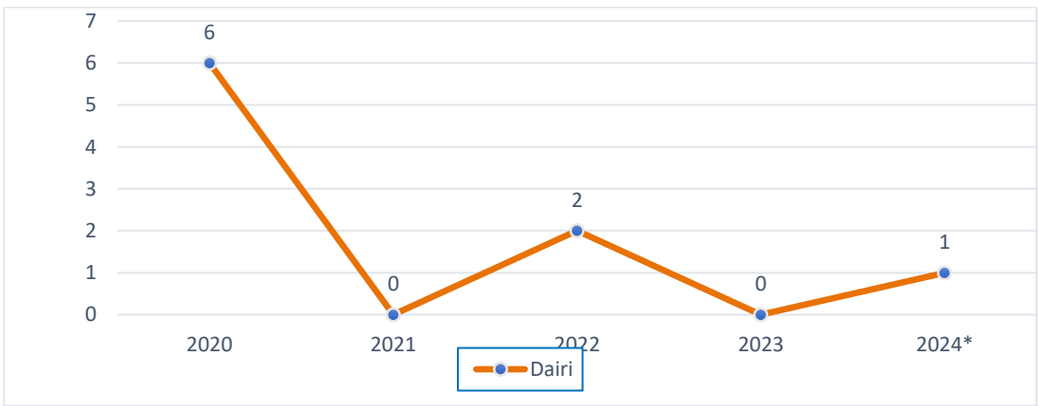
Gambar 2.82 Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

Gambar 2.83 Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2020 – 2024



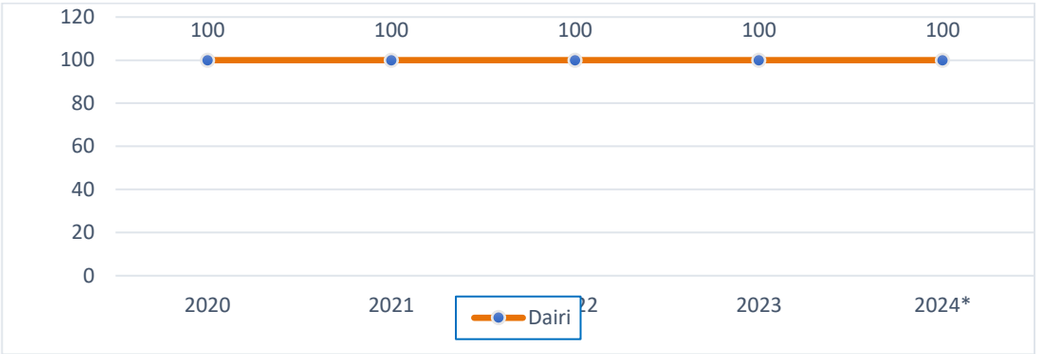
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya kompetisi olah raga yang terselenggara di Kabupaten Dairi sebanyak 6 cabang olah raga pada Tahun 2020 dan pada Tahun 202 sebanyak 0 cabang olah raga, pada Tahun 2022 sebanyak 2 cabang olah raga dan pada Tahun 2024 data tidak tersedia. Pada Tahun 2024 terdapat 1 kompotesi olah raga yang terselenggara.

3. Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga

Persentase penanganan gedung olah raga/lapangan olah raga di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024sebesar 100%.

Gambar 2.84 Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

N. Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian krusial sebagai sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Ketersediaan data yang berkualitas dan mudah diakses berpengaruh dalam perumusan masalah dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Urusan statistik juga berperan penting dalam proses evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah. Statistik daerah Kabupaten Dairi telah dituangkan dalam berbagai laporan data daerah yang meliputi berbagai aspek seperti geografi, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Basis data berbentuk laporan cetak maupun *online* di Kabupaten Dairi sudah tersedia setiap tahun. Namun demikian, jika dicermati lebih detail di setiap indikator, masih terdapat laporan yang indikator tahunnya belum diperbaharui. Beberapa laporan pada tahun tertentu terkadang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan data yang kurang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data di Kabupaten Dairi.

O. Persandian

Urusan persandian di kabupaten mencakup upaya pengamanan informasi daerah serta penetapan pola hubungan persandian antar perangkat daerah. Urusan persandian di Kabupaten Dairi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara umum, layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Namun, terdapat beberapa persoalan dalam penyelenggaraan urusan persandian. Persoalan tersebut terkait

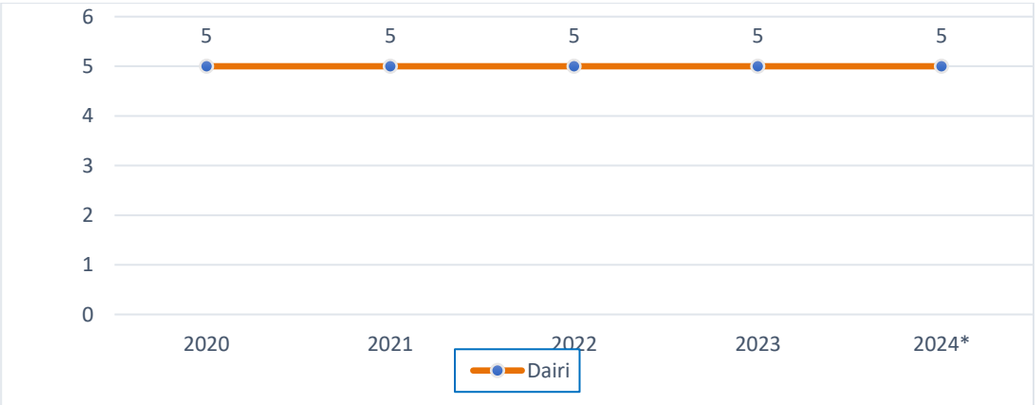
dengan kapasitas sumber daya manusia dibidang persandian yang belum memadai.

P. Kebudayaan

Lingkup urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian masyarakat, penetapan dan pelestarian cagar budaya. Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang terkait dengan lingkup urusan tersebut. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi.

1. Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi

Gambar 2.85 Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi Tahun 2020 – 2024



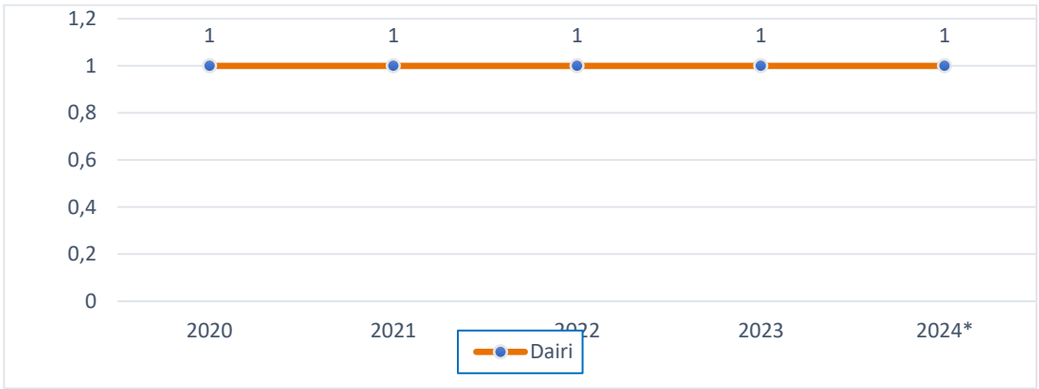
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah organisasi/lembaga yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024adalah sebanyak 5 organisasi.

2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah sebanyak 1 unit.

Gambar 2.86 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

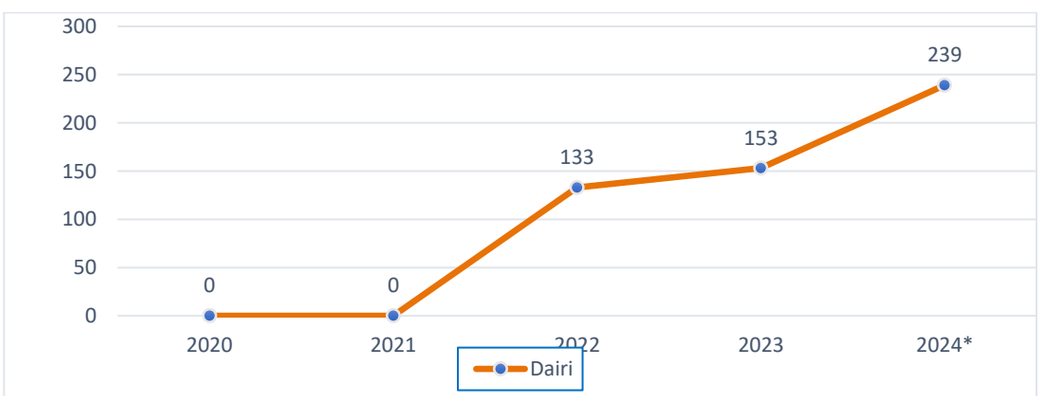
Q. Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan guna memajukan literasi masyarakat. Selain itu, perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat. Perkembangan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Dairi dapat dianalisis dengan melihat capaian kinerja perpustakaan pada beberapa indikator berikut ini.

1. Jumlah Arsip Yang Dilestarikan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah arsip yang dilestarikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 data tidak tersedia. Pada Tahun 2022 jumlah yang tersedia dan dilestarikan adalah 133 arsip, pada Tahun 2023 jumlahnya sebanyak 153 arsip. Pada Tahun 2024 jumlahnya menjadi 239 terdiri dari arsip aktif sebanyak 153 dan arsip in-aktif sebanyak 86 arsip.

Gambar 2.87 Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2020 – 2024

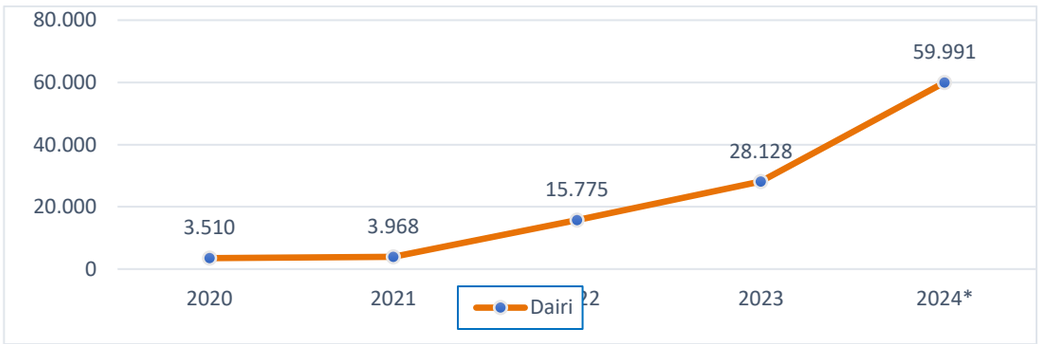


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Dairi sebanyak 3.510 Orang pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 3.968 orang dan pada Tahun 2022 sebanyak 15.775 orang, kemudian pada Tahun 2023 dan 2024 meningkat secara signifikan menjadi 28.128 orang dan 59.991. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 di Kabupaten Dairi dibangun Gedung Perpustakaan yang cukup memadai, sehingga meningkatkan kunjungan Masyarakat ke perpustakaan.

Gambar 2.88 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi

A. Pertanian

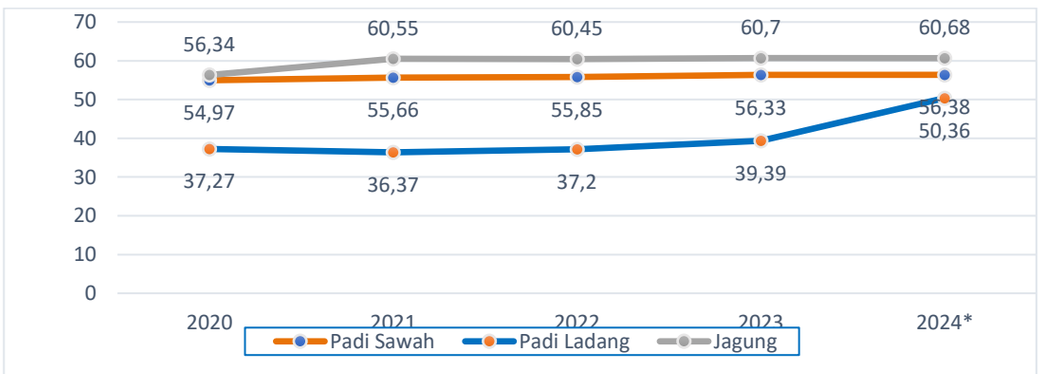
1. Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/Ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadei 56,33 kw/Ha dan tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56.38 kw/Ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 Kw/Ha, pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 KW/Ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 KW/Ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 Kw/Ha dan pada tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 Kw/Ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 Kw/Ha. Peningkatan Produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensfikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

Gambar 2.89 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024



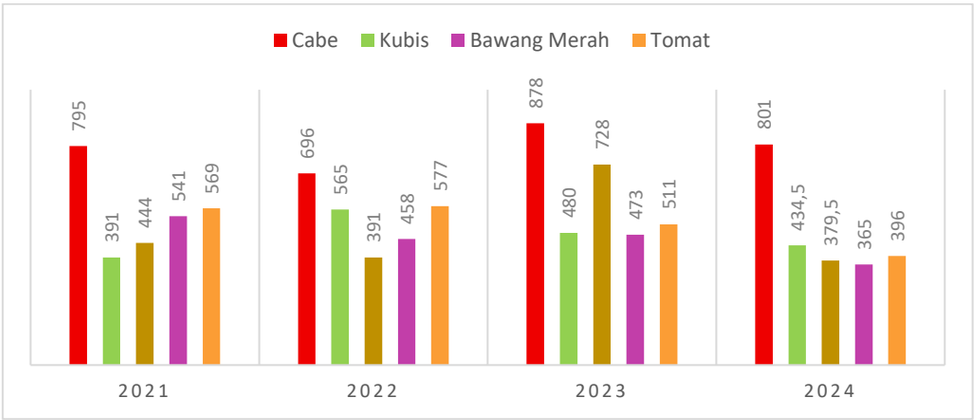
Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

2. Hortikultura

Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat

sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang beluk teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

Gambar 2.90 Luas panen sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman Tahun 2021-2024 (Ha)

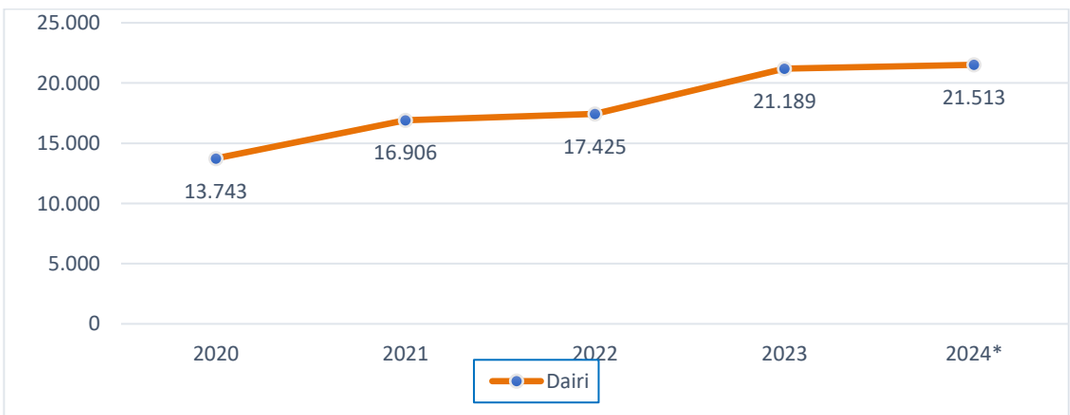


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

3. Tanaman Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.91 Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2020-2024 (ton)



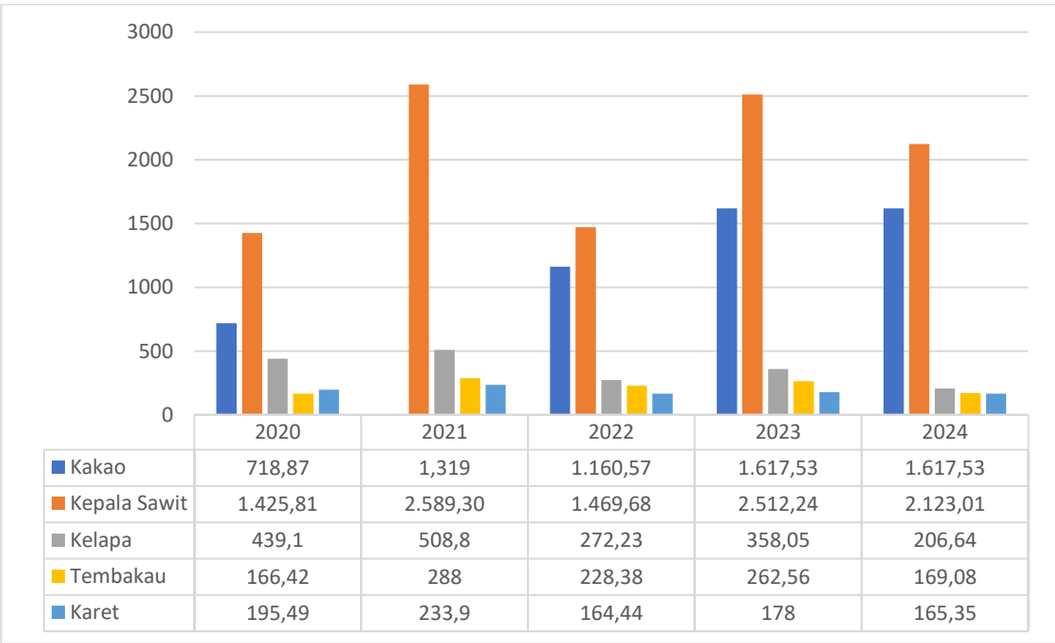
Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 produksi kopi di Dairi sebesar 13.743 ton kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.189 ton. Kemudian Tahun 2024 produksi kopi Kabupaten Dairi kembali mengalami peningkatan menjadi 21.513 Ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.975,1 ton dan kopi robusta sebesar 2.537,5 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh program pemerintah kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi sidikalang dengan penanaman kopi 1 juta batang. Kemudian peningkatan harga biji kopi semenjak lima tahun yang lalu, sehingga meningkatkan minat petani bertanam kopi.

Disamping Tanama kopi terdapat beberapa tanaman Perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Berikut ini data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.92 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	718,87	1,319	1.160,57	1.617,53	1.617,53
Kepala Sawit	1.425,81	2.589,30	1.469,68	2.512,24	2.123,01
Kelapa	439,1	508,8	272,23	358,05	206,64
Tembakau	166,42	288	228,38	262,56	169,08
Karet	195,49	233,9	164,44	178	165,35

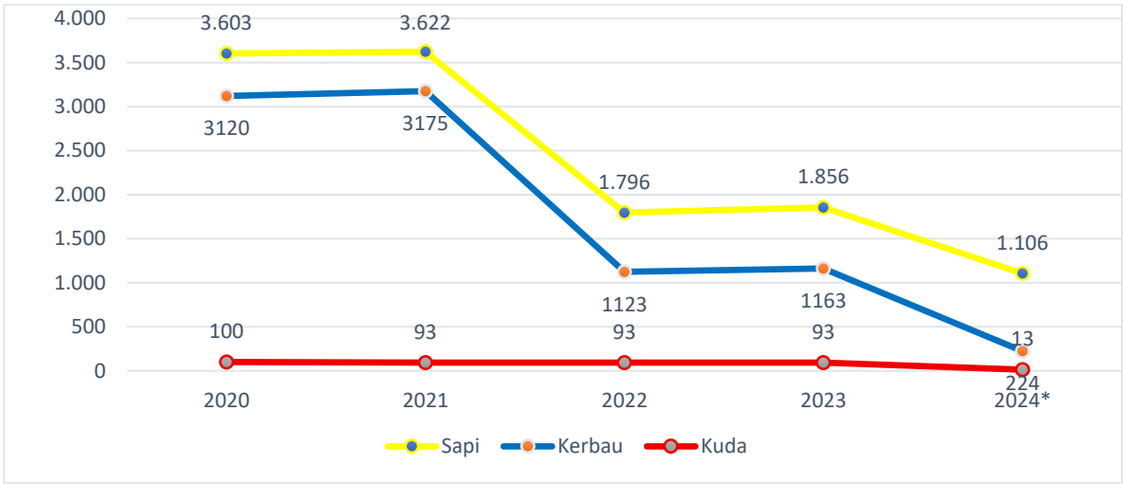
Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

4. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini

dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

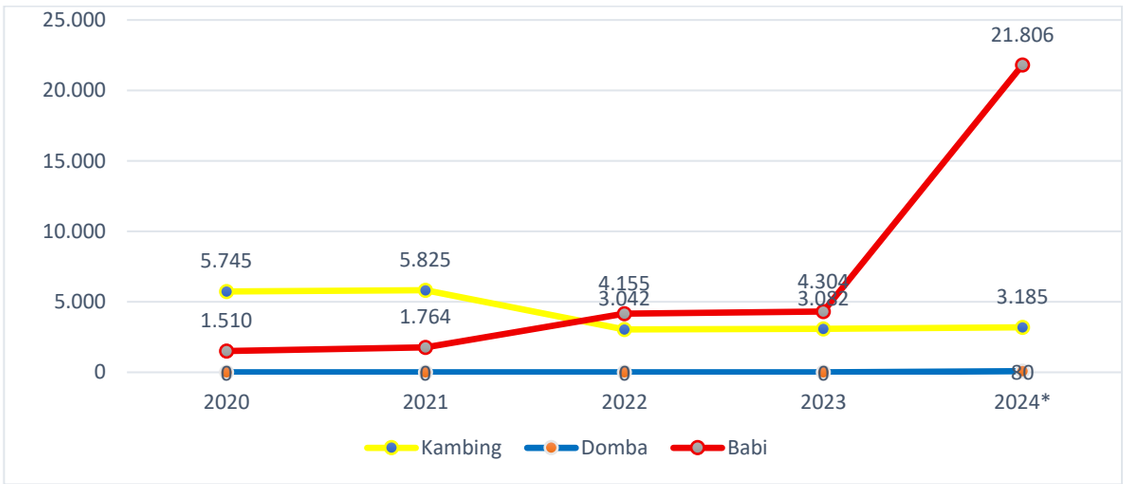
Gambar 2.93 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

Gambar 2.94 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.

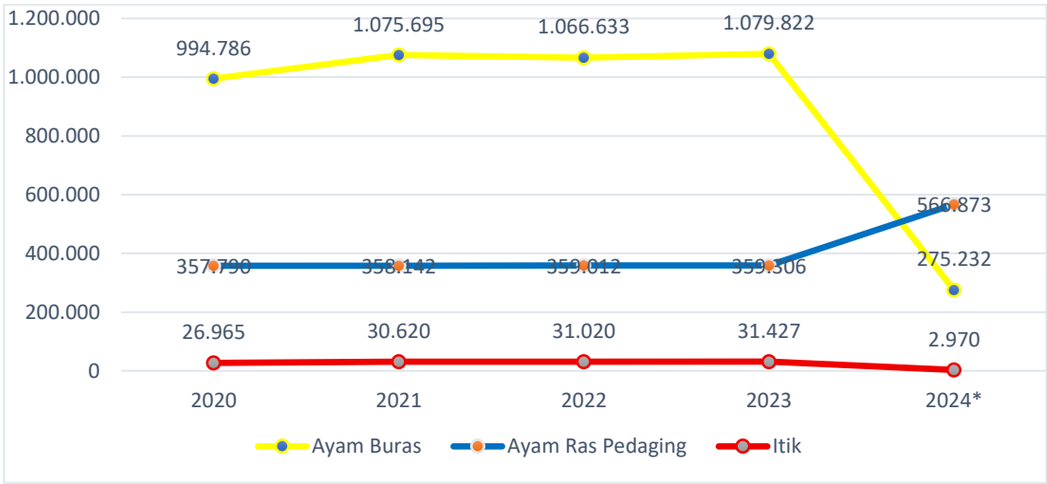


Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan

timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit ASF pada babi sudah berkurang.

Gambar 2.95 Populasi Ternak Unggas diKabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak ungags di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Populasi ayam buras tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis.

B. Perikanan

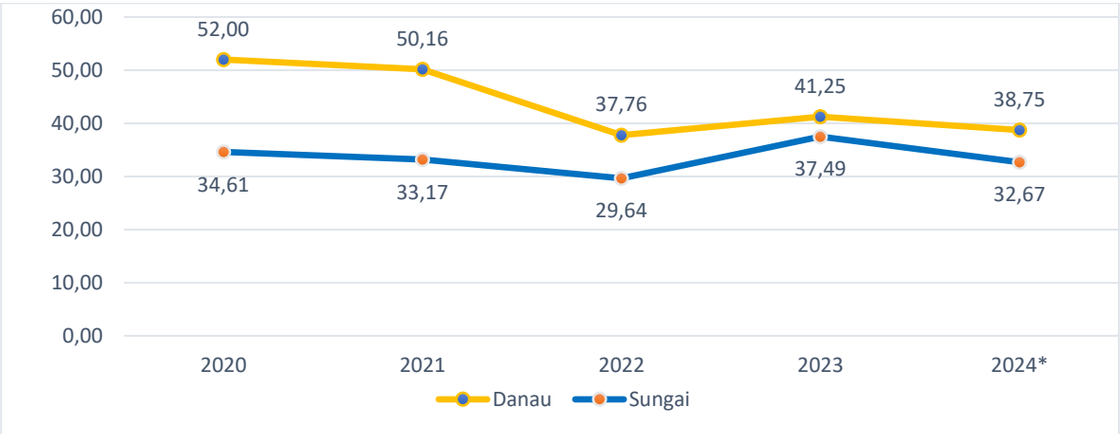
Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi Perikanan Tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurununan yang cukup signifikan dari 52 Ton/tahun menjadi 38,75 Ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung danau toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan

landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 2.96 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024



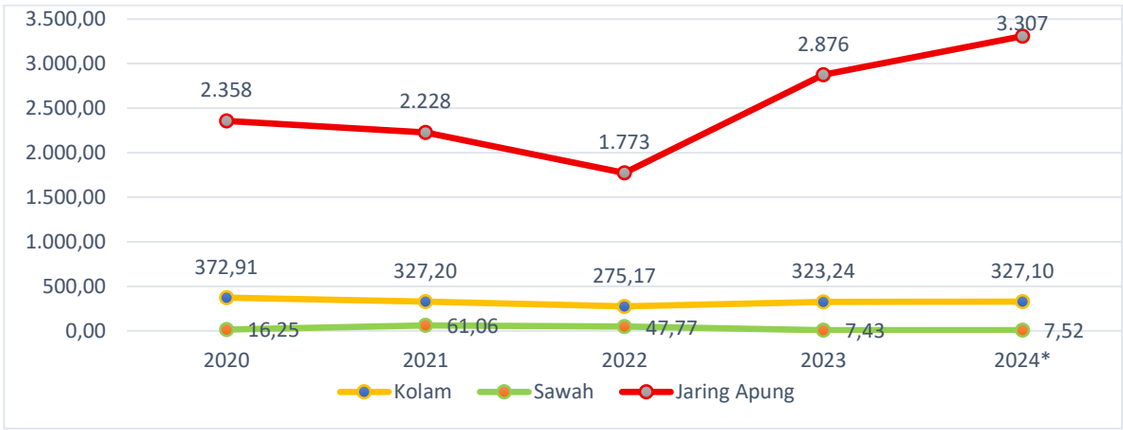
Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2. Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: Perikanan Budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari danau toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem bioflok. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 2.97 Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024



Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

C. Pariwisata

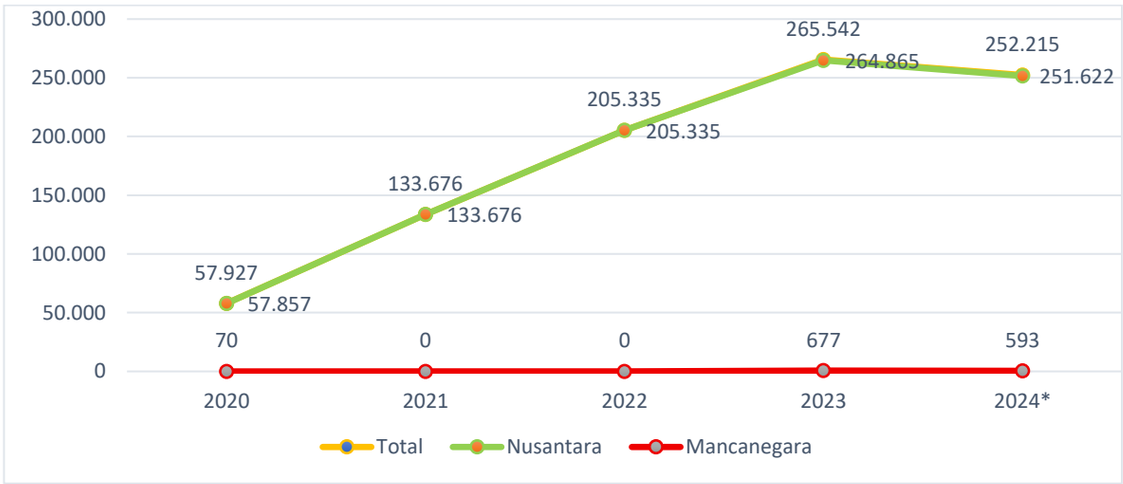
Sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Dairi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Dairi meliputi didominasi oleh wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Untuk menunjang aktivitas wisata dan menarik wisatawan asing maupun domestik, keberadaan akomodasi sebagai sarana pendukung kepariwisataan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bisa terwujud dengan tersedianya fasilitas dukungan yang memadai seperti hotel. Wisatawan yang datang dari luar daerah tentu membutuhkan tempat untuk menginap dan alternatif yang paling diminati wisatawan adalah menginap di hotel

1. Kunjungan Wisata

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi sebesar 57.927 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 133.676 orang, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 205.335 orang dan pada Tahun 2023 kunjungan wisata ke Dairi sebanyak 265.542 orang. Sedangkan Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 252.215 orang.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 70 orang, Tahun 2021 dan 2022 tidak ada data. Sedangkan untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 677 0rang dan Tahun 2024 sebanyak 593 orang.

Gambar 2.98 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi (Orang) Tahun 2020–2024



Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

3. Objek Wisata di Kabupaten Dairi

Tabel 2.58 Objek Wisata di Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan Dan Jarak Dari Sidikalang Tahun 2024

Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (Km)
(1)	(2)	(3)
Gedung Djauli Manik (Pusat Aktifitas Seni Budaya)	Sidikalang	0,0
Taman Kota Sidikalang (Stadion Lama)	Sidikalang	0,5
Panorama Indah Puncak Sidiangkat	Sidikalang	5,0
Taman Wisata Iman (TWI)	Sitinjo	10,0
Taman Tugu TB Simatupang Dan Liberty Manik	Sitinjo	10,0
Air Terjun Lae Pandaroh, Air Terjun Sampendabah	Sitinjo	12,0
Simergatep	Parbuluan	12,0
Leter Z	Siempat Nempu Hulu	12,0
Parhonasan	Lae Parira	21,0
Pemandian Lau Bagot	Tigalingga	30,0
Gua Kendet Liang	Gunung Sitember	42,0
Pantai Danau Toba/Tao Silalahi	Silahisabungan	44,0
Air Terjun Sampuren Desa Gundaling	Gunung Sitember	45,0
Situs Budaya Marga Silahisabungan (Aek Sipaulak Hosa, Batu Sigadap, Pagar Parorot, Pansur Napitu, Tugu Silahisabungan)	Silahisabungan	46,0
Pemadian Lau Timah	Tanah Pinem	80,0

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

Dari tabel 2.54 di atas dapat kita ketahui bahwa total objek wisata potensial di Kabupaten Dairi berjumlah 15 objek wisata. Dan dari tabel tersebut kita juga mengetahui nama objek wisata, letak serta jarak objek wisata dari kota Sidikalang, dapat kita lihat bahwa

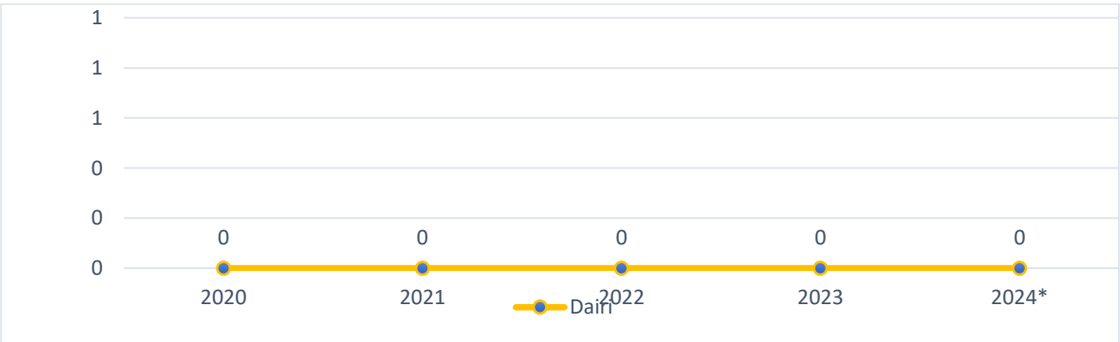
Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo memilik sebanyak 3 objek wisata, Silahisabungan dan Gunung Sitember 2 objek wisata, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga dan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 objek wisata.

D. Perindustrian dan Perdagangan

1. Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 stagnan yaitu sebesar 0% tiap tahunnya, artinya tidak ada penambahan industri yang bergerak dibidang agribisnis kurun waktu 2020-2024

Gambar 2.99 Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2020–2024

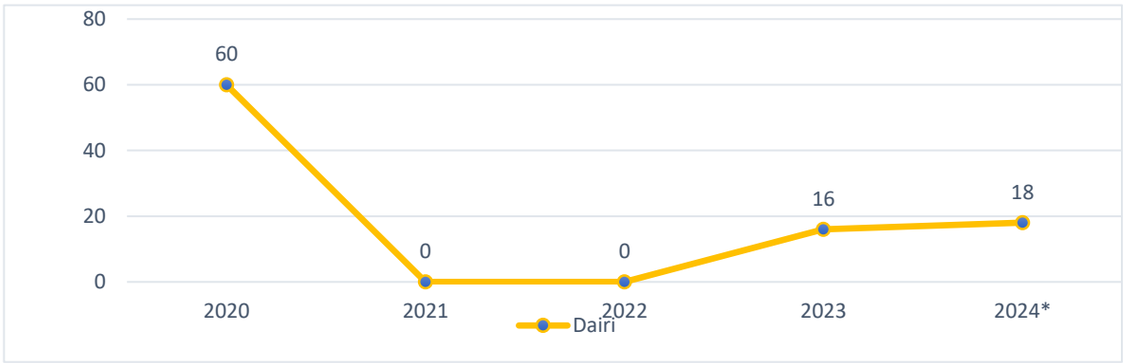


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 60 produk, data Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia dan pada 2023 sebanyak 16 dan Tahun 2024 sebanyak 18 Produk.

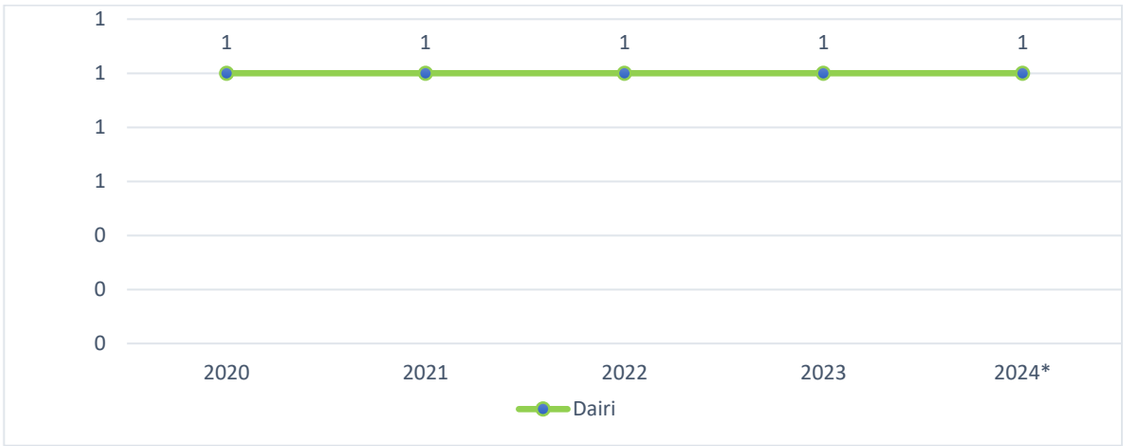
Gambar 2.100 Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.101 Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok Tahun 2020 – 2024



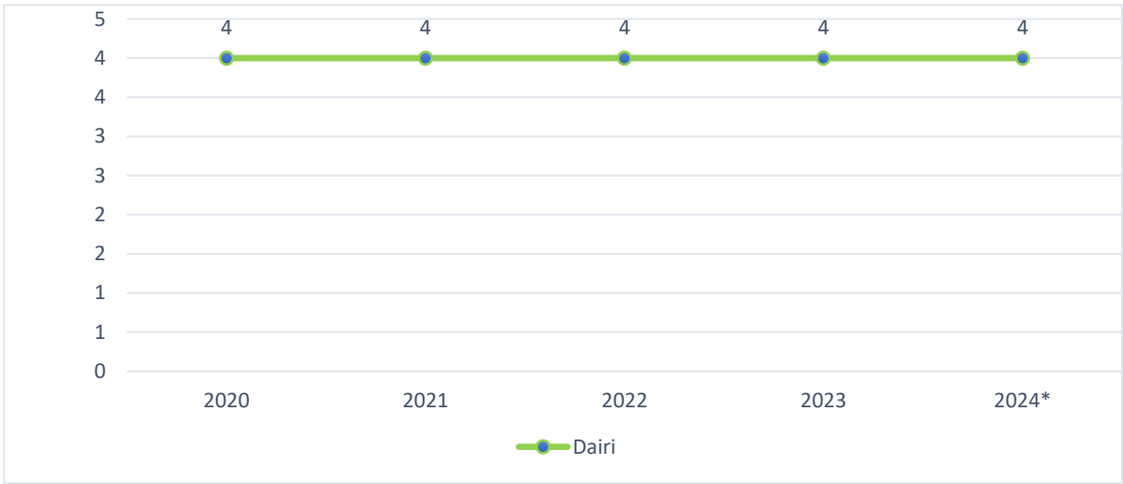
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah 1 dokumen setiap tahunnya.

4. Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya.

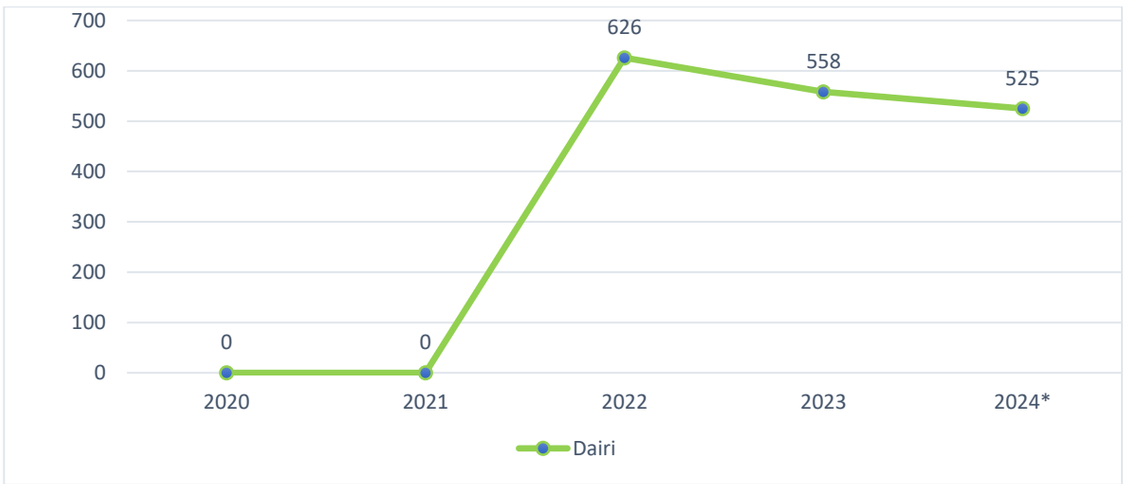
Gambar 2.102 Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2024

5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.103 Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jumlah alat UTTP yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 data tidak tersedia sementara untuk Tahun 2022 ada sebanyak 626 unit, pada Tahun 2023 sebanyak 558 unit dan tahun 2024 ada sebanyak 525 unit.

2.1.4.4 Fokus Layanan Penunjang Umum

A. Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintahan daerah. Urusan ini memiliki fungsi untuk memfasilitasi,

mengkoordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumusan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah di bawah ini

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 2.59 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 – 2024

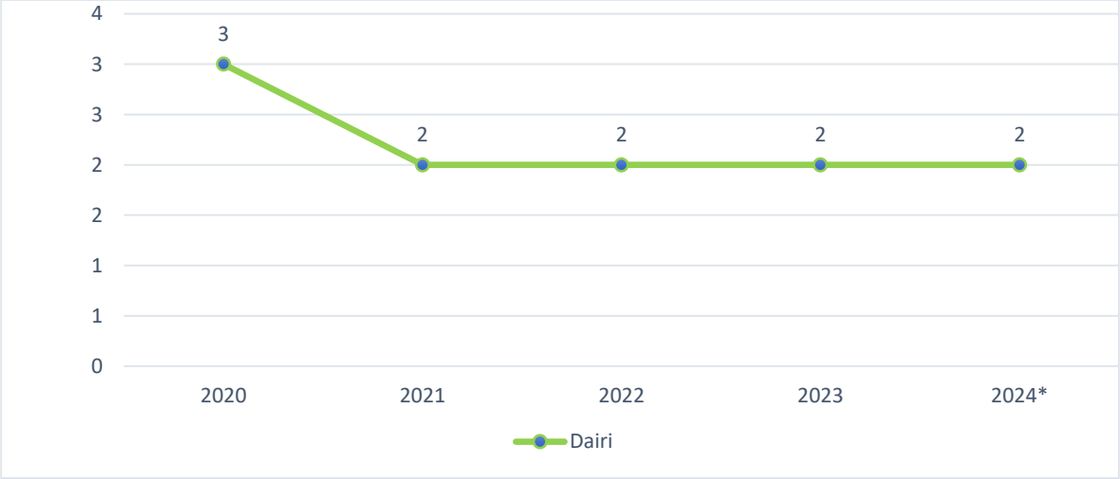
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	C	CC	CC	B	B

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 adalah C dan pada Tahun 2021 – 2022 menjadi CC pada Tahun 2023 dan 2024 Predikat SAKIP daerah Kabupaten Dairi predikat "B"

2) Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Gambar 2.104 Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 berada level 3, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 turun menjadi level 2, pada Tahun 2023 tetap berada pada level 2 dan Tahun 2024 tetap berada pada level2.

3) Rekomendasi LKPJ

Tabel 2.60 Rekomendasi LKPJ Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2020-2024 Rekomendasi LKPJ di Kabupaten Dairi ada setiap tahunnya.

4) Nilai LPPD

Tabel 2.61 Nilai LPPD Tahun 2020-2024

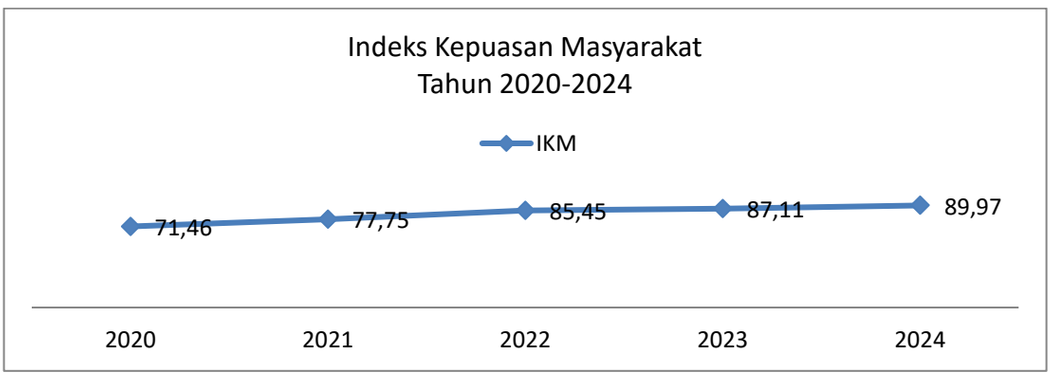
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : LPPD Kab.Dairi Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2020 Nilai LPPD Kabupaten Dairi adalah sedang. Pada Tahun 2021 sampai 2024 memiliki nilai rendah.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.105 Indeks Kepuasaan Masyarakat Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Dairi sebesar 71,46 poin pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 77,75 poin dan sebesar 85,45 poin pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 87,11 poin. Pada Tahun 2024 kembali Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Dairi kembali meningkat menjadi 89,97 poin.

6) Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima P/ Rastra

Tabel 2.62 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2020-2024

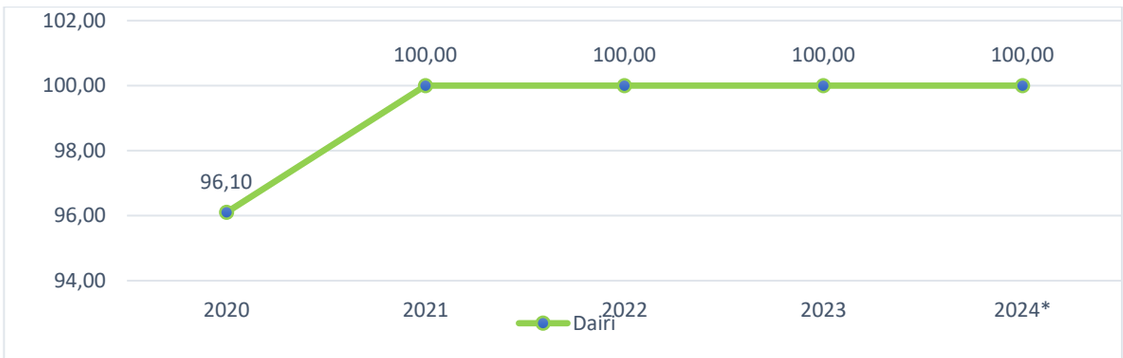
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
KK	16.525	16.525	n/a	n/a	n/a

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2021 adalah sebanyak 16.525 KK setiap tahunnya, Tahun 2022 – 2024 data tidak tersedia.

7) Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik

Gambar 2.106 Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik Tahun 2020-2024



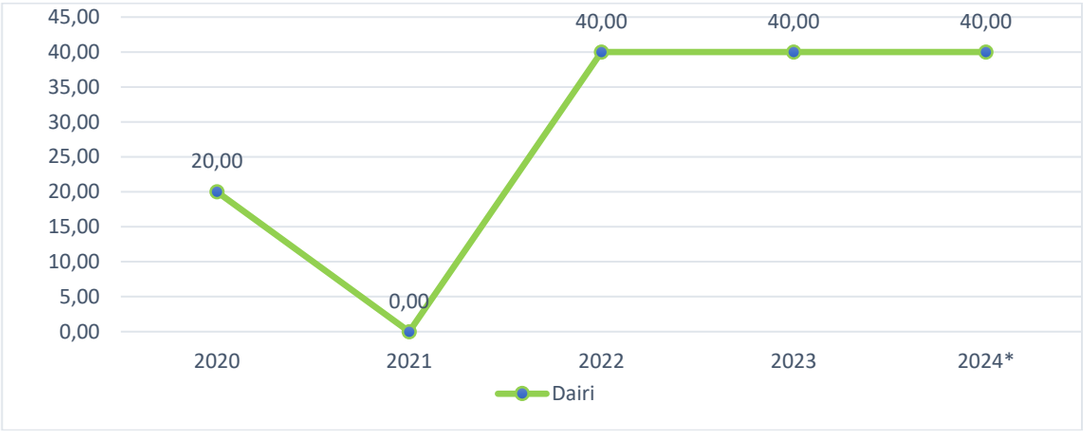
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase paket kegiatan yang dilelengkan secara elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 96,10%. Untuk Tahun 2021-2024 peresentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik adalah 100 persen setiap tahunnya.

8) Jumlah Informasi Publik Yang dihasilkan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan banyaknya informasi publik yang dihasilkan Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 20 naskah, data Tahun 2021 data tidak tersedia, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 jumlah data sebanyak 40 data. Pada Tahun 2024 jumlah data sebanyak 40 Data.

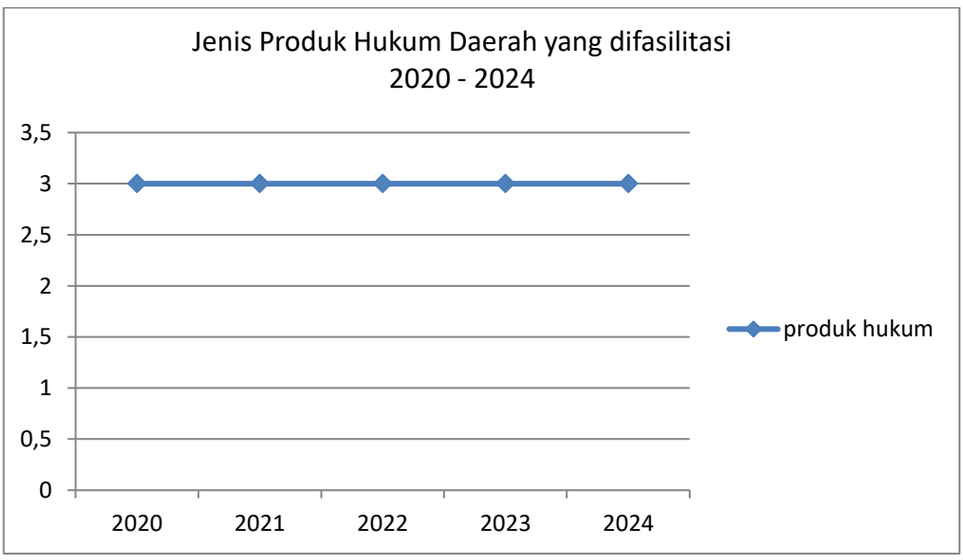
Gambar 2.107 Jumlah Informasi Publik yang Dihasilkan Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

9) Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi

Gambar 2.108 Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi Tahun 2020-2024



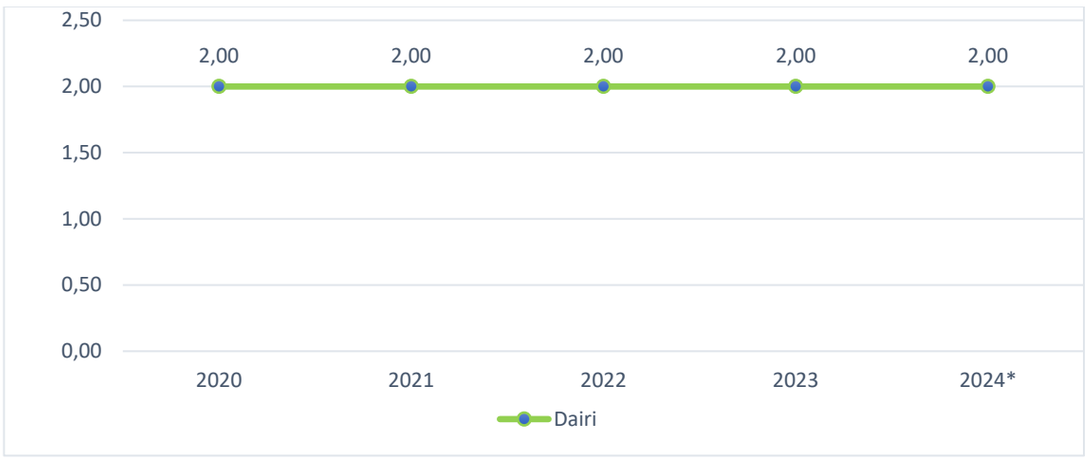
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 - 2024 sebanyak 3 jenis.

10) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari gambar di bawah ini banyaknya Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimonitoring dan dievaluasi pada Tahun 2020-2024adalah 2 unit setiap tahunnya.

Gambar 2.109 Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

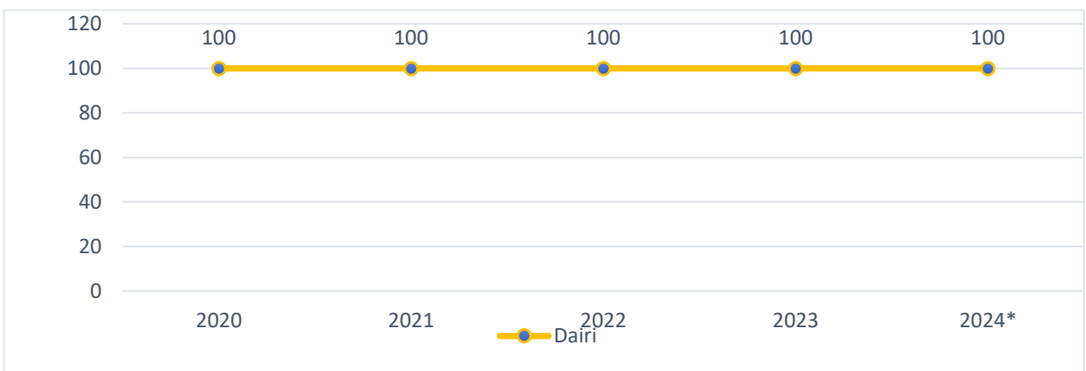
2. Sekretariat Dewan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

1) Terfasilitasinya Persidangan di DPRD

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terfasilitasinya persidangan di DPRD pada Tahun 2020 – 2024 adalah terfasilitasi 100%

Gambar 2.110 Terfasilitasinya Persidangan di DPRD Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Inspektorat Daerah

Urusan inspektorat daerah merupakan urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan daerah. Pengawasan daerah yang dilaksanakan dengan baik menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Adapun indikator untuk melihat kualitas penyelenggaraan pengawasan daerah adalah maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1) Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 2.63 Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Level	3	3	3	3	3

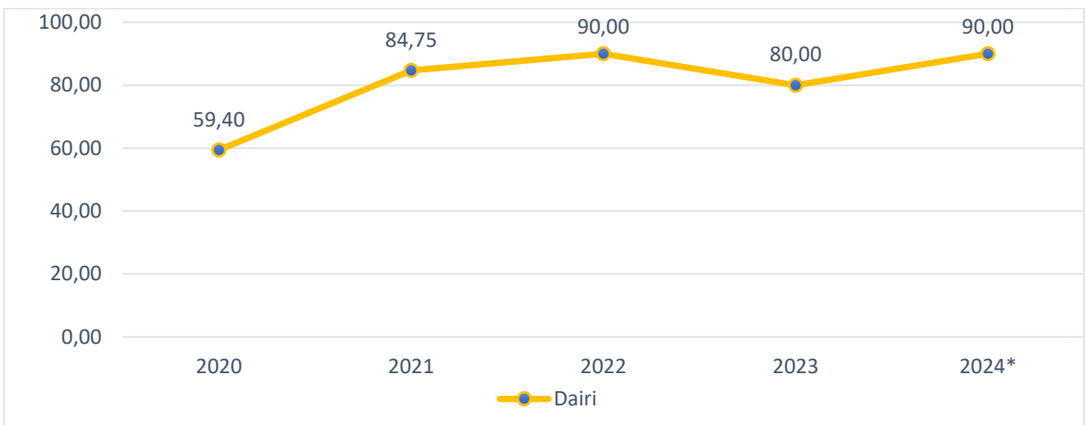
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi ada di level 2 pada tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah level 3.

2) Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 59,40%, pada Tahun 2021 sebesar 84,75% dan pada Tahun 2022 sebesar 90%, Pada Tahun 2023 menurun menjadi 80% dan pada Tahun 2024 naik menjadi 90%.

Gambar 2.111 Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

B. Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang visioner dan implementatif.

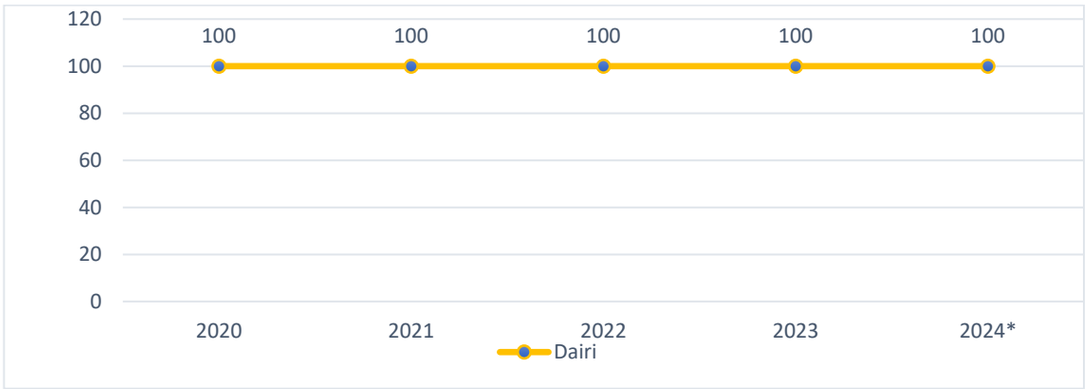
Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel sertakonsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (Sense of ownership) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Gambar 2.112 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun 2020-2024

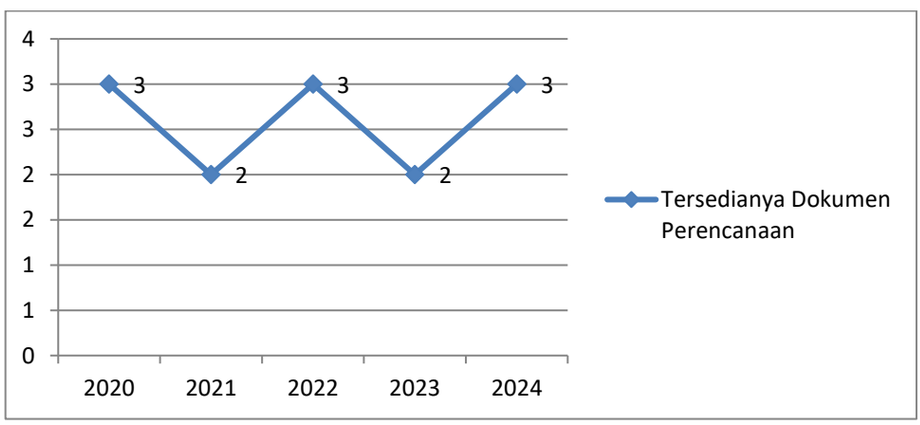


Sumber : LPPD Pemerintah Kab.Dairi 2024

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dari gambar di bawah dapat dijelaskan tersedianya dokumen perencanaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut pada Tahun pada Tahun 2020 sebanyak 3 dokumen, untuk Tahun 2021 sebanyak 2 dokumen ,Tahun 2022 sebanyak 3 dokumen, pada Tahun 2023 sebanyak 2 dokumen dan Tahun 2024 sebanyak 3 dokumen.

Gambar 2.113 Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2020 – 2024

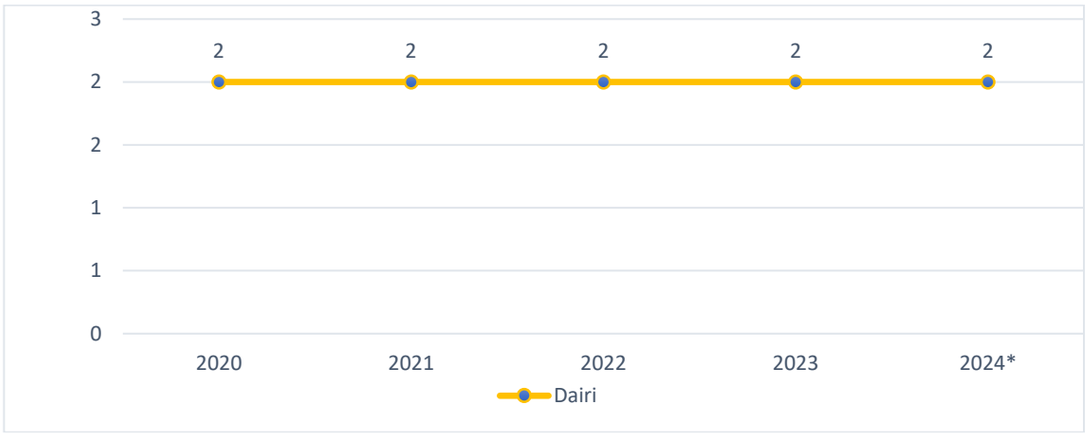


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan.

Banyaknya dokumen pendukung perencanaan yang tersedia di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 2 Dokumen yaitu KLHS RPJMD dan RTRW.

Gambar 2.114 Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2020 – 2024

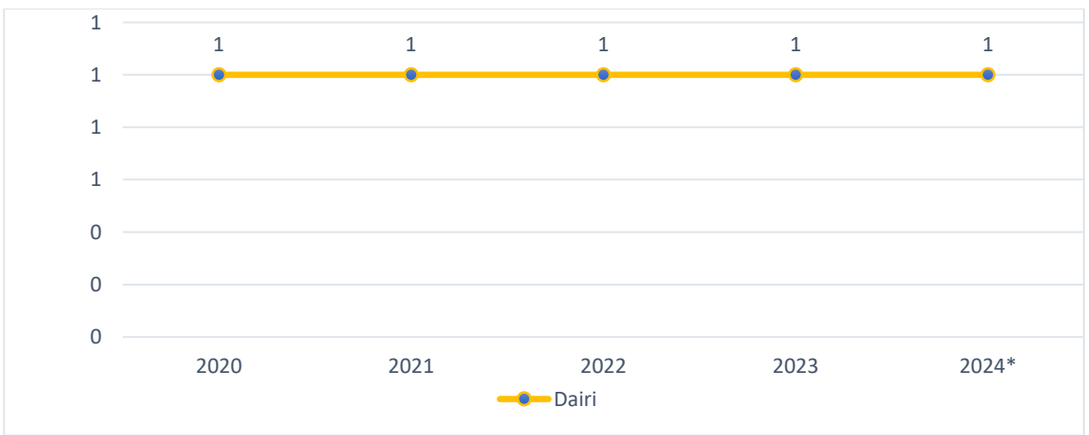


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

4. Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terpeliharanya sistem perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1 sistem yaitu sistem perencanaan SIPD-RI.

Gambar 2.115 Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024

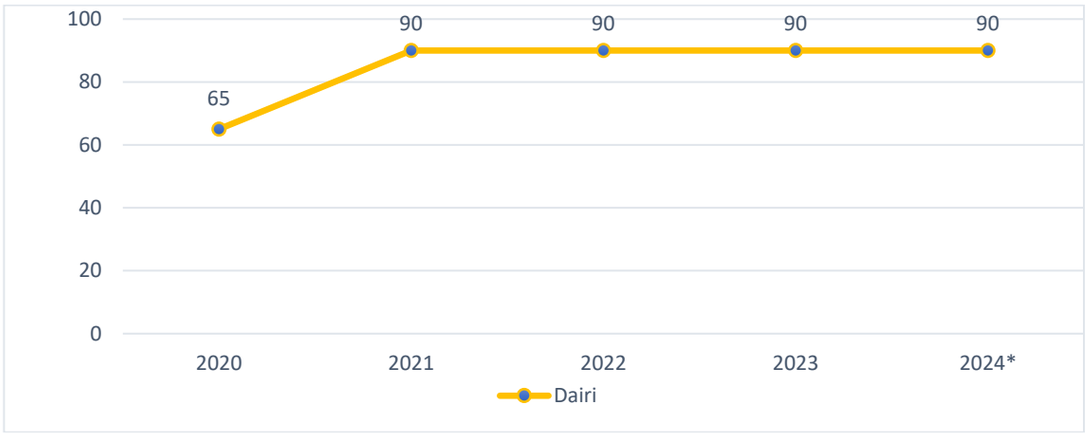


Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten

Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 adalah 65%. Sedangkan pada Tahun 2021 sampai 2024 adalah rata-rata sebesar 90%.

Gambar 2.116 Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

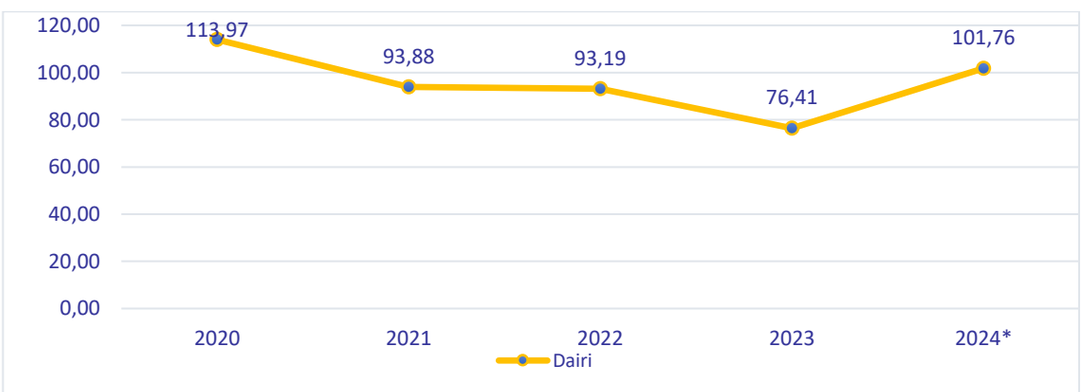
C. Keuangan

Urusan keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang memiliki peran yang sangat dalam memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Pertama, sisi akuntabiltas keuangan dengan indikator Opini BPK/ sementara yang kedua dari sisi kapasitas keuangan dengan indikator tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran kinerja urusan keuangan daerah Kabupaten Dairi.

Selain dari sisi akuntabilitas keuangan daerah, kinerja urusan keuangan juga dapat dilihat dari tingkat kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Dairi.

1. Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 2.117 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024



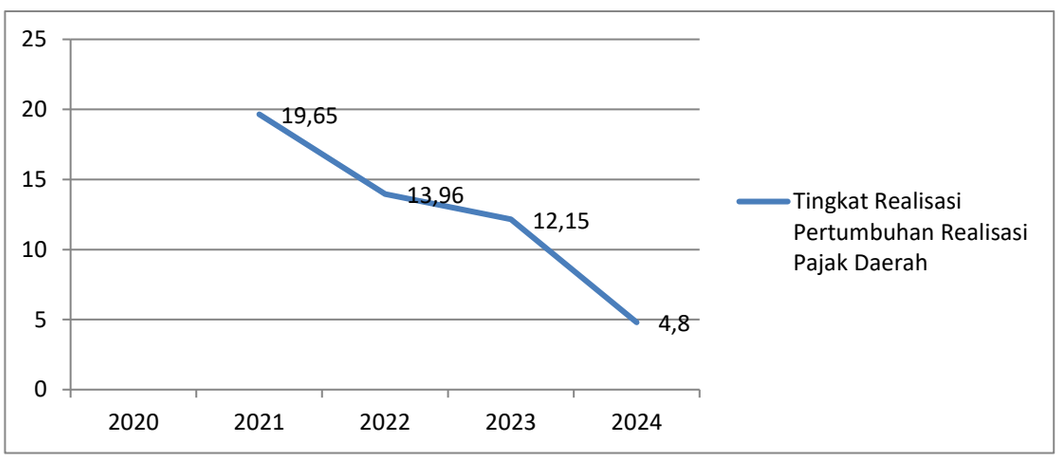
Sumber :BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mengalami peningkatan ke angka 113,97% pada Tahun 2021 menjadi 93,88% dan pada Tahun 2022 menjadi 93,19% , pada Tahun 2023 sebesar 76,41%. Pada Tahun 2024 pencapaian target pajak dan retribusi daerah Kabupaten Dairi meningkat menjadi 101,76%

2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dairi menunjukkan trend penurunan dimana pada Tahun 2021 sebesar 19,65% pada Tahun 2022 sebesar 13,96% dan pada Tahun 2023 sebesar 12,5% dan pada tahun 2024 sebesar 4,8%.

Gambar 2.118 Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020–2024



Sumber : Laporan Keuangan

3. Opini Laporan Keuangan

Kabupaten Dairi mampu mempertahankan Opini BPK selama 5 (lima) tahun terakhir dengan predikat WTP. Predikat WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah mempu menyajikan secara wajar dalam semua hal mulai dari material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Dengan demikian maka, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan baik.

Tabel 2.64 Opini Laporan Keuangan Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LPPD.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat opini laporan keuangan Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 adalah dengan WTP setiap tahunnya.

4. Penyusunan APBD Tepat Waktu

Tabel 2.65 Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

5. Penyusunan LKPD Tepat Waktu

Tabel 2.66 Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2020– 2024

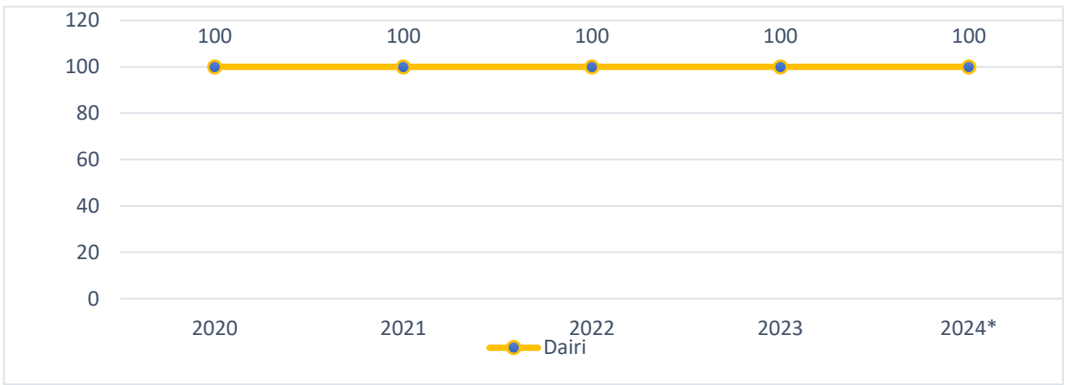
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah tepat waktu setiap tahunnya.

6. Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS

Gambar 2.119 Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah 100% setiap tahunnya.

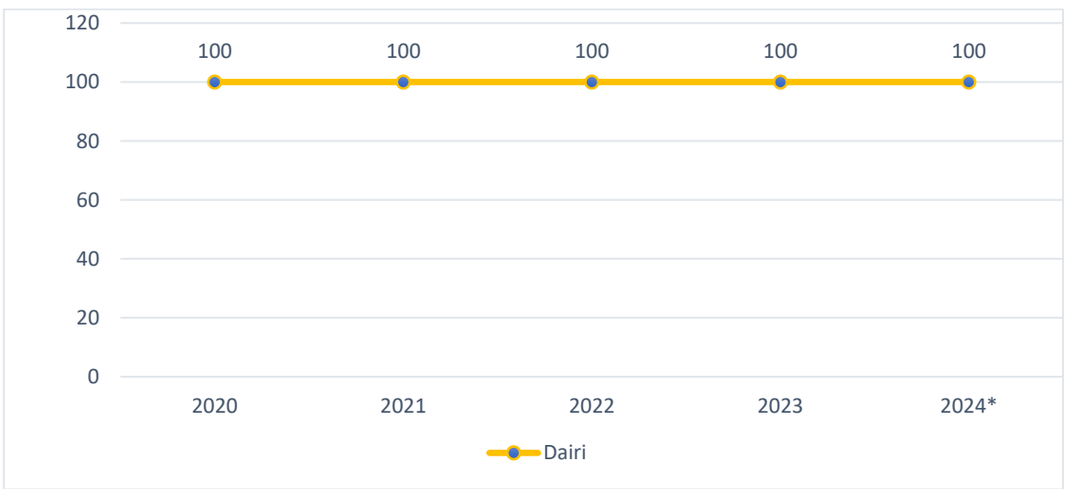
D. Aparatur dan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran sangat penting bagi peningkatan profesionalitas pegawai. Berikut ini adalah capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi

1. Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin

Gambar 2.120 Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Tahun 2020–2024



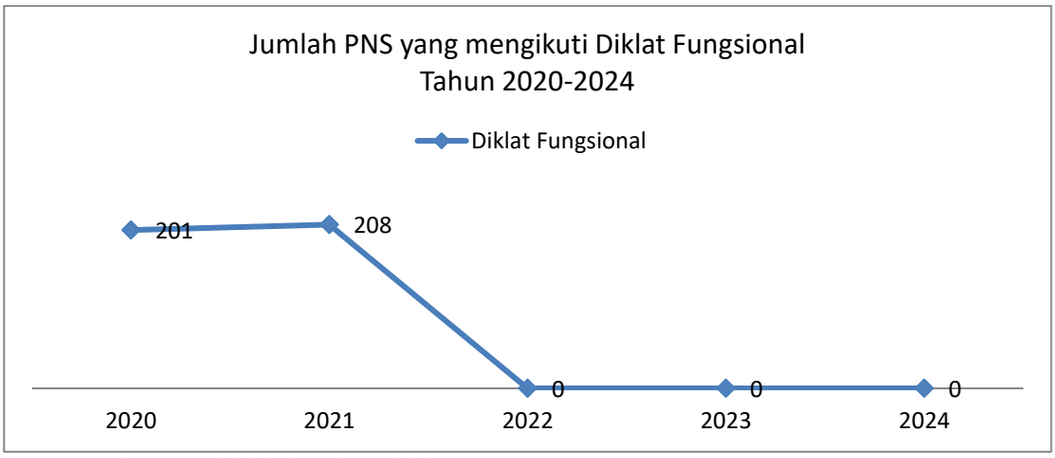
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah tercapai 100% setiap tahunnya.

Banyaknya guru diklat penilaian kinerja guru (PKG) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebanyak 79 Orang, sebanyak 38 Orang pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebanyak 38 Orang dan untuk Tahun 2020-2024 data tidak tersedia.

2. Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

Gambar 2.121 Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional pada Tahun 2020 sebanyak 201 Orang, sebanyak 208 Orang pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022-2024 data tidak tersedia.

E. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang. Urusan ini berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan yang baik berdasarkan hasil kajian dan mendorong adanya inovasi daerah. Berikut ini data mengenai capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi.

Tabel 2.67 Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Dairi 2020-2024

Aspek	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	3	3	2	1	4

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi, 2024

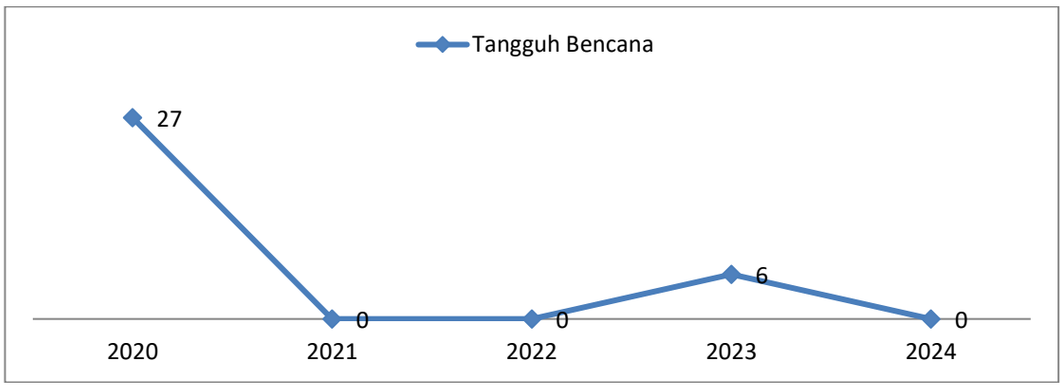
Data capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi.. Beberapa penyebab indikatif kurang maksimalnya urusan kelitbangan adalah belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, belum optimalnya sumber daya

manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan serta belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

F. Kebencanan

1. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana.

Gambar 2.122 Jumlah Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 – 2024



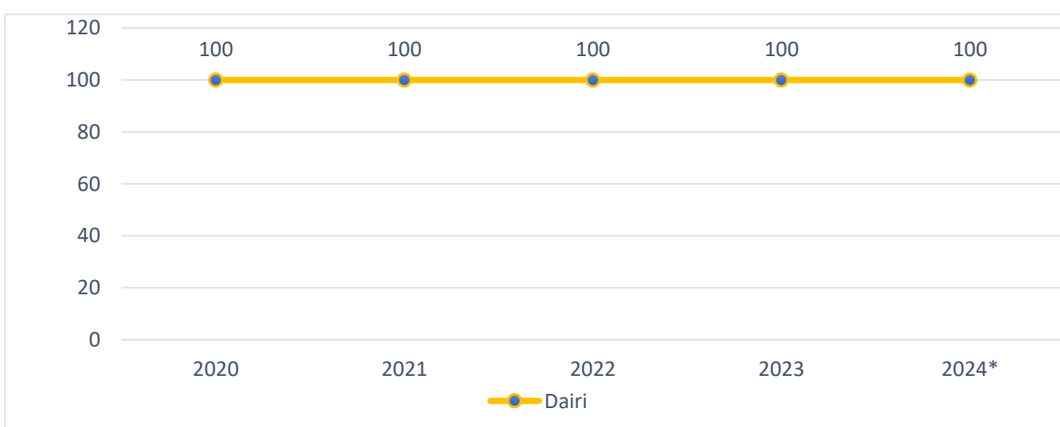
Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 27 desa dan untuk Tahun 2023 sebanyak 6 desa.

2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi sebesar 100% pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 kembali dengan nilai 100%.

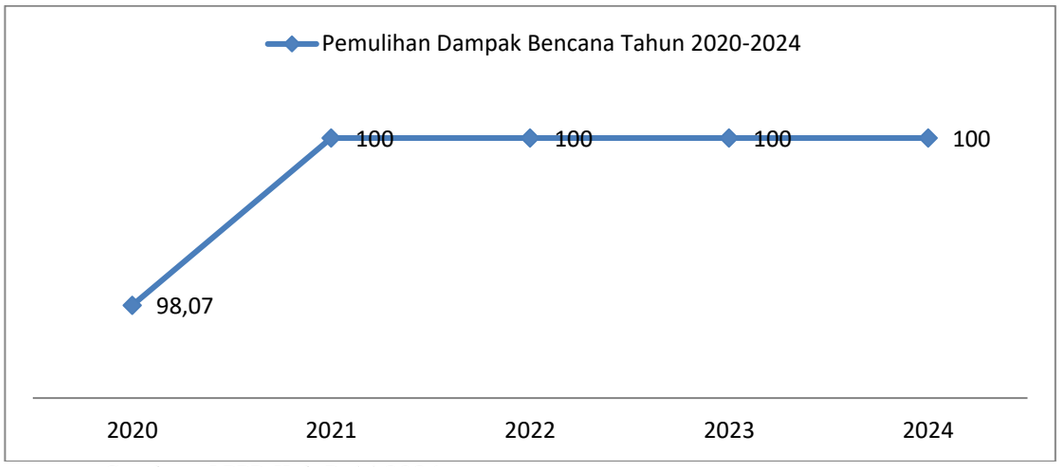
Gambar 2.123 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana.

Gambar 2.124 Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana Tahun



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase terpenuhinya pemulihan dampak bencana di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 98,07 , Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100%.

2.1.4.5 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada sub bab ini ditampilkan rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 68 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aspek Kesejahteraan						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Laju Pertumbuhan PDRB	-0,94	5.1	4.21	5.04	4,97	>
1.1.2	Laju Inflasi	4.76	3.1	2.15	1.54	2.78	>
1.1.3	PDRB per Kapita	30.271. 338	31.013. 125	33.097. 125	35.87 7.624	38.390 .000	>
1.1.4	Indeks Gini	0.27	0.23	0.22	0.24	0,215	>
1.1.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.09	1.24	0,65	0.93	0.93	>
1.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.2	0.28	0.08	0.17	0.17	<
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.2.1	IPM	71.57	71.84	72.56	75,18	75.88	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi:
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
1.2.2	Angka Melek Huruf	99.80	99.68	99.65	98.76	99.55	<
1.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	9.58	9.59	9.72	9.88	9.89	<
1.2.5	Harapan Lama Sekolah	13.10	13.11	13.24	13.32	13.53	>
1.2.9	Angka Harapan Hidup	73.35	73.53	73.94	74.13	74.38	>
2	Aspek Pelayanan Umum						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	111,00	98.24	101,97	111,34	101,66	<
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,24	99.10	95,82	89,12	94,41	<
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,19	89.40	93,78	99,28	98,95	<
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90,21	90.18	87,70	77,47	78,14	<
2.1.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.58	9.59	9.72	9.88	9.89	<
2.1.6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.55	0.57	0.05	0.02	0.11	<
2.1.7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.93	0.94	0.03	0.03	0.05	>
2.1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	=
2.1.9	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	=
2.1.10	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	124.27	91.49	99.81	99.81	98.82	>
2.1.11	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89.85	97.03	96.59	96.59	105.37	>
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Kematian Bayi	6	3	3	6	10	<
2.2.2	Angka Kematian Ibu	93	172	121	76	105	<
2.2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	79.95	89.56	70.91	71.24	100	>
2.2.4	Usia Harapan Hidup	73.35	73.53	73.94	74.13	74.38	>
2.2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	65	73.11	94.87	98.18	96.68	<
2.2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	2.49	2.49	2.18	1.09	7.22	<
2.2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80	18.22	50.07	66	72.55	<
2.2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.18	88.34	87.62	75.56	100	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.51	70.65	80.04	94	93.03	<
2.2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.54	47.79	68.55	100	100	>
2.2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	50.46	43.18	80.99	58	87.06	<
2.2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	59.54	6.29	25.00	30.35	50.00	<
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	56,51	58.39	58,43	51,80	52,66	<
2.3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	90.12	90.12	90.12	90	89.23	>
2.3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	89.72	78.86	72.93	71	71.87	>
2.3.4	Capaian Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	91.31	89.03	89.03	93.61	94.45	>
2.3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	1.25%	2.25%	1.68%	2.50%	2.60%	>
2.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	79.85	71.02	69.04	69.46	73.53	>
2.4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	58.42	33.51	23.54	25.04	25.39	>
2.4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	65.6	83.81	58.89	72.92	65.03	>
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
2.5.1	Persentase Penanganan	100	100	90.17	100	84.62	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelanggaran Peraturan Daerah						
2.6	Sosial						
2.6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	47.48	35.96	71.98	100	100	>
2.7	Tenaga Kerja						
2.7.1	Tingkat pengangguran terbuka	1.75	1.49	0.88	1.23	1.43	<
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender	98.02	98.05	98.15	98.44	99.07	>
2.8.2	Indeks Pemberdayaan gender	61.14	61.11	62.57	62.34	63.27	>
2.9	Pangan						
2.9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72.3	82.9	na	na	na	<
2.9.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	100.63	64.47	na	92.32	93.16	>
2.9.3	Persentasen Konsumsi Protein Per kapita	95.63	71.04	na	97.00	97.34	>
2.10	Pertanahan						
2.10.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	2,624	2,743	6,453	3,000	3.000	<
2.11	Lingkungan Hidup						
2.11.1	Penurunan Lahan Kritis	12.41	9.44	9.22	8.65	8.35	<
2.11.2	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	na	na	13.342, 56 ton	16.35 2,82 ton	16.379 ,22 ton	<
2.11.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	>
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	60,09	65,52	69,65	75,36	76.55	>
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.13.1	Jumlah Bumdes	17	4	25	0	25	<
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.14.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	72.49	72.90	69.20	47.28	51.81	<
2.14.2	Unmet Need	13.24	12.96	27.33	27.21	18.96	<
2.15	Perhubungan						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.15.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.16	Komunikasi dan Informatika						
2.16.1	Persentase OPD menggunakan SPBE	17.45	42.5	100	100	100	=
2.16.2	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	7	7	7	7	7	=
2.17	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah						
2.17.1	Jumlah Koperasi Aktif	158	158	158	158	96	>
2.17.2	Jumlah Usaha Mikro	13.682	13.682	13.682	13.682	21.038	<
2.18	Penanaman Modal						
2.18.1	Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP	90	90	90	90	100	>
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga						
2.19.1	Terfasilitasinya layanan kepemudaan	25	29	0	0	50	<
2.19.2	Persentase penanganan gedung olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.20	Kebudayaan						
2.20.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayan Yang Terfasilitasi	5	5	5	5	5	=
2.20.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	1	1	1	1	1	<
2.20.3	Jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya	1	1	1	1	1	<
2.21	Perpustakaan						
2.21.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	3.510	3.968	15,775	28.128	59.991	>
2.22	Kearsipan						
2.22.1	Jumlah Arsip yang Dilestarikan	na	na	133	153	239	=
2.23	Perikanan dan Kelautan						
2.23.1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	42.71	42.87	43.37	44.30	44.36	>
2.24	Pariwisata						
2.24.1	Jumlah kunjungan wisata	57.927	133.676	205.335	265.547	252.215	<
2.24.2	Jumlah usaha hotel	27	27	31	31	32	<
2.25	Pertanian						
2.25.1	Produktivitas Tanaman Pangan						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Padi Sawah	54.97	55.66	55.85	56.33	60.38	<
	- Padi Ladang	37.27	36.37	37.2	39.39	50.36	<
	- Jagung	56.34	60.55	60.45	60.7	60.68	<
2.25.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura						
	- Jeruk Manis	4.19%	4.00%	4.12%	na	3.33%	<
	- Kentang	4.77%	4.74%	4.76%	na	0.30%	<
	- Cabe merah	1.68%	1.66%	1.56%	na	3.34%	>
	- Durian	5.05%	5.17%	4.91%	na	5.14%	<
2.25.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat						
	- Kopi	13.743	16.906	17.425	21.189	21.513	>
2.25.4	Jumlah Populasi Peternakan						
	- Babi	1.510	1,764	4.155	4.304	21.806	<
	- Ayam	994.786	1.075.695	1.066.633	1.079.882	275.232	<
2.26	Kehutanan						
2.26.1	Rehabilitasi Lahan Kritis	12.41	9.44	9.22	8.65	8.35	>
2.27	Perdagangan						
2.27.1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.22	17.55	17.67	17.76	17.79	>
2.27.2	Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran	-0.68	4.21	6.67	5.96	6.24	>
2.28	Perindustrian						
2.28.1	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	6.53%	4.23%	4.91%	4.79%	-2.93%	<
2.29	Sekretariat Daerah						
2.29.1	SAKIP	C	CC	CC	B	B	>
2.29.2	Predikat LPPD	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	<
2.29.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	71.46	77.75	85.45	87.11	89.97	>
2.29.4	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelengkan Secara Elektronik	96.10	100	100	100	100	=
2.29.5	Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi	3	3	3	3	3	=
2.29.6	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	2	2	2	2	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.29.7	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	16,525	16,525	na	na	na	=
2.30	Sekretariat DPRD						
2.30.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	100	100	100	100	100	=
2.31	Perencanaan						
2.31.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	=
2.31.2	Tersedianya dokumen perencanaan	3	2	3	2	3	=
2.31.3	Tersedianya dokumen pendukung perencanaan	2	2	2	2	2	=
2.31.4	Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	1	1	1	1	1	=
2.31.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	65	90	90	90	90	>
2.32	Keuangan						
2.32.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.32.2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8.51	6.33	7.31	7.14%	8.39	>
2.33	Kepegawaian						
2.33.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	100	100	=
2.34	Pendidikan dan Pelatihan						
2.34.3	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	201	208	N/A	N/A	N/A	>
2.35	Penelitian dan Pengembangan						
2.35.1	Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	3	3	2	1	4	=
2.36	Pengawasan						
2.36.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	>
2.36.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	59.40	84.75	90	80	90	>
3	Aspek Daya Saing Daerah						
3.1	Pengeluaran per kapita	10.350	10.504	10.740	10.969	11.355	>
3.2	Rasio ketergantungan	53,98	63,6	64	63,13	68,86	<

Permasalahan dan isu strategis

Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu ditingkatkan terutama beberapa urusan yang belum memenuhi target. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah. Pendekatan ini mengidentifikasi kondisi riil yang diperkuat dengan analisis data capaian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Dairi selama 5 tahun terakhir. Pemetaan ini untuk memberikan gambaran dalam merumuskan tema setiap periode rencana pembangunan jangka menengah dan intervensi arah kebijakan.

2.3.1 Permasalahan Pokok Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah tersebut diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan ini didasarkan pada telaah bab II tentang gambaran umum daerah. Adapun masalah pokok Kabupaten Dairi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut

A. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS menggambarkan kondisi akses layanan pendidikan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS dan HLS menunjukan semakin tinggi kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan. Selama periode 2020-2024, angka RLS dan HLS Kabupaten Dairi menunjukan trend yang meningkat. Pada Tahun 2020, RLS Kabupaten Dairi sebesar 9,58 menjadi 9,93 pada tahun 2024 atau setara kelas 1 SMA, sedangkan HLS sebesar 13,10 pada tahun 2020 menjadi 13,53 atau setara jenjang D2. Meskipun mengalami peningkatan, namun jika dibanding dengan wajib belajar 12 tahun atau setara kelas 3 SMA,

capaian tersebut masih cukup jauh. Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2024 masih dibawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara yang berada diangka 10,18, Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Dairi masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan berikutnya.

B. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kualitas pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting, kondisi fasilitas kesehatan, dan ketersediaan sumber daya kesehatan.

Selama periode (2020-2024), capaian AHH Kabupaten Dairi menunjukan trend meningkat dan berhasil naik 1,03, dimana pada tahun 2020 sebesar 73,35 dan pada tahun 2024 menjadi 74,38. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,90. Meskipun capaian AHH Kabupaten Dairi cukup bagus, namun dari segi pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting. Pada Tahun 2024, angka kematian ibu 105 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2024 angka kematian bayi 10 per 1.000 kelahiran hidup dan prevalensi stunting 23,50% pada Tahun 2024. Masih adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi, dan balita masih perlu ditingkatkan.

Dari segi fasilitas kesehatan, Kabupaten Dairi memiliki 1 rumah sakit umum yakni RSUD Sidikalang dan 1 unit rumah sakit swasta. Rumah sakit tersebut menjadi tempat rujukan bagi masyarakat Kabupaten Dairi yang tersebar di 15 kecamatan. Terbatasnya jumlah dan tipe rumah sakit yang ada di Kabupaten Dairi mengakibatkan beberapa pasien harus dirujuk ke daerah lain seperti Medan dan Kabanjahe yang memiliki fasilitas kesehatan lebih memadai. Fasilitas

kesehatan yang lainnya seperti Puskesmas dan Pustu memiliki jumlah yang cukup memadai. Namun, berdasarkan dokumen LPPD Kabupaten Dairi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana, serta alat kesehatan yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari segi ketersediaan SDM kesehatan juga perlu ditingkatkan, terutama dokter spesialis, serta pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan puskemas dan tenaga penunjang manajemen.

C. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi selama periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 memiliki tren fluktuatif. Pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan karena dampak COVID-19. Namun pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 persentase penduduk miskin menurun di Kabupaten Dairi yaitu dari 7,47 menurun menjadi 7,10 di tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dengan berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dairi.

D Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Artinya, dalam sebuah proses pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakatnya, harus dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Kabupaten Dairi mendapatkan predikat baik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Tahun 2024. Namun, Kabupaten Dairi masih memiliki permasalahan dalam urusan

lingkungan hidup pada beberapa sektor. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dairi diantaranya terkait pengelolaan persampahan yang belum optimal, dibuktikan dengan sarana dan prasarana yang belum tersedia secara merata melayani di setiap kecamatan di Kabupaten Dairi. Selain itu, rasa kepedulian masyarakat di Kabupaten Dairi terkait penanganan sampah juga dinilai masih kurang. Kondisi tersebut yang menjadikan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi belum optimal hingga Tahun 2024.

E. Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Perkembangan wilayah salah satunya diukur dengan pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur wilayah yang memadai akan mampu memenuhi hak dasar masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah dengan terpenuhinya sarana prasarana pendukung perekonomian. Permasalahan pada aspek infrastruktur berbeda-beda di setiap wilayah karena tantangan yang dihadapi juga bervariasi. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Dairi diantaranya belum optimalnya kualitas infrastruktur.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

Tabel 2.86 Permasalahan Pembangunan berdasarkan urusan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
1	**Pendidikan**		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal	Belum meratanya pemenuhan kebutuhan guru dan kualitas tenaga pendidik
			Belum optimalnya kualitas akses sarana dan prasarana pendidikan
2	**Kesehatan**		
	Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
			Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan pelayanan
		Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Belum optimalnya sarana pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi paripurna
		Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan	Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
			Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
			Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
			Belum optimalnya sistem drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum termutakhirkannya dokumen regulasi rencana tata ruang	Penyusunan regulasi perubahan rencana tata ruang dalam proses Penyusunan
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
	Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
			Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
			Masih adanya permukiman kumuh
		Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
			Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
			Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
			Masih adanya rumah yang belum memliki akses air

			minum
			Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan**		
	Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya monitoring ijin usaha sesuai kewenangan kabupaten
		Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang tersedia
			Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
			Terbatasnya jumlah pos damkar
	Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam mengadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencanapada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
			Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat
6	**Sosial**		
	belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
			Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin dan kelompok rentan
		Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
		Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
		Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial
II	**Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
1	**Tenaga Kerja**		
	Belum optimlanya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya penyebaran informasi lowongan kerja; yang menyebabkan kurangnya akses terhadap pasar kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat Belum tersedianya database

			tenaga kerja
		Mutu tenaga kerja relatif rendah/Belum optimalnya kompetensi Angkatan kerja	Minimnya Ketrampilan tenaga kerja
		Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pelatihan kerja	Minimnya sarana dan prasarana pelatih kerja
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik
			Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	belum optimalnya layanan perlindungan anak	Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap anak
			Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak
3	**Pangan**		
	Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan
			Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
			Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
		Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan Belum optimalnya diversifikasi pangan	Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
		Masih adanya pangan tidak aman yang beredar di masyarakat	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan
4	**Pertanahan**		
		Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah dan koordinasi penggunaaan tanah dan pencatatan aset untuk pembangunan	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
5	**Lingkungan Hidup**		
		Belum optimalnya penanganan pencemaran air, tanah dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri, domestik dan transportasi
			Belum optimalnya pengurangan sampah
			Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan,

	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)
		Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup alih fungsi lahan hijau
			Adanya ekspoitasi alam yang merusak lingkungan
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Dairi memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
			Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
			Masih terbatasnya Perangkat Daerah yang menggunakan data kependudukan dalam pelayanan publik
7	**Perhubungan**		
	Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
			Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
			Belum optimalnya penataan parkir
			Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
		Belum optimalnya pemanfaatan prasarana Transportasi	Kurangnya kesadaran pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas
8	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
	Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa
		belum optimalnya sarana prasarana desa	Belum optimalnya pemanfaatan dana desa
		Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa
9	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
		Belum Optimalnya akses pelayanan dan kualitas Keluarga	usia perkawinan dibawah umur
			Masih rendahnya kesadaran

	Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Berencana	untuk ber-KB
			Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
		Belum optimalnya Ketahanan keluarga	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
10	**Komunikasi dan Informatika**		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
	Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**		
	Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
		Rendahnya omzet	Kapasitas produksi usaha
		usaha mikro	mikro masih kurang
			Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
12	**Penanaman Modal**		
	Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
			Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
		Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi
			Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
			Belum optimalnya promosi investasi
			Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal
13	**Kepemudaan dan Olahraga**		
	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Masih rendahnya pembinaan pemuda

		Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga
14	**Statistik**		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
15	**Persandian**		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Kurangnya kapabilitas persandian daerah dalam pengelolaan kemanan informasi	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja
			kerangka kerja keamanan informasi terstandar
16	**Kebudayaan**		
	Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan Daerah	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
			Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya
			Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	Belum tersedianya museum
17	**Perpustakaan dan Kearsipan**		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
			Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
			Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip	Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
		Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip
III	**Urusan Pilihan**		
1	**Pertanian dan Perikanan**		
	produksi hasil	a. Belum Optimalnya produksi pertanian b. Belum optimalnya kelembagaan petani c. Belum optimalnya	Sarana prasarana dan infrasturktur pertanian belum memadai
			Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum

	pertanian yang belum optimal	produksi peternakan d. Belum optimlanya pengendalian bencana pertanian	Memadai, kemandiaran petani yang kurang
			Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
		Produksi perikanan belum optimal	Sarana perikanan budidaya dan tangkap belum memadai
2	**Pariwisata**		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
			Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
3	**Kehutanan**		
	-	-	-
4	**Perdagangan dan Perindustrian**		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
			Rendahnya pertumbuhan ekspor
			Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
	Belum optimalnya kontribusi sektor industri	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal
IV	**Penunjang Urusan**		
1	**Sekretariat Daerah**		
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
			Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
			Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan
2	**Sekretariat DPRD**		
	Belum optimalnya fasilitasi antara eksekutif dan legislatif	Belum optimalnya fasilitasi antara eksekutif dan legislatif	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
			Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
			Belum otimalnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD
3	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**		
	Belum optimalnya		Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid
			Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen

	kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	perencanaan
			Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi	Belum optimalnya tema prioritas riset dan inovasi yang disusun	Belum optimalnya sinkronisasi/penerapan hasil riset dan inovasi dengan program daerah
			Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam riset dan inovasi daerah
4	**Keuangan**		
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan
			Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
			Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
			Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran
			Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
			Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah
			Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
5	**Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan**		
	Belum optimalnya kualitas Manajemen	Belum optimalnya	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemerintah Daerah yang valid dan konsisten.
			Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di

	Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	tingkat Pemerintah Daerah
			Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah dengan K/L
	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemerintah Daerah
6	**Pengawasan**		
	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
		Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerjaInspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasi-kan secara memadai
		Praktik pengawasan belum memenuhi standart	Lemahnya pengendalian internal
		Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemerintah Daerah terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
	Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
		Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat
		Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
			Belum optimalnya budaya sadar risiko
V	**Unsur Kewilayahan**		
	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan
			Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
			Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
			Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang

	Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah		Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
		Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
			Belum Optimalnya penyelesaian masalah- masalah aktual di wilayah kecamatan
		Belum Optimalnya kondisivitas wilayah	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
			Belum Optimalnya penyelesaian masalah- masalah actual di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
			Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan
			Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat
VI	**Unsur Pemerintahan Umum**		
		Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik
			Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
			Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

2.3.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi mempertimbangkan pada isu global, isu nasional dan isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu direspons dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi.

2.3.4 Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Krisis Lingkungan Global

Krisis Lingkungan Global, mencakup tiga tantangan utama yang saling terkait: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini saling memperkuat dampaknya, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di Bumi. Perubahan Iklim menjadi salah satu aspek paling menonjol dari krisis ini. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini berdampak pada pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati juga menjadi perhatian utama. Perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies karena banyak organisme tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, aktivitas manusia seperti perburuan liar, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat alami flora dan fauna . Polusi Lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, memperburuk kondisi ekosistem dan kesehatan manusia. Polusi udara, misalnya, berkontribusi terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara polusi air dan tanah mengancam ketersediaan air bersih dan keamanan pangan.

b. Ketidakpastian dan Ketegangan Geopolitik Global

Ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global telah menjadi faktor dominan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan internasional pada tahun 2025. Konflik bersenjata seperti perang Rusia- Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, telah mengganggu pasokan energi dan pangan global, menyebabkan lonjakan harga dan inflasi di berbagai negara. Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait Selat Taiwan, semakin memperburuk ketegangan regional dan mengancam stabilitas jalur perdagangan internasional.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya terbatas pada aspek geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan energi dan pangan nasional. Krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil menimbulkan risiko terhadap keamanan energi Indonesia.

c. Transformasi Teknologi dan Kompetisi Ekonomi Digital

Transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital telah menjadi pilar utama dalam dinamika global saat ini. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk adopsi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan komputasi awan, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial di berbagai negara. Negara-negara berlomba untuk meningkatkan daya saing digital mereka guna memperoleh keunggulan dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

d. Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Penduduk Secara Global Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk secara global merupakan isu yang semakin kompleks di era globalisasi, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mobilitas tenaga kerja lintas negara, baik yang terampil maupun tidak, telah meningkat seiring dengan kebutuhan pasar global. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yang sering kali menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

e. Kergantungan Energi Fosil dan Transisi Energi

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, telah menimbulkan tantangan serius dalam konteks perubahan iklim global dan ketahanan energi nasional. Sektor energi menyumbang lebih dari 30% emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, menjadikannya kontributor utama terhadap pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

f. Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global

Ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global telah menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor utama yang memicu ketidakpastian ini adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada April 2025, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk hampir semua barang impor ke AS, dengan tambahan tarif hingga 32% untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Langkah ini memicu ketegangan dagang internasional dan memperburuk kondisi perdagangan global.

Perang dagang antara negara-negara besar, seperti AS dan China, telah menciptakan ketidakpastian yang luas dalam ekonomi global. Ketegangan ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan internasional, peningkatan biaya produksi, dan penurunan investasi global.

g. Peningkatan Risiko Bencana Global

Peningkatan risiko bencana global, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, telah menjadi tantangan signifikan bagi ketahanan nasional Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan meningkat secara signifikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia, dengan dampak yang meluas pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.3.5. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Produktivitas nasional Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah di tengah meningkatnya persaingan

global. Mengacu pada laporan Asian Productivity Organization (2024), pertumbuhan rata-rata produktivitas Indonesia yang diukur melalui indikator Total Factor Productivity (TFP) selama periode 2015–2022 hanya mengalami peningkatan sebesar 60 basis poin dibandingkan periode sebelumnya (2010–2015), yakni dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Capaian ini menunjukkan perbaikan yang sangat terbatas dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang pernah berada pada tahap transisi menuju negara maju. Sebagai perbandingan, Korea Selatan mampu mencatat pertumbuhan TFP sebesar 1,78 persen selama periode 1971–1995, sedangkan Tiongkok mencatat 2,12 persen pada kurun waktu 2005–2022. Rendahnya produktivitas di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia— terutama pada kelompok perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang belum memadai. Selain itu, kelembagaan yang belum kuat, seperti lemahnya sistem insentif, regulasi yang belum mendukung transformasi ekonomi, dan rendahnya kepastian hukum, turut memperburuk kondisi produktivitas nasional

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan laporan Asian Productivity Organization (2024), tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) per pekerja pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai US$149.100 per pekerja, serta di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar US$40.200 per pekerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Kelompok calon kelas menengah kini menjadi bagian terbesar

dalam struktur sosial ekonomi Indonesia. Selama periode 2019–2024, jumlahnya bertambah sebanyak 8,65 juta orang, sehingga mencapai 137,5 juta jiwa atau sekitar 49,2 persen dari total populasi nasional. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan: jumlah masyarakat rentan miskin juga meningkat sebesar 12,72 juta jiwa dalam kurun waktu yang sama, mencapai 67,69 juta orang atau 24,33 persen dari populasi pada tahun 2024 (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi ekspansi pada kelompok calon kelas menengah dan rentan miskin, jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan.

Di samping itu, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyediakan akses terhadap perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang besar dengan kapasitas pemenuhan layanan publik dan sumber daya yang terbatas berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan penduduk dapat dipenuhi secara adil, efisien, dan inklusif, guna mendukung pencapaian kesejahteraan nasional dan stabilitas jangka panjang.

e. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi tetap menjadi isu strategis yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku

kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga akan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

b. Geo Politik dan Geo Ekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Eskalasi persaingan antarnegara besar serta kemunculan kekuatan-kekuatan baru telah memengaruhi konstelasi kawasan dan tatanan global, serta menuntut Indonesia untuk terus menyesuaikan peran dan sikapnya dalam hubungan internasional.

Salah satu contoh nyata dari ketegangan geopolitik adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yang telah menimbulkan dampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik ini telah memperbesar kewaspadaan terhadap potensi krisis baru di berbagai kawasan seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Dampaknya mencakup tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, serta meningkatnya belanja militer oleh banyak negara guna memperkuat kedaulatan nasional. Hal ini mendorong kemungkinan terjadinya konflik lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan maupun global.

2.3.6. Isu Strategis Provinsi

Pada tingkatan regional, ditetapkan isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Dairi yakni :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya

permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. Urban sprawl atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar. Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.

b. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antara daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan

mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan informasi.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3.7 Isu Strategis Kabupaten Dairi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025-2029 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

a. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 6/400.9.14/I/2023 tanggal 5 Januari 2023. Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional

penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Berdasarkan data Statistik Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2024 sebesar 7,10 lebih baik bila dibangdingkan dengan data tahun 2023 yakni sebesar 7,47 dan data tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 8,15

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pemetaan permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan Kabupaten Dairi telah menggambarkan berbagai permasalahan pokok. Selain itu, telaah beberapa dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi di bidang sumber daya manusia. Secara umum, pemetaan masalah pada rumpun sumber daya manusia, sosial, dan budaya menunjukkan belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Dairi relatif dibandingkan daerah sekitar dan rata-rata provinsi.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; kualitas pendidikan yang belum optimal. Kualitas pendidikan tersebut salah satunya ditandai dengan belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2024 meningkat 0,21 tahun yakni dari 13,32 pada tahun 2023 menjadi 13,53. Capaian ini sudah diatas harapan lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 13,49. Kemudian rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 meningkat sebesar 0,01 tahun yakni dari 9,88 pada tahun 2023 menjadi 9,89. Rata-Rata sekolah ini berada dibawah rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 9,93. Sedangkan kinerja pemberdayaan perempuan juga masih relatif belum optimal

dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 sebesar 63,27 persen. Berbagai persoalan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, isu terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini layak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi.

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, selain sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan strategis di sektor kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2024 AKI sebesar 105 meningkat dari tahun 2023 sebesar 76 kasus;
2) Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2024, AKB sebanyak 10 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup.
3) Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting, dimana pada tahun 2024 prevalensi sebesar 23,5 persen.

c. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Dairi, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan atau agenda prioritas yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi daerah lain yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi daerah lain yang mengalami surplus ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2024 sebesar 4,74% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5,04%. Capaian peetumbuhan ekonomi

pada tahun 2024 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju peertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara yakni 5,03%. Pemerintah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kualiatas pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Beberapa agenda prioritas daerah yang diharapakan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 1) penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2) penumbuh kembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja, 3) penumbuhkembangan inkubator bisnis dan *start up* di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan 4) peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan 5) perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda- agenda prioritas tersebut menjadi penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Dairi.

d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi

Isu strategis rumpun tata kelola Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembanguan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Misalnya terkait agenda pengendalian reformasi birokrasi yang belum optimal yang dapat dilihat dari belum optimalnya sistem

pengendalian kualitas pelayanan publik, belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Beberapa realitas lapangan di atas perlu direspon dalam pembangunan mendatang dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif serta pelaksanaan survei kepuasan layanan secara reguler. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mengikuti tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan untuk mewujudkan efektifivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik.

e. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan Kabupaten Dairi memasuki periode akhir dari RPJPD Kabupaten Dairi. Hal ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang kabupaten harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dairi yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan

berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; serta antisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi juga berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Peningkatan konektivitas ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana logistik serta melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat-pusat wisata Dairi dalam rangka mendukung status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional. Selanjutnya terkait dengan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, hal

tersebut menjadi pemegang peranan penting sebagai salah satu faktor dalam pencapaian target pembangunan baik Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah fokus dalam penanganan stunting, dimana sektor air bersih, sanitasi dan perumahan menjadi bagian dalam memerangi stunting.

Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang daerah, baik struktur maupun pola ruang. Pengelolaan sistem perencanaan ruang yang terpadu juga akan dapat memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dampak negatif pembangunan yang mengarah kepada perusakan lingkungan akan dapat ditekan. Jika persoalan ini dapat diatasi maka keberlanjutan dan kesinambungan untuk kehidupan masyarakat Dairi pada masa yang akan datang akan dapat terjaga.

2.3.8. Telaah RTRW Kabupaten Dairi 2014-2034.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Dairi 2013-2033, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Dairi yang sejahtera berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi untuk “Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah” melalui:
    a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Lintas Tengah dan sarana pendukungnya.

b. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Poros Provinsi.
c. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Nasional.
d. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Provinsi.
e. Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jaringan jalan Kabupaten.
f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan di PKL dan PPK

2. Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
   c. Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.

d. Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri.

3. Strategi yang diperlukan untuk "Meningkatkan fungsi Kota Sidikalang sebagai PKW dan Kota Sumbul sebagai PKLp" melalui;
   a. Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah
   b. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal
   c. Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.

2. Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka "Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya" melalui:
   a. Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
   b. Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat
   c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
   d. Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung, terutama hutan lindung.

e. Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk enclave dan relokasi.

3. Strategi dalam rangka ”Mendorong peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan moderenisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan” melalui :
   a. Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
   b. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
   c. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi
   d. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
4. Strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka “Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan” melalui:
   a. Pengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
   b. Peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang

lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

c. Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

d. Pembangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

e. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.

f. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

2.3.8.1 Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi terdiri atas:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas beberapa bagian, antara lain adalah PKW, PKLp, PPK, dan PPL. Penjelasan lebih lengkap tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 87 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Kab.Dairi

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
1.	PKW	Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo)	▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pusat Perdagangan dan Jasa Regional ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa ▪ Terminal Regional Tipe B ▪ Pusat Pelayanan Sosial ▪ Pusat Kawasan Agropolitan ▪ Transit ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pendidikan ▪ Pusat Pelayanan Pariwisata
2.	PKLp	Sumbul	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan
			Perkebunan ▪ Permukiman Perkotaan
		Tigalingga	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Peternakan
		Parongil	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Kawasan Pertambangan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman Perkotaan
3	PPK	Bunturaja	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan
4	PPL	Kutabuluh	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan
		Silalahi	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Pariwisata ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Perikanan ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman
		Berampu	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian
		Sigalingging	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Lae Parira	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Perikanan

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
		Silumboyah	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Tiga Baru	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Sopobutar	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan
		Gunung Sitember	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi

2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
   a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
   b. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
   c. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
   e. Rencana pengembangan prasarana persampahan;
   f. Rencana sistem pengelolaan air minum;
   g. Rencana sistem jaringan drainase;
   h. Rencana sistem jaringan air limbah
3. Rencana pola ruang Kabupaten Dairi terdiri atas:
   a) Kawasan hutan lindung

   Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi ditetapkan seluas 60.463,89 Ha yang tersebar di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punggapungga, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung

Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan resapan air di Kabupaten Dairi seluas 51.317 Ha yang tersebar di kawasan hutan Delleng Cengkeh, Sibuatan Selatan, Adian Tinjoan, dan Dairi.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Dairi terdiri dari sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan suaka alam di Kabupaten Dairi berada di kawasan hutan Adian Tinjoan (Register 67) terletak di sebelah Selatan Kabupaten Dairi dan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas kawasan hutan Adian Tinjoan di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih 7.912 Ha sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11.868 Ha berada di Kabupaten Pakpak Bharat.

e) Kawasan lindung geologi

Kriteria kawasan lindung geologi, yaitu adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik. Kabupaten Dairi termasuk wilayah rawan terhadap bencana alam geologi yang didasari letaknya berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi dan patahan/sesar sungai Lae Renun Kecamatan yang berpotensi terhadap bencana alam geologi meliputi Kecamatan Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

f) Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Dairi berupa gempa bumi, tanah longsor, amblesan dan angin puting beliung.

Kriteria kawasan rawan bencana alam, yaitu:

- Adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik
- Kawasan rawan tanah longsor, ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- Merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung

Berdasarkan karakter topografi, jenis tanah, hidrologi, pola drainase alami dan klimatologi, bahwa delineasi kawasan lindung bencana alam seluas kurang lebih 29.229,12 Ha atau sekitar 14,69% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di seluruh kecamatan.

g) Ruang terbuka hijau

RTH di Kabupaten Dairi diarahkan di Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo), Sumbul, Tigalingga dan Parongil berupa taman kota dan kawasan pertanian.

Dari segi pemanfaatannya, RTH berfungsi sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan serta sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga baik pada skala lingkungan maupun kota, disamping itu ada juga yang bersifat privat seperti jalur hijau dan fasilitas taman yang ada disepanjang perumahan (pola perumahan linier) disepanjang jalan atau yang ada di tempat rekreasi, seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo.

Rencana pola ruang kawasan budidaya;

a) Kawasan peruntukan hutan produksi

Penetapan Hutan Produksi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Unsur hutan produksi antara lain:

- Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Dairi seluas 3.902,83 (tiga ribu sembilan ratus dua koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 6,64% dari luas Kabupaten Dairi, terletak di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan dan Siempat Nempu Hulu.

- Hutan Produksi Terbatas

  Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dairi seluas 50.901,31 (lima puluh ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu) hektar, terletak di Kecamatan Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Punggapungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b) Kawasan peruntukan hutan rakyat

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih sekitar 12.439 Ha yang tersebar di 15 kecamatan.

c) Kawasan peruntukan pertanian

- Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 Ha atau setara dengan sekitar 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember.

- Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 Ha tersebar diseluruh kecamatan.

d) Kawasan peruntukan perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri

dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

e) Kawasan peruntukan peternakan

Pemenuhan kebutuhan ternak di Kabupaten Dairi pengembangan peternakan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, utamanya jenis komoditas ternak kerbau, lembu, kambing, babi dan ayam. Hal ini terkait dengan kearifan lokal di Kabupaten Dairi, dimana dalam pemenuhan jenis ternak sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai media dalam hubungan sosial kemasyarakatan/adat istiadat.

f) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan.

g) Kawasan peruntukan pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Punggappungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir. Disamping itu, terdapat potensi bahan galian

Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

h) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain;
- Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain;
- Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain;
- Kecamatan Silima Punggapungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyam-anyaman dan lain-lain.

i) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari pariwisata alam dan pariwisata budaya.

- Pariwisata Alam

  Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang

memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

- Pariwisata Budaya

  Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi.

j) Kawasan peruntukan permukiman

- Permukiman Perkotaan

  Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Dairi dikembangkan di kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

- Permukiman Perdesaan

  Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

  Mengingat desa-desa di Kabupaten Dairi

jumlahnya relatif banyak, mencapai 169 desa/kelurahan, maka sistem perdesaan diarahkan sebagai berikut:

- Sistem dusun memiliki pusat dusun;
- Terdapat satu pusat bagi setiap desa;
- Beberapa desa memiliki pusat pelayanan/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
- Perdesaan yang lokasinya strategis, langsung berhubungan dengan ibukota kecamatan (IKK);
- Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan, diorientasikan berhubungan langsung dengan pusat kota

2.3.9. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Dairi. Isu pembangunan tersebut terutama terkait masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 6 isu di Kabupaten Dairi yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan capaian TPB dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Dairi.

Terdapat 21 OPD yang bertangung jawab dan berkewenangan dalam pencapaian TPB di wilayah Kabupaten Dairi. Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPPKB paling banyak terkait indikator TPB, yaitu : 39 indikator dan 25 indikator. Dari sisi pencapaian indikator TPB pada masing-masing OPD, pencapaian yang paling besar oleh Badan Kesbangpol sebesar 100 % dan Dinas PerindakopUKM sebesar 67 %. OPD lain yang menghasilkan pencapaian lebih besar dari 50 % lainnya, adalah BPBD, BPKAD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas PMPPTSPK dan Dinas PPAPPKB.

Sedangkan, OPD yang paling kecil pencapaiannya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Perhubungan dan Dinas PMD sebesar 0 %, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 11 %.

A. Capaian Indikator TPB

Pemetaan indikator TPB bagi Kabupaten Dairi menghasilkan

218 indikator. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi baru mencapai 46 %, yaitu 101 indikator dari 218 indikator (SS). Kondisi ini memerlukan kerja keras dan terpadu untuk meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketidakcapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat juga dilihat dari indikator- indikator belum mencapai target sebanyak 42 %, yaitu 93 indikator (SB). Kondisi ketidakcapaian ini masih cukup besar walaupun tidak lebih besar daripada yang telah mencapai target. Data pencapaian dan ketidakcapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi tersebut belum menggambarkan keadaan sebenarnya, karena jumlah indikator TPB yang tidak memiliki data (TD) masih berjumlah yang besar, yaitu 12 % atau 26 indikator, baik yang telah dilaksanakan atau memang belum dilaksanakan.

Setelah dilakukan proyeksi hingga akhir rencana KLHS RPJMD tahun 2029, dan dibandingkan dengan target pencapaian TPB pada tahun 2029 juga (Perpres 59/2016. Hasil proyeksi menunjukkan kategori capaian hingga akhir tahun rencana (2029), bahwa indikator yang Melebihi Target sebanyak 114 indikator (52 %), indikator Belum Mencapai Target dan Gap Kecil sebanyak 41 indikator (19 %), dan indikator Belum Mencapai Target dan Perlu Perhatian karena Gap besar atau cenderung memburuk sebanyak 36 indikator (17 %). Sedangkan, tidak ada data sebanyak 27 indikator (12 %)

Secara umum ketidakcapaian target pembangunan pada 63 indikator lainnya hingga pada tahun 2029 tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- Kurangnya koordinasi antar OPD dan belum terbangun kebiasaan koordinasi yang efisien dan produktif dalam melaksanakan indikator TPB;
- Kegiatan dan sistem pendataan belum berlangsung secara efisien, efektif dan tertib;
- Perkembangan kegiatan perekonomian masih terbatas dan berorientasi dengan pola usaha tradisional;
- Belum dimiliki sistem dan skala prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di OPD.
- Masih lemahnya pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan akan berlangsung sesuai rencananya;
- Kapasitas dan ketrampilan ASN dalam melaksanakan tugas

secara umum dan spesifik belum memenuhi kebutuhan;

- Sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat dan pengusaha masih kurang efektif;
- Pandangan/persepsi keluarga terhadap peran perempuan dalam peningkatan kualitas kehidupan keluarga, sosial dan ekonomi daerah.

Dalam kaitan dengan pencapaian TPB beberapa yang perlu diperhatikan terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Dairi, adalah:

- Upaya pencapaian target bagi TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan, untuk indikator akses air layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin membutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi daya dukung air bersih yang telah terlampaui dan jasa ekosistem penyediaan air bersih yang cukup, tetapi jasa jasa ekosistem tata aliran air dan banjir, jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah yang rendah memberikan ancaman pencemaran dan kerusakan sumber- sumber air bakunya;
- Upaya pencapaian target bagi TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan untuk indikator- indikator kerugian dan penanganan kebencanaan akan memfokuskan pada penangan bencana gempa, longsor dan puting beliung berisiko tinggi;
- Upaya pencapaian target bagi TPB 2 Menghilangkan Kelaparan untuk indikator- indikator kerawanan pangan dan pola makan didukung kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Pemenuhan pangan dengan meningkatkan produktivitas dengan penambahan pupuk, penjaminan debit dan kontinuitas aliran air irigasi pada daerah daya dukung air sudah terlampaui, perlindungan konversi lahan pertanian pangan, dan sistem distribusi komoditi pangan;
- Upaya pencapaian target bagi TPB 6 Menyediakan Air dan Sanitasi untuk indikator penyediaan air minum, akses sanitasi, pengolahan limbah dan pengelolaan air baku harus menangani kendala membutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi daya dukung air bersih yang telah terlampaui dan jasa ekosistem penyediaan air bersih yang cukup, tetapi sebaliknya jasa ekosistem tata aliran air dan banjir, jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah yang rendah memberikan ancaman

pencemaran dan kerusakan sumber-sumber air bakunya;

- Upaya pencapaian target bagi TPB 8 – Ekonomi, Industri dan Infrastruktur untuk indikator peran pariwisata berhadapan dengan kendala potensi jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi dan jasa ekosistem rekreasi alam yang rendah;
- Upaya pencapaian TPB 11 Kota dan Permukiman dan TPB 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi untuk indikator akses hunian yang layak yang belum tercapai berhadapan dengan permasalahan karena jasa ekosistem ruang hidup yang rendah, daya dukung air bersih yang terlampaui dan rawan bencana alam gempa, longsor dan cuaca ekstrim;
- Upaya pencapaian TPB 12 Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan yang belum menerapkan produk ramah lingkunggan akan berhadapan dengan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah yang rendah;
- Upaya pencapaian TPB 13 yang belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana akan berhadapan dengan kondisi rawan bencana gempa bumi, longsor dan cuaca ekstrim yang berisiko tinggi;
- Upaya pencapaian TPB 15 Ekosistem Daratan untuk indikator tutupan lahan hutan dan dokumen KEHATI yang belum mencapai target menghadapi faktor penghambat dari jasa ekosistem keanekaragaman hayati tinggi yang perlu dilindungi (KEHATI ekosistem hutan dan KEHATI spesies terancam).

B. Kesepakatan Isu Strategis

Dengan melakukan analisis terhadap berbagai isu, yaitu : pencapaian target indikator TPB hingga tahun akhir rencana, isu kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, isu RTRW Kabupaten Dairi yang berlaku, dan isu pada materi awal RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029. Dengan demikian, isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi dalam pencapaian TPB hingga tahun 2029 yang akan menjadi pertimbangan dan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, adalah :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.

4. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Tata Kelola PemerintahanYang Baik (Good Governance).
6. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal.

Adapun arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi adalah meningkatkan kontribusi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran reperasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor transportasi dan pergudangan.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dairi

a. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 3.1
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.942,50	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Pertambangan dan Penggalian	4,27	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Industri Pengolahan	21,72	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Pengadaan Listrik dan Gas	5,84	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,77	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Konstruksi	863,95	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 108.06	1.108,57	1.146,87	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Transportasi dan Pergudangan	256,58	247,22	244,55	264,18	290,35	304,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,78	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37
Informasi dan Komunikasi	76,64	82,12	85,77	92,29	97,83	101,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	131,28	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Real Estat	175,8	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11

Jasa Perusahaan	4,01	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	608,77	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Jasa Pendidikan	126,73	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,8	40,89	40,38	42,12	44,82	46,47
Jasa lainnya	1,32	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**6.569,81**	**6.508,05**	**6.641,67**	**6.921,48**	**7.270,26**	**7.631,31**

Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami penurunan nilai, namun pada periode atau tahun 2021 sampai tahun 2024 nilai PDRB mengalami peningkatan kembali dengan nilai positif.

Berikut penjabaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam rentang waktu 2019-2024, dimana pada tahun 2019 berjumlah sebesar Rp. 6.569,81 milyar, kemudian pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.508,05 milyar, pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.641,67 milyar pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 6.921,48 milyar dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai menjadi Rp. 7.270,26 milyar. Pada tahun 2024 PDRB Kabupaten Dairi meningkat kembali di angka Rp 7.631,31 milyar. Pertumbuhan rata-rata Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2024 sebesar 4,97 %. Untuk tahun 2024 lima (5) kontributor terbesar yakni (1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berjumlah Rp. 3.422,75 milyar disusul (2) sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11milyar, (3) sektor konstruksi sebesar Rp. 938,80 milyar, (4) sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 661,94 milyar dan (5) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 304,75 milyar.

Tabel 3.2

Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2019-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.875,85	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.630,56
Pertambangan dan Penggalian	6,43	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
Industri Pengolahan	35,79	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
Pengadaan Listrik dan Gas	6,99	7,27	7,60	8,38	8,71	93,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,13	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
Konstruksi	1.275,12	1.250,16	1.313,82	1.420,37	1.505,48	1.626,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.577,45	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
Transportasi dan Pergudangan	381,23	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	266,93	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
Informasi dan Komunikasi	85,59	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	198,65	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
Real Estat	255,62	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
Jasa Perusahaan	6,12	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	945,44	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33
Jasa Pendidikan	176,94	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63.08	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
Jasa lainnya	2,01	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**9.166,42**	**9.317,91**	**9.710,80**	**10.716,94**	**11.651,15**	**12.693,88**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan nilai, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.166,42 milyar, pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.317,91 milyar, pada tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 milyar, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.716,94 milyar, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 11.651,15, Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 12.693,88 milyar.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Dairi untuk tahun 2023, 5 (lima) kontributor terbesar yakni Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 miliar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 2.257,91 miliar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 miliar. (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 miliar dan (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 miliar.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi sebesar 4,82 %, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -0,94 % pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,05 % dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai positif menjadi 4,21 %, pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,04 %. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami penurunan nilai menjadi 4,97 %. Untuk tahun 2023, 3 (tiga) kontributor terbesar Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran yakni (1) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 9,10 %, (2) pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,75 %, (3) pembentukan modal tetap bruto sebesar 1,98 %.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,28	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	00,7	0,07	0,07	0,06
3	Industri Pengolahan	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Kontruksi	13,91	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,21	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,16	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,91	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,93	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
12	Real Estat	2,79	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,31	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
15	Jasa Pendidikan	1,93	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada distribusi persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2019-2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36 % disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,79 %, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81 %, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05 %, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 %.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi Pada tahun 2021 sebesar 1,49%, Sumatera Utara sebesar 6,33%, dan mengalami penurunan sebesar 0,61% pada tahun 2022 menjadi 0,88%, sedangkan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,17% menjadi 6,16%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,62% menjadi 1,23% dan Sumatera Utara juga mengalami penurunan dengan nilai 0,27% menjadi 5,89%. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43%, sedangkan Sumatera Utara secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu 5,60%. Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-6 terendah Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2025**.**

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku per Kapita Kabupaten Dairi pada tahun 2019 (dalam ribu rupiah) sebesar Rp. 32.272,15, pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.271,33, pada tahun 2021 sebesar Rp. 31.013,12, pada tahun 2022 sebesar Rp. 33.603,65 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 35.877,62, kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 38.398,10. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

PDRB per kapita Atas dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Dairi pada tahun 2019 (dalam ribu rupiah) sebesar Rp. 23.130,29 kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 21.142,88, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.211,34, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.21.702,72 pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 22.387,47 dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi Rp. 23.084,18.

Jika kita bandingkan antara PDRB per Kapita Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Kota Medan pada tahun 2023-2024 maka dapat kita lihat bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Dairi (dalam ribu rupiah) untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 35.877,62 masih dibawah PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 68.305,71 dan PDRB Kota Medan sebesar Rp. 122.591,56. Sementara untuk Tahun 2024 PDRB per Kapita Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 38.398,10, untuk Provinsi Sumatera utara sebesar Rp. 73.574,62 dan untuk PDRB kota Medan sebagai yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 132.571,06. Posisi PDRB Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-26 tertinggi berdasarkan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2024.

d. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi tahun 2021-2023 menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,2268 kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 0,2210 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,2410 hal ini menggambarkan tingkat Ketimpangan di Kabupaten Dairi berada dalam posisi Rendah.

Trend Gini Ratio Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi nilai dari rentang tahun 2021-2023 dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari kabupaten Dairi yaitu sebesar 0,31%. Pada Maret 2021, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang di ukur dengan Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,3145, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,3120 kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,3090 tidak terjadi perubahan Gini Ratio pada Maret 2021 terhadap September 2020. Gini Ratio di daerah perkotaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,314, sebaliknya Gini Ratio di daerah pedesaan pada maret 2021 tercatat sebesar 0,250, distribusi pengeluaran kelompok penduduk

40 persen terbawah yaitu sebesar 21,78%, Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika di rinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka tercatat

sebesar 24,65% yang artinya kedua juga berada pada kategori ketimpangan rendah dan kategori Gini Ratio Sumatera Utara Pada Tahun 2021 berada posisi Ketimpangan Sedang yaitu sebesar 0,314.

e. Persentase Penduduk Miskin

Trend persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari tahun 2022–2024 cukup fluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 8,31%, menurun menjadi 7,88% pada tahun 2023, pada tahun 2024 menurun kembali diangka 7,47%. Sedangkan Trend persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2022–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2022 bulan Maret sebesar 9,01%, pada tahun 2022 bulan Maret menjadi 8,42 %, pada tahun 2023 bulan Maret menurun menjadi 8,15 %, garis kemiskinan pada Maret Tahun 2024 adalah 7,99%.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada tahun 2020 mencapai 0,96, mencapai 1,09 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 1,24 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,65, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,93. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Dairi pada tahun 2020 mencapai 0,22 dan pada tahun 2021 mencapai 0,20 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,28 pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,08 dan pada tahun 2024 menjadi 0,17.

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada tahun 2021 yaitu sebesar 71,84%, pada tahun 2022 Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi meningkat menjadi 72,56%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 75,18% dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 75,88%. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Dairi berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Posisi Kabupaten Dairi berada pada peringkat ke-13 tertinggi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024.

g. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Dairi tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar Rp. 1.166.398 dari Rp. 1.164.405 atau naik sebesar 0,17% yang terdiri atas makanan 5,48% tetapi yang menarik non makanan mengalami penurunan sebesar 7,42%. Pengeluaran makanan terbesar berasal dari pembelian makanan jadi sebesar 11,56% dan Pengeluaran non makanan terbesar berasal dari perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 18,35%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Tahun 2022 menjadi tahun yang sulit untuk seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dimana pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbaikan ekonomi global terus berlanjut, meskipun masih terdapat resiko dan tantangan perekonomian Tahun 2023 ini antara lain: Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada memperparah gangguan rantai pasok dan Peningkatan harga komoditas energi dan pangan; Pengetatan Keuangan Global serta isu resesi di negara-negara maju.

Berdasarkan pandangan perekonomian global Tahun 2023 di atas Ekonomi global 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik karena

didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Dairi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Perekonomian global akan mengalami perlambatan demikian juga halnya perekonomian Kabupaten Dairi diperkirakan akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan ketidakpastian ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang nyata. Tantangan dimaksud antara lain :

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Menurunkan angka pengangguran;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
5. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
6. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar lebih kompetitif;
7. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 juga tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka usaha-usaha yang dilakukan harus disinkronkan dengan arah

kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian didukung pelayanan dasar dengan berbagai upaya antara lain adalah :

1. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal potensial;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata;
3. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dan berwawasan lingkungan;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis serta mendorong tumbuhnya wirausahawan baru;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan dan infrastruktur);
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPD Tahun 2025-2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-

sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan APBD, disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPD Tahun 2025 - 2026 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024.

3.2.1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja dan Daerah

Untuk menghitung kapasitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam melakukan analisis dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang disajikan pada tabel 3.4 Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2022 sebesar Rp. 1.156.956.282.477,79, tahun 2023 sebesar Rp. 1.192.110.715.857,23 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.195.824.688.264,57 sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 1,68% yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 9,28%, Pendapatan Transfer sebesar 1,19% dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -6,22%.

b. Menghitung rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang disajikan pada tabel 3.5 Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah kurun waktu tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2022 sebesar Rp. 1.123.338.555.302,52, tahun 2023 sebesar Rp. 1.236.286.270.150,50 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.248.759.410.799,08 yang terdiri dari realisasi belanja operasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 757.712.293.113,52, pada tahun 2023 sebesar Rp. 844.293.304.487,73, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 909.963.663.123,20 sedangkan realisasi belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp. 172.288.707.597,00 , tahun 2023 sebesar Rp. 187.745.257.267,77, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.216.588.940,88 sedangkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 sebesar Rp. 10.062.757.592,00 , 2023 sebesar Rp. 4.700.424.800,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.581.937.735,00 sedangkan realisasi transfer pada tahun 2022 sebesar Rp. 183.274.797.000,00, pada tahun 2023 sebesar Rp. 199.480.027.400,00, dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 204.997.221.000,00 sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 5,53% yang dimana belanja operasi sebesar 9,60 %, belanja modal sebesar -10,84 %, belanja Transfer sebesar 5,80%.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Audited	Audited	Audited	
1	PENDAPATAN	1.156.956.282.477,79	1.192.110.715.857,23	1.195.824.688.264,57	1,68%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	84.618.675.420,79	85.084.763.844,23	100.411.235.107,57	9,28%
1.1.1	Pajak Daerah	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	8,83%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	861,79%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	1,35%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	51.279.323.819,30	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	-45,17%
1.2	Pendapatan Transfer	1.058.551.026.987,00	1.094.557.567.445,00	1.083.304.010.242,00	1,19%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.977.976.433,00	24.790.734.235,00	22.551.799.890,00	-18,04%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00	647.834.166.080,00	7,90%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	223.711.106.827,00	-13,43%
1.2.4	Dana Insentif Fiskal	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	15.166.908.000,00	429,47%
1.2.5	Dana Desa	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	136.561.076.000,00	4,99%
1.2.6	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.777.039.786,00	42.102.238.300,00	37.478.953.445,00	-2,57%
1.2.7	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.832.962.800,00	965.798.547,00	0,00	-73,65%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	12.109.442.915,00	-6,22%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	-
1.3.4	Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	-

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Audited	Audited	Audited	
2.	Belanja	1.123.338.555.302,52	1.236.219.013.955,50	1.248.759.410.799,08	5,53
2.1	Belanja Operasi	757.712.293.113,52	844.293.304.487,73	909.963.663.123,20	9,60
2.1.1	Belanja Pegawai	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	8,80
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.564.192.761,52	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	6,14
2.1.3	Belanja Hibah	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	245,15
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	0,00	-62,09
2.2	Belanja Modal	172.288.707.597,00	187.745.257.267,77	130.216.588.940,88	-10,84
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00	3.581.937.735,00	-38,54
2.4	Belanja Transfer	183.274.797.000,00	199.480.027.400,00	204.997.221.000,00	5,80
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	13,01
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00	5,73

3.2.2. Analisa Penerimaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Sedangkan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Pada Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024 adalah sebesar 1,68% dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan asli daerah adalah sebesar 9,28% yang terdiri dari Pajak daerah sebesar 8,83%, Retribusi daerah sebesar 861,79%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,35% dan Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar -6,25%.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui peningkatan peran dan fungsi perangkat dinas;

7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah;
8. Peningkatan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, instansi vertikal, akademisi/peneliti, apparat penegak hokum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka peningkatan dan penagihan pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan aset daerah;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang mudah, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal;
10. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan menyederhanakan birokrasi guna mempermudah investasi.

Perencanaan pendapatan daerah pada RKPD tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2) Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dengan penurunan terbesar sebagai imbas dari Covid-19 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diasumsikan turun sementara perhitungan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan dengan menggunakan angka rata-rata realisasi kurun waktu tahun 2016-2020.
3) Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan juga mengalami penurunan.

Proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.222.020.250.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**97.675.250.000,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	37.820.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	44.026.500.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.600.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	3.228.750.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.108.595.000.000,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.074.095.000.000,00**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**941.095.000.000,00**
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	711.095.000.000,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	20.595.000.000,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	690.500.000.000,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	230.000.000.000,00
1.2.1.2	**Dana Insentif Fiskal**	**0,00**
1.2.1.3	**Dana Desa**	**133.000.000.000,00**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**34.500.000.000,00**
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**15.750.000.000,00**
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi:	15.750.000.000,00
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	15.750.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan Kabupaten Dairi tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 1.222.020.250.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berkisar Rp. 97.675.250.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.108.595.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berkisar Rp. 15.750.000.000,00

Dari perhitungan proyeksi penerimaan daerah pada RKPD Tahun 2026 dan proyeksi penerimaan daerah pada RPJMD untuk rencana pada Tahun 2026 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No.	Uraian	APBD Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi RPJMD Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2026 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.197.015.499.604,00**	**1.249.460.093.000,00**	**1.222.020.250.000,00**	**27.439.843.000,00**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**93.022.694.604,00**	**137.675.500.000,00**	**97.675.250.000,00**	**40.000.250.000,00**
1.1.1.	Pajak Daerah	36.017.694.604,00	29.469.200.000,00	37.820.000.000,00	-8.350.800.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	41.930.000.000,00	54.181.300.000,00	44.026.500.000,00	10.154.800.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	11.000.000.000,00	12.600.000.000,00	-1.600.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	3.075.000.000,00	43.025.000.000,00	3.228.750.000,00	39.796.250.000,00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.119.177.305.396,00**	**1.098.457.956.000,00**	**1.108.595.000.000,00**	**-10.137.044.000,00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.085.409.811.396,00**	**1.056.355.718.000,00**	**1.074.095.000.000,00**	**-17.739.282.000,00**
a	Dana Perimbangan	924.655.056.000,00	**924.166.251.000,00**	**941.095.000.000,00**	**-16.928.749.000,00**
b	Dana Insentif Fiskal	-	-	-	**-**
c	Dana Desa	**130.570.255.000,00**	**132.189.467.000,00**	**133.000.000.000,00**	**-810.533.000,00**
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah:**	**33.767.494.000,00**	**42.102.238.000,00**	**34.500.000.000,00**	**7.602.238.000,00**
	a. Pendapatan DBH Provinsi	33.767.494.000,00	42.102.238.000,00	34.500.000.000,00	7.602.238.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.000.000.000,00**	**13.326.637.000,00**	**15.750.000.000,00**	**-2.423.363.000,00**
1.3.1	Pendapatan JKN Kapitasi	15.000.000.000,00	13.326.637.000,00	15.750.000.000,00	-2.423.363.000,00
	Pendapatan JKN Kapitasi pada FKTP	15.000.000.000,00	13.326.637.000,00	15.750.000.000,00	-2.423.363.000,00
1.3.2	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		**1.197.015.499.604,00**	**1.249.460.093.000,00**	**1.222.020.250.000,00**	**27.439.843.000,00**
2	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.000.000.000,00**	**27.000.000.000,00**	**29.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**
2.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**32.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	32.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
2.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
2.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-
2.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-		-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**32.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**
2.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0**

2.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :	0	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0
	a.PT. Bank Sumut	-	-	-	-
	b. Perumda Air Minum Lae Nciho	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0**
	Pembiayaan Netto	**30.000.000.000,00**	**27.000.000.000,00**	**29.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**1.227.015.499.604,00**	**1.276.460.093.000,00**	**1.251.020.250.000,00**	**25.439.843.000,00**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi penghitungan penerimaan daerah pada RPJMD untuk Tahun 2026 lebih besar jika dibandingkan dengan proyeksi penerimaan daerah pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026. Jumlah penerimaan daerah pada RKPD tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1.251.020.250.000,00. Jumlah pada Proyeksi RPJMD 2026 sebesar Rp. 1.276.460.093.000,00 sedangkan pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.015.499.604,00 dengan selisih sebesar Rp. 25.439.843.000,00 (perbandingan antara proyeksi RPJMD untuk tahun rencana 2026 dan proyeksi RKPD tahun 2026). Selisih tersebut terjadi pada penerimaan asli daerah yaitu sebesar Rp. 40.000.250.000,00, dimana pada sektor retribusi daerah terjadi penurunan target yaitu sebesar Rp. 10.154.800.000,00 dan diikuti pada sektor lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 39.796.250.000,00. Pada pendapatan transfer pemerintah pusat juga terjadi penurunan target terutama pada sektor dana transfer khusus yaitu sebesar Rp. 23.319.041.000,00.

3.2.3. Analisa Pengeluaran Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1) Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk penanganan dampak Covid-19, antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya;
5) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan

peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;

6) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

7) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;

8) Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2026.

Proyeksi belanja daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
2	BELANJA	1.227.015.499.604,00
2.1	Belanja Operasi	890.698.496.466,00
2.1.1	Belanja Pegawai	625.456.353.306,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.193.169.260,00
2.1.3	Belanja Hibah	5.048.973.900,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.2	Belanja Modal	128.972.255.138,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	202.344.748.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.381.148.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	199.963.600.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada proyeksi belanja daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 890.698.496.466,00, Belanja Modal Rp.

128.972.255.138,00, Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 202.344.748.000,00.

Dari perhitungan proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Tahun 2026 dan proyeksi pengeluaran daerah pada RPJMD tahun rencana tahun 2026 maka dapat dibandingkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Proyeksi Pengeluaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2026 (Rp)	Selisih Proyeksi (Rp)
A	**BELANJA**	**1.263.775.964.592,00**	**1.227.015.499.604,00**	**36.760.464.988,00**
2.1	**Belanja Operasi**	**917.419.451.360,00**	**890.698.496.466,00**	**26.720.954.894,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	644.220.043.905,00	625.456.353.306,00	18.763.690.599,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.998.964.338,00	260.193.169.260,00	7.805.795.078,00
2.1.3.	Belanja Hibah	5.200.443.117,00	5.048.973.900,00	151.469.217,00
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.2	**Belanja Modal**	**132.841.422.792,00**	**128.972.255.138,00**	**3.869.167.654,00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.100.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100.000.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**208.2415.090.440,00**	**202.344.748.000,00**	**6.070.342.440,00**
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	2.452.582.440,00	2.381.148.000,00	71.434.440,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	205.962.508.000,00	199.963.600.000,00	5.998.908.000,00
B.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**27.000.000.000,00**	**27.000.000.000,00**	**0,00**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**0,00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	- PT Bank Sumut	0,00	0,00	0,00
	- Perumda Air Minum Lae Nciho	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**3.000.0000.00,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**27.000.000.000,00**	**27.000.000.000,00**	**0,00**
Jumlah Pengeluaran (A+B)		**1.290.775.964.592,00**	**1.254.015.499.604,00**	**36.760.464.988,00**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa proyeksi pengeluaran daerah pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 terdapat selisih jika dibandingkan dengan proyeksi pegeluaran daerah pada RPJMD Kabupaten Dairi untuk tahun rencana 2026. Proyeksi pengeluaran daerah pada proyeksi RPJMD untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.290.775.964.592,00 sedangkan pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1.254.015.499.604,00. Terdapat selisih pada pengeluaran belanja sebesar Rp. 36.760.464.988,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 26.720.954.894,00 dan belanja modal sebesar Rp. 3.869.167.654,00.

3.2.4. Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2026

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui usaha kreatif dan inovatif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Melalui program optimalisasi, dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pungutan daerah, penerimaan daerah diperkirakan dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal, sebagai sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan tugas pembinaan kemasyarakatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.192.110.715.857,23 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 85.084.763.844,23, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.094.557.567.445,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 12.468.384.568,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.195.824.688.264,57 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 100.411.235.107,57 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.083.304.010.242,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 12.468.384.568,00.

Pada APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi adalah sebesar Rp. 1.197.015.499.604,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 93.022.694.604,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.088.992.805.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

Untuk Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi untuk Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.222.020.250.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 97.675.250.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.108.595.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 15.750.000.000,00.

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2023 s/d Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2023 s/d Tahun 2026

No	Jenis Pendapatan Daerah	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI
		TAHUN 2023 (*Audited*)	**TAHUN 2024 (Audited)**	**TAHUN 2025 (Induk)**	**TAHUN 2026**
1	**PENDAPATAN**	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.688.264,57**	**1.197.015.499.604,00**	**1.222.020.250.000,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**85.084.763.844,23**	**100.411.235.107,57**	**93.022.694.604,00**	**97.675.250.000,00**
1.1.1	Pajak Daerah	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	36.017.694.604,00	37.820.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	41.930.000.000,00	44.026.500.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	12.000.000.000,00	12.600.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	3.075.000.000,00	3.228.750.000,00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.094.557.567.445,00**	**1.083.304.010.242,00**	**1.088.992.805.000,00**	**1.108.595.000.000,00**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.790.734.235,00	22.551.799.890,00	20.083.066.000,00	20.595.000.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	590.036.443.000,00	647.834.166.080,00	676.567.908.000,00	690.500.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	267.766.001.163,00	223.711.106.827,00	228.004.082.000,00	230.000.000.000,00
1.2.4	Dana Insentif Fiskal	33.666.172.000,00	15.166.908.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Dana Desa	135.230.180.200,00	136.561.076.000,00	130.570.255.000,00	133.000.000.000,00
1.2.6	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	42.102.238.300,00	37.478.953.445,00	33.767.494.000,00	34.500.000.000,00
1.2.7	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	965.798.547,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**12.468.384.568,00**	**12.109.442.915,00**	**15.000.000.000,00**	**15.750.000.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.750.000.000,00
		1.192.110.715.857,23	**1.195.824.688.264,57**	**1.197.015.499.604,00**	**1.222.020.250.000,00**

3.2.5. Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 s/d 2026

Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan program prioritas yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 1.236.219.013.955,50 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 844.293.304.487,73, Belanja Modal sebesar Rp. 187.745.257.267,77, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 4.700.424.800,00, serta Belanja Transfer Rp. 199.480.027.400,00.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.248.759.410.799,08 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 909.963.663.123,20, Belanja Modal sebesar Rp. 130.216.588.940,88, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.581.937.735,00, serta Belanja Transfer Rp. 204.997.221.000,00.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 890.698.496.466,00, Belanja Modal sebesar Rp. 129.156.755.534,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00, serta Belanja Transfer Rp. 202.344.748.000,00.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi pada Tahun 2026 sebesar Rp. 1.227.200.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 890.698.496.466,00, Belanja Modal sebesar Rp. 129.156.755.534,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00, serta Belanja Transfer Rp. 202.344.748.000,00.

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 s/d Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2023 s/d Tahun 2026

NO	BELANJA	REALISASI		ANGGARAN	PROYEKSI
		TAHUN 2023 (*Audited*)	TAHUN 2024 (*Audited*)	TAHUN 2025 (Induk)	TAHUN 2026
A	**BELANJA**	**1.236.219.013.955,50**	**1.248.759.410.799,08**	**1.227.200.000.000,00**	**1.227.200.000.000,00**
2.1	**Belanja Operasi**	**844.293.304.487,73**	**909.963.663.123,20**	**890.698.496.466,00**	**890.698.496.466,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	625.456.353.306,00	625.456.353.306,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	260.193.169.260,00	260.193.169.260,00
2.1.3	Belanja Hibah	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	5.048.973.900,00	5.048.973.900,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Belanja Modal**	**187.745.257.267,77**	**130.216.588.940,88**	**129.156.755.534,00**	**129.156.755.534,00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.700.424.800,00**	**3.581.937.735,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**199.480.027.400,00**	**204.997.221.000,00**	**202.344.748.000,00**	**202.344.748.000,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	2.381.148.000,00	2.381.148.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	199.963.600.000,00	199.963.600.000,00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Dairi. Sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 juga harus disinergikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2026 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yang memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah

berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak AsasiManusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis denganlingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Dairi mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing

provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah- langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.1

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5) Pemberantasan kemiskinan 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2) Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6) Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7) Melanjutkan pembangunan

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya. 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2026. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 4.2

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PRIORITAS NASIONAL	**No**	**KEGIATAN PRIORITAS UTAMA**
Prioritas Nasional 1	1.	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2.	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*
	3.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan
	5.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6.	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7.	**Pembangunan pangan akuatik (*blue food*)**
	8.	**Pembangunan pangan hewani**
	9.	**Pembangunan pangan lokal dan nabati**

PRIORITAS NASIONAL	No	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	10.	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11.	Peningkatan penyediaan energi
	12.	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi
	13.	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14.	Konservasi sumberdaya air
	15.	**Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir**
	16.	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17.	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	18.	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19.	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	20.	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21.	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22.	**Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau**
	23.	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24.	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25.	**Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR**
	26.	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	27.	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28.	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29.	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	30.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	31.	**Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba**
	32.	Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo
	33.	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34.	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	35.	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36.	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37.	**Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah**
	38.	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
	39.	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	40.	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41.	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42.	Penurunan kematian ibu dan anak
	43.	Pencegahan dan penurunan stunting
	44.	**Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis**
	45.	Penuntasan TBC
	46.	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47.	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48.	Eliminasi penyakit kusta & *Schistosomiasis*
	49.	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50.	**Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses**
	51.	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	54.	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga

PRIORITAS NASIONAL	No	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 5	55.	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56.	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57.	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58.	Pengembangan hilirisasi Timah
	59.	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60.	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61.	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62.	Pengembangan hilirisasi Kimia
	63.	Pengembangan industri semikonduktor
	64.	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65.	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	66.	Pengembangan industri dirgantara
	67.	**Pengembangan KEK Sei Mangkei**
	68.	Pengembangan KIT Batang
	69.	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	70.	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71.	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72.	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73.	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahahan ke Ibu Kota Nusantara
	74.	**Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU**
	75.	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	76.	Pencegahan tindak pidana korupsi
	77.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN
	78.	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79.	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80.	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	81.	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82.	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83.	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Berikut 9 (sembilan) sasaran makro pembangunan nasional provinsi Sumatera Utara:

Tabel 4.3
Target Nasional Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2026

Sasaran Pembangunan	Target 2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 – 6,2
PDRB per Kapita (juta)	83,2 – 85,7
Kontribusi PDRB Provinsi	5,2
Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 – 5,60
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 – 5,59
Rasio Gini	0,284 – 0,290
Indeks Modal Manusia	0,55
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 – 2,77
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37

Sumber: Permendagri No. 10 Tahun 2025

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.4
Program Strategis asional (ProSN)

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		3. Sekolah Rakyat
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		3. Jaminan Kesehatan Nasional
		4. Penuntasan TBC
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		4. Makan Bergizi Gratis

NO	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah RKPD tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2026.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh.

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: • Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan • Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" • Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA • Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerja sama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: • Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda • Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga • Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: • Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan • Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan Kasus TBC • Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan • Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi • Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting • Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) • Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: • MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: • INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) • SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) • Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD • Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Hijau • Pengembangan Ekonomi Biru
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: • Peningkatan Produktivitas Pangan • Peningkatan Kesejahteraan Petani
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: • Digitalisasi Layanan Publik
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: • Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) • Pengembangan Kawasan Deli Sports City melalui Kerja sama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: • Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. • Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter • Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan • Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: • Konservasi Sumber Daya Alam • Pengurangan Emisi Karbon
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: • Program Membangun Desa Produktif Terpadu
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: • Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: • SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)

4.1.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi

Sama halnya dengan dengan RKPD Kabupaten Dairi disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Selain itu penetapan target kinerja visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan Masyarakat Dairi Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing Dengan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”.

Pencapaian visi ini diuraikan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

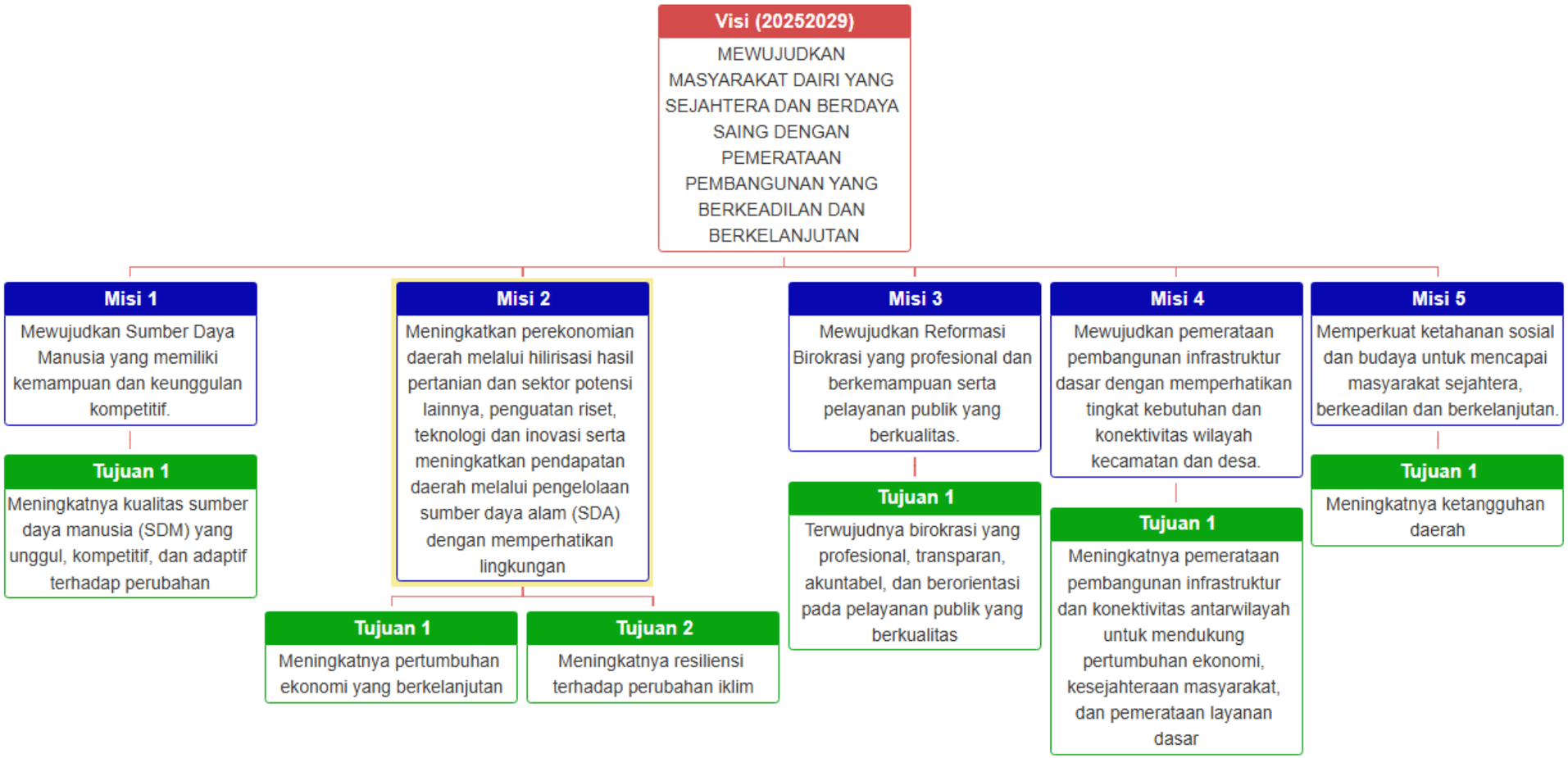
Misi 2 Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan

Misi 3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Gambar 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029



Tabel 4.6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026 pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Visi : ***MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN***					
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,29	
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,95	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,91	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,98	
			Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,83	
		Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	54,32	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,83	
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	73,07	
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	98,59	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,252	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	60,42	
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	60.20:60.20	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	83,50	
		Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) ()	100,285	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	138,10	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	17,91	
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,65	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,45	
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	7,99	
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah)	47.304.165	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,21	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitf	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	13,15	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa (%)	65,88	
	Meningkatnya resiliensi terhadap perubahan iklim		Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	152,265	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	78,24	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.	Terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	71,00	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)	64,14	
		Meningkatnya Tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	66,00	
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,15	
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	2,95	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,85	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Predikat)	B (Baik)	
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	40,50	
		Terwujudnya transformasi layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,18	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (Nilai)	2,85	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	78,00	
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan dasar		Indeks Infrastruktur (Angka)	64,50	
		Meningkatnya Ases Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	64,50	
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	82,00	
		Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	67,25	
		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45,61	
Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.	Meningkatnya ketangguhan daerah		Tingkat Kemiskinan ((%))	7,00	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	79,56	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	58,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	65	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	115,00	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	83,76	
			Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	60	

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 berpedoman pada Visi Misi serta Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode Tahun 2025-2029, selain hal tersebut juga penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan terhadap program Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Dairi berperan aktif dalam mendukung Program Strategis Nasional yang merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2025-2029 dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa **10 (Sepuluh) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar (**Dairi Tangguh**)
   a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan,irigasi, drainase dan trotoar;
   b) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
   c) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa.
2. Program hilirisasi produksi pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)
   a) Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan

pertanian (jagung dan kopi);

b) Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;
c) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
d) Pengembangan industri rumah tangga.

3. Program penguatan riset, teknologi dan inovasi. (**Dairi Inovatif**)
   a) Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global;
   b) Pengembangan Teknologi Informatika.
4. Program peningkatan pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)
   a) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi;
   b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
   c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
   d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)
   a) Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%);
   b) Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular;
   c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
   d) Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
   e) Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat;
   f) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
   g) Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.
6. Program peningkatan Pariwisata (**Dairi Wisata Maju**)
   a) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata;
   b) Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni,

olahraga dan ekonomi kreatif lainnya.

7. Program layanan sosial (**Dairi Peduli**)
   a) Pemberdayaan para penyandang difabel;
   b) Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.
8. Tata Kelola Pemerintahan (**Dairi Clean Governance**)
   a) Percepatandigitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
   b) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara(ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala;
   c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,akuntabel dan professional;
   d) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
9. Program pengembangan Sumber Daya Alam (**Dairi Ekonomi Bangkit**)
   a) Pembangunan Ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik berbasis potensi lokal terhadap daerah yang belum terjangkau jaringan listriknya;
   b) Mengembangkan akses dan daya tarik Pariwisata.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (**Dairi Hijau**)
    a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
    b) Optimalisasi pengolahan sampah;
    c) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
    d) Penghijauan pada lahan – lahan kritis.

Dalam mencapai Visi, Misi, Sasaran Daerah, Strategi Pembangunan yang telah ditetapkan tahun 2026 diperlukan inovasi dan tematik pembangunan agar lebih cepat terwujud. Sesusi dengan tema Pembangunan Nasional 2026 dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta capaian target SDGs dan RPJPN 2025–2045, Dukungan Kabupaten Dairi terhadap Asta Cita Tahun 2026 pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebesar Rp 96.038.129.466,- dengan subkegiatan termuat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Dukungan Kabupaten Dairi terhadap Asta Cita Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.345.200.800	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	898.516.100	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.761.520.500	Dinas Pendidikan
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.033.200	Dinas Pendidikan
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	81.500.000	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.170.000.000	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	352.016.000	Dinas Kesehatan
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.200.000.000	Dinas Kesehatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penyandang disabilitas.						1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000	Dinas Kesehatan
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.806.400.000	Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	11.037.094.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	146.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	239.704.000	Satuan Polisi Pamong Praja
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	58.832.000	Satuan Polisi Pamong Praja
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	67.791.446	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000	Dinas Sosial
							1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Sosial

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	99.999.800	Dinas Sosial
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	317.655.600	Dinas Sosial
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165.143.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.999.800	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Keluarga Berencana
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	116.923.200	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.270.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.916.100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomihijau, dan ekonomi biru	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	112.781.050	Dinas Lingkungan Hidup
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta				2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	683.794.400	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	191.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	191.585.000	Dinas Lingkungan Hidup
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	23.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	26.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.376.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	808.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	60.822.200	Dinas Perhubungan
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	19.924.000	Dinas Perhubungan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	19.955.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	10.196.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	151.670.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	19.981.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	48.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	19.830.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi	70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		KECIL, DAN MENENGAH					Dalam Pengembangan Ekonomi		dan Menengah
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	160.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	nilai tambah di dalam negeri.									Ketenagakerjaan
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	375.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	19.987.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	49.999.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	19.975.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	22.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	700.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), danpenyandang disabilitas.	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	15.080.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	53.959.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adildan makmur.	2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori KolektifBangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	39.999.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	198.326.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.320.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.526.320	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	150.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	350.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
28	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3,30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	49.999.700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dan Menengah
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	199.999.950	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
29	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	250.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	75.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
30	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	28.226.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU RKPD 2026	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Nilai- Nilai ideologi Pancasila		PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH									**96.038.129.466**	

4.2.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM memuat standar teknis dan indikator yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mutu pelayanan. Dengan implementasi yang tepat, SPM menciptakan sistem pelayanan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Pemenuhan SPM dapat dilihat dari terakomodirnya Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026, Pagu Indikatif yang direncanakan untuk pemenuhan SPM sebesar Rp 112.123.781.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Program Pemenuhan SPM

Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**1.220.000.000**
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**300.000.000**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	150.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	50.000.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**920.000.000**
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	920.000.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	120.000.000
Dinas Kesehatan	**4.183.000.000**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**4.183.000.000**
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.183.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.060.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000

Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	105.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	400.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	70.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	80.000.000
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**10.057.940.000**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3.500.000.000**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.500.000.000
Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.500.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**6.557.940.000**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.557.940.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.000.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	457.940.000
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000
Dinas Pendidikan	**96.456.121.400**
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**975.929.800**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	975.929.800
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	443.929.800
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	532.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**95.460.191.600**
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.840.477.500
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	254.287.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	198.000.000
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.761.520.500
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	135.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.500.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	484.000.000
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	347.670.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.000.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	135.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	529.153.200

Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	174.120.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.033.200
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.412.794.530
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	799.989.200
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.588.130.400
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	632.642.300
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.748.792.600
Pengadaan Mebel Sekolah	1.700.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.005.489.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	400.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	170.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.614.906.780
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.612.844.250
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.000.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33.677.766.370
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	898.516.100
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	97.036.400
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	106.062.400
Pembangunan Laboratorium	859.100.070
Pembangunan Ruang Kelas Baru	691.185.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	156.200.000
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	86.059.900
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	106.195.800
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.218.403.500
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	109.136.400
Pengadaan Mebel Sekolah	1.140.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.968.600.000
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	119.820.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.345.200.800
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.835.030.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	368.319.600
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	338.804.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	114.096.400
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**20.000.000**
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000
Dinas Sosial	**200.000.000**
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**200.000.000**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200.000.000

Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000
Satuan Polisi Pamong Praja	**6.720.000**
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**6.720.000**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.720.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.720.000
Total	**112.123.781.400**

4.2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi oleh pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mencegah jatuhnya kelompok rentan ke jurang kemiskinan.

Tiga pilar utama strategi penanggulangan kemiskinan sesuai kebijakan nasional yang termuat dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 20206 sebagai berikut :

Pilar 1 : Mengurangi Beban Pengeluaran

Strategi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan bantuan langsung agar kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan dapat terpenuhi.

Pilar 2 : Meningkatkan Pendapatan

Strategi ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi agar penduduk miskin dapat meningkatkan pendapatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pilar 3 : Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan (Pembangunan Infrastruktur Dasar) 🏘️

Strategi ini bersifat spasial, yaitu memfokuskan pembangunan pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup.

Pagu Indikatif yang direncanakan untuk Penanggulangan Kemiskinan pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebesar Rp 155.844.674.100,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9
Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	**31.119.528.250**
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	**10.750.000.000**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.000.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**3.000.000.000**
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.250.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**7.250.000.000**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	250.000.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**250.000.000**
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	250.000.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	250.000.000
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**250.000.000**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**2.919.999.920**
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.859.999.920
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**2.859.999.920**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.709.999.920
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	150.000.000
PROGRAM PENATAAN DESA	50.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa	**50.000.000**
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	10.000.000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**10.000.000**
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.000.000
Dinas Pendidikan	**16.499.258.330**
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.499.258.330
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**12.448.523.730**
Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.588.130.400
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	632.642.300
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.614.906.780
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.612.844.250
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**4.050.734.600**
Pembangunan Ruang Kelas Baru	691.185.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	156.200.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.835.030.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	368.319.600
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	**950.270.000**

Strategi/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	242.270.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**167.270.000**
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	167.270.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**75.000.000**
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	158.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**158.000.000**
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	158.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	550.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	**550.000.000**
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	550.000.000
Mengurangi Beban Pengeluaran	**121.301.345.600**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**150.000.000**
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	150.000.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**50.000.000**
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100.000.000**
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**657.287.000**
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	36.000.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**36.000.000**
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	26.000.000
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	615.730.000
Penataan Pendaftaran Penduduk	**580.730.000**
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	580.730.000
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**35.000.000**
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	35.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.500.000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**2.500.000**
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3.057.000
Penyusunan Profil Kependudukan	**3.057.000**
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3.057.000
Dinas Kesehatan	**53.498.016.000**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.498.016.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**63.000.000**

Strategi/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	63.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**53.435.016.000**
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	352.016.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.700.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.060.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	70.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	105.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	400.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	60.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	70.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**777.600.000**
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	777.600.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**777.600.000**
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	777.600.000
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	**29.999.800**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	29.999.800
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**19.999.800**
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.999.800
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	10.000.000
Dinas Pendidikan	**65.603.443.000**
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.603.443.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**2.500.000.000**
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.500.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**494.153.200**
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	174.120.000

Strategi/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.033.200
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**38.175.489.000**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.005.489.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	170.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**24.433.800.800**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.968.600.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.345.200.800
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	120.000.000
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	**150.000.000**
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	150.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**150.000.000**
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150.000.000
Dinas Sosial	**434.999.800**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	135.000.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**135.000.000**
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	99.999.800
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**99.999.800**
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	99.999.800
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	200.000.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**200.000.000**
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	100.000.000
Meningkatkan Pendapatan	**3.423.800.250**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**200.000.000**
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	200.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**200.000.000**
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	**165.143.000**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	165.143.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**165.143.000**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165.143.000

Strategi/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu RKPD 2026
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**32.385.850**
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	32.385.850
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**32.385.850**
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	32.385.850
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	**3.026.271.400**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	349.440.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**199.440.000**
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	199.440.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**150.000.000**
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	150.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**150.000.000**
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.996.185.400
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**1.996.185.400**
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.996.185.400
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	300.000.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**300.000.000**
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	230.646.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**230.646.000**
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	32.320.000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	198.326.000
Total	**155.844.674.100**

4.2.4 Penelaahan Pokok Pikiran DPRD

Pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil reses DPRD yang disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dijadikan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program daerah yang merupakan bagian dari perumusan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2026.

Sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 87/DPRD/2025 perihal Penyampian Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Kab. Dairi Tahun 2025, disampaikan 20 (dua puluh) pokok pikiran DPRD sebagai berikut :

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Dalam rangka penyusunan Ranperdes tentang Penggunaan ADD Desa agar benar-benar cermat dan teliti sebagai tindakan untuk menghindari terjadinya penganganggaran pembangunan infrastruktur terhadap kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah desa.
2. Dalam rangka peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah perlu dibentuk tim khusus untuk mengkaji peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha khususnya tangkahan / galian yang melakukan pengrusakan lingkungan, jalan dan bahkan irigasi.
3. Untuk menghindarkan maraknya peredaran Judi dan Narkoba di wilayah Kabupaten Dairi Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan pengawasan serta penertiban ijin tempat – tempat hiburan malam.
4. Untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan sosial agar Pemerintah Kabupaten Dairi maupun Pemerintah Desa melakukan pendataan dengan riil, sehingga data penerima benar-benar masyarakat yang layak menerimanya.
5. Untuk mendukung program pemberian sertifikat tanah, kami sangat mendukung bilamana Pemerintah Kabupaten Dairi dapat melakukan langkah tidak hanya menunggu program secara nasional, namun ikut serta terlibat secara aktif dalam upaya penerbitan sertifikat tanah masyarakat Kabupaten Dairi yang akan sekaligus sebagai upaya pencapaian progres peningkatan kepemilikan PBB oleh masyarakat.
6. Dalam upaya penguasaan Asset-asset milik Pemerintah Daerah perlu untuk membuat sebuah regulasi atau aturan yang jelas terhadap asset-asset yang menjadi kewenangan desa dan kabupaten dan juga terhadap tapal batas antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten.

B. BIDANG PENDIDIKAN

1. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik, maka proses belajar mengajar harus berkualitas, sehingga untuk mendukung hal ini Pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan Penyediaan sarana dan Prasana yang baik di tingkat SD dan SLTP dengan baik

2. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer khususnya yang diangkat oleh Komite, kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Dairi dapat mencari solusi dalam peningkatan penerimaan upah/gajinya tenaga guru honorer dimaksud tanpa harus melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang handal khususnya masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar kiranya Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memperhatikan dan memberikan bantuan biaya kepada anak-anak yang berprestasi mulai tingkat SD sampai ke Tingkat Perguruan Tinggi, terutama bagi anak-anak yang ekonomi orang tuanya tidak mampu.

C. BIDANG KESEHATAN

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan penempatan tenaga kesehatan pada setiap poskesdes yang telah ada serta melakukan pengawasan penggunaan sarana kesehatan ini, demi terwujudnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.
2. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum memiliki Kartu BPJS, KIS maupun Program lainnya. Untuk itu diharapkan kepada OPD terkait dan Pemerintah Desa untuk dapat proaktif melakukan evaluasi khususnya masyarakat yang sudah dilakukan pendataan namun belum diterbitkannya kartu BPJS maupun KIS dari masyarakat dimaksud.
3. Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Dairi, kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil langkah-langkah yang konkret terhadap perbaikan-perbaikan manajerial RSU Sidikalang, termasuk dalam rangka penyediaan tenaga Medis (Dokter Spesialis); Obatan-obatan serta upaya peningkatan status Akreditasi RSU Sidikalang.

D. BIDANG PERTANIAN

1. Terkait dengan ketersedian atau kelangkaan pupuk bagi masyarakat petani yang selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat mendorong OPD maupun Tim Pengawas Pupuk untuk berkerja lebih optimal dalam melakukan pengawasan peredaran

pupuk sehingga penyalurannya sampai ke masyarakat petani dengan baik.

2. Untuk peningkatan pengolahan lahan pertanian diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat memberikan bantuan Pengadaan Traktor kepada kelompok tani secara merata, serta melakukan pengawasan penggunaannya.
3. Dalam mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai swasembada beras diminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi kiranya dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi bagi masyarakat agar tidak mengkonfersi tanaman padi menjadi tanaman lain di lahan persawahan dan sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap saluran irigasi yang dapat dilakukan melalui penganggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Dana Desa.
4. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Dairi untuk dapat meningkatkan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian yang telah tersebar di setiap desa untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat petani.
5. Dalam upaya peningkatan produksi kopi yang telah menjadi produk unggulan masyarakat Kabupaten Dairi, maka pemberian bantuan bibit kopi varietas unggul dan cocok dengan iklim Kabupaten Dairi dapat dilakukan secara berkesinambungan.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Mengingat rest area sangat penting (skala perioritas) karena menyangkut nyawa manusia agar Pemkab Dairi dapat untuk lebih serius dalam penyediaan dan atau merealisasikannya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar dalam melakukan perencanaan pembangunan benar-benar memperhatikan asas pemerataan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi dengan selalu mengutamakan skala perioritas sehingga dengan demikian diharapkan hasil pembangunan tersebut dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat dan juga tantangan kedepan;
3. Dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terutama kegiatan fisik agar benar-benar matang dan mengkaji dampak dari kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Dua puluh pokok pikiran DPRD tersebut selanjutnya dirincikan menjadi 237 usulan dan dipetakan ke dalam kamus usulan pembangunan yang diinput dalam Aplikasi SIPD-RI untuk ditelaah. Dengan tetap memperhatikan keselarasan sasaran program daerah dan kemampuan keuangan daerah, hasil telaahan menjadi rumusan untuk dapat diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah.

Dari 237 usulan dalam Pokok Pikiran DPRD yang di-entri dalam SIPD-RI sebanyak 226 usulan yang telah divalidasi oleh Sekretariat DPRD. Usulan tersebut terdistribusi kepada 5 (perangkat) perangkat daerah yang sebagian besar ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (71,68%), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pemetaan Usulan Pokok Pikiran DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	PERSENTASE (%)
1	Dinas Kesehatan	8	3,54%
2	Dinas Lingkungan Hidup	2	0,88%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	162	71,68%
4	Dinas Pendidikan	14	6,19%
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	38	16,81%
JUMLAH		**226**	**100%**

Sumber : Bappeda Kabupaten Dairi (data diolah dari SIPD-RI)

Dari 226 usulan pembangunan tersebut, selanjutnya direkomendasi secara bertahap oleh Sekretaris DPRD, Bappeda, Perangkat Daerah dan diakhiri oleh TAPD sebagai langkah verifikasi dan validasi untuk dimuat oleh Perangkat Daerah dalam rencana kerja, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Prioritisasi usulan berdasarkan a) derajat kebutuhan pelayanan dasar, b) jumlah penerima dampak/manfaat, c) memberi nilai tambah perekonomian masyarakat, dan d) kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun berkenaan
2. Proyeksi kapasitas riil anggaran tahun berkenaan.

4.2.5 Telaahan Usulan Aspirasi Masyarakat

Usulan aspirasi masyarakat yang ditampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat atau usulan dari bawah (button up) sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Usulan aspirasi masyarakat diajukan desa/kelurahan

melalui aplikasi SIPD-RI yang merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pada aplikasi SIPD-RI diperoleh total usulan aspirasi masyarakat sebanyak 355 usulan. Usulan tersebut selanjutnya divalidasi dan verifikasi oleh mitra Bappeda, perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh usulan aspirasi yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah.

4.3 Indikator Kinerja

4.3.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Dairi pada RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Dairi pada RKPD Tahun 2026

No	RPJMN	Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2026	Kabupaten Dairi	Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6 – 6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70-6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,00-5,50
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	83,2 – 85,7	PDRB per Kapita (Rp juta)	86,78	PDRB per Kapita (Rp juta)	46,97
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%_	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,23	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	1,12
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 – 5,60	Tingkat Kemiskinan (%)	5,93-6,55	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00-5,50
5	Rasio Gini	0,284 – 0,290	Rasio Gini	0,301-0,303	Rasio Gini	0,213-0,210
6	Indeks Modal Manusia	0,55	Indeks Modal Manusia	0,53-0,55	Indeks Pembangunan Manusia	78,50-78,00
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 – 2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1-2,77	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	152,265,50
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,07
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 – 5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 - 5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,89-1,36

4.3.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Target indikator kinerja utama yang termuat pada RKPD Tahun 2026 merupakan tahun kedua yang termuat rancangan RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.12
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,29	
2.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7	
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	79,56	
5.	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	152,265	
6.	Indeks Infrastruktur	Angka	64,5	
7.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,15	
8.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	83,76	
9.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58	
10.	Indeks SPBE	Nilai	2,85	
11.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	82	
12.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	64,5	
13.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	65	
14.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	45,61	
15.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,95	
16.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	67,25	
17.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	67,67	
18.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,25	
19.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115	
20.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	64,12	
21.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	
22.	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
23.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,91	
24.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,83	
25.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	54,32	
26.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	57,83	
27.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,07	
28.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,59	
29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,252	
30.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,42	
31.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Indeks	100,285	
32.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,5	
33.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	138,1	
34.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	-	
35.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	17,91	
36.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,1	
37.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,45	
38.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	
39.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,21	
40.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	13,15	
41.	Indeks Desa	%	0,066	
42.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71	
43.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	66	
44.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,5	
45.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
46.	Indeks NSPK Manajemen ASN	Predikat	B (Baik)	
47.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	92,5	
48.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Nilai	80,3	
49.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	40,5	
50.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,18	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
51.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	78	
52.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	
53.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.20:60.20	
54.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,21	
55.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7,99	

4.3.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat pada RKPD Tahun 2026 merupakan tahun kedua yang termuat rancangan RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.13
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Dairi pada RKPD Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	79.89	
2	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	71.56	
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	25.00	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	718	
5	Return on Asset (ROA) BUMD	%	0	
6	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0	
7	Inklusi Keuangan	(%)	97.30	
8	Tingkat Inflasi	(%)	2.51	
9	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53.00	
10	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	500	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0.40	
12	Persentase Desa Mandiri	%	4	
13	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	0	
14	Total Kredit/PDRB	(%)	0	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3.10	
16	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0.46	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	17.85	
18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	0.42	
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Desa	%	0.066	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	96.64	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.76	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78.50	
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	90.54	
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83.50	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.19	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	52.77	
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	296.29	
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	30.27	
11	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	31.48	
12	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	3714466	
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	74.81	
14	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1.30	
15	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	131.80	
16	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	77.07	
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	5.61	
18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83.99	
19	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	68.15	
20	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	152265.50	
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Umur Harapan Hidup		74.98	
2	Angka Literasi/Numerasi	%	79.28	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	79.56	
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.08	
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.07	
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	54.32	
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	19.89:19.89	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.21	
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60.42	
11	Tingkat Kemiskinan	(%)	7.00	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	64.35	
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	61.21	
14	Rasio Gini	Indeks	0.219	
15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0.32	
16	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.50	
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	96.00	
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	100	
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.22	
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58.61	
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	27.83	
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.20	
23	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	77.38	
24	Skor Literasi/Numerasi		76.22	
25	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	67.67	
26	Jumlah Kematian Ibu	Angka	4	
27	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	64.12	
28	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	2.80	
29	Jumlah Kematian Balita	Angka	40	
30	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.25	
31	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	50	
32	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66.21	
33	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	78	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
34	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD	%	5.3	
35	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.2:60.2	
36	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.96	
37	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	55.10	
38	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	77.40	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0.0022	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	7.55	
3	Indeks Integritas Nasional	Persentase	00	
4	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	85.23	
5	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99.15	
6	Persentase Penegakan Perda	%	82	
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.4	
8	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.4	
9	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	78.2	
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	75	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			
1	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	100	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	
3	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	64.83	
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	66.05	
5	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
6	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99.35	
7	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	9.94	
8	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	5.70	
9	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	44.970	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
10	Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	70.910	
11	Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)	%	0.23	
12	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	77.89-77.89	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
1	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Angka	82:-	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	77	
3	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	95	
4	Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM	%	80	
5	Proporsi Fasilitas Layanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar	Angka	85:-	
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	75	
7	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	77.00	
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	
10	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS	%	100	
11	Cost Recovery Rate (CRR)	%	85	
12	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS	%	100	
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD	Nilai	77.6	
14	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS	%	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	68.40	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	55.81	
3	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	600	
4	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi	Orang	280	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi			
5	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	
6	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%)	%	150	
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4350	
8	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	58.55	
9	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	30	
10	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	95.39	
11	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	35	
12	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	225	
13	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Persentase	100	
14	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100.00	
15	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	60500	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	15	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	82	
3	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	70.30	
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	7.62	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	15.75	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	65	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Nilai	55	
4	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	
5	Persentase capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	%	72	
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	75	
8	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98	
9	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	85	
10	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	
11	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	90	
12	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	
13	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	41.2	
14	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	
15	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
1	Persentase PPKS yang ditangani sesuai standar	%	56	
2	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	%	100	
3	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	100	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	%	100	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	56	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	2	
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	
8	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial	%	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencanaÂ sesuaiÂ standar			
9	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	83.82	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	0.20	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	8.57	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	90.19	
5	Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	
6	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	100	
7	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32200	
8	Jumlah LPK yang terakreditasi (IP)	LPK	2	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	53	
10	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	
11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	32200	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	60	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	51	
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	80.75	
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	Persentase	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan			
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59.24	
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	55	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	72	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87.3	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	18	
4	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	68.99	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	0.75	
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	80.00	
2	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
3	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	17.72	
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	
6	Persentase RTH	Persentase	100	
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	75.00	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99.85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	61.00	
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	13.00	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	47.00	
6	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase	98.40	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	60.00	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0.006	
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	3.53	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	81	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	
5	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persentase	100	
6	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0.012	
7	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0.01	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	65	
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	72.1	
3	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12.3	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	6.7-7.3	
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.98	
6	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	57.69	
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	82.6	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	70.20	
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	45.61	
3	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	2000	
4	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	50.20	
5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	68	
2	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	100	
3	Indeks SPBE	Nilai	2.85	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			
1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	56.1	
2	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2.65	
3	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	0.92	
4	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	51.54	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	88.15	
2	Jumlah proyek investasi (IP)	Perusahaan	180	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	13.15	
4	PMA (IP)	%	26.50	
5	PMDN (IP)	%	73.50	
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	
7	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	triliun rupiah	11156.75	
8	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	
9	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	
10	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	1.74	
11	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
1	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	80.5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	13	
3	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	16	
AT	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	220	
AU	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
1	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	30	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	100	
AV	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65	
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	3	
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	75	
AW	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			
1	TIngkat digitalisasi arsip	Nilai	54	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	67	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	85	
AX	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4268.068	
AY	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	4	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	4	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	4	
AZ	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			
1	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	6000	
2	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	30	
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	1	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	1.35	
5	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	100	
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	24	
7	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	100	
8	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1.38	
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	10	
10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	23889.36	
BA	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	100	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	100	
3	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	47	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91	
5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	Nilai	4.02	
BB	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5	
2	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	58	
BC	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**			
1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	11.08	
2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	3	
3	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	unit	7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	20	
5	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	85	
6	Indeks Akses KeuanganÂ Daerah	Angka	4.24	
7	Return On Asset (ROA) BUMD	Angka	1	
BD	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**			
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	
3	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	
BE	**5.01 - PERENCANAAN**			
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	100	
BF	**5.02 - KEUANGAN**			
1	Manajemen Aset	Kategori	4	
2	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Angka	93.50	
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	7.99	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	10	
6	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	50.4	
7	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100	
8	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	9	
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase	100	
10	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	
11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	89.5	
12	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	90	
13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	88.53	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
14	Rasio PAD	%	8.43:8.44	
15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	
BG	**5.03 - KEPEGAWAIAN**			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	
BH	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	100	
BI	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**			
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2.95	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.15	
BJ	**7.01 - KECAMATAN**			
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	79.00	
2	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	84.30	
BK	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	90.00	
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	92.00	
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	92.00	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	83.00	
5	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	84.00	
6	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Persentase	91.00	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Dairi dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h)Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

Perbandingan program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dalam table 5.1. berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. DAIRI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**464.569.700.000,00**							**1.401.780.771.393,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**464.569.700.000,00**							**1.401.780.771.393,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**464.569.700.000,00**							**1.401.780.771.393,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**367.677.203.600,00**						**-**	**372.696.971.393,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**78.21**	**100**	**100**	**367.677.203.600,00**	-	-	-	-	-	-	**372.696.971.393,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.999.200,00			-	-	-	-	16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	15.999.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	361.114.490.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	365.838.471.393,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	361.114.490.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		365.838.471.393,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	375.734.900,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	532.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			-				-	19.469.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.312.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.918.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34.393.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	255.641.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.130.200.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	6.240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6.100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		6.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.779.500,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.779.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**95.896.566.600,00**						**-**	**1.026.495.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** **Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)**	**0.43** **78.49** **8.43** **99.92**	**0.13** **4.34** **59.69** **99.06**	**0.18** **5.02** **62.87** **99.20**	**0.23** **5.70** **66.05** **99.35**	**95.896.566.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.026.495.600.000,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	55.849.169.530,00			-	-	-	-	52.487.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	632.642.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				700 Paket	1.700.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	436.375.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				323 Satuan Pendidikan	38.005.489.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-	-		36.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			0				0 0	400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	799.989.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	3.588.130.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		2.525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	1.612.844.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				7500 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				22 Ruang	6.614.906.780,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		5.710.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			0				0 0	1.748.792.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	33.677.766.370,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	966.648.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	859.100.070,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		935.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	156.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	2.835.030.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	368.319.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				80 Paket	1.140.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	1.345.200.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1.218.403.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				63 Satuan Pendidikan	106.195.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				20403 Satuan Pendidikan	22.968.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		22.968.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				63 Orang	109.136.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.896.566.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.026.495.600.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				63 Konten Digital	119.820.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** **Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)**	**0.43** **78.49** **8.43** **99.92**	**0.13** **4.34** **59.69** **99.06**	**0.18** **5.02** **62.87** **99.20**	**0.23** **5.70** **66.05** **99.35**	**95.896.566.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.026.495.600.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				63 Orang	106.062.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	114.096.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	338.804.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.896.566.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.026.495.600.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				100 Komunitas	97.036.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)** **Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusu (APS)**	**0.43** **78.49** **8.43** **99.92**	**0.13** **4.34** **59.69** **99.06**	**0.18** **5.02** **62.87** **99.20**	**0.23** **5.70** **66.05** **99.35**	**95.896.566.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.026.495.600.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	86.059.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				63 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	691.185.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				836 Orang	898.516.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	5.840.477.500,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	5.810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	198.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	484.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				120 Satuan Pendidikan	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				150 Satuan Pendidikan	2.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		2.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				130 Orang	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Dokumen	347.670.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	254.287.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1.761.520.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	529.153.200,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	200.033.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	174.120.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				75 Peserta Didik	120.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**975.929.800,00**						**-**	**2.563.200.000,00**	
		[meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan]	**Indeks Pemerataan Guru** **Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik** **Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik** **Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik**	**100** **19.34** **67.69**	**0** **33.61** **5.24** **54.75**	**100** **39.29** **62.830** **7.590**	**100** **44.970** **70.910** **9.94**	**975.929.800,00**	-	-	-	-	-	-	**2.563.200.000,00**	-
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	975.929.800,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	2.563.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	532.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		585.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				13 Laporan	443.929.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		1.978.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**20.000.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
		[meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan]	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui**	**100**	**44.83**	**54.83**	**64.83**	**20.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**25.000.000,00**	-
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	20.000.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-	-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**175.500.256.759,91**							**184.390.260.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**175.500.256.759,91**							**184.390.260.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**175.500.256.759,91**							**184.390.260.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**102.861.227.000,00**						**-**	**107.815.623.350,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang]	**Nilai Komponen Pelaporan Kinerja**	**85.00**	**73.95**	**75.00**	**77.00**	**102.861.227.000,00**	-	-	-	-	-	-	**107.815.623.350,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	126.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	132.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		88.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	100.796.927.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	105.836.773.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1056 Orang/bulan	100.796.927.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		105.836.773.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	257.250.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	270.112.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	47.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		49.612.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	210.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	997.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	1.047.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	210.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	525.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		551.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	99.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		11.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.861.227.000,00**	-	-	-	-	-	-	**107.815.623.350,00**	-
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	168.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		[Persentase keterpenuhan program penunjang]	**Nilai Komponen Pelaporan Kinerja**	**85.00**	**73.95**	**75.00**	**77.00**	**102.861.227.000,00**	-	-	-	-	-	-	**107.815.623.350,00**	-
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	421.550.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	429.862.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		49.612.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	113.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		114.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	105.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	155.900.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**70.497.529.759,91**						**-**	**74.326.061.650,00**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar** **Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**	**100** **72.55** **83.58** **87.06**	**100**	**100**	**70.497.529.759,91**	-	-	-	-	-	-	**74.326.061.650,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir **Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan** **Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil** **Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar** **Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar** **Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar** **Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar** **Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)** **Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar** **Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar**		**87.26** **93.03** **94.47** **96.68** **97.32** **n/a**											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.432.029.759,91			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	14.594.761.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		840.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				5 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		4.620.811.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	7.363.029.759,91	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Sopo Butar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.102.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Bintang Hulu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	210.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		220.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	5.170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		5.512.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				90000 Keluarga	63.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		66.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	126.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		132.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.805.516.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	59.626.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.222 Orang	3.060.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		3.213.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8158 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7.824 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35889 Orang	48.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		50.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53658 Orang	400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				192768 Orang	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35623 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				401 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2000 Orang	105.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1.500 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2.700.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		2.835.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	494.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	367.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		385.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3000 Orang	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		73.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	352.016.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		356.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	46.200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		48.510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	42.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	73.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		77.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	970.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.102.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	340.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		157.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	180.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1000 Orang	105.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		110.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	99.984.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	99.984.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	160.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**1.589.000.000,00**						**-**	**1.668.450.000,00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	**Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.**	**87**	**50**	**61**	**67**	**1.589.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.668.450.000,00**	-
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	94.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	99.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	94.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	99.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		44.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.400.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	1.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	1.400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		1.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**237.500.000,00**						**-**	**249.375.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**237.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**249.375.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	80.000.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	52.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	52.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	52.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	55.125.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**315.000.000,00**						**-**	**330.750.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**315.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**330.750.000,00**	-
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	52.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	55.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		55.125.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	262.500.000,00			-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-	-	275.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	262.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	-		275.625.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG						**71.017.000.000,00**							**73.535.850.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**71.017.000.000,00**							**73.535.850.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**71.017.000.000,00**							**73.535.850.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**66.710.600.000,00**						**-**	**69.035.850.000,00**	
		[Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau]	**Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS** **Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS** **Cost Recovery Rate (CRR)** **Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS**	**100** **90**	**-** **100** **113.33** **83.81**	**100** **85**	**100** **85**	**66.710.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**69.035.850.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar*	-			280 Unit	6.195.100.000,00			-	-	-	-	19.035.850.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	3.535.850.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.535.850.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	1.077.750.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-	-		10.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				265 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	81.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-	-		3.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan*	-			1 Dokumen	60.515.500.000,00			-	-	-	-	50.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	60.045.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		50.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	470.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**4.306.400.000,00**						**-**	**4.500.000.000,00**	
		[Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar]	**Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS**	**100**	**89.58**	**100**	**100**	**4.306.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.500.000.000,00**	-
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di rumah sakit*	-			40 Orang	3.806.400.000,00			-	-	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di rumah sakit	-	4.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				37 Orang	3.806.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di rumah sakit		4.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	-			35 Orang	500.000.000,00			-	-	Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan	-	500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	500.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan		500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**87.730.000.000,00**							**98.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**85.980.000.000,00**							**87.650.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**72.842.770.500,00**							**80.400.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.838.483.000,00**						**-**	**15.050.000.000,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**13.838.483.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.050.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	307.300.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	198.980.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	108.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1200 Orang/bulan	10.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.215.883.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	70.292.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				250 Paket	249.181.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				250 Paket	146.410.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1200 Laporan	750.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	601.940.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	601.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.960.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	77.960.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.838.483.000,00**	-	-	-	-	-	-	**15.050.000.000,00**	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.635.400.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	1.499.910.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	135.490.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**7.250.000.000,00**						**-**	**7.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas**	**98.08**	**94.42**	**94.72**	**95.39**	**7.250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.250.000.000,00**	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.250.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	7.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	7.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.1 KM	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**6.557.940.000,00**						**-**	**7.300.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)**	**62000**	**60096**	**60100**	**60500**	**6.557.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.300.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.557.940.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	7.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	457.940.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.557.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.300.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				5 Liter/Detik	1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)**	**62000**	**60096**	**60100**	**60500**	**6.557.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**7.300.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5 Liter/Detik	3.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				384 SR	2.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				80 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.500.000.000,00**						**-**	**3.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**4500**	**4299**	**4329**	**4350**	**3.500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.500.000.000,00**	-
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.500.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				8 M³/Hari	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat				210 Sambungan Rumah (SR)	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**3.250.000.000,00**						**-**	**3.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan permukiman dan perkotaan]	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**	**50**	**20**	**25**	**30**	**3.250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.250.000.000,00**	-
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.250.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	3.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1784 M	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				5 Sistem Drainase Lingkungan	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**1.162.012.000,00**						**-**	**1.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	**Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%)**	**300**	**85**	**125**	**150**	**1.162.012.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.250.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	1.162.012.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	162.012.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**1.228.618.300,00**						**-**	**1.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**55**	**25**	**30**	**35**	**1.228.618.300,00**	-	-	-	-	-	-	**1.500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.228.618.300,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	229.680.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				15 Kawasan	998.938.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**34.629.581.200,00**						**-**	**40.050.000.000,00**	
		[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	**Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota**	**58.75**	**58.43**	**58.50**	**58.55**	**34.629.581.200,00**	-	-	-	-	-	-	**40.050.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	34.629.581.200,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	40.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				7.1 KM	5.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				11.6 KM	8.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5.7 KM	19.629.581.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			Panjang jembatan yang dibangun				10 Meter	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**176.136.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	**Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi**	**425**	**125**	**175**	**225**	**176.136.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	94.286.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	94.286.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**176.136.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	81.850.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				100 Paket Pekerjaan	81.850.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.250.000.000,00**						**-**	**750.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualittas penyelenggaraan penataan ruang]	**Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**750.000.000,00**	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**13.137.229.500,00**							**7.250.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**100.135.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara, dan korban bencana dan yang tekena relokasi akibat program pemerintah]	**Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)**	**70.70**	**70.12**	**70.20**	**70.30**	**100.135.000,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-			-	100.135.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				4 Laporan	100.135.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.750.000.000,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
		[Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh]	**Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani**	**7.70**	**7.58**	**7.60**	**7.62**	**1.750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.750.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				30 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**11.287.094.500,00**						**-**	**5.250.000.000,00**	
		[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**16.75**	**15.25**	**15.50**	**15.75**	**11.287.094.500,00**	-	-	-	-	-	-	**5.250.000.000,00**	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	11.287.094.500,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				15 Lokasi	11.037.094.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.750.000.000,00**							**10.750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.750.000.000,00**							**10.750.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**250.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
		[Terselesaikannya sengketa tanah garapan]	**Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**250.000.000,00**	-
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**1.000.000.000,00**						**-**	**10.000.000.000,00**	
		[Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan]	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**	**1.75**	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**10.000.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**500.000.000,00**						**-**	**500.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria														
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.				1 Berita Acara	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**8.154.784.677,00**							**5.049.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.154.784.677,00**							**5.049.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.154.784.677,00**							**5.049.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.711.128.677,00**						**-**	**5.000.875.000,00**	
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.711.128.677,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.875.000,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.999.800,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	4.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.837.736.914,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	3.426.999.609,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	6.837.736.914,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		3.426.999.609,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	37.984.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	9.965.560,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	4.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		6.335.560,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	33.484.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		3.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	259.397.600,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	148.010.508,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.022.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		2.201.650,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.771.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		57.341.358,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.680.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		1.980.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	192.124.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		82.527.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.732.300,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	9.359.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2.073.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		2.280.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.711.128.677,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.875.000,00**	-
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.658.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		7.078.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.711.128.677,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.875.000,00**	-
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.595.520,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	1.150.511.076,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		26.435.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	257.595.520,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		1.124.075.876,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.711.128.677,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.875.000,00**	-
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	276.682.543,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	251.628.897,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	269.127.543,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		247.628.197,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.711.128.677,00**	-	-	-	-	-	-	**5.000.875.000,00**	-
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.565.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		3.197.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	4.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		803.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**443.656.000,00**						**-**	**48.125.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan Trantibumlinmas]	**Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat** **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan** **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** **Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100** **60**	**-** **100** **41.2** **97**	**-** **100** **41.2** **98**	**100** **41.2** **98**	**443.656.000,00**	-	-	-	-	-	-	**48.125.000,00**	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	359.824.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	31.625.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				122 Orang	33.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				50 laporan	239.704.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				20 Laporan	65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				5 Unit	6.720.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		4.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	83.832.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-	-	16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				10 Laporan	58.832.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15 Laporan	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**13.322.450.000,00**							**13.382.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.322.450.000,00**							**13.382.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.322.450.000,00**							**13.382.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.503.558.554,00**						**-**	**8.152.000.000,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah]	**Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**	**94**	**88.69**	**89**	**90**	**11.503.558.554,00**	-	-	-	-	-	-	**8.152.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.722.027.554,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	3.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	9.722.027.554,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		3.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	113.790.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	113.790.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	592.857.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	927.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	62.948.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.909.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		580.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	551.324.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	551.324.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.160.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.425.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	22.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		2.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	397.400.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	430.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	280.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.503.558.554,00**	-	-	-	-	-	-	**8.152.000.000,00**	-
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**831.100.000,00**						**-**	**3.530.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**100**	**-**	**80**	**85**	**831.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.530.000.000,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	250.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				4 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				20 Kawasan	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat]	**Persentase penanganan tanggap bencana darurat**	**100**	**-**	**100**	**100**	**831.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.530.000.000,00**	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	200.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.040.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana]	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**95**	**-**	**70**	**75**	**831.100.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.530.000.000,00**	-
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	331.100.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.040.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	146.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				20 Orang	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			0				1 0	185.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**987.791.446,00**						**-**	**1.700.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran]	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**987.791.446,00**	-	-	-	-	-	-	**1.700.000.000,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	987.791.446,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	800.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**987.791.446,00**	-	-	-	-	-	-	**1.700.000.000,00**	-
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	67.791.446,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran]	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**987.791.446,00**	-	-	-	-	-	-	**1.700.000.000,00**	-
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				100 Unit	120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**4.355.684.968,00**							**4.396.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.355.684.968,00**							**4.396.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4.355.684.968,00**							**4.396.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.354.671.768,00**						**-**	**2.856.000.000,00**	
		[Terpenuhinya program penunjang sesuai standard]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.354.671.768,00**	-	-	-	-	-	-	**2.856.000.000,00**	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.832.983.770,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.832.983.770,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	282.227.550,00			-	-	-	-	289.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.042.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	201.184.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	129.472.576,00			-	-	-	-	37.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	10.060.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	95.412.576,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Dairi Ekonomi Bangkit	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.987.872,00			-	-	-	-	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	59.987.872,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**235.000.000,00**						**-**	**420.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS**	**100**	**100**	**100**	**100**	**235.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**420.000.000,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	235.000.000,00			-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**200.000.000,00**						**-**	**240.000.000,00**	
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya** **Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**30**	**0**	**0**	**30**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**240.000.000,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**507.655.400,00**						**-**	**820.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	**Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan** **Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi** **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**3500** **6** **60**	**0** **1000**	**1** **1000** **55**	**1500** **2** **56**	**507.655.400,00**	-	-	-	-	-	-	**820.000.000,00**	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	507.655.400,00			-	-	-	-	820.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	99.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				750 Orang	317.655.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				5000 Usulan	90.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**50.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial** **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota** **Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana** **Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**8.357.800,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan]	**Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.357.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	8.357.800,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Dairi Ekonomi Bangkit	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				80 Makam	8.357.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran Dairi Ekonomi Bangkit	-		0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						**4.848.999.836,00**							**8.178.739.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.848.999.836,00**							**8.178.739.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**215.142.800,00**							**804.200.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**165.143.000,00**						**-**	**520.200.000,00**	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	**Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**	**100**	**0**	**100**	**100**	**165.143.000,00**	-	-	-	-	-	-	**520.200.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	165.143.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	520.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	165.143.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Sitinjo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		520.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**49.999.800,00**						**-**	**284.000.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja yang terlindungi]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**33000**	**32000**	**32100**	**32200**	**49.999.800,00**	-	-	-	-	-	-	**284.000.000,00**	-
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				4 Perusahaan	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.999.800,00			-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-	-	224.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				90 Orang	19.999.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	-		224.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.633.857.036,00**							**7.374.539.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.523.857.036,00**						**-**	**6.372.039.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.523.857.036,00**	-	-	-	-	-	-	**6.372.039.000,00**	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.205.159.794,00			-	-	-	-	5.013.621.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.205.159.794,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.013.621.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	198.394.100,00			-	-	-	-	1.018.826.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.446.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	69.752.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		356.956.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.222.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		153.670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	106.972.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		484.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	76.562.892,00			-	-	-	-	171.402.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.600.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.052.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.922.892,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		123.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	19.040.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.740.250,00			-	-	-	-	168.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	43.740.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		168.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**50.000.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				25 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				5 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**60.000.000,00**						**-**	**402.500.000,00**	
		[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100**	**100**	**100**	**100**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**402.500.000,00**	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	402.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				1 Kegiatan Usaha.	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				6 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		302.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**10.570.000.000,00**							**2.135.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.570.000.000,00**							**2.135.500.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**3.759.805.000,00**							**90.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.562.874.800,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.562.874.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.351.484.934,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.351.484.934,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.108.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.108.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.849.605,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	24.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.562.874.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	71.849.605,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		[Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.562.874.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	82.431.761,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	44.051.475,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	38.380.286,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**70.000.000,00**						**-**	**90.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**85**	**55**	**62.5**	**77**	**70.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**90.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				25 orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				40 Orang	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**36.930.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**60**	**0**	**50**	**51**	**36.930.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.930.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi														
			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				25 orang	16.930.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				20 orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**25.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**75**	**59.09**	**65**	**68**	**25.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**65.000.200,00**						**-**	**0,00**	
		[Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak]	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** **Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**56.17** **60**	**0**	**50** **54.98**	**51** **55.10**	**65.000.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				5 Kegiatan	15.000.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				35 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.810.195.000,00**							**2.045.500.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**405.475.000,00**						**-**	**440.000.000,00**	
		[Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)** **Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun** **Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**	**2.86** **5.1-** **88.5**	**3.01** **70.4** **7.9-**	**2.99** **7.3-** **78**	**2.96** **6.7-** **82.6**	**405.475.000,00**	-	-	-	-	-	-	**440.000.000,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				0 0	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	365.475.000,00			-	-	-	-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				16 Laporan	61.275.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			0				2 0	124.200.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**4.849.120.000,00**						**-**	**1.605.500.000,00**	
		[Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana]	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)** **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)** **Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)** **Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR** **Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**	**10.3** **65:65** **72.81** **75.1** **8**	**13.7** **18.98** **51.81** **57:57** **70**	**13** **16.98** **55.81** **58:58** **71.1**	**12.3** **14.98** **59.81** **60:60** **72.1**	**4.849.120.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.605.500.000,00**	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.409.825.000,00			-	-	-	-	755.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				180 Laporan	734.925.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		755.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				150 Laporan	299.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				5 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	830.000.000,00			-	-	-	-	850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				34 Organisasi	830.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.492.795.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				120 Laporan	18.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4224 Orang	1.350.336.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	102.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				8 Laporan	22.376.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	1.116.500.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				147 Unit	808.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				55 Kampung	308.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1.555.600.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera]	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)**	**69.00**	**57.43**	**59.50**	**61.21**	**1.555.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	130.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.425.600.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				6480 laporan	648.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				6480 laporan	777.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						**19.063.780.940,00**							**27.739.128.816,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.718.610.545,00**							**17.444.128.816,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**12.718.610.545,00**							**17.444.128.816,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.000.501.245,00**						**-**	**15.874.128.816,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**12.000.501.245,00**	-	-	-	-	-	-	**15.874.128.816,00**	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.601.807.705,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	13.084.128.816,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	10.601.807.705,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		13.084.128.816,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	384.583.300,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	925.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.977.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.995.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	249.660.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	864.110.240,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.615.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	114.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		115.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	749.670.240,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**424.923.200,00**						**-**	**950.000.000,00**	
		[Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat]	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)** **Skor Pola Pangan Harapan**	**6.54** **88.8**	**0** **86.4**	**7.54** **86.8**	**7.34** **87.3**	**424.923.200,00**	-	-	-	-	-	-	**950.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	424.923.200,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	950.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				10 Laporan	158.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				200 Keluarga	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	116.923.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**293.186.100,00**						**-**	**620.000.000,00**	
		[Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**14**	**21.30**	**19**	**18**	**293.186.100,00**	-	-	-	-	-	-	**620.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	75.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	218.186.100,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	470.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	167.270.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	50.916.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.146.274.370,00**							**10.070.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**580.086.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**230.646.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**86.6**	**71.417**	**83.5**	**84**	**230.646.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	230.646.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	198.326.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				1 Kelompok	32.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**349.440.000,00**						**-**	**600.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**6248.878**	**3642.024**	**3880.062**	**4268.068**	**349.440.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	199.440.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	199.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349.440.000,00**	-	-	-	-	-	-	**600.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	150.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.566.188.370,00**							**9.070.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**2.346.192.550,00**						**-**	**2.170.000.000,00**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian]	**Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi** **Peningkatan Produksi Hortikultura** **Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**20** **2.75** **29220.70** **3.38**	**0** **0.88** **1** **21512.58**	**0.88** **1** **22680.85** **5**	**10** **1.35** **1.38** **23889.36**	**2.346.192.550,00**	-	-	-	-	-	-	**2.170.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	2.196.185.400,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.820.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1.996.185.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				20000 Batang	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				10 Ton	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	150.007.150,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	150.007.150,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2.100.000.000,00**						**-**	**3.850.000.000,00**	
		[Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**6000**	**0**	**6000**	**6000**	**2.100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.850.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	1.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				100 Ha	350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.100.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				7 Unit	550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**219.995.820,00**						**-**	**500.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner]	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**219.995.820,00**	-	-	-	-	-	-	**500.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.996.400,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	149.996.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.999.420,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	69.999.420,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**150.000.000,00**						**-**	**550.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian]	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian** **Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**100** **28**	**0** **22.37**	**100** **23**	**100** **24**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**550.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**750.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
		[Cakupan Penyuluhan Pertanian]	**Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi** **Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**100** **75**	**0**	**0** **100**	**100** **30**	**750.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	750.000.000,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				168 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				80 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				30 Unit	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	X	**NON URUSAN**						**198.896.025,00**							**225.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**198.896.025,00**							**225.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**198.896.025,00**						**-**	**225.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**198.896.025,00**	-	-	-	-	-	-	**225.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	198.896.025,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-	-	225.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	44.996.025,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	153.900.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		175.000.000,00	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**11.237.670.000,00**							**9.826.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.237.670.000,00**							**9.826.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**11.237.670.000,00**							**9.826.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.737.896.550,00**						**-**	**6.690.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.737.896.550,00**	-	-	-	-	-	-	**6.690.000.000,00**	-
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.666.449.402,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	4.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	6.666.449.402,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		4.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	333.150.984,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	43.150.984,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	113.438.500,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	104.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	73.438.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		62.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	40.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	797.257.664,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	619.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	139.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	654.257.664,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.737.896.550,00**	-	-	-	-	-	-	**6.690.000.000,00**	-
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	827.600.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	821.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	809.860.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		[Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**8.737.896.550,00**	-	-	-	-	-	-	**6.690.000.000,00**	-
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	12.740.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	5.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**762.781.050,00**						**-**	**776.000.000,00**	
		[Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Udara**	**75.61** **84.79**	**69.50** **94.30**	**74.61** **83.79**	**74.81** **83.99**	**762.781.050,00**	-	-	-	-	-	-	**776.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	512.781.050,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	511.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		81.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				6 Lokasi	120.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	112.781.050,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				17 Ha	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**257.344.000,00**						**-**	**260.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**100**	**100**	**100**	**100**	**257.344.000,00**	-	-	-	-	-	-	**260.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	257.344.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1,99 Ha	257.344.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		260.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**0,00**						**-**	**55.000.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**	**100**	**-**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**55.000.000,00**	-
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				20 Usaha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**100.000.000,00**						**-**	**105.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**105.000.000,00**	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**150.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				50 Lembaga	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**1.229.648.400,00**						**-**	**1.830.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**17.76**	**17.70**	**17.71**	**17.72**	**1.229.648.400,00**	-	-	-	-	-	-	**1.830.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.229.648.400,00			-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.830.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	102.669.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			0				- 0	683.794.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				30 Persentase	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				- Ton	191.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				15961,54 Ton	191.585.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	-		885.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**6.526.777.848,00**							**6.028.868.907,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.526.777.848,00**							**6.028.868.907,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6.526.777.848,00**							**6.028.868.907,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.823.490.848,00**						**-**	**5.373.976.707,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah** **Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100.00** **98.33**	**100.00** **98.33**	**100.00** **98.33**	**100.00** **98.33**	**5.823.490.848,00**	-	-	-	-	-	-	**5.373.976.707,00**	-
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.842.685.868,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.356.039.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.842.685.868,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.356.039.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	234.701.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.687.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	116.692.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	13.141.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.050.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.131.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana*	-			100 persen	352.210.000,00			-	-	-	-	145.552.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	352.210.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.552.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.703.680,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	416.394.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			-				-	126.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	136.303.680,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		286.394.784,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.190.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	125.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	91.590.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**638.730.000,00**						**-**	**586.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto)** **Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)** **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**-0.44** **33.00** **95.00**	**-0.44** **4.12** **63.41**	**-0.44** **70.00** **8.00**	**-0.44** **13.00** **75.00**	**638.730.000,00**	-	-	-	-	-	-	**586.000.000,00**	-
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	580.730.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				4500 Dokumen	580.730.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	58.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	36.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**59.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran**	**100.00** **55.00** **65.00** **68.00**	**43.56** **56.16** **58.83** **98.00** **99.79**	**45.00** **58.00** **60.00** **98.00** **99.80**	**47.00** **60.00** **61.00** **98.40** **99.85**	**59.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	59.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**2.500.000,00**						**-**	**4.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**2.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.000.000,00**	-
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	2.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**3.057.000,00**						**-**	**4.892.200,00**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**3.057.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.892.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	3.057.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.892.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3.057.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.892.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**6.220.000.000,00**							**4.076.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.213.790.000,00**							**4.070.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**6.213.790.000,00**							**4.070.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.793.790.080,00**						**-**	**345.000.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.793.790.080,00**	-	-	-	-	-	-	**345.000.000,00**	-
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.472.310.480,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.472.310.480,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	206.990.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				12 0	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	149.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.989.600,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19.989.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	89.500.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	92.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	40.420.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Penataan Desa]	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**86**	**80**	**80**	**81**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	50.000.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**10.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa]	**Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**	**3.11**	**0**	**0**	**0.62**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	10.000.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**3.029.999.920,00**						**-**	**3.285.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.029.999.920,00**	-	-	-	-	-	-	**3.285.000.000,00**	-
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	3.029.999.920,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	3.285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				13 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		[Meningktatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya** **Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**100** **14.99**	**100** **2.33**	**100** **2.33**	**100** **3.53**	**3.029.999.920,00**	-	-	-	-	-	-	**3.285.000.000,00**	-
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				161 Dokumen	2.709.999.920,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		2.800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				15 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				10 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		63.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**330.000.000,00**						**-**	**340.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**330.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**340.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	330.000.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	130.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X	**NON URUSAN**						**6.210.000,00**							**6.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**6.210.000,00**							**6.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.210.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.210.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.210.000,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6.210.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN						**5.436.777.506,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.426.737.506,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**5.426.737.506,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.210.860.306,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.210.860.306,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.010.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.010.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.610.689.080,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.610.689.080,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.170.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	170.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	268.144.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.340.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.429.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	211.425.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.598.576,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.186.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.210.860.306,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.412.576,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.210.860.306,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	209.248.250,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	11.958.250,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	192.180.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5.110.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**215.877.200,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ]	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan** **Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota** **Rasio konektivitas kabupaten/kota**	**2000** **46.20** **50.60**	**161** **45.61** **50.00**	**2000** **45.61** **50.10**	**2000** **45.61** **50.20**	**215.877.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	103.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	103.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	60.822.200,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	60.822.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	19.924.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	19.924.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	72.840.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1100 Dokumen	72.840.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**215.877.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	8.000,00			-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	8.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ]	**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan** **Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota** **Rasio konektivitas kabupaten/kota**	**2000** **46.20** **50.60**	**161** **45.61** **50.00**	**2000** **45.61** **50.10**	**2000** **45.61** **50.20**	**215.877.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	980.000,00			-	Dairi Infrastruktur Tangguh	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				12 Laporan	980.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Infrastruktur Tangguh	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	61.200.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 kali kegiatan Laporan	61.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X	**NON URUSAN**						**10.040.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**10.040.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.040.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.040.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	10.040.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**6.909.162.352,00**							**3.827.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.909.162.352,00**							**3.827.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.769.500.852,00**							**3.772.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.206.521.952,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah]	**Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah**	**78**	**66.46**	**68**	**70**	**3.206.521.952,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.026.300,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.026.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.250.000.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2.250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	486.178.400,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	105.682.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	310.495.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.144.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	16.644.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	38.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	244.435.152,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	94.435.152,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	155.738.100,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	106.599.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9.679.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.460.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**933.751.500,00**						**-**	**992.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya jangkuan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**75**	**-**	**65**	**68**	**933.751.500,00**	-	-	-	-	-	-	**992.000.000,00**	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	933.751.500,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	992.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	554.300.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	19.955.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				40 Permohonan	10.196.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	151.670.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				30 Konten	158.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				3 Orang	38.750.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.629.227.400,00**						**-**	**2.780.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Indeks SPBE**	**3.0**	**2.69**	**2.8**	**2.85**	**2.629.227.400,00**	-	-	-	-	-	-	**2.780.000.000,00**	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.629.227.400,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	2.780.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	14.960.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				123 Perangkat Daerah	469.956.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	19.981.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				5 Aplikasi	316.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	48.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				25 Perangkat Daerah	1.740.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		2.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				0 Dokumen	19.830.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**69.986.500,00**							**55.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**69.986.500,00**						**-**	**55.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.986.500,00**	-	-	-	-	-	-	**55.000.000,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.986.500,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				70 %	19.987.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				100 %	49.999.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**69.675.000,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**69.675.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**300**	**-**	**200**	**220**	**69.675.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.675.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	27.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.675.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				40 Perangkat Daerah	19.975.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**300**	**-**	**200**	**220**	**69.675.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	22.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**6.632.200.000,00**							**1.720.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.217.200.350,00**							**880.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**5.217.200.350,00**							**880.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.314.820.500,00**						**-**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**1.00**	**100**	**100**	**100**	**4.314.820.500,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.547.657.717,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.547.657.717,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	198.641.500,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.996.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	158.645.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	180.260.736,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	153.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27.260.736,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	388.260.547,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	173.470.198,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.314.820.500,00**	-	-	-	-	-	-	**300.000.000,00**	-
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	214.790.349,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**55.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**	**800.000**	**500.000**	**550.000**	**600.000**	**55.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	55.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				10 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				40 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**30.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	**Persentase Koperasi Aktif**	**800.000**	**500.000**	**550.000**	**600.000**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**599.994.000,00**						**-**	**580.000.000,00**	
		[meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**72.16**	**41.23**	**46.39**	**51.54**	**599.994.000,00**	-	-	-	-	-	-	**580.000.000,00**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	599.994.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	580.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				20 Kelompok Masyarakat	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**599.994.000,00**	-	-	-	-	-	-	**580.000.000,00**	-
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				100 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**72.16**	**41.23**	**46.39**	**51.54**	**599.994.000,00**	-	-	-	-	-	-	**580.000.000,00**	-
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				100 Unit Usaha	29.994.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	500.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**217.385.850,00**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**Pertumbuhan Wirausaha**	**2.85**	**2.50**	**2.60**	**2.65**	**217.385.850,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	217.385.850,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	32.385.850,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	25.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			0				0 0	160.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**	**2.80**	**2.50**	**2.55**	**2.60**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.414.999.650,00**							**840.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**489.999.650,00**							**390.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**129.999.700,00**						**-**	**130.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**130.000.000,00**	-
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				25 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.999.700,00**	-	-	-	-	-	-	**130.000.000,00**	-
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-			-	49.999.700,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	49.999.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**500000000**	**250000000**	**300000000**	**350000000**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**50.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**249.999.950,00**						**-**	**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Nilai Ekspor Barang**	**350000000**	**150000000**	**220000000**	**240000000**	**249.999.950,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	249.999.950,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	199.999.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**60.000.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase penanganan pengaduan konsumen**	**200000000**	**100000000**	**120000000**	**140000000**	**60.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	60.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				500 Unit	45.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				15 UMKM	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**925.000.000,00**							**450.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**800.000.000,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**2.6**	**1.5**	**1.7**	**1.9**	**800.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**125.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**11.386.000.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.506.473.680,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.356.473.680,00**							**0,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.177.473.680,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.177.473.680,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				5 0	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.146.455.692,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	6.146.455.692,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	510.156.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	413.756.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	413.085.888,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	195.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	218.085.888,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.775.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	76.890.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5.205.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.680.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**555.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan]	**Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan**	**17**	**10.63**	**12**	**13**	**555.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				2 Orang	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**555.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	375.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				3 Orang	375.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.624.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**20**	**14.1**	**15**	**16**	**1.624.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	100.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	354.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	54.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.624.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	300.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**20**	**14.1**	**15**	**16**	**1.624.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	200.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	520.000.000,00			-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Batang Beruh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.150.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**900.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**900.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	700.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				5 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**250.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan**	**50**	**12.5**	**25**	**30**	**250.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**879.526.320,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**879.526.320,00**							**0,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**379.526.320,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata]	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**10**	**0**	**2**	**4**	**379.526.320,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Lokasi	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	309.526.320,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Lokasi	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.526.320,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata]	**Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**	**10**	**0**	**2**	**4**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		[Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual**	**10**	**0**	**2**	**4**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	70.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				1 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**200.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi**	**10**	**0**	**2**	**4**	**200.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	100.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	100.000.000,00			-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**3.594.521.920,00**							**1.020.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.594.521.920,00**							**1.020.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.539.523.320,00**							**958.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.839.001.320,00**						**-**	**490.000.000,00**	
		[Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Administrasi Perkantoran]	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**75**	**75**	**75**	**75**	**2.839.001.320,00**	-	-	-	-	-	-	**490.000.000,00**	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.390.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.390.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	185.403.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	205.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.003.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.054.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.054.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.990.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	32.990.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.553.620,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	84.999.620,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	86.904.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.839.001.320,00**	-	-	-	-	-	-	**490.000.000,00**	-
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			-				-	49.650.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**626.562.500,00**						**-**	**413.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	**Indeks pembangunan literasi masyarakat** **Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**75** **79.09**	**63.12** **70.23**	**64** **71.63**	**65** **73.07**	**626.562.500,00**	-	-	-	-	-	-	**413.000.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	238.362.400,00			-	-	-	-	263.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				15 Perpustakaan	121.562.500,00	-	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	15.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			0				0 0	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	14.999.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			-				-	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	16.720.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	388.200.100,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				100 Perpustakaan	350.000.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				15 Lokus	38.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**73.959.500,00**						**-**	**55.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Pelestarian dan Penyelamatan Naskah Kuno]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**12**	**0**	**0**	**3**	**73.959.500,00**	-	-	-	-	-	-	**55.000.000,00**	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	73.959.500,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				60 Orang	53.959.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				0 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**54.998.600,00**							**62.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**54.998.600,00**						**-**	**62.000.000,00**	
		[Meningkatnya jumlah pengguna, Arsip Dinamis yang tercipta dan Sumber Daya Manusia ABKD (Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis)]	**TIngkat digitalisasi arsip**	**61**	**50.52**	**52**	**54**	**54.998.600,00**	-	-	-	-	-	-	**62.000.000,00**	-
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.999.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	14.999.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	39.999.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	39.999.300,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**45.962.500.138,00**							**40.135.725.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.962.500.138,00**							**40.135.725.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**45.962.500.138,00**							**40.135.725.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**39.891.740.928,00**						**-**	**33.170.725.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**95**	**80**	**80**	**83**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	261.210.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	319.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	59.623.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	21.593.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	29.119.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	19.108.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	131.765.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.781.844.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.404.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	15.505.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	131.037.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	145.307.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	125.445.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	69.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	125.445.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		69.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	304.540.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	319.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	45.440.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	170.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	89.100.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	7.707.450.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.504.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	143.714.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		198.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	420.003.900,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	230.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				49 Dokumen	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	2.300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2000 Laporan	4.513.732.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.272.957.360,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	1.383.418.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				70 Unit	2.889.539.360,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.697.870.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.095.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	705.350.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		705.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	932.520.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.423.354.318,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.731.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	610.258.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		595.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	1.735.620.518,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		409.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.811.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		396.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				70 Unit	265.875.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.192.974.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	214.010.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		214.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	253.964.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	675.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.269.095.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	600.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	420.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	249.095.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah]	**Indeks Kematangan Organisasi**	**4**	**0**	**0**	**3**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	935.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	870.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelayanan Publik Daerah]	**Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.**	**7**	**7**	**7**	**7**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	220.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya pemenuhan Komponen Pelaporan Kinerja]	**Nilai Komponen Pelaporan Kinerja**	**12.08**	**10.58**	**10.83**	**11.08**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelayanan Publik Daerah]	**Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.**	**7**	**7**	**7**	**7**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya pemenuhan Komponen Pelaporan Kinerja]	**Nilai Komponen Pelaporan Kinerja**	**12.08**	**10.58**	**10.83**	**11.08**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**95**	**80**	**80**	**83**	**39.891.740.928,00**	-	-	-	-	-	-	**33.170.725.000,00**	-
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	919.999.450,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	287.085.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	324.914.450,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	308.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.875.759.210,00**						**-**	**4.630.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	**Efektivitas Kerja Sama Daerah** **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100** **95**	**0**	**70** **85**	**75** **85**	**3.875.759.210,00**	-	-	-	-	-	-	**4.630.000.000,00**	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	1.292.832.510,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				10 Dokumen	499.999.060,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	449.999.950,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	342.833.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** **Indeks Zakat Daerah**	**0.30** **100**	**-** **100**	**0.20** **100**	**0.22** **100**	**3.875.759.210,00**	-	-	-	-	-	-	**4.630.000.000,00**	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	1.982.926.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	1.516.683.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	116.802.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	349.441.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan]	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**3.875.759.210,00**	-	-	-	-	-	-	**4.630.000.000,00**	-
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	1.060.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			0				0 0	200.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**2.195.000.000,00**						**-**	**2.335.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan** **Indeks Akses Keuangan Daerah** **Return On Asset (ROA) BUMD**	**100** **2** **4.31**	**0**	**0** **4.22** **80**	**1** **4.24** **85**	**2.195.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.335.000.000,00**	-
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	900.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				43 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				35 Laporan	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				34 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan]	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**100**	**0**	**80**	**85**	**2.195.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.335.000.000,00**	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	295.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	285.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				13 Laporan	115.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			0				0 0	110.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		92.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa]	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**40**	**13.33**	**20**	**20**	**2.195.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.335.000.000,00**	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				25 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			-				-	100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				5 Orang	350.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						**35.020.000.000,00**							**41.222.332.234,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.020.000.000,00**							**41.222.332.234,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**35.020.000.000,00**							**41.222.332.234,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.023.686.050,00**						**-**	**28.808.607.784,00**	
		[Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25.023.686.050,00**	-	-	-	-	-	-	**28.808.607.784,00**	-
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.649.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.502.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.088.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	7.649.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.413.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.878.782.966,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.166.661.262,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.878.782.966,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.166.661.262,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.023.686.050,00**	-	-	-	-	-	-	**28.808.607.784,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	743.949.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	663.635.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	743.949.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		552.260.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		111.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25.023.686.050,00**	-	-	-	-	-	-	**28.808.607.784,00**	-
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.641.060.080,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.584.243.730,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	21.416.300,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		91.383.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	123.210.380,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		134.874.290,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	196.863.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		216.549.740,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	13.320.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.286.250.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.126.784.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	557.147.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	918.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		565.079.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		79.072.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	98.173.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		111.173.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	58.974.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		162.699.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.003.223.442,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	816.867.194,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	247.062.207,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.166.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	756.161.235,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		683.701.194,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	340.826.506,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	990.599.898,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	125.710.791,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		160.281.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	37.347.150,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.061.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	177.768.565,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		790.256.248,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	15.771.048.056,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.465.072.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	15.561.048.056,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.234.072.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	210.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		231.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	1.080.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	1.080.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**9.996.313.950,00**						**-**	**12.413.724.450,00**	
		[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N** **Persentase Penetapan Ranperda Tahun N**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.996.313.950,00**	-	-	-	-	-	-	**12.413.724.450,00**	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	300.575.950,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	330.757.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	300.575.950,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.757.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	8.735.788.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.027.021.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				35 Dokumen	7.512.350.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.512.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	1.202.468.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.491.780.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	20.970.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.891.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	959.950.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.055.945.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				35 Laporan	63.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		69.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	896.450.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		986.095.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH						**6.988.256.234,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.231.976.800,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**1.670.726.800,00**							**0,00**	
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.024.117.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Keselarasan RKPD terhadap RPJMD]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.024.117.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	937.189.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	122.029.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	815.160.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	86.928.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	86.928.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**646.609.200,00**						**-**	**0,00**	
		[Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD** **Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**646.609.200,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	356.609.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	126.609.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	230.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	205.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	85.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	85.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**561.250.000,00**							**0,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**461.250.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah]	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**461.250.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	225.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	236.250.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	86.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah]	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	50.000.000,00			-	Dairi Clean Governance	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	50.000.000,00			-	Dairi Clean Governance	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah														
			0				1 0	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**4.756.279.434,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.756.279.434,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.756.279.434,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.756.279.434,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	38.444.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.289.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	21.155.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.694.609.934,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/bulan	3.694.609.934,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.501.500,00			-	Dairi Clean Governance	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.501.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Dairi Clean Governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	35.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	535.375.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5.878.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.835.100,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	43.710.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	450.552.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	233.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	233.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.160.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	31.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.160.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	172.688.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	75.706.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	272.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	24.230.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	46.880.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**216.765.972.251,00**							**221.812.237.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**216.765.972.251,00**							**221.812.237.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**216.765.972.251,00**							**221.812.237.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.164.471.651,00**						**-**	**6.925.987.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.811.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	24.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8.668.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	9.143.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.110.005.381,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.524.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.090.005.381,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	262.313.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	292.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				82 Orang	152.913.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	109.400.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		72.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	628.402.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	818.635.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.023.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	132.921.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		144.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	29.476.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		48.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	67.348.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		157.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.075.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	386.633.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		440.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	191.919.540,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	360.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	191.919.540,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	594.133.680,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	490.302.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	211.200.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		68.002.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	379.733.680,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		415.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	359.886.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	415.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	279.450.250,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	294.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Nilai SAKIP OPD]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56.792.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		62.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.164.471.651,00**	-	-	-	-	-	-	**6.925.987.000,00**	-
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.350.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		34.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**209.692.747.900,00**						**-**	**213.732.240.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Anggaran]	**Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N**	**100**	**100**	**100**	**100**	**209.692.747.900,00**	-	-	-	-	-	-	**213.732.240.000,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.172.373.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Dairi Clean Governance	-	-	1.421.190.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	123.529.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Dairi Clean Governance	-		164.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	120.713.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		147.620.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	39.365.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.410.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	39.785.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.670.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	54.487.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	73.625.200,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	298.236.500,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		435.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	384.933.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		459.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	37.697.800,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan]	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**	**91.5**	**88.78**	**89**	**89.5**	**209.692.747.900,00**	-	-	-	-	-	-	**213.732.240.000,00**	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	339.946.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	544.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				250 Dokumen	102.422.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		157.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				100 Dokumen	92.415.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		145.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				41 Laporan	92.479.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		145.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				123 Orang	52.630.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		96.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan]	**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**98**	**90**	**90**	**90**	**209.692.747.900,00**	-	-	-	-	-	-	**213.732.240.000,00**	-
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	394.983.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	611.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	63.942.900,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		181.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	177.652.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		266.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	3.389.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.150.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				82 Orang	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Meningkatnya Penyaluran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah]	**Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)**	**50.6**	**50.19**	**50.3**	**50.4**	**209.692.747.900,00**	-	-	-	-	-	-	**213.732.240.000,00**	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	207.535.445.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	210.900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				161 Laporan	200.063.871.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		202.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	5.090.426.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				161 Laporan	2.381.148.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Penggunaan Aplikasi Keuangan]	**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital**	**100**	**100**	**100**	**100**	**209.692.747.900,00**	-	-	-	-	-	-	**213.732.240.000,00**	-
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	255.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		255.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**908.752.700,00**						**-**	**1.154.010.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah]	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**18**	**10**	**10**	**10**	**908.752.700,00**	-	-	-	-	-	-	**1.154.010.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	908.752.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.154.010.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				41 Dokumen	146.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		187.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		36.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				41 Laporan	251.192.300,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		363.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				41 Laporan	80.310.400,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				41 Laporan	45.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				41 Dokumen	55.750.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		84.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				84 Laporan	300.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Sidikalang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		288.860.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**5.347.182.180,00**							**109.182.180,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.173.165.000,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**5.173.165.000,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.784.518.600,00**						**-**	**0,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**9**	**9**	**9**	**9**	**3.784.518.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	58.228.800,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	58.228.800,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.551.011.803,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.551.011.803,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.785.400,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38.785.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	136.492.597,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	136.492.597,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.388.646.400,00**						**-**	**0,00**	
		[tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah]	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD** **Rasio PAD** **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	**0.0032** **8.51:8.52** **90.53**	**0.0018** **8.39:8.40** **88.03**	**0.0020** **8.41:8.42** **88.28**	**0.0022** **8.43:8.44** **88.53**	**1.388.646.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.388.646.400,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				16 Dokumen	53.314.400,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	159.523.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				9 Laporan Laporan	105.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	277.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	157.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				16 Dokumen	52.498.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	262.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	154.161.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				16 Laporan	114.449.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**174.017.180,00**							**109.182.180,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**174.017.180,00**							**109.182.180,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**174.017.180,00**						**-**	**109.182.180,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174.017.180,00**	-	-	-	-	-	-	**109.182.180,00**	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	65.500.000,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.517.180,00			-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-	-	109.182.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	67.182.180,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	-		109.182.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**4.569.999.739,00**							**5.027.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.569.999.739,00**							**5.027.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.289.999.739,00**							**4.719.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.053.085.739,00**						**-**	**3.358.394.313,00**	
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**90**	**-**	**80**	**82**	**3.053.085.739,00**	-	-	-	-	-	-	**3.358.394.313,00**	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.460.670.659,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.706.737.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.460.670.659,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.706.737.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	412.773.380,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	480.602.903,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	67.564.180,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.442.683,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.655.200,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.731.720,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	9.360.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.296.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	300.194.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		330.632.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	106.081.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	84.571.685,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	66.184.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		41.055.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	39.897.700,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		43.516.385,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.053.085.739,00**	-	-	-	-	-	-	**3.358.394.313,00**	-
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	58.560.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	69.982.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	44.320.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.318.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**90**	**-**	**80**	**82**	**3.053.085.739,00**	-	-	-	-	-	-	**3.358.394.313,00**	-
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.240.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.664.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.236.914.000,00**						**-**	**1.360.605.687,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian]	**Indeks Profesionalitas ASN**	**81**	**75.21**	**76**	**76**	**1.236.914.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.360.605.687,00**	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	276.914.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	304.605.687,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				0 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.236.914.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.360.605.687,00**	-
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	56.914.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		62.605.687,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian]	**Indeks Profesionalitas ASN**	**81**	**75.21**	**76**	**76**	**1.236.914.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.360.605.687,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	700.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	770.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				6 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		715.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.236.914.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.360.605.687,00**	-
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	200.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian]	**Indeks Profesionalitas ASN**	**81**	**75.21**	**76**	**76**	**1.236.914.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.360.605.687,00**	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	60.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**280.000.000,00**							**308.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**280.000.000,00**						**-**	**308.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN]	**Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi**	**55**	**50**	**55**	**55**	**280.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**308.000.000,00**	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	200.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0 Orang	200.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	80.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				10 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**15.299.999.657,00**							**22.488.627.232,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.299.999.657,00**							**22.488.627.232,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**15.299.999.657,00**							**22.488.627.232,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.120.047.657,00**						**-**	**18.443.377.232,00**	
		[Persentase penunjang urusan pemeintah daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**11.120.047.657,00**	-	-	-	-	-	-	**18.443.377.232,00**	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.081.270.992,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	13.682.859.732,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	6.081.270.992,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.682.859.732,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.517.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.715.005.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	242.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		265.005.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	225.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	1.050.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	962.813.550,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.250.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.384.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	245.447.550,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	156.566.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	545.616.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.781.094.750,00			-	-	-	-	800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	1.232.080.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	408.014.750,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	141.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	51.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.350.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32.400.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	738.118.365,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	944.187.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	77.907.600,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	521.016.765,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		725.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	39.350.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.187.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.844.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**3.025.980.000,00**						**-**	**2.910.250.000,00**	
		[Persentase pengawasan internal]	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**90**	**90**	**90**	**90**	**3.025.980.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.910.250.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	2.773.560.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.660.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	378.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		222.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				90 Laporan	787.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		675.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				42 Laporan	131.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		187.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				42 Laporan	131.250.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				161 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	295.560.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	252.420.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	52.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				24 Laporan	199.920.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.153.972.000,00**						**-**	**1.135.000.000,00**	
		[Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan]	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.153.972.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.135.000.000,00**	-
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	1.153.972.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 perangkat daerah	605.372.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				20 perangkat daerah	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	278.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				20 perangkat daerah	135.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		135.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN SIDIKALANG						**8.755.000.000,00**							**9.814.558.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**8.753.350.000,00**							**9.812.758.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**8.753.350.000,00**							**9.812.758.500,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.778.145.020,00**						**-**	**6.824.538.800,00**	
		[Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**94.20**	**93.69**	**93.70**	**93.80**	**5.778.145.020,00**	-	-	-	-	-	-	**6.824.538.800,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.713.000,00			-	-	-	-	12.883.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.928.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.220.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8.785.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.663.500,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.778.000.000,00			-	-	-	-	5.783.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	4.778.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.783.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	129.952.020,00			-	-	-	-	148.434.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.687.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.554.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.777.020,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.880.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.488.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.000.000,00			-	-	-	-	37.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	8.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	784.300.000,00			-	-	-	-	785.300.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan Laporan	27.500.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		81.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	676.800.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		676.800.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.778.145.020,00**	-	-	-	-	-	-	**6.824.538.800,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.180.000,00			-	-	-	-	57.921.300,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	42.650.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.650.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		[Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**94.20**	**93.69**	**93.70**	**93.80**	**5.778.145.020,00**	-	-	-	-	-	-	**6.824.538.800,00**	-
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	3.530.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.271.300,00	KECAMATAN SIDIKALANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.962.960.980,00**						**-**	**2.963.751.700,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**	**94.20**	**93.69**	**93.70**	**93.80**	**2.962.960.980,00**	-	-	-	-	-	-	**2.963.751.700,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.960.980,00			-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-	-	8.751.700,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	3.897.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		4.201.700,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			0				0 0	4.063.980,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		4.550.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	2.955.000.000,00			-	-	-	-	2.955.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.955.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.955.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			0				5 0	1.000.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	-		1.000.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**94.20**	**93.69**	**93.70**	**93.80**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		20.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.244.000,00**						**-**	**4.468.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**94.20**	**93.69**	**93.70**	**93.80**	**2.244.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.468.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.244.000,00			-	-	-	-	4.468.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	1.122.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.234.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	1.122.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.234.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	X	**NON URUSAN**						**1.650.000,00**							**1.800.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.650.000,00**							**1.800.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.650.000,00**						**-**	**1.800.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.650.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.800.000,00**	-
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.650.000,00			-	-	-	-	1.800.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.650.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN SIDIKALANG
		KECAMATAN SUMBUL						**3.250.999.786,00**							**2.892.310.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.250.999.786,00**							**2.892.310.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.250.999.786,00**							**2.892.310.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.547.077.286,00**						**-**	**2.546.900.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**85.50**	**84.29**	**84.50**	**84.75**	**2.547.077.286,00**	-	-	-	-	-	-	**2.546.900.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.099.150,00			-	-	-	-	6.100.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.499.350,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.599.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.600.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.306.682.586,00			-	-	-	-	2.307.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	2.306.682.586,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.307.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	71.417.300,00			-	-	-	-	71.100.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	796.600,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	21.831.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.799.700,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.800.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	44.990.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.422.500,00			-	-	-	-	123.700.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.222.500,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	115.200.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.200.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	39.455.750,00			-	-	-	-	39.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.995.750,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1.460.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**609.600.000,00**						**-**	**220.460.000,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**	**82.50**	**79.97**	**80.00**	**80.50**	**609.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**220.460.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	18.600.000,00			-	-	-	-	20.460.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	2.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.310.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	16.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.150.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	591.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Pagagan Julu I	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	381.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**81.322.500,00**						**-**	**89.650.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**82.50**	**79.97**	**80.00**	**80.50**	**81.322.500,00**	-	-	-	-	-	-	**89.650.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	81.322.500,00			-	-	-	-	89.650.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	81.322.500,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		89.650.000,00	KECAMATAN SUMBUL
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**13.000.000,00**						**-**	**35.300.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**82.50**	**79.97**	**80.00**	**80.50**	**13.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**35.300.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	13.000.000,00			-	-	-	-	35.300.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.350.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.950.000,00	KECAMATAN SUMBUL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Sumbul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN SUMBUL
		KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA						**3.194.630.368,00**							**3.351.972.920,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.194.630.368,00**							**3.351.972.920,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.194.630.368,00**							**3.351.972.920,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.533.989.568,00**						**-**	**2.729.487.920,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**85.50**	**84.29**	**84.50**	**84.75**	**2.533.989.568,00**	-	-	-	-	-	-	**2.729.487.920,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.341.000,00			-	-	-	-	2.646.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.270.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.394.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	1.071.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.252.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.264.762.069,00			-	-	-	-	2.440.362.103,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.264.762.069,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.440.362.103,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	84.932.894,00			-	-	-	-	66.044.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.079.200,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.483.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.348.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.488.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.255.694,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.308.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	59.250.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.765.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	23.010.000,00			-	-	-	-	28.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5.850.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17.160.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.770.368,00			-	-	-	-	108.288.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.210.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	18.040.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.828.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	85.630.368,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		79.200.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.173.237,00			-	-	-	-	83.547.817,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	52.713.237,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.064.817,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.460.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.883.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**614.017.500,00**						**-**	**574.952.000,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**	**81.00**	**79.97**	**80.00**	**80.20**	**614.017.500,00**	-	-	-	-	-	-	**574.952.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	23.017.500,00			-	-	-	-	28.352.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	5.614.500,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.618.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	17.403.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.734.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	591.000.000,00			-	-	-	-	546.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	8.196.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	391.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		320.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	191.804.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**41.311.300,00**						**-**	**41.800.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**81.00**	**79.97**	**80.00**	**80.20**	**41.311.300,00**	-	-	-	-	-	-	**41.800.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	41.311.300,00			-	-	-	-	41.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	41.311.300,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.800.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.312.000,00**						**-**	**5.733.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**81.00**	**79.97**	**80.00**	**80.20**	**5.312.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.733.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.312.000,00			-	-	-	-	5.733.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	2.615.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.855.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2.697.000,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.878.000,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Silima Pungga Pungga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SILIMA PUNGGA PUNGGA
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU						**1.790.000.000,00**							**2.266.098.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.730.780.000,00**							**2.201.198.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.730.780.000,00**							**2.201.198.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.668.650.000,00**						**-**	**1.835.515.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.668.650.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.835.515.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	-	-	-	9.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		[Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**85.50**	**84.29**	**84.50**	**84.75**	**1.668.650.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.835.515.000,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.500.000.000,00			-	-	-	-	1.650.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.500.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.650.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.650.000,00			-	-	-	-	15.015.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.650.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.815.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.200.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	46.000.000,00			-	-	-	-	50.600.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	46.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.600.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.000.000,00**						**-**	**5.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**81.00**	**79.97**	**80.00**	**80.20**	**5.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**5.500.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				13 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**54.530.000,00**						**-**	**356.983.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**85.50**	**79.97**	**84.50**	**84.75**	**54.530.000,00**	-	-	-	-	-	-	**356.983.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	54.530.000,00			-	-	-	-	356.983.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	30.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		330.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54.530.000,00**	-	-	-	-	-	-	**356.983.000,00**	-
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	24.530.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		26.983.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.600.000,00**						**-**	**3.200.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**81.00**	**79.97**	**80.00**	**80.20**	**2.600.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.200.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.600.000,00			-	-	-	-	3.200.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.400.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X	**NON URUSAN**						**59.220.000,00**							**64.900.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**59.220.000,00**							**64.900.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**59.220.000,00**						**-**	**64.900.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.220.000,00**	-	-	-	-	-	-	**64.900.000,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.220.000,00			-	-	-	-	3.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.220.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	56.000.000,00			-	-	-	-	61.600.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.900.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.200.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
		KECAMATAN TIGA LINGGA						**1.740.000.000,00**							**1.964.279.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.740.000.000,00**							**1.964.279.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.740.000.000,00**							**1.964.279.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.641.234.000,00**						**-**	**1.846.579.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**85.55**	**84.20**	**84.25**	**84.30**	**1.641.234.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.846.579.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.680.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.667.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.284.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.703.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	8.396.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.964.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.405.513.090,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.553.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.405.513.090,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.553.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	19.700.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	19.700.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	107.585.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.912.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.497.500,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.212.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.062.200,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		39.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	8.026.400,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		31.500.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	9.999.500,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.600.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		59.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.854.410,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.723.570,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.130.840,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.280.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.280.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.620.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	64.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.270.900,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.920.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	23.430.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Tigalingga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**46.191.000,00**						**-**	**58.700.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**46.191.000,00**	-	-	-	-	-	-	**58.700.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	46.191.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	58.700.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				15 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.700.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25.191.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		36.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.350.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**11.350.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	11.350.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	11.350.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**41.225.000,00**						**-**	**39.000.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Kecamatan Dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**92**	**80**	**82**	**84**	**41.225.000,00**	-	-	-	-	-	-	**39.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	41.225.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	39.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	17.930.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	23.295.000,00	Kab. Dairi, Tigalingga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	KECAMATAN TIGA LINGGA
		KECAMATAN TANAH PINEM						**1.636.100.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**39.691.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**39.691.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**11.950.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**11.950.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan koordinasi Pemberdayaan Desa*	-			100 Persen	11.950.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	6.850.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.100.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**13.341.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**13.341.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 Persen	13.341.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	13.341.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**14.400.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**84.50**	**84.20**	**84.25**	**84.30**	**14.400.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan*	-			100 Persen	14.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				19 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X	**NON URUSAN**						**1.596.409.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.596.409.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.596.409.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.596.409.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	7.088.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.544.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	3.544.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	1.398.867.557,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	1.398.867.557,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Tahun	123.522.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.974.600,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.481.500,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.326.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	88.740.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Tahun	25.230.368,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	10.600.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.630.368,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Dairi Clean Governance	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			1 Tahun	41.700.975,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	38.050.975,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.650.000,00	Kab. Dairi, Tanah Pinem, Kuta Buluh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN TANAH PINEM
		KECAMATAN PEGAGAN HILIR						**1.589.977.694,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.589.977.694,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.589.977.694,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.569.967.294,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**1.569.967.294,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.503.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.503.500,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.377.047.648,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.377.047.648,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.789.636,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.918.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11.258.600,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	4.132.236,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	32.480.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.871.210,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	200.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	7.200.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	58.471.210,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.569.967.294,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.755.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	60.815.500,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**1.569.967.294,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2.650.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.964.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.325.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.855.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.855.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.855.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	1.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**8.757.600,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**8.757.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.757.600,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	3.314.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	5.442.900,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.457.800,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**1.457.800,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	1.457.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				800 Orang	657.800,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				800 Orang	800.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**7.940.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**7.940.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	7.940.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	4.710.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	3.230.000,00	Kab. Dairi, Pegagan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PEGAGAN HILIR
		KECAMATAN PARBULUAN						**1.760.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.760.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.760.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.709.780.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**82.50**	**84.20**	**84.25**	**83.30**	**1.709.780.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.575.579.892,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1.575.579.892,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	80.859.608,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	902.058,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.057.100,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.400.450,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.500.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Parbuluan IV	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	44.340.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	44.340.500,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**19.420.000,00**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**82.50**	**84.20**	**84.25**	**83.30**	**19.420.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	19.420.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	9.540.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	9.880.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.000.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**80**	**62.77**	**75**	**77.25**	**25.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	15.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	10.000.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.800.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**80**	**62.77**	**75**	**77.25**	**5.800.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN PARBULUAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5.800.000,00	Kab. Dairi, Parbuluan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PARBULUAN
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR						**1.353.621.651,00**							**1.524.306.405,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.353.621.651,00**							**1.524.306.405,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.353.621.651,00**							**1.524.306.405,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.273.341.083,00**						**-**	**1.412.076.405,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**1.273.341.083,00**	-	-	-	-	-	-	**1.412.076.405,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.147.783.000,00			-	-	-	-	1.257.783.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.147.783.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.257.783.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	62.622.800,00			-	-	-	-	68.800.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.999.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.627.800,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.997.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	22.999.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.300.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.630.368,00			-	-	-	-	14.993.405,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	13.630.368,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.993.405,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.273.341.083,00**	-	-	-	-	-	-	**1.412.076.405,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	49.304.915,00			-	-	-	-	54.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	49.304.915,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**30.283.000,00**						**-**	**33.030.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**81.00**	**80.00**	**80.20**	**80.40**	**30.283.000,00**	-	-	-	-	-	-	**33.030.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	30.283.000,00			-	-	-	-	33.030.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15.283.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.530.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**34.997.568,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**34.997.568,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	34.997.568,00			-	-	-	-	38.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1000 Orang	14.997.568,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**15.000.000,00**						**-**	**40.700.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**81.00**	**80.00**	**80.20**	**80.40**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**40.700.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	15.000.000,00			-	-	-	-	40.700.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**40.700.000,00**	-
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.200.000,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
		KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU						**1.749.983.828,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**93.600.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**93.600.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**27.850.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.00**	**88.20**	**80.30**	**27.850.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	27.850.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 DESA Lembaga Kemasyarakatan	27.850.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
2.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**65.750.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan Layanan Kecamatan dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.750.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	65.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3bulan Orang	30.750.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	35.000.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Layanan Kecamatan dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 DESA Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X	**NON URUSAN**						**1.656.383.828,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.656.383.828,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.656.383.828,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.656.383.828,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.525.352.048,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.525.352.048,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	29.127.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	1.827.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	27.300.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.475.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	19.726.700,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	748.400,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.429.280,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	76.599.280,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4.830.000,00	Kab. Dairi, Siempat Nempu Hulu, Silumboyah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
		KECAMATAN LAE PARIRA						**1.690.000.000,00**							**1.858.819.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**191.280.000,00**							**210.227.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**191.280.000,00**							**210.227.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**112.955.000,00**						**-**	**120.027.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**81.20**	**80.20**	**80.40**	**80.60**	**112.955.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.027.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.570.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.570.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.955.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.027.000,00**	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			-				-	0,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.750.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**81.20**	**80.20**	**80.40**	**80.60**	**112.955.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.027.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	71.142.000,00			-	-	-	-	65.680.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.993.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.980.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.345.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.200.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.054.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	37.750.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.500.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.500.000,00			-	-	-	-	12.210.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			0				0 0	1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.650.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.560.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.955.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.027.000,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.313.000,00			-	-	-	-	36.817.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	32.313.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.817.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12.000.000,00**						**-**	**13.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**81.20**	**80.20**	**80.40**	**80.60**	**12.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**13.200.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	13.200.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.200.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**66.325.000,00**						**-**	**77.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.325.000,00**	-	-	-	-	-	-	**77.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	66.325.000,00			-	-	-	-	77.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	26.260.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**81.20**	**80.20**	**80.40**	**80.60**	**66.325.000,00**	-	-	-	-	-	-	**77.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	40.065.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.000.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X	**NON URUSAN**						**1.498.720.000,00**							**1.648.592.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.498.720.000,00**							**1.648.592.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.498.720.000,00**						**-**	**1.648.592.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.498.720.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.648.592.000,00**	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.498.720.000,00			-	-	-	-	1.648.592.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.498.720.000,00	Kab. Dairi, Lae Parira, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.648.592.000,00	KECAMATAN LAE PARIRA
		KECAMATAN GUNUNG SITEMBER						**1.460.000.000,00**							**22.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.460.000.000,00**							**22.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.460.000.000,00**							**22.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.424.322.980,00**						**-**	**22.200.000,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**84.00**	**77.00**	**78.00**	**79.00**	**1.424.322.980,00**	-	-	-	-	-	-	**22.200.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	3.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.271.916.140,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1.271.916.140,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	92.013.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.013.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	59.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.344.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	700.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			-				-	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.344.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.049.840,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.049.840,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.120.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**84.00**	**78.00**	**79.00**	**80.00**	**9.120.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	9.120.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	7.120.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**21.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**86.00**	**80.00**	**81.00**	**82.00**	**21.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	21.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.557.020,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**84.00**	**78.00**	**79.00**	**80.00**	**5.557.020,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.557.020,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				8 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				8 Dokumen	1.557.020,00	Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
		KECAMATAN BERAMPU						**1.439.823.360,00**							**1.583.999.999,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.439.823.360,00**							**1.583.999.999,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.439.823.360,00**							**1.583.999.999,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.379.313.860,00**						**-**	**1.517.240.284,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**87.60**	**81.20**	**82.30**	**83.20**	**1.379.313.860,00**	-	-	-	-	-	-	**1.517.240.284,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.887.000,00			-	-	-	-	5.374.600,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.398.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.637.800,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.489.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.736.800,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.211.506.169,00			-	-	-	-	1.332.656.785,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.211.506.169,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.332.656.785,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	107.697.110,00			-	-	-	-	118.462.960,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.003.510,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.453.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.098.300,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.470.600,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.017.660,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	73.770.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		81.147.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	18.500.000,00			-	-	-	-	20.350.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.650.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.000.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.700.000,00	KECAMATAN BERAMPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.723.581,00			-	-	-	-	40.395.939,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.533.581,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		37.986.939,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2.190.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.409.000,00	KECAMATAN BERAMPU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**16.601.000,00**						**-**	**18.460.365,00**	
		[Menigkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti**	**89.60**	**83.20**	**83.60**	**83.40**	**16.601.000,00**	-	-	-	-	-	-	**18.460.365,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	16.601.000,00			-	-	-	-	18.460.365,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	1.322.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.454.750,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	15.278.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.005.615,00	KECAMATAN BERAMPU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**40.000.000,00**						**-**	**44.000.000,00**	
		[Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**89.60**	**83.20**	**83.60**	**84.20**	**40.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**44.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	-	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN BERAMPU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.908.500,00**						**-**	**4.299.350,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.908.500,00**	-	-	-	-	-	-	**4.299.350,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3.908.500,00			-	-	-	-	4.299.350,00	KECAMATAN BERAMPU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	3.908.500,00	Kab. Dairi, Berampu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.299.350,00	KECAMATAN BERAMPU
		KECAMATAN SILAHISABUNGAN						**1.330.000.000,00**							**1.633.838.656,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.308.874.500,00**							**1.611.282.056,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.308.874.500,00**							**1.611.282.056,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.265.609.196,00**						**-**	**1.495.282.056,00**	
		[Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**90.35**	**90**	**90.10**	**90.15**	**1.265.609.196,00**	-	-	-	-	-	-	**1.495.282.056,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.350.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.350.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.134.347.324,00			-	-	-	-	1.247.782.056,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	1.134.347.324,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.247.782.056,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	50.394.000,00			-	-	-	-	103.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	11.854.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	38.540.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	25.500.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.017.872,00			-	-	-	-	49.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	45.017.872,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		49.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**18.970.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
		[Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti**	**80.70**	**80.23**	**80.25**	**80.50**	**18.970.000,00**	-	-	-	-	-	-	**35.000.000,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	18.970.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	6.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**24.295.304,00**						**-**	**55.000.000,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.23**	**80.55**	**80.65**	**24.295.304,00**	-	-	-	-	-	-	**55.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	24.295.304,00			-	-	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				8 Orang	11.095.304,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	13.200.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**						**-**	**26.000.000,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**87.00**	**81.00**	**82.00**	**83.00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**26.000.000,00**	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	-	-	-	26.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X	**NON URUSAN**						**21.125.500,00**							**22.556.600,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**21.125.500,00**							**22.556.600,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.125.500,00**						**-**	**22.556.600,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.125.500,00**	-	-	-	-	-	-	**22.556.600,00**	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	16.125.500,00			-	-	-	-	17.056.600,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	16.125.500,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.056.600,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi, Silahisabungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN SILAHISABUNGAN
		KECAMATAN SITINJO						**2.921.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.921.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.921.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.238.803.532,00**						**-**	**0,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**2.238.803.532,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	3.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.026.341.032,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	2.026.341.032,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.069.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			-				-	10.022.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	19.711.500,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	15.335.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.238.803.532,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**2.238.803.532,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	11.800.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	72.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.238.803.532,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.593.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	50.593.500,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**2.238.803.532,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**642.620.000,00**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**642.620.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	51.620.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0 Dokumen	25.610.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	26.010.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	591.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	391.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Panji Dabutar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**37.069.168,00**						**-**	**0,00**	
		[Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	**Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**37.069.168,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	37.069.168,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.069.168,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	17.069.168,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.507.300,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar**	**80.50**	**80.20**	**80.25**	**80.30**	**2.507.300,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.507.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen	2.507.300,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	0,00	Kab. Dairi, Sitinjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SITINJO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.470.000.000,00**							**1.380.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.462.000.000,00**							**1.380.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.462.000.000,00**							**1.380.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.173.384.809,00**						**-**	**0,00**	
		[Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah]	**Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah**	**95.00**	**88.00**	**90.00**	**91.00**	**2.173.384.809,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.910.090.809,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.910.090.809,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	169.694.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4.004.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.500.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	121.190.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	18.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.600.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	65.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**540.747.691,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**90.00**	**80.00**	**82.00**	**84.00**	**540.747.691,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	540.747.691,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	35.747.691,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	5.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				30 Orang	480.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.029.232.500,00**						**-**	**1.330.000.000,00**	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100**	**90.00**	**91.00**	**92.00**	**1.029.232.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.330.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	1.029.232.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.001.006.000,00	Kab. Dairi, Sidikalang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	28.226.500,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**30.000.000,00**						**-**	**20.000.000,00**	
		[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**100**	**90.00**	**91.00**	**92.00**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**20.000.000,00**	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	30.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dairi, Gunung Sitember, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**610.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	**Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**	**88.00**	**80.00**	**82.00**	**83.00**	**610.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	610.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				9 Dokumen	610.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**78.635.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100**	**86.00**	**88.00**	**90.00**	**78.635.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	78.635.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	78.635.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**8.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**8.000.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	Kab. Dairi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.287.160.813.692,91**							**2.204.572.604.242,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing pada akhir periode masa jabatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menujukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintahan sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA, RKPD maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Dairi merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapanan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi, pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten Dairi.

6.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, berikut disajikan capaian indikator pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan target pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2024.

6.1.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Tabel 6.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Dairi Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV Tahun 2024	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,09	75,18	Data 2023
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,79-7,60	7,10	BPS 2024
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00-5,00	5,04	Data 2023
4	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,22	0,241	Data 2023
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,19-1,10	1,22	Data 2024

6.1.2 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Tabel 6.2 Capaian IKU Kepala Daerah Kabupaten Dairi Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Triwulan IV Tahun 2024*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115,24	146,97	127,53%	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	Data 2024
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	100,00%	Setda	Data 2024
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100,00%	BKAD	Data 2023
4	Indeks SPBE	Poin	3,00	2,69	89,67%	Dinas Kominfo	Data 2024
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	73,62	92,03%	Setda	Data 2023
6	Indeks Infrastruktur	Persen	51,78	55,38	110,36%	Dinas PUTR	Data 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Triwulan IV Tahun 2024*)	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Perangkat Daerah	Keterangan
7	Indeks Pendidikan	Poin	69,72	69,93	100,30%	Dinas Pendidikan	Data 2024
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,64	74,38	103,83%	Dinas Kesehatan	Data 2024
9	Pengeluaran Per Kapita	Rp (x 1.000)	11.219,5	11.355	101,208%	BPS	Data 2024
10	Indeks Desa Membangun	Poin	0,65	0,67	103,08%	Dinas PMD	Data 2024

6.1.3 Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, dan tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Capaian IKU Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Triwulan IV Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
Dinas Pendidikan							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan	Nilai	69,72	69,93	100,30%	
		Predikat Sakip	Predikat	BB	B	50,00%	
2	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Kesetaraan yang adil dan merata, untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan	Angka Melek Huruf Umur 15-45 Tahun	Tahun	99,91	98,76	98,85%	
		Persentase lembaga PAUD yang memiliki izin	%	19,30	10,34	53,58%	
		APK PAUD	%	40,00	38,92	97,30%	
		APK SD	%	100,00	96,81	96,81%	
		APK SMP	%	97,30	94,76	97,39%	
		APM SD	%	99,85	97,40	97,55%	
		APM SMP	%	95,30	94,04	98,68%	
		Angka putus sekolah SD/MI	%	0,15	0,02	13,33%	
		Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,55	0,03	5,45%	
		AM SD	%	100,00	94,67	94,67%	
		AM SMP	%	99,67	99,96	100,29%	
		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SD/MI	%	68,00	67,95	99,93%	
		Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	32,00	31,40	98,13%	
		Persentase siswa dengan nilai	%	61,20	66,54	108,72%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Asesmen Nasional (Literasi) memenuhi kompetensi minimum					
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Nasional (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	31,10	57,25	184,08%	
		Persentase SMP Berakreditasi B	%	61,01	63,49	104,06%	
		Jumlah siswa yang masuk SMA Unggulan	Jumlah	160,00	34,00	21,25%	
		Persentase guru PAUD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	31,20	41,05	131,57%	
		Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	78,40	82,11	104,73%	
		Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4	%	89,78	94,03	104,73%	
		Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	2,46	2,89	117,48%	
		Persentase guru SD/MI yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	38,55	27,93	72,45%	
		Persentase guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	51,83	46,67	90,04%	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:15	1:13	97,33%	
		Tingkat Partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartispasi dalam pendidikan	%	36,30	54,18	149,26%	
		Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	%	100,00	104,48	104,48%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		pendidikan dasar					
		Tingkat partisipasi warga negara usi 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	101,1	101,1%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,93	0,26	2%	
Dinas Kesehatan							
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	AHH	Tahun	71,64	74,38	103,83	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	Belum Ada Data	50,00%	
		BOR (Bad Accupacy Rate)	%	79,00	88,08	111,50%	
		AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3,00	3,13	104,33%	
		TOI (Turn Over Interval)	Hari	1.00	1,00	100.00%	
		GDR (Gross Death Rate)	%	28,00	16,8	60,00%	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	%	81,00	97,95	120,9%	
		Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Predikat	Paripurna	Paripurna	100,00	
		Cakupan Masyarakat menjadi anggota JKN	%	90,00	94,24	104,72%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan lapangan sesuai standar	%	100	100	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Pesentase penangan kejadian gawat darurat sesuai standar	%	100	100,00	100,00%	
		Persentase Puskesmas denggan ketersediaan obat dan BMHP esensial	%	100	94,44	94,44%	
		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatann(SPA)	%	87,00	88,9	102,19%	
		Persentase puskesmas dengan jumdan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	78	89,00	114%	
		Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	%	100,00	100,00	100,00%	
		Persentase ibu hamil memdapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	98,78	98,78%	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	97,77	97,77%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	97,32	97,32%	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	73,32	73,32%	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	94,47	94,47%	
		Pesentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	100,00	83,58%	83,58%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		sesuai standar					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skirining kesehatan sesuai standar	%	100,00	91,40	91,40%	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00%	
		Persentase ODJG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	89,80	89,80%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	85,07	85,07%	
		Pesentase oaring dengan resiko terinferksi HIV memdapatkan deteksi dinai HIV sesuai standar	%	100,00	87,06	87,06%	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	67,00	44,34	66,20%	
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota tang terakreditasi	%	100 %	100,00	100,00%	
		Cakupan pemenuhan upaya peningkatan pelayanan	%	100 %	100,00	100,00%	
		Persentase penilaian standar SNARS	%	100 %	84,79	84,79%	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan	%	95,00	113,33	119,30%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		sarana dan prasarana					
		Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	%	100,00	100,00	100,00%	
		CRR (Cost Recovery Rate)	%	60,00	83,81	140,00%	
		Cakupan Pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS	%	100,00	89,58	89,58%	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan dan Irigasi	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	94,85	94,42	99,55%	
		Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	64,14	52,66	82,10%	
2	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	%	84,82	71,87	84,73%	
		Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100,00	6,25	6,25%	
		Cakupan penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100	100%	
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100,00	20	20%	
		Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	%	30,83	25,37	82,29%	
		Cakupan ketersediaan tanah untuk	%	100,00	64,96	64,96%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		pembangunan kepentingan umum					
		Persentase jumlah rumah tangga yang memeperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	84	62,53	74,43%	
		Rasio kepatuhan IMB	%	100	100	100%	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	30	20	66,67%	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	100	0	-	
		Prsentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	60	42,86	71,43%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100	
Satuan Polisi Pamong Praja							
1	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3	%	5,00	6	120%	
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	97	97%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	78	78%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100%	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1	Meningkatnya layanan kebencanaan	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00%	
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,80	0,73	9,12%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	-	50,00%	
Dinas Sosial							
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PPKS	%	58,52	56,70	96,90%	
		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	335	335%	
		Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	%	100,00	100	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		setelah tanggap darurat bencana daerah					
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Sosial	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Meningkatnya Kesertaan ber KB	Unmet Need	%	11.82	18,98	160,57%	
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang Berkeadilan Gender	Persentase Keadilan dan Kesetaraan Gender (IDG)	%	61,26	62,34	101,76%	
		Persentase perangkat daerah yang melakukan analisis ARG dalam penyusunan program/ kegiatan	%	90,00	55	61,66%	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100%	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	%	1,19	0,00003	0,0025%	
		Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	87,00	68	78,16%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Angka Kelahiran remaja 15-19 Tahun	%	4,20	9,5	226,19%	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern	%	73,29	51,81	70,69%	
		Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100,00	100	100%	
		Pesentase peserta KB aktif MKJP	%	57,73	62,64	108,50%	
		Pesentase pelayanan KB pasca persalinan	%	93,89	8,67	9,24%	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	0,50	0,10	20%	
		Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	%	100,00	34,41	34,41%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	CC		
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan							
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	115,24	146,97	127,53%	
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase ketersediaan pangan (tersediannya beras/jagung) sesuai kebutuhan	%	125,00	130	104,00%	
		Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	2842	930,06	32,72%	
	Produktifitas	Padi sawah	Kw/ha	58,1	56,4	97,04	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	pertanian per hektar per tahun						
		Padi Ladang	Kw/ha	39,2	50,6	128,08%	
		Jagung	Kw/ha	61,1	60,68	99,31%	
		Bawang merah	Kw/ha	76,0	120,02	157,92%	
		Kubis	Kw/ha	91,0	94,51	103,85	
		Kopi robusta	Kg	1053,13	888,13	84,33	
		Kopi arabika	Kg	1665,13	6641,28	398,85%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50%	
Dinas Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68,22	77,90	114,8%	
		Terlaksananyapengelolaan sampah di wilayah	%	71,00	31,08	43,77%	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Tertib Administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	97,5	77,76	79,75%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	93,64	117,05%	
		Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	100,00	100,00	100,00%	
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA	%	100,00	69,00	69,00%	
		Persentase kepemiliikan akta kelahiran 0-18 tahun	%	100,00	99,80	99,80%	
		Persentase Perkawainan tercatat	%	90,00	42,25	46,95%	
		Predikat AKIP	Predikat	BB	A	100,00%	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	%	0,75	14,29	19,05%	Persentase Desa Maju
		Persentase pengetasan desa tertinggal/ sangat tertinggal	%	0,00	8,7	0.00	
		Persentase peningkatan status desa berkembang, maju, dan mandiri	%	85,00	91,3	107,411%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Perhubungan							
1	Meningkatnya Sarana	Persentase Ketersediaan Sarana dan	%	70	70	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	dan Prasarana Perhubungan	Prasarana Perhubungan					
		Persentase Angkutan Orang dan Barang yang layak Jalan	%	62,50	56,00	89,60%	
2	Meningkatnya Angkutan Orang dan Barang Laik Jalan	Rasio Konektivitas	%	80	34,49	43,12%	
		Kinerja lalu lintas	%	85	85	100%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	-	50,00%	
Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Informatika Serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE	Angka	3,00	2,69	89,67%	
		Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	91,00	75	55,86%	
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi	%	100	100	100%	
		Persentase layanan publik yang diselenggrakan secara online dan terintergrasi	%	100	90	90%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Persentase masyarakatyang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	100	60	60%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan							
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	98,40	-	98,40%	
		Persentase peningkatan realisasi penanaman Modal	%	15,00	14,88	99,20%	
		Persentase peningkatan investasi	%	15,00	9,00	60%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perizinan	Nilai	80,00	81,197	101,50%	
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70,00	0,00	70,00%	
		Persentase tenaga kerja bersertifikasi Kompetensi	%	0,15	-	0,15%	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS,Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	2,00	4,17	208,5%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		Predikat AKIP	Predikat	BB	AA	100,00%	
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga							
1	Meningkatnya Pengelolaan Pariwisata	Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	5,17	4,96	95,94%	
		Persentase peningkatan jumlah kunjugan wisatawan	Persen	50,00	100	100,00	
		Persentase Budaya Benda dantidak benda yang dilestarikan	Persen	100	100	100,00	
		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	24	19,00	79,16	
		Persentase Peningkatan Wirausahawan muda	Persen	8,00	6,95	86,87	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Persen	27,00	5,00%	18,51%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	-	50 %	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	12,00	70,23	585,25%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	88,00	16,70	18,98%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyrakat	%	70,00	63,115	90,17%	
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Nilai	12,00	70,23	585,25%	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor industri	Persentase Peningkatan Omset IKM	%	10,00	2,5	25,00%	
2	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	8,50	2,1	24,71%	
3	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor koperasi	Persentase Peningkatan Omset Koperasi Aktif	%	5,50	1,4	25,45%	
4	Bertambahnya usaha mikro naik kelas	Persentase Peningkatan Omset UMKM Binaan	%	7,00	2,00	28,58%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Sekretariat Daerah							
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berbasis Good Governance dan Clean Governance	Nilai LPPD	Kategori	Tinggi	Hasil Belum Keluar	100,00%	
		Persentase efektivitas pengendalian kebijakan daerah bidang	%	100,00	Dalam Tahap Evaluasi	30,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		perekonomian dan pembangunan					
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	Baik	Predikat ITKP belum Keluar	100,00%	
		Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah	%	17,00	Hasil Belum Keluar	100,00%	
		Indeks Pelayanan Publik	Predikat	B	Dalam Tahap Evaluasi	100,00%	
		Maturitas SPIP	Level	3,00	Dalam Tahap Evaluasi	66,67%	
		Pesentase jumlsh totsl proyeksi kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	5.00	Dalam Tahap Evaluasi		
		Pesentase pengadaan yang dilakukan dengan kompetitif	%	95.00	Dalam Tahap Evaluasi		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,00	Dalam Tahap Evaluasi		
		Maturitas sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,00	Dalam Tahap Evaluasi		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Sekretariat DPRD							
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Kinerja DPRD	Nilai	80	Tidak Ada Data	-	
	Meningkatnya	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	Akuntabilitas Kinerja Daerah						
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah							
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi program anntar Dokumen Perencanaan	%	100,00	100,00	10,00%	
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	%	100,00	100,0	100%	
		Tersediannya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100%	
		Persediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100%	
		Tersediannya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	100%	
		Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	100%	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	80,00	80,00	100%	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100,00	100,00	100%	
3	Meningkatnya	Nilai Sakip	Predikat	BB	A	100%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	Akuntabilitas Kinerja OPD						
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	A	100,00%	
Badan Pendapatan Daerah							
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Pelayanan Pendapatan Daerah	%	22,24	100,00	449,65%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Predikat	BB	CC	50,00%	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatnya Kepegawaian Daerah yang professional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,00	75,21	131,95%	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar	%	83,00	86,81	104,60%	
		Rasio pegawai fungsional	%	57,00	78,43	137,60%	
		Persentase ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	80,00	23,92	29,90%	
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	32,00	31,99	99,96%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		struktural					
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Sakip	Predikat	BB	B	50,00%	
Inspektorat							
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal	%	85,79	60,00	69,94%	
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	100,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Kecamatan Sidikalang							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	91,788	91,79%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	BB	B	50,00%	
Kecamatan Sumbul							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	80,00	80,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
Kecamatan Silima Pungga Pungga							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	95,65	95,65%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	N/A	50,00%	
Kecamatan Siempat Nempu							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	Nilai	B	B	100%	
Kecamatan Tigalinggga							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	7,00	70,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100,00%	
Kecamatan Tanah Pinem							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	27,00	27,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	BB	B	50%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	Perangkat Daerah						
Kecamatan Pegagan Hilir							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Kecamatan Parbuluan							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	10,00	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	BB	B	50,00%	
Kecamatan Siempat Nempu Hilir							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Nilai	B	B	100%	
Kecamatan Siempat Nempu Hulu							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
2	Meningkatnya	Predikat SAKIP	Predikat	BB	CC	50,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
Kecamatan Lae Parira							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Desa Tertib Menjalankan Siklus Pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50%	
Kecamatan Gunung Sitember							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	25,24	25,24%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Kecamatan Berampu							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	100,00	100%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100%	
Kecamatan Silahisabungan							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
	Perangkat Daerah						
Kecamatan Sitinjo							
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Persentase desa tertib menjalankan siklus pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Menurunnya konflik sosial	Jumlah Angka Potensi Konflik Sosial Diharapkan Dapat Diminimalisir	Poin	1,00	1,00	100,00%	
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Partai Politik Yang Aktif Dalam Pendidikan Politik Masyarakat	%	100,00	1,30	1,3%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat AKIP	Predikat	BB	B	50,00%	
RSUD Sidikalang							
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupation Rate)	Persen	79,00	88,08	111,49%	
		AVLOS (Average Length of Stay)	Hari	3,00	3,13	103,00%	
		TOI (Turn Over Interval)	Hari	1,00	1,00	100,00%	
		GDR (Gross Death Rate)	Persen	28,00	16,8	60,00%	
		Cakupan masyarakat menjadi angota JKN	%	100,00	94,24	94,24%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan lapangan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		Pesentase penangan kejadian gawat darurat sesuai standar	%	100,00	100	100,00	
		Persentase Puskesmas denggan ketersediaan obat dan BMHP esensial	%	100,00	94,44	94,44%	
		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatann(SPA)	%	87,00	88,9	102,19	
		Persentase puskesmas dengan jumdan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	78,00	89,00	114%	
		Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat keahlian	%	100,00	100,00	100,00%	
		Persentase ibu hamil memdapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	98,78	98.87%	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	97,77	97,77%	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	97,32	97,32%	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	73,32	73,32%	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	94,47	94,47%	
		Pesentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	100,00	83,58	83,58%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		sesuai standar					
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skirining kesehatan sesuai standar	%	100,00	91,40	91,40%	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00%	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00%	
		Persentase ODJG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100,00%	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	85,07	85,07%	
		Pesentase oaring dengan resiko terinferksi HIV memdapatkan deteksi dinai HIV sesuai standar	%	100,00	87,06	87,06%	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	67,,00	44,34	66,18%	
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota tang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00%	
		Cakupan pemenuhan upaya peningkatan pelayanan	%	100,00	100,00	100,00	
		Persentase penilaian standar SNARS	%	100,00	84,79	84,79%	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan	%	95,00	113,33	119,30%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi TW IV 2024	Persentase Realisasi Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Keterangan
		sarana dan prasarana					
		Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	%	100,00	100,00	100,00%	
		CRR (Cost Recovery Rate)	%	60,00	83,81	139,69%	
		Cakupan Pemenuhan Peningkatan Kapasitas SDM RS	%	95,00	89,58	110,60	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan RSUD	%	81,00	97,95	120,9%	
		Akreditasi RSUD Sidikalang	Predikat	Paripurna	Paripurna	100,00%	
		Predikat SAKIP	Predikat	BB	Belum Ada Data	50,00%	

2.2 Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan

Realisasi capaian program dan kegiatan didapatkan dengan cara menghitung presentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja. Kinerja anggaran diukur dengan menghitung presentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan dan fisik per triwulan.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 6.4. Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi TW IV Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024(Rp)	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran (Rp)	%	Kinerja (%)
1	Dinas Pendidikan	433.403.976.934	400.374.145.634	92,38	94,97
2	Dinas Kesehatan	165.105.498.346	148.659.206.670	90,04	88,59
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	121.030.159.550	116.536.304.791	96,29	72,29
4	Satuan Polisi Pamong Praja	7.570.544.090	7.146.126.556	94,36	57,59
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.687.902.437	8.024.862.477	92,37	52,06
6	Dinas Sosial	6.282.684.980	4.823.115.089	76,77	84,69
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.803.890.623	8.591.372.870	79,52	90,99
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	28.384.841.242	21.636.014.477	76,22	17,39
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.939.084.707	10.480.390.051	65,75	54,19
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.481.782.063	6.150.712.864	94,89	90,67
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	6.941.090.331	6.469.658.513	93,21	68,38

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024(Rp)	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran (Rp)	%	Kinerja (%)
	Desa				
12	Dinas Perhubungan	4.369.944.974	4.160.830.676	95,21	100
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.825.485.365	4.873.443.910	96,01	98,55
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	5.477.701.599	4.997.010.261	91,22	27,11
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	25.461.108.500	16.863.899.537	66,23	65,99
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.470.981.312	3.131.612.639	90,22	78,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.604.584.124	7.327.947.573	69,10	89,93
18	Sekretariat Daerah	42.878.768.456	36.607.189.059	85,37	99,07
19	Sekretariat DPRD	46.768.916.796	43.174.129.197	92,31	83,33
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	6.867.203.919	6.200.323.290	90,29	98,26
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	220.142.436.912	218.170.261.431	99,10	93,45
22	Badan Pendapatan Daerah	2.511.428.570	2.470.404.304	98,37	89,97
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.391.926.288	3.685.754.209	68,36	77,70
24	Inspektorat	9.000.000.000	8.468.952.970	77,31	73,54
25	Kecamatan Sidikalang	6.856.836.516	6.835.172.351	99,68	70,85
26	Kecamatan Sumbul	3.034.038.439	2.820.717.965	92,97	70,31
27	Kecamatan Silima Pungga2	2.847.289.707	2.820.154.612	99,05	96,35

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2024(Rp)	Persentase Rata-Rata Capaian		
			Serapan Anggaran (Rp)	%	Kinerja (%)
28	Kecamatan Siempat Nempu	2.210.448.430	1.614.564.546	73,04	80,90
29	Kecamatan Tiga Lingga	2.009.209.427	1.788.204.646	89,00	90,63
30	Kecamatan Tanah Pinem	3.286.064.328	1.819.153.493	55,36	100
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.739.071.399	1.564.307.979	89,95	95,83
32	Kecamatan Parbuluan	1.920.169.598	1.885.346.606	98,19	61,04
33	Kecamatan Siempat N. Hilir	1.594.767.108	1.429.259.619	89,62	54,17
34	Kecamatan Siempat N.Hulu	2.006.160.661	1.778.242.084	88,64	100
35	Kecamatan Lae Parira	1.879.032.835	1.730.241.643	92,08	66,19
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.551.941.846	1.540.383.394	99,26	94,44
37	Kecamatan Berampu	1.545.177.344	1.470.546.492	95,17	80,21
38	Kecamatan Silahisabungan	1.539.351.035	1.383.797.346	89,89	84,00
39	Kecamatan Sitinjo	2.806.335.690	2.499.619.477	89,07	99,21
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.955.298.002	41.169.187.148	98,13	99,31
41	UPTD Rumah Sakit Umum Sidikalang	87.530.022.610	68.055.918.896	77,75	78,54
Jumlah		**1.368.713.157.093**	**1.244.846.487.345**	**90,95**	**79,26**

Sumber: Bappeda (Data diolah)

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD sebagai bahagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2026 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

RKPD ini berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan bagi masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026 yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Dokumen RKPD ini merupakan konsep terkait arah pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2026, yang dalam proses pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, namun serta merta membutuhkan perhatian serta keseriusan seluruh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Dairi. Tercapai tidaknya target-target yang ditetapkan dalam rancangan ini merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya Kabupaten Dairi yang lebih baik .

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010